



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Nomor : 17.A/LHP/XIX.PNK/4/2024
Tanggal : 30 April 2024**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2023**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2023**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 terdiri dari dua laporan, yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan;
 - c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah dilengkapi dengan tanggal dan tempat; dan
 - d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat:
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan sebelumnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	3
1. Dasar Hukum Pemeriksaan	3
2. Standar Pemeriksaan	3
3. Tujuan Pemeriksaan	3
4. Entitas yang Diperiksa	3
5. Lingkup Pemeriksaan	3
6. Metodologi Pemeriksaan	4
7. Jangka Waktu Pemeriksaan	5
8. Batasan Pemeriksaan	5
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) AUDITED	



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 17.A/LHP/XIX/PNK/4/2024 tanggal 30 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pontianak, 30 April 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
Registrasi Negeri Akuntan Nomor RNA 718

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki 50 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca per 31 Desember 2023;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2023;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;

- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektifitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hasil tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 26 hari mulai tanggal 13 Maret 2024 s.d. 7 April 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 21/ST/XIX.PNK/3/2024 tanggal 8 Maret 2024.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang disengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.



KAPUAS HULU!
HEBAT!

**PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU**

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023



audited

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Neraca
Laporan Operasional
Laporan Arus Kas
Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023.....	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	3
3. NERACA.....	4
4. LAPORAN OPERASIONAL.....	6
5. LAPORAN ARUS KAS.....	8
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	10
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	11
LAMPIRAN	



BUPATI KAPUAS HULU

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pintassibau, 30 April 2024
BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN, S.H., M.H.





Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 (Audited)

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Audited)

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Kode Rekening	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	7.4.1	1.740.301.847.350,33	1.723.722.235.976,12	99,05	1.566.982.253.918,63
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.4.1.1	84.625.985.965,70	73.407.843.892,73	86,74	70.668.853.866,21
3	Pajak Daerah	7.4.1.1.1	30.949.919.267,00	18.192.870.236,32	58,78	16.455.782.266,53
4	Retribusi Daerah	7.4.1.1.2	6.177.650.000,00	5.992.780.864,00	97,01	4.995.795.080,83
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.4.1.1.3	17.371.160.680,00	17.469.034.435,62	100,56	13.926.125.609,76
6	Lain-lain PAD yang Sah	7.4.1.1.4	30.127.256.018,70	31.753.158.356,79	105,40	35.291.150.909,09
7	PENDAPATAN TRANSFER	7.4.1.2	1.644.923.583.384,63	1.640.262.373.303,62	99,72	1.439.460.492.812,23
8	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	7.4.1.2.1	1.516.932.902.946,00	1.519.215.578.697,00	100,15	1.375.284.294.638,00
	Dana Bagi Hasil		1.267.620.359.946,00	1.270.445.085.897,00	100,22	1.115.446.090.878,00
9	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		20.298.178.033,00	24.074.732.176,00	118,61	29.618.898.747,00
10	Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak		69.625.558.913,00	71.335.167.141,00	102,46	33.256.728.074,00
11	Pendapatan Dana Alokasi Umum		924.278.715.000,00	924.278.715.000,00	100,00	892.260.063.000,00
12	Pendapatan Dana Alokasi Khusus		253.417.908.000,00	250.756.471.580,00	98,95	160.310.401.057,00
13	Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya	7.4.1.2.2	249.312.543.000,00	248.770.492.800,00	99,78	259.838.203.760,00
14	Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	10.093.626.000,00
15	Dana Desa		249.312.543.000,00	248.770.492.800,00	99,78	249.744.577.760,00
16	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	7.4.1.2.3.1	75.535.680.438,63	69.707.044.651,62	92,28	60.410.525.024,23
17	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		75.535.680.438,63	69.707.044.651,62	92,28	60.410.525.024,23
18	Bantuan Keuangan	7.4.1.2.3.2	52.455.000.000,00	51.339.749.955,00	97,87	3.765.673.150,00
19	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi		52.455.000.000,00	51.339.749.955,00	97,87	3.765.673.150,00
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.4.1.3	10.752.278.000,00	10.052.018.779,77	93,49	56.852.907.240,19
21	Pendapatan Hibah	7.4.1.3.1	0,00	490.788.549,77	0,00	845.878.194,71
22	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.4.1.3.2	10.752.278.000,00	9.561.230.230,00	88,92	56.007.029.045,48
23	BELANJA DAERAH	7.4.2	1.766.688.951.566,00	1.711.410.699.681,15	96,87	1.615.623.766.661,64
24	BELANJA OPERASI	7.4.2.1	1.121.242.287.539,00	1.071.257.715.036,29	95,54	1.028.626.545.358,10
25	Belanja Pegawai	7.4.2.1.1	562.013.334.092,00	534.539.096.164,00	95,11	518.016.053.503,50
26	Belanja Barang dan Jasa	7.4.2.1.2	424.022.005.495,00	404.036.617.674,47	95,29	381.002.536.489,97
27	Belanja Subsidi	7.4.2.1.3	0,00	0,00	0,00	1.515.748.250,00
28	Belanja Hibah	7.4.2.1.4	134.097.755.952,00	131.783.651.197,82	98,27	121.091.269.614,63
29	Belanja Bantuan Sosial	7.4.2.1.5	1.109.192.000,00	898.350.000,00	80,99	7.000.937.500,00
30	BELANJA MODAL	7.4.2.2	290.716.596.027,00	286.543.813.186,86	98,56	236.955.283.717,54
31	Belanja Modal Tanah	7.4.2.2.1	0,00	0,00	0,00	8.932.275,00
32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.4.2.2.2	26.149.127.380,00	25.419.577.448,00	97,21	31.320.262.383,01
33	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.4.2.2.3	135.663.968.459,00	132.663.818.494,86	97,79	86.778.054.668,79
34	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.4.2.2.4	121.429.237.748,00	121.086.925.212,00	99,72	114.323.298.911,74
35	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.4.2.2.5	7.028.832.440,00	6.928.459.040,00	98,57	4.524.735.479,00
36	Belanja Modal Aset Lainnya	7.4.2.2.6	445.430.000,00	445.032.992,00	99,91	
36	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.4.2.3	1.733.000.000,00	1.333.000.000,00	76,92	4.506.963.640,00
37	Belanja Tidak Terduga		1.733.000.000,00	1.333.000.000,00	76,92	4.506.963.640,00

No.	Uraian	Kode Rekening	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
38	BELANJA TRANSFER	7.4.2.4	352.997.068.000,00	352.276.171.458,00	99,80	345.534.973.946,00
39	Belanja Bagi Hasil	7.4.2.4.1	3.735.259.000,00	3.735.259.000,00	100,00	2.427.770.000,00
40	Bagi Hasil Pajak		3.069.994.000,00	3.069.994.000,00	100,00	1.750.006.000,00
41	Bagi Hasil Retribusi		665.265.000,00	665.265.000,00	100,00	677.764.000,00
42	Belanja Bantuan Keuangan	7.4.2.4.2	349.261.809.000,00	348.540.912.458,00	99,79	343.107.203.946,00
43	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		349.261.809.000,00	348.540.912.458,00	99,79	343.107.203.946,00
44	<u>SURPLUS/(DEFISIT)</u>		(26.387.104.215,67)	12.311.536.294,97	(46,66)	(48.641.512.743,01)
45	<u>PEMBIAYAAN DAERAH</u>	7.4.3	15.675.622.215,56	13.675.622.215,56	87,24	62.317.134.958,57
46	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.4.3.1	15.675.622.215,56	13.675.622.215,56	87,24	74.317.134.958,57
47	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.4.3.1.1	15.675.622.215,56	13.675.622.215,56	87,24	74.317.134.958,57
48	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.4.3.2	0,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00
49	Pembentukan Dana Cadangan	7.4.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
50	Penyertaan Modal Daerah	7.4.3.2.2	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
51	PEMBIAYAAN NETTO		15.675.622.215,56	13.675.622.215,56	87,24	62.317.134.958,57
52	<u>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</u>	7.4.4	(10.711.482.000,11)	25.987.158.510,53	(242,61)	13.675.622.215,56

*) Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan ini



 BUPATI KAPUAS HULU,



 FRANSISKUS DIAAN, S.H., M.H.



Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 (Audited)

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.1	13.675.622.215,56	74.317.134.958,57
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.2	(13.675.622.215,56)	(74.317.134.958,57)
3	Subtotal (1 + 2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	7.5.2.3	25.987.158.510,53	13.675.622.215,56
5	Subtotal (3 + 4)		25.987.158.510,53	13.675.622.215,56
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	7.5.2.4	0,00	0,00
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6)	7.5.2.5	25.987.158.510,53	13.675.622.215,56

*) Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan ini


BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN, S.H., M.H.



Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 (Audited)

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	ASET			
2	ASET LANCAR	7.6.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	7.6.1.1.1	20.222.108.325,97	10.024.218.586,38
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.6.1.1.2	283.177.600,00	0,00
5	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	7.6.1.1.3	8.165.000,00	0,00
7	Kas Lainnya-Kas Di BLUD	7.6.1.1.4	1.322.334.839,61	3.536.907.815,27
8	Kas Lainnya-Sisa Dana BOS	7.6.1.1.5	74.132.505,20	24.507.678,87
9	Kas Lainnya-FKTP	7.6.1.1.6	106.741.380,75	89.988.135,04
10	Kas Lainnya- BOK		3.970.498.859,00	0,00
11	Kas Lainnya- Sisa Dana Tidak Terduga	7.6.1.1.7	0,00	20.300.000,00
12	Kas Lainnya - Jasa Giro	7.6.1.1.8	0,00	0,00
13	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran – PFK	7.6.1.1.9	0,00	3.726.430,00
15	Piutang Pajak	7.6.1.1.10	1.053.033.392,38	671.084.847,21
16	Piutang Retribusi	7.6.1.1.11	0,00	93.219.104,00
18	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah-Piutang BLUD	7.6.1.1.12	4.123.876.057,00	3.024.156.759,00
19	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah-Piutang Lainnya	7.6.1.1.13	1.818.541.380,14	1.900.261.818,74
20	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	7.6.1.1.14	0,00	0,00
21	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	7.6.1.1.15	3.965.972.179,00	12.807.839.369,63
22	Penyisihan Piutang	7.6.1.1.16	(2.290.927.008,45)	(2.186.617.319,56)
23	Beban Dibayar Dimuka	7.6.1.1.17	0,00	0,00
24	Persediaan	7.6.1.1.18	31.547.542.779,32	57.362.188.858,98
25	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 24)		66.205.197.289,92	87.371.782.083,56
26	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.6.1.2		
27	Investasi Nonpermanen	7.6.1.2.1		
28	Dana Bergulir		862.539.000,00	862.539.000,00
29	Penyisihan Dana Bergulir		(862.539.000,00)	(862.539.000,00)
30	Jumlah Investasi Non Permanen (27 s/d 29)		0,00	0,00
31	Investasi Permanen	7.6.1.2.2		
32	Penyertaan Modal pada PT. Bank KALBAR		119.106.000.000,00	119.106.000.000,00
33	Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Kapuas Hulu		20.120.983.477,25	17.261.743.818,58
34	Penyertaan Modal pada Perumda Uncak Kapuas		19.549.460.051,16	19.549.460.051,16
35	Penyertaan Modal pada PT. JAMKRIDA		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
36	Penyertaan Modal pada BUMD PT. Uncak Kapuas Mandiri		5.437.371.188,55	6.801.655.909,03
37	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
38	Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
39	Jumlah Investasi Permanen (33 s/d 39)		167.713.814.716,96	166.218.859.778,77
40	Jumlah Investasi Jangka Panjang (30 + 40)		167.713.814.716,96	166.218.859.778,77
41				

No.	Uraian	Reff	2023 (Rp)	2022 (Rp)
43	ASET TETAP	7.6.1.3		
44	Tanah	7.6.1.3.1	245.223.965.474,30	245.372.760.053,30
45	Peralatan dan Mesin	7.6.1.3.2	472.436.594.827,14	454.706.682.342,78
46	Gedung dan Bangunan	7.6.1.3.3	1.565.166.693.079,84	1.470.064.233.742,98
47	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.6.1.3.4	3.451.332.811.932,59	3.281.427.166.820,11
48	Aset Tetap Lainnya	7.6.1.3.5	27.226.058.034,59	23.875.832.084,59
49	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.6.1.3.6	213.723.215.632,27	195.182.018.864,19
50	Akumulasi Penyusutan	7.6.1.3.7	(2.866.364.716.932,01)	(2.629.198.525.487,40)
51	Jumlah Aset Tetap (44 s/d 50)		3.108.744.622.048,72	3.041.430.168.420,55
52	DANA CADANGAN			
53	Dana Cadangan		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
54	Jumlah Dana Cadangan (53)		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
55	ASET LAINNYA	7.6.1.5		
56	Tagihan Penjualan Angsuran	7.6.1.5.1	0,00	0,00
57	Tuntutan Perbendaharaan		0,00	0,00
58	Tuntutan Ganti Rugi	7.6.1.5.2	1.987.894.004,00	2.067.894.004,00
59	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	7.6.1.5.3	(1.094.105.254,00)	(1.134.105.254,00)
60	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.6.1.5.4	0,00	0,00
61	Aset Tak Berwujud	7.6.1.5.5	1.583.495.787,61	1.011.415.000,00
62	Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.6.1.5.6	(987.718.964,60)	(807.182.666,66)
63	Aset Lain-lain	7.6.1.5.7	304.412.505.302,94	298.166.383.785,59
64	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	7.6.1.5.8	(156.081.104.145,70)	(150.896.028.718,32)
65	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	7.6.1.5.9	23.275.841.000,00	4.949.377.492,00
66	Jumlah Aset Lainnya (56 s/d 65)		173.096.807.730,25	153.357.753.642,60
67	JUMLAH ASET (25 + 41 + 51 + 54 + 66)		3.517.760.441.785,85	3.450.378.563.925,49
68	KEWAJIBAN	7.6.2		
69	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.6.2.1		
70	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.6.2.1.1	0,00	3.726.430,00
71	Utang Bunga		0,00	0,00
72	Utang Jasa Medis		0,00	0,00
73	Utang Belanja	7.6.2.1.2	30.976.916.273,18	21.593.024.975,01
74	Utang Jangka Pendek- Utang Kelebihan Transfer		0,00	0,00
75	Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
76	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (70 s/d 75)		30.976.916.273,18	21.596.751.405,01
77	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.6.2.2		
78	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
79	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
80	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
81	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank		0,00	0,00
82	Utang Dalam Negeri – Obligasi		0,00	0,00
83	Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
84	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (78 s/d 83)		0,00	0,00
85	JUMLAH KEWAJIBAN (76 + 84)		30.976.916.273,18	21.596.751.405,01
86	EKUITAS DANA			
87	JUMLAH EKUITAS DANA	7.6.3	3.486.783.525.512,67	3.428.781.812.520,48
88	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	7.6.4	3.517.760.441.785,85	3.450.378.563.925,49

*) Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan ini





Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 (Audited)

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
	7.7.1		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.7.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah	7.7.1.1.1	18.574.818.781,49	16.397.568.006,74
Pendapatan Retribusi Daerah	7.7.1.1.2	5.899.561.760,00	5.046.690.684,83
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.7.1.1.3	17.469.034.435,62	0,00
Lain-Lain PAD yang Sah	7.7.1.1.4	35.673.068.828,87	27.647.830.015,94
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		77.616.483.805,98	49.092.088.707,51
PENDAPATAN TRANSFER	7.7.1.2		
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN			
Dana Bagi Hasil Pajak		24.855.935.825,00	32.627.046.098,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		88.880.427.000,00	35.197.958.215,00
Dana Alokasi Umum		924.278.715.000,00	892.260.063.000,00
Dana Alokasi Khusus		250.756.471.580,00	160.310.401.057,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.288.771.549.405,00	1.120.395.468.370,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA			
Dana Otonomi Khusus			
Dana Insentif Desa (DID)		0,00	10.093.626.000,00
Dana Desa		0,00	0,00
Dana Penyesuaian		0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		0,00	10.093.626.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		60.865.177.460,99	67.989.232.973,63
Pendapatan Dana BOS		0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		60.865.177.460,99	67.989.232.973,63
BANTUAN KEUANGAN			
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		0,00	398.842.500,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		51.339.749.955,00	3.366.830.650,00
Jumlah Bantuan Keuangan		51.339.749.955,00	3.765.673.150,00
Jumlah Pendapatan Transfer		1.400.976.476.820,99	1.202.244.000.493,63
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.7.1.3		
Pendapatan Hibah Provinsi		0,00	0,00
Pendapatan Hibah Sumbangan Pihak Ketiga		37.388.816.562,77	750.838.194,71
Pendapatan Hibah BOS		0,00	48.352.031.204,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Per-UU-an-Lain-lain pendapatan		0,00	0,00
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - FKTP		9.561.230.230,00	7.654.997.841,48
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		46.950.046.792,77	56.757.867.240,19
JUMLAH PENDAPATAN		1.525.543.007.419,74	1.308.093.956.441,33

Uraian	Reff	2023	2022
BEBAN	7.7.2		
BEBAN OPERASI	7.7.2.1		
Beban Pegawai	7.7.2.1.1	541.802.124.151,77	526.138.215.771,51
Beban Persediaan	7.7.2.1.2	87.025.800.098,14	78.981.079.932,00
Beban Jasa	7.7.2.1.3	151.197.058.726,92	132.032.472.298,73
Beban Pemeliharaan	7.7.2.1.4	9.409.595.568,00	9.944.036.594,11
Beban Perjalanan Dinas	7.7.2.1.5	91.823.592.586,01	86.610.059.401,41
Beban Uang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.7.2.1.6	23.720.102.882,00	27.746.085.691,00
Beban Penyisihan Piutang	7.7.2.1.7	111.307.905,74	920.961.335,43
Beban Penyusutan	7.7.2.1.8	246.846.712.650,66	242.379.580.976,61
Beban Amortisasi	7.7.2.1.9	180.536.297,94	93.676.666,67
Beban Subsidi	7.7.2.1.10	0,00	1.515.748.250,00
Beban Hibah	7.7.2.1.11	155.673.100.372,32	109.447.688.924,58
Beban Bansos	7.7.2.1.12	898.350.000,00	3.167.177.500,00
Beban Beasiswa	7.7.2.1.13	0,00	0,00
Beban Ekstrakomtabel	7.7.2.1.14	6.150.712.885,30	4.384.012.296,22
Beban Lain-lain	7.7.2.1.16	46.149.718.556,15	41.834.185.716,97
Jumlah Beban Operasi	7.7.2.1.17	1.360.988.712.680,95	1.265.194.981.355,24
BEBAN TRANSFER	7.7.2.2		
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak		3.069.994.000,00	1.750.006.000,00
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi		665.265.000,00	677.764.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		99.770.419.658,00	93.362.626.186,00
Beban Transfer Keuangan Kepada Partai Politik		0,00	0,00
Jumlah Beban Transfer		103.505.678.658,00	95.790.396.186,00
BEBAN TIDAK TERDUGA			
Beban Tidak Terduga		0,00	4.486.663.640,00
Jumlah Beban Tidak Terduga		0,00	4.486.663.640,00
JUMLAH BEBAN DAN TRANSFER		1.464.494.391.338,95	1.365.472.041.181,24
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	7.7.3	61.048.616.080,79	(57.378.084.739,91)
SURPLUS NON OPERASIONAL		73.675.973,45	447.629.909,14
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	32.910.000,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		73.675.973,45	447.629.909,14
Jumlah Surplus Non Operasional		73.675.973,45	480.539.909,14
DEFISIT NON OPERASIONAL			
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(2.773.331.640,47)	(2.555.560.945,88)
Jumlah Defisit Non Operasional		(2.773.331.640,47)	(2.555.560.945,88)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.7.4	(2.699.655.667,02)	(2.075.021.036,74)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		58.348.960.413,77	(59.453.105.776,65)
PENDAPATAN LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		1.333.000.000,00	0,00
Jumlah Beban Luar Biasa		1.333.000.000,00	0,00
POS LUAR BIASA	7.7.5	(1.333.000.000,00)	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.7.6	57.015.960.413,77	(59.453.105.776,65)

*) Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan ini





Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 (Audited)

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2023	2022
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.8.1		
Arus Kas Masuk	7.8.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		18.192.870.236,32	16.455.782.266,53
Penerimaan Retribusi Daerah		5.992.780.864,00	4.995.795.080,83
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		17.469.034.435,62	13.926.125.609,76
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		31.741.487.356,79	35.029.435.909,09
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		24.074.732.176,00	29.618.898.747,00
Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam		71.335.167.141,00	33.256.728.074,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		924.278.715.000,00	892.260.063.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		250.756.471.580,00	160.310.401.057,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		0,00	10.093.626.000,00
Penerimaan Dana Desa		248.770.492.800,00	249.744.577.760,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		69.707.044.651,62	60.410.525.024,23
Penerimaan Bantuan Keuangan		51.339.749.955,00	3.765.673.150,00
Penerimaan Hibah		490.788.549,77	1.141.511.272,95
Penerimaan Lainnya		9.561.230.230,00	55.711.395.967,24
Jumlah Arus Masuk Kas	7.8.1.2	1.723.710.564.976,12	1.566.720.538.918,63
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai		534.539.096.164,00	518.016.053.503,50
Pembayaran Barang dan Jasa		404.036.617.674,47	381.002.536.489,97
Pembayaran Subsidi		0,00	1.515.748.250,00
Pembayaran Hibah		131.783.651.197,82	121.091.269.614,63
Pembayaran Bantuan Sosial		898.350.000,00	7.000.937.500,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		348.540.912.458,00	343.107.203.946,00
Pembayaran Tidak Terduga		1.333.000.000,00	4.506.963.640,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		3.069.994.000,00	1.750.006.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		665.265.000,00	677.764.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.424.866.886.494,29	1.378.668.482.944,10
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		298.843.678.481,83	188.052.055.974,53
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	7.8.2		
Arus Kas Masuk	7.8.2.1		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		11.671.000,00	261.715.000,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		11.671.000,00	261.715.000,00

Uraian	Ref	2023	2022
1	2	3	4
Arus Kas Keluar	7.8.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	2.000.000.000,00
Perolehan Tanah		0,00	8.932.275,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		25.419.577.448,00	31.320.262.383,01
Perolehan Gedung dan Bangunan		132.663.818.494,86	86.778.054.668,79
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		121.086.925.212,00	114.323.298.911,74
Perolehan Aset Tetap Lainnya		6.928.459.040,00	4.524.735.479,00
Perolehan Aset Lainnya		445.032.992,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	10.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		286.543.813.186,86	248.955.283.717,54
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(286.532.142.186,86)	(248.693.568.717,54)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.8.3		
Arus Kas Masuk	7.8.3.1		
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Kas Keluar	7.8.3.2		
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.8.4		
Arus Kas Masuk	7.8.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		92.588.805.416,00	94.393.732.865,20
Jumlah Arus Masuk Kas		92.588.805.416,00	94.393.732.865,20
Arus Kas Keluar	7.8.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		92.592.531.846,00	94.390.006.435,20
Jumlah Arus Keluar Kas		92.592.531.846,00	94.390.006.435,20
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		(3.726.430,00)	3.726.430,00
Kenaikan/Penurunan Kas	7.8.5	12.307.809.864,97	(60.637.786.313,01)
Saldo Awal Kas di BUD & Kas Bendahara Pengeluaran	7.8.6	10.024.218.586,38	70.426.993.198,32
Saldo Awal Kas BLUD		3.536.907.815,27	3.636.640.058,27
Saldo Awal Kas FKTP		89.988.135,04	58.412.196,23
Saldo Awal Kas BOS Pusat		24.507.678,87	195.089.505,75
Saldo Awal Kas Lainnya - PFK		3.726.430,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP, BOS & Kas di Bendahara Pengeluaran	7.8.7	25.978.993.510,53	13.679.348.645,56
Saldo Kas Lainnya		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		8.165.000,00	0,00
Saldo Akhir Kas		25.987.158.510,53	13.679.348.645,56

*) Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan ini



 BUPATI KAPUAS HULU,



 FRANSISKUS DIAAN, S.H., M.H.



Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 (Audited)

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref	PER 31 DES 2023	PER 31 DES 2022
1	EKUITAS AWAL	7.9.1	3.428.781.812.520,47	3.497.145.203.450,78
2	SURPLUS/DEFISIT LO	7.9.2	57.015.960.413,77	(59.453.105.776,65)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN			
4	KESALAHAN MENDASAR:	7.9.3	985.752.578,43	(8.910.285.153,66)
5	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS			
6	Koreksi Kas Lainnya		0,00	0,00
7	Koreksi Piutang		0,00	0,20
8	Koreksi Nilai Persediaan		(13.491.216,00)	0,00
9	Koreksi Penyisihan Piutang		(94.609.756,60)	0,00
10	Koreksi Investasi Jangka Panjang		0,00	(387.507.107,68)
11	Koreksi Aset Tetap		(2.558.080.383,62)	2.985.541.455,57
12	Koreksi Penyusutan		1.165.016.170,32	(11.430.901.184,97)
13	Koreksi Aset Lain-Lain		2.486.917.764,33	(82.435.000,00)
14	Koreksi Penyisihan Ganti Rugi		0,00	0,00
15	Koreksi Kewajiban Jangka Pendek		0,00	5.016.683,22
	EKUITAS AKHIR	7.9.4	3.486.783.525.512,67	3.428.781.812.520,47

*) Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan ini


 BUPATI KAPUAS HULU,
 FRANSISKUS DIAAN, S.H., M.H.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 EKONOMI MAKRO

7.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu

Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pendapatan masyarakat diperoleh melalui proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto.

Pertumbuhan ekonomi penting untuk menciptakan kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang untuk mengurangi kemiskinan. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi sendiri tidak cukup, orang miskin dan orang yang rentan mungkin tidak memperoleh keuntungan dari pertumbuhan, karena mereka kurang sehat, kurang keahlian, dan kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar. Pemberdayaan sangat penting bagi penduduk miskin untuk mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang diciptakan dengan adanya pertumbuhan.

Kondisi makro ekonomi tersebut disajikan dalam bentuk data dan fakta berupa uraian faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian suatu daerah serta beberapa variabel dan indikator yang menggambarkan kondisi perekonomiannya. Adapun pengukuran Indikator Ekonomi Makro Daerah yang sering digunakan adalah, Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indikator Inflasi, Indikator PDRB (atas dasar harga Berlaku), Indikator Jumlah Penduduk, Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk, Indikator Jumlah Pengangguran, Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indikator Jumlah Penduduk Miskin, Indikator Ketenagakerjaan, Indikator Upah Minimum Regional, Indikator Investasi Daerah, Indikator Kemandirian Daerah.

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun terakhir (2019 - 2023), pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu secara umum fluktuatif. Berdasarkan data PDRB tahun 2023, pertumbuhan ekonomi dua tahun terakhir yakni pada tahun 2021 sebesar 4,43% sedangkan ditahun 2022 sebesar 4,51% dan 4,62 pada tahun 2023 dan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,11% yang menandakan bahwa di sektor kegiatan ekonomi banyak dilakukan dan mulai berangsur pulih.

7.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu: umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak. IPM adalah indeks komposit dari gabungan 4 (empat) indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.

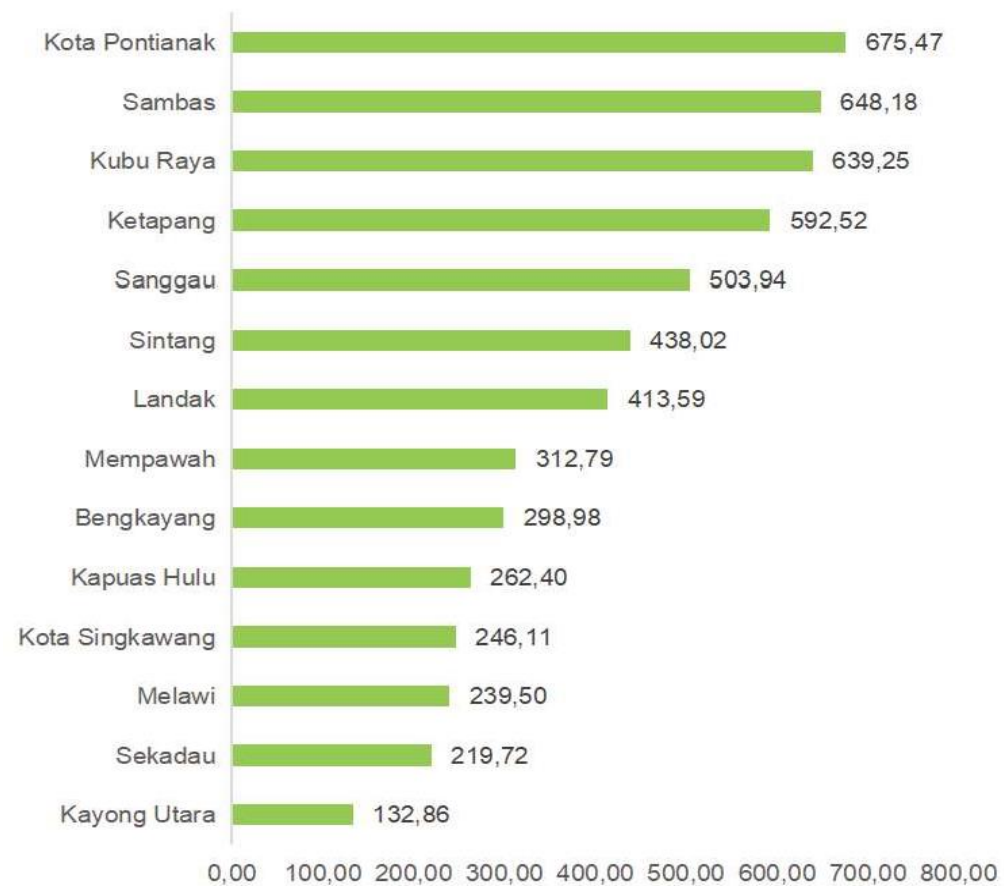
Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2020-2035, penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 berjumlah 5.623,33 ribu jiwa sementara penduduk Kabupaten Kapuas Hulu hanya sebesar 262,40 ribu jiwa. Tiga urutan kabupaten/kota yang mempunyai penduduk terbanyak adalah Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Kubu Raya yang masing-masing jumlahnya 675,47 ribu jiwa, 648,18 ribu jiwa dan 639,25 ribu jiwa.

Pada tahun 2020, hampir semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat mengalami kontraksi karena adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terguncangnya perekonomian di Kalimantan Barat. Namun sejak tahun 2021, kabupaten/kota di Kalimantan Barat mulai membangun kembali perekonomiannya yang dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat sebesar 4,80 persen tahun 2021 dan 5,07 persen tahun 2022. Selanjutnya untuk tahun 2023 PDRB Provinsi Kalimantan Barat mengalami kenaikan sebesar 4,46 persen. Hasil sementara penghitungan PDRB menunjukkan dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat pada tahun 2023, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, dan Kabupaten Kubu Raya merupakan kabupaten/kota yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB terbesar, yaitu masing-masing 5,09 persen; 5,06 persen; dan 4,98 persen Sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki laju PDRB sebesar 4,62 persen.

Banyaknya penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 0,89 persen, yaitu dari 350,25 ribu penduduk pada tahun 2022 menjadi 353,35 ribu penduduk miskin di tahun 2023.

Dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten/kota yang memiliki penduduk miskin terbanyak yaitu sebanyak 49,95 ribu penduduk miskin, disusul Kabupaten Landak sebanyak 38,92 ribu penduduk miskin, dan Kabupaten Sambas sebanyak 38,71 ribu penduduk miskin. Untuk Kabupaten Kapuas Hulu menempati urutan ke-6 yang memiliki penduduk miskin paling sedikit se-Kalimantan Barat dengan penduduk miskin ada sebanyak 22,59 ribu penduduk.

Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik mengeluarkan 2 macam angka IPM. Perbedaan dari kedua angka tersebut adalah salah satunya menggunakan angka proyeksi penduduk dari Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan angka lainnya menggunakan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form (SP2020 LF). Angka IPM yang masih menggunakan data proyeksi Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dikeluarkan untuk melihat pertumbuhan angka IPM yang sudah dibuat dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan data IPM yang menggunakan data proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form (SP2020 LF) merupakan data yang ter-update. Sehingga data yang digunakan adalah data terbaru yang menggunakan data proyeksi penduduk dari SP2020 *Long Form*.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kapuas Hulu 2023

Grafik 1. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, 2023

7.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB/PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB/ PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; *Real Estate*; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDB/PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga *Non Profit* yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB/PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen, yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRM, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100%. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Penyusutan atas ausnya nilai barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama satu tahun.

PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.

Harga Berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan. Harga Konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar. Tahun Dasar adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai

perubahan/pergerakan yang terjadi.

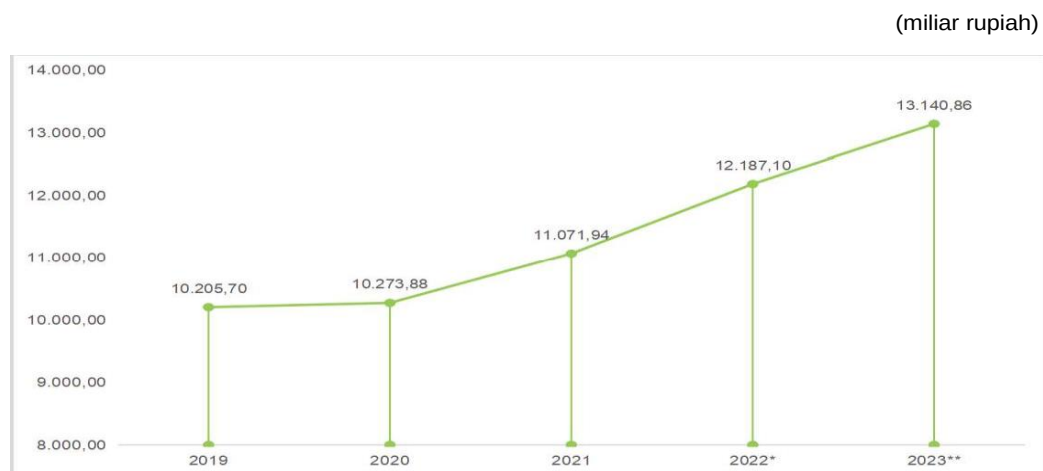
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. Saat ini, PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan dari sisi penggunaan/pengeluaran. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Harga konstan yang digunakan yaitu harga pada tahun dasar 2010. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Kapuas Hulu atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai 13,14 triliun rupiah dengan kontribusi terbesar pada sektor konstruksi 3,02 triliun rupiah (22,99%); sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 2,87 triliun rupiah (21,81%); dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 1,12 triliun (11,83%). Jika dilihat dari strukturnya selama lima tahun terakhir, tampak bahwa sektor konstruksi dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat dikatakan sebagai sektor utama.

2. PDRB Menurut Pengeluaran

Selain dari sektoral, perkembangan ekonomi dapat tercermin juga dari komponen-komponen penggunaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penyajian menurut penggunaan/pengeluaran dapat menggambarkan komposisi penggunaan barang dan jasa. Baik yang dihasilkan di dalam regional maupun yang berasal dari luar regional. Dari sisi penggunaannya, komponen PDRB 2023 menurut pengeluaran mengalami sedikit kenaikan dibandingkan PDRB 2022. PDRB tahun 2023 atas dasar harga berlaku masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 7,08 triliun rupiah atau 53,87 persen dari total PDRB, diikuti oleh pembentukan modal bruto sebesar 3,90 triliun rupiah atau 29,68 persen dari total PDRB. Selain dari sektoral, perkembangan ekonomi dapat tercermin juga dari komponen-komponen penggunaan (PDRB) Penyajian menurut penggunaan/pengeluaran dapat menggambarkan komposisi penggunaan barang dan jasa. Baik yang dihasilkan di dalam region maupun yang berasal dari luar region.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kapuas Hulu 2023

Grafik 2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kapuas Hulu 2019–2023

**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kapuas Hulu 2019–2023**

miliar rupiah

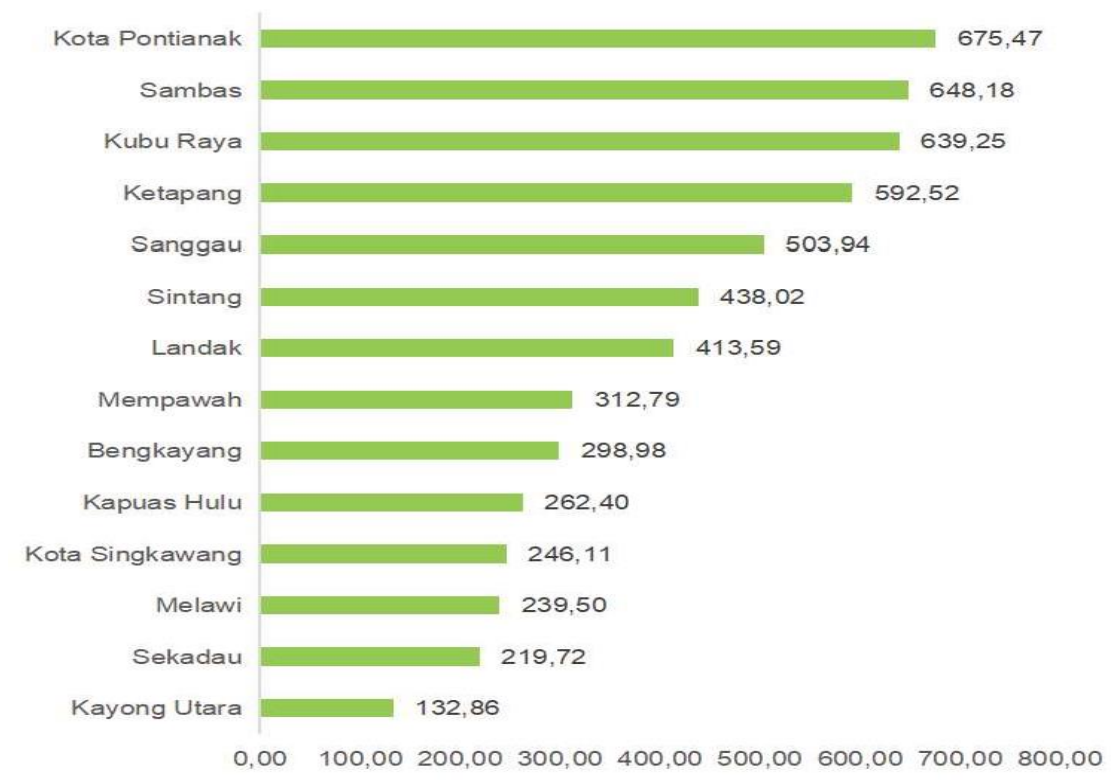
Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	2.248,07	2.366,48	2.535,35	2.774,05	2.866,08
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	793,89	824,47	869,87	920,69	930,98
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	1.155,84	1.157,31	1.267,90	1.409,87	1.416,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,60	0,59	0,59	0,64	0,75
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	8,74	9,02	9,78	10,36	11,05
F	Konstruksi/Construction	2.291,02	2.295,80	2.589,17	2.793,11	3.021,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1.149,75	1.065,31	1.119,21	1.342,10	1.554,79
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	156,26	156,81	148,78	206,86	249,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	195,39	172,31	189,28	217,73	251,30
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	376,31	408,66	438,41	473,39	522,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	160,99	150,48	156,60	170,87	185,68
L	Real Estat/Real Estate Activities	245,10	245,04	248,41	255,48	290,73
M,N	Jasa Perusahaan / Business Activities	51,10	47,64	47,53	55,87	66,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib / Public Administration and Defence Compulsory Social Security;	759,34	796,83	804,74	837,40	933,92
P	Jasa Pendidikan/Education	347,89	321,64	338,42	370,06	406,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	173,58	187,87	243,17	270,21	339,43
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	91,83	67,61	64,72	78,40	93,32
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	10.205,70	10.273,88	11.071,94	12.187,10	13.140,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kapuas Hulu 2023

7.1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2020-2035, penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 berjumlah 5.623,33 ribu jiwa sementara penduduk Kabupaten Kapuas Hulu hanya sebesar 262,40 ribu jiwa. Tiga urutan kabupaten/kota yang mempunyai penduduk terbanyak adalah Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Kubu Raya yang masing-masing jumlahnya 675,47 ribu jiwa, 648,18 ribu jiwa dan 639,25 ribu jiwa, yang menyebar di 23 kecamatan. Dengan luas wilayah yang mencapai 29.842,03 km², Kapuas Hulu mempunyai kepadatan penduduk sekitar 9 jiwa/km².

Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak adalah Putussibau Utara, Putussibau Selatan, dan Silat Hilir yang masing-masing mempunyai jumlah penduduk yang tertinggi dari 23 Kecamatan di kabupaten Kapuas hulu tahun 2023. Walaupun ketiga kecamatan tersebut mempunyai jumlah penduduk yang besar, namun kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Hulu Gurung yang mencapai 32 jiwa/km², disusul oleh Kecamatan Jongkong 25 jiwa/km², dan Kecamatan Seberuang dan Kecamatan Suhaid yang kepadatannya sebesar 20 jiwa/km². Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Embaloh Hulu yaitu hanya 2 jiwa/km², Kecamatan Batang Lupar dan Putussibau Selatan dengan kepadatan penduduk masing-masing 4 jiwa/km².



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kapuas Hulu 2023

Grafik 3. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 2023

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Barat, 2019–2023**

dalam ribuan

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sambas	535,73	626,93	634,18	641,27	648,18
Bengkayang	255,26	285,42	289,97	294,50	298,98
Landak	377,31	396,53	402,30	407,99	413,59
Mempawah	264,23	300,76	304,78	308,80	312,79
Sanggau	470,22	483,50	490,47	497,28	503,94
Ketapang	512,78	569,24	577,19	584,95	592,52
Sintang	418,79	420,17	426,26	432,21	438,02
Kapuas Hulu	263,21	251,92	255,49	258,99	262,40
Sekadau	201,58	210,92	213,95	216,86	219,72
Melawi	208,42	227,74	231,77	235,67	239,50
Kayong Utara	112,72	126,04	128,32	130,59	132,86
Kubu Raya	579,33	607,02	617,80	628,56	639,25
Kota Pontianak	646,66	658,06	664,06	669,85	675,47
Kota Singkawang	222,91	234,16	238,19	242,18	246,11
Kalimantan Barat	5.069,13	5.398,40	5.474,71	5.549,70	5.623,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kapuas Hulu 2023

7.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Dalam konteks Kabupaten Kapuas Hulu, laju pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 2022 sampai 2023, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kapuas Hulu tercatat dari yang awalnya tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,43%, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 4,51%, dan pada tahun 2023 Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,62% nilai tersebut menunjukkan kenaikan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2023 mengalami kenaikan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 0,11%. Dampak pada laju pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 2022 sampai 2023 ada 6 (enam) sektor yang pertumbuhannya menurun dibandingkan tahun 2022, yakni: Pertumbuhan ekonomi sektor Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*. tahun 2022 sebesar 25,43% dan pada tahun 2023 sebesar 6,54% menurun sebesar (18,89%) dari tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*. tahun 2022 sebesar 13,44% dan pada tahun 2023 sebesar 9,68% menurun sebesar (3,76%) dari tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi sektor Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*. tahun 2022 sebesar 1,9% dan pada tahun 2023 sebesar (0,96%) menurun sebesar (2,86%) dari tahun 2022.



Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*. tahun 2022 sebesar 2,71% dan pada tahun 2023 sebesar 0,44% menurun sebesar (2,27%) dari tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi sektor Industri Pengolahan/*Manufacturing*. tahun 2022 sebesar 4,26% dan pada tahun 2023 sebesar 2,14% menurun sebesar (2,12%) dari tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*. tahun 2022 sebesar 12,44% dan pada tahun 2023 sebesar 11,73% menurun sebesar (0,71%) dari tahun 2022. Sementara pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan terdapat pada sektor yakni: Pertumbuhan ekonomi sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*. tahun 2022 sebesar 7,18% dan pada tahun 2023 sebesar 20,12% kenaikan sebesar 12,94% dari tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi sektor Real Estat/*Real Estate Activities*. tahun 2022 sebesar 0,6% dan pada tahun 2023 sebesar 13,15% kenaikan sebesar 12,55% dari tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi sektor Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*. tahun 2022 sebesar 4,91% dan pada tahun 2023 sebesar 14,04% kenaikan sebesar 9,13% dari tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*. tahun 2022 sebesar (1,61%) dan pada tahun 2023 sebesar 5,33% kenaikan sebesar 6,94% dari tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi sektor Konstruksi/*Construction*. tahun 2022 sebesar 0,84% dan pada tahun 2023 sebesar 3,33% kenaikan sebesar 2,49% dari tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi sektor Jasa Perusahaan/*Business Activities*. tahun 2022 sebesar 12,12% dan pada tahun 2023 sebesar 14,92% kenaikan sebesar 2,8% dari tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi sektor Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*. tahun 2022 sebesar 6,21% dan pada tahun 2023 sebesar 8,67% kenaikan sebesar 2,46% dari tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi sektor Jasa Pendidikan/*Education*. tahun 2022 sebesar 6,15% dan pada tahun 2023 sebesar 7,84% kenaikan sebesar 1,69% dari tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi sektor Informasi dan Komunikasi/*Information and Communication*. tahun 2022 sebesar 7,77% dan pada tahun 2023 sebesar 9,33% kenaikan sebesar 1,56% dari tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi sektor Jasa Lainnya/*Other Services Activities*. tahun 2022 sebesar 13,94% dan pada tahun 2023 sebesar 14,85% kenaikan sebesar 0,91% dari tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*. tahun 2022 sebesar 5,63% dan pada tahun 2023 sebesar 5,95% kenaikan sebesar 0,32% dari tahun 2022. Adapun data Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kapuas Hulu terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kapuas Hulu 2019–2023

(persen)

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	4,99	1,08	2,24	2,71	0,44
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1,64	(1,29)	1,84	1,9	(0,96)
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5,84	(0,67)	5,16	4,26	2,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	3,78	(3,25)	(0,14)	4,91	14,04



Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	4,83	2,5	5,93	5,63	5,95
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	0,08	(5)	8,13	0,84	3,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	4,02	(10,01)	4,56	13,44	9,68
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	6,16	(10,33)	(7,72)	25,43	6,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	5,5	(15,56)	8,24	12,44	11,73
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	8,36	7,7	6,09	7,77	9,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,21	(5,25)	2,72	6,21	8,67
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,49	(1,82)	2,82	0,6	13,15
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	3,8	(4,56)	0,38	12,12	14,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	6,07	1,51	(0,78)	(1,61)	5,33
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2,07	(4,43)	4,74	6,15	7,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	5,67	6,34	27,15	7,18	20,12
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	7,7	(17,93)	1,34	13,94	14,85
	Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	3,8	(2,43)	4,43	4,51	4,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kapuas Hulu 2023

7.1.6 Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk total di suatu daerah.

Banyaknya penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 0,89 persen, yaitu dari 350,25 ribu penduduk pada tahun 2022 menjadi 353,35 ribu penduduk miskin di tahun 2023, dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten/kota yang memiliki penduduk miskin terbanyak yaitu sebanyak 49,95 ribu penduduk miskin, disusul Kabupaten Landak sebanyak 38,92 ribu penduduk miskin, dan Kabupaten Sambas sebanyak 38,71 ribu penduduk miskin. Untuk Kabupaten Kapuas Hulu menempati urutan ke-6 yang memiliki penduduk miskin paling sedikit se-Kalimantan Barat dengan penduduk miskin ada sebanyak 22,59 ribu penduduk.



Kabupaten Kapuas Hulu digunakan ukuran garis kemiskinan untuk mengategorikan orang miskin, yakni penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi- padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang- kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). GKNM kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan, yang dari tahun ketahun sangat tidak menentu. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2019–2023**

dalam ribuan

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sambas	43,84	41,41	41,49	37,65	38,71
Bengkayang	17,69	17,11	16,92	15,97	16,87
Landak	43,16	42,36	42,01	38,65	38,92
Mempawah	14,02	13,18	13,82	14,30	14,15
Sanggau	21,41	21,16	21,70	21,74	23,34
Ketapang	53,84	53,45	53,04	49,92	49,95
Sintang	40,30	39,19	39,40	36,76	35,49
Kapuas Hulu	25,22	23,93	24,03	23,43	22,59
Sekadau	12,28	11,92	12,69	11,91	12,09
Melawi	25,71	25,34	25,47	24,57	24,18
Kayong Utara	11,21	10,90	10,72	10,52	10,77
Kubu Raya	27,37	25,90	25,47	24,39	25,33
Kota Pontianak	31,46	30,70	30,11	29,61	29,92
Kota Singkawang	10,90	10,23	11,03	10,82	11,06
Kalimantan Barat	378,41	366,77	367,89	350,25	353,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kapuas Hulu 2023

Tabel 5. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kapuas Hulu, 2015–2023

Tahun / Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin / Percentage of Poor People
1	2	3	4
2015	346.335,00	23,74	9,66
2016	369.981,00	24,49	9,82
2017	384.275,00	23,96	9,45
2018	430.652,00	24,76	9,60
2019	452.471,00	25,22	9,62
2020	465.360,00	23,93	8,99
2021	481.826,00	24,03	8,93
2022	508.087,00	23,43	8,59
2023	543.301,00	22,59	8,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Kapuas Hulu 2023

7.2 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini adalah Realisasi Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah melakukan memorial dana BLUD, JKN dan dana BOS sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini:

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan).

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp84.625.985.965,70 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 tercatat sebesar Rp73.399.678.892,73 atau 86,73% atau tidak mencapai target sebesar (Rp11.226.307.072,97) atau (15,29%) Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp70.668.853.866,21 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 mengalami penurunan sebesar



(Rp2.730.825.026,52) atau (3,72%).

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp1.644.923.583.384,63 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 tercatat sebesar Rp1.640.262.373.303,62 atau 99,72% atau tidak mencapai target sebesar (Rp4.661.210.081,01) atau (0,28%) Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp1.487.812.524.016,23 Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar (Rp200.801.880.491,39) atau (12,21%).

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp10.752.278.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 tercatat sebesar Rp10.052.018.779,77 atau 93,49% atau tidak mencapai target sebesar (Rp700.259.220,23) atau (6,97%) Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp8.500.876.036,19 Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar (Rp1.551.142.743,58) atau (18,25%).

Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.740.301.847.350,33 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 tercatat sebesar Rp1.723.714.070.976,12 atau 99,05%, atau tidak mencapai target sebesar (Rp16.587.776.374,21) atau (0,96%). Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp1.566.982.253.918,63 Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp156.731.817.057,49) atau (9,09%). Adapun rincian Pendapatan daerah dapat dikelompokkan terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Pendapatan Daerah per SKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023**

Kode Rek.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	2	3	4	5
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
4.	PENDAPATAN DAERAH	33.176.933.416,00	42.459.022.058,00	127,98
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	33.176.933.416,00	32.897.791.828,00	99,16
4.1.02.	Retribusi Daerah	4.423.650.000,00	4.693.790.164,00	106,11
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	28.753.283.416,00	28.204.001.664,00	98,09
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	9.561.230.230,00	0,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	9.561.230.230,00	0,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
4.	PENDAPATAN DAERAH	375.000.000,00	111.354.500,00	29,69
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	375.000.000,00	111.354.500,00	29,69
4.1.02.	Retribusi Daerah	375.000.000,00	111.354.500,00	29,69



Kode Rek.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	2	3	4	5
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
4.	PENDAPATAN DAERAH	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
DINAS PERHUBUNGAN				
4.	PENDAPATAN DAERAH	124.000.000,00	103.572.000,00	83,53
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	124.000.000,00	103.572.000,00	83,53
4.1.02.	Retribusi Daerah	124.000.000,00	103.572.000,00	83,53
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
4.	PENDAPATAN DAERAH	344.500.000,00	434.779.200,00	126,21
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	344.500.000,00	434.779.200,00	126,21
4.1.02.	Retribusi Daerah	344.500.000,00	434.779.200,00	126,21
DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
4.	PENDAPATAN DAERAH	100.000.000,00	103.530.000,00	103,53
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000,00	103.530.000,00	103,53
4.1.02.	Retribusi Daerah	100.000.000,00	103.530.000,00	103,53
DINAS PERIKANAN				
4.	PENDAPATAN DAERAH	255.000.000,00	258.670.000,00	101,44
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	255.000.000,00	258.670.000,00	101,44
4.1.02.	Retribusi Daerah	255.000.000,00	258.670.000,00	101,44
SEKRETARIAT DAERAH				
4.	PENDAPATAN DAERAH	0,00	208.920.000,00	0,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	208.920.000,00	0,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	0,00	208.920.000,00	0,00
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.655.675.861.384,63	1.661.757.117.369,80	100,37
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	21.003.955.516,41	0,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	17.469.034.435,62	0,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	3.534.921.080,79	0,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.644.923.583.384,63	1.640.262.373.303,62	99,72
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.516.932.902.946,00	1.519.215.578.697,00	100,15
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.990.680.438,63	121.046.794.606,62	94,57
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.752.278.000,00	490.788.549,77	4,56
4.3.01.	Pendapatan Hibah	0,00	490.788.549,77	0,00



Kode Rek.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	2	3	4	5
BADAN PENDAPATAN DAERAH				
4.	PENDAPATAN DAERAH	50.180.552.549,70	18.207.105.848,32	36,28
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.180.552.549,70	18.207.105.848,32	36,28
4.1.01.	Pajak Daerah	30.949.919.267,00	18.192.870.236,32	58,78
4.1.02.	Retribusi Daerah	485.500.000,00	0,00	0,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.371.160.680,00	0,00	0,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	1.373.972.602,70	14.235.612,00	1,04

BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). Dan Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Belanja daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi ditargetkan sebesar Rp1.121.242.287.539,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 tercatat sebesar Rp1.071.270.615.036,29 atau 95,13% atau tidak mencapai target sebesar (Rp49.971.672.502,71) atau (4,66%) Dibandingkan dengan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp1.028.626.545.358,10 Realisasi Belanja Operasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp42.644.069.678,19) atau (4,15%).

2. Belanja Modal

Belanja Modal ditargetkan sebesar Rp290.716.596.027,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 tercatat sebesar Rp286.543.813.186,86 atau 98,25% atau tidak mencapai target sebesar (Rp4.172.782.840,14) atau (1,46%) apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp236.955.283.717,54 Realisasi Belanja Modal tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp49.588.529.469,32) atau (20,93%).

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga ditargetkan sebesar Rp1.733.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 tercatat sebesar Rp1.333.000.000,00 atau 76,92% atau tidak mencapai target sebesar (Rp400.000.000,00) atau (30,01%) apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp4.506.963.640,00 Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.173.963.640,00 atau 70,42%.

4. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga ditargetkan sebesar Rp1.733.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 tercatat sebesar Rp1.333.000.000,00 atau 76,92%



atau tidak mencapai target sebesar (Rp400.000.000,00) atau (30,01%) apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp4.506.963.640,00 Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.173.963.640,00 atau 70,42%.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp1.766.688.951.566,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 tercatat sebesar Rp1.711.423.599.681,15 atau 96,56%, atau tidak mencapai target sebesar (Rp55.265.351.884,85) atau (3,23%). apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp1.615.623.766.661,64 Realisasi Belanja Daerah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp95.799.833.019,51) atau (5,93%). Adapun rincian Belanja Daerah terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Belanja Daerah per SKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023**

Kode Rekening	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
5.	BELANJA DAERAH	460.147.592.083,00	441.357.143.681,67	94,71
5.1.	BELANJA OPERASI	377.670.464.484,00	361.731.855.135,67	94,56
5.1.01.	Belanja Pegawai	293.085.821.156,00	280.247.972.434,00	95,62
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	74.070.719.328,00	71.183.135.001,67	90,68
5.1.05.	Belanja Hibah	10.513.924.000,00	10.300.747.700,00	92,24
5.2.	BELANJA MODAL	82.477.127.599,00	79.625.288.546,00	95,42
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.427.159.451,00	8.464.816.498,00	93,65
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	140.400.000,00	140.400.000,00	100
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.297.994.500,00	1.291.485.500,00	99,5
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.000.000,00	9.000.000,00	100
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	2.106.255.000,00	2.071.628.000,00	98,36
5.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.873.509.951,00	4.952.302.998,00	89,87
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.944.010.708,00	64.154.738.158,00	95,83
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	63.210.936.461,00	60.440.945.028,00	95,62
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.733.074.247,00	3.713.793.130,00	99,48
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.980.527.440,00	6.880.525.890,00	93,55
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	3.716.810.000,00	3.714.198.550,00	99,93
5.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.263.717.440,00	3.166.327.340,00	86,29
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	125.430.000,00	125.208.000,00	99,82
5.2.06.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	125.430.000,00	125.208.000,00	99,82
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
5.	BELANJA DAERAH	255.442.861.527,00	239.177.064.478,95	93,63
5.1.	BELANJA OPERASI	229.809.873.088,00	214.178.387.148,95	93,2
5.1.01.	Belanja Pegawai	95.054.356.188,00	92.402.077.353,00	97,21
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	134.755.516.900,00	121.776.309.795,95	90,37
5.2.	BELANJA MODAL	25.632.988.439,00	24.998.677.330,00	97,53
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.410.788.439,00	12.791.020.088,00	95,38



Kode Rekening	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	18.000.000,00	17.000.053,00	94,44
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	2.629.800.500,00	2.629.800.500,00	100
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.253.961,00	6.680.900,00	92,1
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	277.273.950,00	257.821.000,00	92,98
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	35.500.000,00	35.450.000,00	99,86
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.731.186.489,00	5.289.436.255,00	92,29
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.349.497.000,00	3.277.668.953,00	97,86
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	1.262.276.539,00	1.177.923.557,00	93,32
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	100.000.000,00	99.238.870,00	99,24
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.639.200.000,00	11.624.985.717,00	99,88
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	11.489.200.000,00	11.475.055.217,00	99,88
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	150.000.000,00	149.930.500,00	99,95
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	563.000.000,00	562.671.525,00	99,94
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	175.000.000,00	174.933.225,00	99,96
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	220.000.000,00	219.856.200,00	99,93
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	168.000.000,00	167.882.100,00	99,93
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	20.000.000,00	20.000.000,00	100
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
5.	BELANJA DAERAH	231.504.119.703,00	229.148.125.425,40	98,98
5.1.	BELANJA OPERASI	59.876.719.051,00	58.019.278.466,32	96,9
5.1.01.	Belanja Pegawai	8.825.195.951,00	7.637.634.834,00	86,54
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.483.579.130,00	30.870.291.988,50	98,05
5.1.05.	Belanja Hibah	19.567.943.970,00	19.511.351.643,82	99,71
5.2.	BELANJA MODAL	171.627.400.652,00	171.128.846.959,08	99,71
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	228.290.000,00	222.855.000,00	97,62
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	57.890.000,00	57.810.000,00	99,86
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	170.400.000,00	165.045.000,00	96,86
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.698.336.750,00	52.547.178.100,08	99,71
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	52.518.336.750,00	52.367.328.100,08	99,71
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	180.000.000,00	179.850.000,00	99,92
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	118.700.773.902,00	118.358.813.859,00	99,71
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	116.897.115.302,00	116.555.750.249,00	99,71
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	783.722.600,00	783.127.610,00	99,92
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	1.019.936.000,00	1.019.936.000,00	100
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
5.	BELANJA DAERAH	13.536.218.643,00	12.180.186.734,00	89,98
5.1.	BELANJA OPERASI	13.271.144.643,00	11.992.716.734,00	90,37
5.1.01.	Belanja Pegawai	5.418.429.143,00	4.861.697.564,00	89,73
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.552.215.500,00	6.831.569.170,00	90,46



Kode Rekening	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
5.1.05.	Belanja Hibah	190.500.000,00	189.450.000,00	99,45
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	110.000.000,00	110.000.000,00	100
5.2.	BELANJA MODAL	265.074.000,00	187.470.000,00	70,72
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	265.074.000,00	187.470.000,00	70,72
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	41.649.000,00	39.920.000,00	95,85
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	26.000.000,00	26.000.000,00	100
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	65.625.000,00	19.750.000,00	30,1
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	45.000.000,00	45.000.000,00	100
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	86.800.000,00	56.800.000,00	65,44
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
5.	BELANJA DAERAH	10.637.776.870,00	10.357.280.444,00	97,36
5.1.	BELANJA OPERASI	10.559.028.970,00	10.278.795.544,00	97,35
5.1.01.	Belanja Pegawai	6.287.478.927,00	6.044.403.289,00	96,13
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.271.550.043,00	4.234.392.255,00	99,13
5.2.	BELANJA MODAL	78.747.900,00	78.484.900,00	99,67
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.747.900,00	78.484.900,00	99,67
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.091.900,00	8.091.900,00	100
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.108.000,00	3.108.000,00	100
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	67.548.000,00	67.285.000,00	99,61
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
5.	BELANJA DAERAH	5.069.054.596,00	4.756.587.438,00	93,84
5.1.	BELANJA OPERASI	5.069.054.596,00	4.756.587.438,00	93,84
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.098.262.516,00	2.791.440.536,00	90,1
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.792.080,00	1.895.250.202,00	99,71
5.1.05.	Belanja Hibah	70.000.000,00	69.896.700,00	99,85
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
5.	BELANJA DAERAH	7.530.146.342,00	7.194.234.027,00	95,54
5.1.	BELANJA OPERASI	7.499.453.967,00	7.164.544.027,00	95,53
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.294.074.442,00	1.987.645.086,00	86,64
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.205.379.525,00	5.176.898.941,00	99,45
5.2.	BELANJA MODAL	30.692.375,00	29.690.000,00	96,73
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.692.375,00	29.690.000,00	96,73
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.847.125,00	8.545.000,00	96,59
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	21.845.250,00	21.145.000,00	96,79
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI				
5.	BELANJA DAERAH	7.077.908.586,00	6.737.459.706,00	95,19
5.1.	BELANJA OPERASI	6.881.608.586,00	6.541.902.226,00	95,06
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.790.788.016,00	3.457.222.261,00	91,2
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.571.820.570,00	2.568.890.724,00	99,89
5.1.05.	Belanja Hibah	519.000.000,00	515.789.241,00	99,38
5.2.	BELANJA MODAL	196.300.000,00	195.557.480,00	99,62
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.300.000,00	195.557.480,00	99,62
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	196.300.000,00	195.557.480,00	99,62



Kode Rekening	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
5.	BELANJA DAERAH	7.473.002.319,00	7.103.462.991,00	95,06
5.1.	BELANJA OPERASI	7.192.668.498,00	6.841.370.991,00	95,12
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.163.757.416,00	2.819.697.535,00	89,12
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.028.911.082,00	4.021.673.456,00	99,82
5.2.	BELANJA MODAL	280.333.821,00	262.092.000,00	93,49
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.492.000,00	80.492.000,00	81,72
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	18.000.000,00	-	-
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	35.292.000,00	35.292.000,00	100
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	45.200.000,00	45.200.000,00	100
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	181.841.821,00	181.600.000,00	99,87
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	181.841.821,00	181.600.000,00	99,87
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
5.	BELANJA DAERAH	9.707.463.028,00	9.400.129.874,00	96,83
5.1.	BELANJA OPERASI	7.544.134.228,00	7.236.859.874,00	95,93
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.712.125.469,00	3.424.297.708,00	92,25
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.382.816.759,00	3.374.212.166,00	99,75
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	449.192.000,00	438.350.000,00	97,59
5.2.	BELANJA MODAL	2.163.328.800,00	2.163.270.000,00	100
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.328.800,00	63.270.000,00	99,91
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.580.000,00	4.570.000,00	99,78
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	58.748.800,00	58.700.000,00	99,92
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100
DINAS PERHUBUNGAN				
5.	BELANJA DAERAH	7.123.845.459,00	6.713.329.814,78	94,24
5.1.	BELANJA OPERASI	6.340.831.009,00	5.966.325.867,00	94,09
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.745.313.199,00	2.381.201.704,00	86,74
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.595.517.810,00	3.585.124.163,00	99,71
5.2.	BELANJA MODAL	783.014.450,00	747.003.947,78	95,4
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.300.000,00	38.660.500,00	98,37
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.200.000,00	11.932.500,00	97,81
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	27.100.000,00	26.728.000,00	98,63
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	743.714.450,00	708.343.447,78	95,24
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	743.714.450,00	708.343.447,78	95,24
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK				
5.	BELANJA DAERAH	4.681.388.997,00	4.363.190.189,00	93,2
5.1.	BELANJA OPERASI	4.499.203.497,00	4.182.086.039,00	92,95
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.179.326.449,00	1.885.609.518,00	86,52
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.319.877.048,00	2.296.476.521,00	98,99
5.2.	BELANJA MODAL	182.185.500,00	181.104.150,00	99,41
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	153.880.500,00	153.171.000,00	99,54



Kode Rekening	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.624.800,00	19.565.000,00	99,7
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	72.283.700,00	71.925.000,00	99,5
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	61.972.000,00	61.681.000,00	99,53
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.305.000,00	27.933.150,00	98,69
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	28.305.000,00	27.933.150,00	98,69
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
5.	BELANJA DAERAH	5.830.846.810,00	5.529.341.982,00	94,83
5.1.	BELANJA OPERASI	5.544.563.810,00	5.243.661.632,00	94,57
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.017.618.112,00	2.720.879.247,00	90,17
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.526.945.698,00	2.522.782.385,00	99,84
5.2.	BELANJA MODAL	286.283.000,00	285.680.350,00	99,79
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.450.000,00	29.440.900,00	99,97
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.950.000,00	9.950.000,00	100
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	19.500.000,00	19.490.900,00	99,95
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	256.833.000,00	256.239.450,00	99,77
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	154.833.000,00	154.332.550,00	99,68
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	102.000.000,00	101.906.900,00	99,91
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
5.	BELANJA DAERAH	3.894.167.319,00	3.569.783.448,00	91,67
5.1.	BELANJA OPERASI	3.880.427.319,00	3.556.043.448,00	91,64
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.198.072.119,00	1.907.309.651,00	86,77
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.682.355.200,00	1.648.733.797,00	98
5.2.	BELANJA MODAL	13.740.000,00	13.740.000,00	100
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.740.000,00	13.740.000,00	100
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.740.000,00	13.740.000,00	100
DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA				
5.	BELANJA DAERAH	18.822.429.619,00	17.706.148.241,00	94,07
5.1.	BELANJA OPERASI	16.914.529.619,00	15.804.652.999,00	93,44
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.641.512.319,00	2.352.497.596,00	89,06
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.954.542.300,00	6.295.889.578,00	90,53
5.1.05.	Belanja Hibah	7.318.475.000,00	7.156.265.825,00	97,78
5.2.	BELANJA MODAL	1.907.900.000,00	1.901.495.242,00	99,66
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	8.999.375,00	99,99
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.000.000,00	5.000.000,00	100
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	4.000.000,00	3.999.375,00	99,98
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.898.900.000,00	1.892.495.867,00	99,66
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.898.900.000,00	1.892.495.867,00	99,66
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
5.	BELANJA DAERAH	3.915.188.239,00	3.570.594.125,34	91,2
5.1.	BELANJA OPERASI	3.698.705.113,00	3.354.350.097,34	90,69
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.410.231.332,00	2.088.223.141,00	86,64



Kode Rekening	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.288.473.781,00	1.266.126.956,34	98,27
5.2.	BELANJA MODAL	216.483.126,00	216.244.028,00	99,89
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.187.550,00	101.165.000,00	99,98
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.587.550,00	16.574.000,00	99,92
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	84.600.000,00	84.591.000,00	99,99
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.831.730,00	49.639.200,00	99,61
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	49.831.730,00	49.639.200,00	99,61
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.463.846,00	65.439.828,00	99,96
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	65.463.846,00	65.439.828,00	99,96
DINAS PERIKANAN				
5.	BELANJA DAERAH	9.634.854.618,00	9.129.776.249,00	94,76
5.1.	BELANJA OPERASI	9.600.814.618,00	9.095.746.249,00	94,74
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.714.565.502,00	3.398.669.940,00	91,5
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.077.950.214,00	4.011.000.409,00	98,36
5.1.05.	Belanja Hibah	1.808.298.902,00	1.686.075.900,00	93,24
5.2.	BELANJA MODAL	34.040.000,00	34.030.000,00	99,97
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.040.000,00	34.030.000,00	99,97
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.240.000,00	22.240.000,00	100
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	11.800.000,00	11.790.000,00	99,92
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				
5.	BELANJA DAERAH	41.452.910.909,00	40.512.940.576,00	97,73
5.1.	BELANJA OPERASI	40.981.572.109,00	40.043.238.501,00	97,71
5.1.01.	Belanja Pegawai	15.583.104.344,00	15.178.378.392,00	97,4
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.956.747.765,00	7.804.406.721,00	98,09
5.1.05.	Belanja Hibah	17.441.720.000,00	17.060.453.388,00	97,81
5.2.	BELANJA MODAL	471.338.800,00	469.702.075,00	99,65
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.338.800,00	141.101.000,00	99,83
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	100.460.000,00	100.335.000,00	99,88
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.880.000,00	5.806.000,00	98,74
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	34.998.800,00	34.960.000,00	99,89
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	330.000.000,00	328.601.075,00	99,58
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	330.000.000,00	328.601.075,00	99,58
SEKRETARIAT DAERAH				
5.	BELANJA DAERAH	105.924.410.950,00	103.465.938.246,01	97,68
5.1.	BELANJA OPERASI	103.817.787.390,00	101.375.504.504,01	97,65
5.1.01.	Belanja Pegawai	12.603.196.258,00	12.092.627.898,00	95,95
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.469.343.132,00	37.095.588.606,01	99
5.1.05.	Belanja Hibah	53.195.248.000,00	51.837.288.000,00	97,45
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	550.000.000,00	350.000.000,00	63,64
5.2.	BELANJA MODAL	2.106.623.560,00	2.090.433.742,00	99,23
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.236.623.560,00	1.221.058.750,00	98,74



Kode Rekening	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	97.427.000,00	93.649.000,00	96,12
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	820.265.000,00	809.824.250,00	98,73
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	318.931.560,00	317.585.500,00	99,58
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	550.000.000,00	549.550.000,00	99,92
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	550.000.000,00	549.550.000,00	99,92
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	320.000.000,00	319.824.992,00	99,95
5.2.06.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud- Aset Tidak Berwujud Lainnya	320.000.000,00	319.824.992,00	99,95
SEKRETARIAT DPRD				
5.	BELANJA DAERAH	44.787.202.730,00	44.215.356.956,00	98,72
5.1.	BELANJA OPERASI	44.594.172.730,00	44.025.590.456,00	98,72
5.1.01.	Belanja Pegawai	21.322.069.840,00	20.992.454.660,00	98,45
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.272.102.890,00	23.033.135.796,00	98,97
5.2.	BELANJA MODAL	193.030.000,00	189.766.500,00	98,31
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193.030.000,00	189.766.500,00	98,31
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	36.670.000,00	34.700.000,00	94,63
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	53.110.000,00	52.657.500,00	99,15
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	43.250.000,00	43.040.000,00	99,51
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	60.000.000,00	59.369.000,00	98,95
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
5.	BELANJA DAERAH	24.400.909.567,00	24.094.583.735,00	98,74
5.1.	BELANJA OPERASI	24.315.394.567,00	24.009.078.735,00	98,74
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.333.897.937,00	4.031.249.039,00	93,02
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.981.496.630,00	19.977.829.696,00	99,98
5.2.	BELANJA MODAL	85.515.000,00	85.505.000,00	99,99
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.515.000,00	85.505.000,00	99,99
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.990.000,00	9.980.000,00	99,9
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	75.525.000,00	75.525.000,00	100
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5.	BELANJA DAERAH	369.508.412.531,00	367.319.919.012,00	99,41
5.1.	BELANJA OPERASI	14.442.280.331,00	13.376.779.354,00	92,62
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.152.772.232,00	3.735.815.560,00	89,96
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.289.508.099,00	9.640.963.794,00	93,7
5.2.	BELANJA MODAL	336.064.200,00	333.968.200,00	99,38
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	336.064.200,00	333.968.200,00	99,38
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	197.594.000,00	195.500.000,00	98,94
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	138.470.200,00	138.468.200,00	100
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.733.000.000,00	1.333.000.000,00	76,92
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	1.733.000.000,00	1.333.000.000,00	76,92
5.3.01.01.	Belanja Tidak Terduga	1.733.000.000,00	1.333.000.000,00	76,92
5.4.	BELANJA TRANSFER	352.997.068.000,00	352.276.171.458,00	99,8
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	3.735.259.000,00	3.735.259.000,00	100



Kode Rekening	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
5.4.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.069.994.000,00	3.069.994.000,00	100
5.4.01.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	665.265.000,00	665.265.000,00	100
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	349.261.809.000,00	348.540.912.458,00	99,79
5.4.02.05.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	349.261.809.000,00	348.540.912.458,00	99,79
BADAN PENDAPATAN DAERAH				
5.	BELANJA DAERAH	6.636.922.704,00	6.081.995.392,00	91,64
5.1.	BELANJA OPERASI	6.617.822.704,00	6.062.915.392,00	91,61
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.859.422.717,00	2.516.216.751,00	88
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.758.399.987,00	3.546.698.641,00	94,37
5.2.	BELANJA MODAL	19.100.000,00	19.080.000,00	99,9
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.100.000,00	19.080.000,00	99,9
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	19.100.000,00	19.080.000,00	99,9
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
5.	BELANJA DAERAH	10.430.373.509,00	10.073.023.849,00	96,57
5.1.	BELANJA OPERASI	10.292.301.984,00	9.935.058.849,00	96,53
5.1.01.	Belanja Pegawai	3.782.300.083,00	3.483.703.733,00	92,11
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.510.001.901,00	6.451.355.116,00	99,1
5.2.	BELANJA MODAL	138.071.525,00	137.965.000,00	99,92
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.071.525,00	137.965.000,00	99,92
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.591.125,00	30.570.000,00	99,93
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.500.000,00	9.500.000,00	100
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	97.980.400,00	97.895.000,00	99,91
BADAN PENGELOLA PERBATASAN				
5.	BELANJA DAERAH	2.726.817.712,00	2.447.275.519,00	89,75
5.1.	BELANJA OPERASI	2.678.692.712,00	2.401.537.144,00	89,65
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.831.301.092,00	1.557.379.057,00	85,04
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	847.391.620,00	844.158.087,00	99,62
5.2.	BELANJA MODAL	48.125.000,00	45.738.375,00	95,04
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.125.000,00	45.738.375,00	95,04
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	24.525.000,00	24.114.375,00	98,33
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	23.600.000,00	21.624.000,00	91,63
INSPEKTORAT				
5.	BELANJA DAERAH	9.475.018.924,00	9.093.939.681,00	95,98
5.1.	BELANJA OPERASI	9.097.718.924,00	8.719.446.681,00	95,84
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.828.402.044,00	4.510.900.877,00	93,42
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.269.316.880,00	4.208.545.804,00	98,58
5.2.	BELANJA MODAL	377.300.000,00	374.493.000,00	99,26
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	202.300.000,00	199.603.000,00	98,67
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	44.600.000,00	43.300.000,00	97,09
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	157.700.000,00	156.303.000,00	99,11



Kode Rekening	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	174.890.000,00	99,94
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	175.000.000,00	174.890.000,00	99,94
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA				
5.	BELANJA DAERAH	6.762.629.394,00	6.595.850.255,00	97,53
5.1.	BELANJA OPERASI	6.739.513.394,00	6.572.734.255,00	97,53
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.479.603.984,00	4.320.072.971,00	96,44
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.259.909.410,00	2.252.661.284,00	99,68
5.2.	BELANJA MODAL	23.116.000,00	23.116.000,00	100
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.116.000,00	23.116.000,00	100
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.348.000,00	13.348.000,00	100
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	9.768.000,00	9.768.000,00	100
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN				
5.	BELANJA DAERAH	6.720.647.802,00	6.612.548.056,00	98,39
5.1.	BELANJA OPERASI	6.720.647.802,00	6.612.548.056,00	98,39
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.589.747.122,00	4.495.280.151,00	97,94
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.130.900.680,00	2.117.267.905,00	99,36
KECAMATAN BIKA				
5.	BELANJA DAERAH	1.666.965.950,00	1.510.410.804,00	90,61
5.1.	BELANJA OPERASI	1.666.965.950,00	1.510.410.804,00	90,61
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.121.460.330,00	966.187.518,00	86,15
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	545.505.620,00	544.223.286,00	99,76
KECAMATAN KALIS				
5.	BELANJA DAERAH	2.352.867.492,00	2.237.662.853,00	95,1
5.1.	BELANJA OPERASI	2.324.880.492,00	2.209.675.853,00	95,04
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.876.588.492,00	1.763.189.633,00	93,96
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	435.292.000,00	433.486.220,00	99,59
5.1.05.	Belanja Hibah	13.000.000,00	13.000.000,00	100
5.2.	BELANJA MODAL	27.987.000,00	27.987.000,00	100
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.987.000,00	27.987.000,00	100
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	27.987.000,00	27.987.000,00	100
KECAMATAN EMBALOH HILIR				
5.	BELANJA DAERAH	2.005.794.029,00	1.880.932.907,00	93,77
5.1.	BELANJA OPERASI	1.978.294.029,00	1.853.462.907,00	93,69
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.490.008.099,00	1.367.571.977,00	91,78
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	488.285.930,00	485.890.930,00	99,51
5.2.	BELANJA MODAL	27.500.000,00	27.470.000,00	99,89
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.500.000,00	27.470.000,00	99,89
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	27.500.000,00	27.470.000,00	99,89
KECAMATAN EMBALOH HULU				
5.	BELANJA DAERAH	2.315.674.282,00	2.197.159.545,00	94,88
5.1.	BELANJA OPERASI	2.274.574.282,00	2.156.069.545,00	94,79
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.810.014.682,00	1.691.509.945,00	93,45



Kode Rekening	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	464.559.600,00	464.559.600,00	100
5.2.	BELANJA MODAL	41.100.000,00	41.090.000,00	99,98
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.100.000,00	41.090.000,00	99,98
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	10.500.000,00	10.500.000,00	100
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.600.000,00	12.600.000,00	100
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	14.000.000,00	13.990.000,00	99,93
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	100
KECAMATAN BUNUT HILIR				
5.	BELANJA DAERAH	2.569.112.978,00	2.445.802.056,00	95,2
5.1.	BELANJA OPERASI	2.569.112.978,00	2.445.802.056,00	95,2
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.886.196.238,00	1.765.740.212,00	93,61
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	682.916.740,00	680.061.844,00	99,58
KECAMATAN BOYAN TANJUNG				
5.	BELANJA DAERAH	3.154.959.846,00	3.022.694.642,00	95,81
5.1.	BELANJA OPERASI	3.079.639.846,00	2.949.923.742,00	95,79
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.182.509.021,00	2.055.779.035,00	94,19
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	747.130.825,00	744.144.707,00	99,6
5.1.05.	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	100
5.2.	BELANJA MODAL	75.320.000,00	72.770.900,00	96,62
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.320.000,00	72.770.900,00	96,62
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	39.920.000,00	39.920.000,00	100
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	35.400.000,00	32.850.900,00	92,8
KECAMATAN BUNUT HULU				
5.	BELANJA DAERAH	2.346.938.927,00	2.178.907.391,00	92,84
5.1.	BELANJA OPERASI	2.265.610.927,00	2.103.186.391,00	92,83
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.833.492.927,00	1.683.545.531,00	91,82
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	393.618.000,00	391.140.860,00	99,37
5.1.05.	Belanja Hibah	38.500.000,00	28.500.000,00	74,03
5.2.	BELANJA MODAL	81.328.000,00	75.721.000,00	93,11
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.328.000,00	75.721.000,00	93,11
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	55.778.000,00	51.781.000,00	92,83
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.950.000,00	1.950.000,00	100
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	23.600.000,00	21.990.000,00	93,18
KECAMATAN MENTEBAH				
5.	BELANJA DAERAH	2.523.598.213,00	2.399.504.250,00	95,08
5.1.	BELANJA OPERASI	2.483.798.213,00	2.359.708.068,00	95
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.038.309.753,00	1.918.020.719,00	94,1
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	445.488.460,00	441.687.349,00	99,15
5.2.	BELANJA MODAL	39.800.000,00	39.796.182,00	99,99
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.800.000,00	39.796.182,00	99,99
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.800.000,00	13.796.482,00	99,97
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	26.000.000,00	25.999.700,00	100
KECAMATAN JONGKONG				



Kode Rekening	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
5.	BELANJA DAERAH	2.445.851.259,00	2.295.386.587,00	93,85
5.1.	BELANJA OPERASI	2.431.851.259,00	2.281.386.587,00	93,81
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.761.938.179,00	1.612.909.455,00	91,54
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	531.413.080,00	529.977.132,00	99,73
5.1.05.	Belanja Hibah	138.500.000,00	138.500.000,00	100
5.2.	BELANJA MODAL	14.000.000,00	14.000.000,00	100
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	14.000.000,00	100
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	14.000.000,00	14.000.000,00	100
KECAMATAN PENGKADAN				
5.	BELANJA DAERAH	2.620.824.078,00	2.474.115.029,00	94,4
5.1.	BELANJA OPERASI	2.562.035.078,00	2.415.326.029,00	94,27
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.893.677.078,00	1.773.448.711,00	93,65
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	509.831.920,00	484.664.518,00	95,06
5.1.05.	Belanja Hibah	158.526.080,00	157.212.800,00	99,17
5.2.	BELANJA MODAL	58.789.000,00	58.789.000,00	100
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.789.000,00	58.789.000,00	100
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	27.889.000,00	27.889.000,00	100
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.900.000,00	30.900.000,00	100
KECAMATAN HULU GURUNG				
5.	BELANJA DAERAH	3.155.041.595,00	2.990.705.373,00	94,79
5.1.	BELANJA OPERASI	3.021.200.315,00	2.865.119.093,00	94,83
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.332.864.355,00	2.189.148.805,00	93,84
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	563.335.960,00	555.970.288,00	98,69
5.1.05.	Belanja Hibah	125.000.000,00	120.000.000,00	96
5.2.	BELANJA MODAL	133.841.280,00	125.586.280,00	93,83
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.841.280,00	125.586.280,00	93,83
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	23.232.000,00	23.232.000,00	100
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	68.809.780,00	67.609.780,00	98,26
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	41.799.500,00	34.744.500,00	83,12
KECAMATAN SELIMBAU				
5.	BELANJA DAERAH	2.739.491.161,00	2.577.760.604,00	94,1
5.1.	BELANJA OPERASI	2.739.491.161,00	2.577.760.604,00	94,1
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.100.185.521,00	1.946.154.202,00	92,67
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	589.305.640,00	581.606.402,00	98,69
5.1.05.	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	100
KECAMATAN BADAU				
5.	BELANJA DAERAH	1.801.408.727,00	1.684.822.596,00	93,53
5.1.	BELANJA OPERASI	1.781.408.727,00	1.664.922.596,00	93,46
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.313.312.727,00	1.196.950.596,00	91,14
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	468.096.000,00	467.972.000,00	99,97
5.2.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.900.000,00	99,5
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.900.000,00	99,5
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	20.000.000,00	19.900.000,00	99,5
KECAMATAN BATANG LUPAR				



Kode Rekening	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
5.	BELANJA DAERAH	2.281.367.908,00	2.134.230.747,00	93,55
5.1.	BELANJA OPERASI	2.253.767.908,00	2.106.660.747,00	93,47
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.692.451.548,00	1.564.522.037,00	92,44
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	561.316.360,00	542.138.710,00	96,58
5.2.	BELANJA MODAL	27.600.000,00	27.570.000,00	99,89
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.600.000,00	27.570.000,00	99,89
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	27.600.000,00	27.570.000,00	99,89
KECAMATAN EMPANANG				
5.	BELANJA DAERAH	1.593.704.461,00	1.470.904.461,00	92,29
5.1.	BELANJA OPERASI	1.593.704.461,00	1.470.904.461,00	92,29
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.064.689.561,00	942.706.861,00	88,54
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	503.014.900,00	502.197.600,00	99,84
5.1.05.	Belanja Hibah	26.000.000,00	26.000.000,00	100
KECAMATAN PURING KENCANA				
5.	BELANJA DAERAH	1.693.816.089,00	1.575.376.587,00	93,01
5.1.	BELANJA OPERASI	1.654.216.089,00	1.535.808.587,00	92,84
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.105.774.169,00	992.442.692,00	89,75
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	548.441.920,00	543.365.895,00	99,07
5.2.	BELANJA MODAL	39.600.000,00	39.568.000,00	99,92
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.600.000,00	39.568.000,00	99,92
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	39.600.000,00	39.568.000,00	99,92
KECAMATAN SEMITAU				
5.	BELANJA DAERAH	2.774.577.210,00	2.659.309.701,00	95,85
5.1.	BELANJA OPERASI	2.774.577.210,00	2.659.309.701,00	95,85
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.971.477.090,00	1.857.110.125,00	94,2
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	803.100.120,00	802.199.576,00	99,89
KECAMATAN SUHAID				
5.	BELANJA DAERAH	2.407.159.551,00	2.276.773.178,00	94,58
5.1.	BELANJA OPERASI	2.375.632.551,00	2.245.246.178,00	94,51
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.712.742.813,00	1.582.514.752,00	92,4
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	662.889.738,00	662.731.426,00	99,98
5.2.	BELANJA MODAL	31.527.000,00	31.527.000,00	100
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.527.000,00	31.527.000,00	100
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.549.000,00	4.549.000,00	100
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	26.978.000,00	26.978.000,00	100
KECAMATAN SEBERUANG				
5.	BELANJA DAERAH	2.442.087.567,00	2.316.832.797,00	94,87
5.1.	BELANJA OPERASI	2.406.787.567,00	2.281.682.797,00	94,8
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.922.487.567,00	1.799.688.365,00	93,61
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	484.300.000,00	481.994.432,00	99,52
5.2.	BELANJA MODAL	35.300.000,00	35.150.000,00	99,58
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.300.000,00	35.150.000,00	99,58
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	23.500.000,00	23.400.000,00	99,57
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	11.800.000,00	11.750.000,00	99,58



Kode Rekening	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
KECAMATAN SILAT HILIR				
5.	BELANJA DAERAH	1.884.343.012,00	1.771.836.661,00	94,03
5.1.	BELANJA OPERASI	1.884.343.012,00	1.771.836.661,00	94,03
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.402.978.832,00	1.290.693.881,00	92
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	481.364.180,00	481.142.780,00	99,95
KECAMATAN SILAT HULU				
5.	BELANJA DAERAH	1.985.680.376,00	1.877.273.926,00	94,54
5.1.	BELANJA OPERASI	1.930.100.376,00	1.821.727.926,00	94,39
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.503.847.636,00	1.396.217.486,00	92,84
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	426.252.740,00	425.510.440,00	99,83
5.2.	BELANJA MODAL	55.580.000,00	55.546.000,00	99,94
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.580.000,00	55.546.000,00	99,94
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	10.500.000,00	10.499.000,00	99,99
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	300.000,00	300.000,00	100
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.000.000,00	6.999.000,00	99,99
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	32.500.000,00	32.498.000,00	99,99
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	5.280.000,00	5.250.000,00	99,43
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
5.	BELANJA DAERAH	27.072.565.365,00	26.937.986.860,00	99,5
5.1.	BELANJA OPERASI	27.039.165.365,00	26.905.087.860,00	99,5
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.993.581.565,00	1.860.485.140,00	93,32
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.272.463.800,00	2.271.482.720,00	99,96
5.1.05.	Belanja Hibah	22.773.120.000,00	22.773.120.000,00	100
5.2.	BELANJA MODAL	33.400.000,00	32.899.000,00	98,5
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.400.000,00	32.899.000,00	98,5
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.800.000,00	5.800.000,00	100
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	27.600.000,00	27.099.000,00	98,18

PEMBIAYAAN DAERAH

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 yang tercatat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp13.675.622.215,56, Dengan demikian total realisasi Pembiayaan dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.914.196.646.991,00 atau 87,24% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.675.622.215,56. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau 00,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp00,00.

Dari data realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan maka posisi SiLPA Tahun Anggaran 2023 tercatat sebesar Rp25.966.093.510,53. Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada Tabel berikut ini.

**Tabel 8. Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022 (Audited)
1	PENDAPATAN	1.740.301.847.350	1.723.714.070.976	99,05	1.566.982.253.919
1.1	Pendapatan Asli Daerah	84.625.985.965,70	73.399.678.892,73	86,73	70.668.853.866,21
1.2	Pendapatan Transfer	1.644.923.583.384,63	1.640.262.373.303,62	99,72	1.487.812.524.016,23
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	10.752.278.000,00	10.052.018.779,77	93,49	8.500.876.036,19
2	BELANJA & TRANSFER	1.766.688.951.566	1.711.423.599.681	96,87	1.615.623.766.662
2.1	Belanja Operasi	1.121.242.287.539,00	1.071.270.615.036,29	95,54	1.028.626.545.358,10
2.2	Belanja Modal	290.716.596.027,00	286.543.813.186,86	98,56	236.955.283.717,54
2.3	Belanja Tak Terduga	1.733.000.000,00	1.333.000.000,00	76,92	4.506.963.640,00
2.4	Transfer - Bantuan Keuangan	352.997.068.000,00	352.276.171.458,00	99,8	345.534.973.946,00
Surplus/Defisit		(26.387.104.215,67)	12.290.471.294,97	0,00	(48.641.512.743,01)
3	PEMBIAYAAN	15.675.622.216	13.675.622.216		62.317.134.959
3.1	Penerimaan Pembiayaan	15.675.622.215,56	13.675.622.215,56	87,24	74.317.134.958,57
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00
4	SILPA		25.966.093.511		13.675.622.216
	SILPA Setelah Koreksi dan Penyesuaian	0,00	25.966.093.510,53	0,00	13.675.622.215,56

PEMENUHAN MANDATORY SPENDING

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4);
2. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN sesuai dengan ketentuan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26% dari penerimaan dalam negeri neto sesuai dengan ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
4. Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dalam menyusun APBD TA 2023 terdapat hal khusus lainnya yang perlu diperhatikan yang merupakan pengeluaran wajib bagi pemerintah daerah (*mandatory spending*) yang merupakan pengeluaran yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU HKPD. Belanja wajib tersebut meliputi:

1. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Anggaran fungsi pendidikan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang pendidikan terealisasi sebesar 27,02% dari belanja daerah, melebihi yang diamanatkan sebesar 20%. Rincian perhitungan alokasi anggaran fungsi pendidikan dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 9. Perhitungan Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023	APBD-P 2023	REALISASI APBD 2023
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:	468.230.719.513,00	440.978.677.583,00	433.386.999.753,67
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	9.527.195.800,00	8.457.432.500,00	7.712.987.722,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	267.450.026,00	274.729.976,00	3.570.594.125,34
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga :	7.702.436.577,00	18.195.829.619,00	17.706.148.241,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	477.757.915.313,00	449.436.110.083,00	462.376.729.842,01
3.	Total Belanja Daerah	1.638.517.086.602	1.755.977.469.566	1.711.410.699.681,15
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	29,16%	25,59%	27,02%

2. Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan

Anggaran fungsi kesehatan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang kesehatan sebesar 17,47% dan realisasi sebesar 16,85%. Alokasi anggaran bidang kesehatan diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan program kesehatan lainnya. Anggaran fungsi kesehatan dengan komponen anggaran Belanja Pegawai setelah perubahan sebesar Rp95.054.356.188 komponen anggaran belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp125.692.306.650 dengan realisasi total dari Anggaran fungsi kesehatan bidang Kesehatan sebesar Rp208.530.084.134,95 Anggaran Fungsi Kesehatan bidang Kesehatan pada Belanja Modal setelah perubahan sebesar Rp24.474.354.939 dengan realisasi total dari Anggaran fungsi kesehatan bidang Kesehatan pada Belanja Modal sebesar Rp23.877.892.330,00

Rincian perhitungan alokasi anggaran fungsi kesehatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 10. Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023	R - PERUBAHAN APBD 2023	REALISASI 2023
1.	a. Belanja bidang Kesehatan:	238.921.569.795,00	245.221.017.777,00	232.407.976.464,95
	1) Belanja Operasi:			208.530.084.134,95
	a. belanja pegawai;	95.146.227.229	95.054.356.188	0,00
	b. belanja barang dan jasa;	120.695.244.382	125.692.306.650	0,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	23.080.098.184	24.474.354.939	23.877.892.330,00
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan.	0,00	0,00	0,00
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	238.921.569.795	245.221.017.777	232.407.976.464,95
3.	Total Belanja Daerah	1.638.517.086.602	1.755.977.469.566	1.711.167.248.686,15
4.	Gaji ASN	352.719.452.178	352.621.809.775	332.082.290.728,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.285.797.634.424	1.403.355.659.791	1.379.084.957.958,15
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	18,58%	17,47%	16,85%

3. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur

Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil/transfers kepada daerah atau desa. Apabila persentase tersebut belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya UU HKPD, sehingga batas akhir pengalokasian tersebut sampai dengan tahun 2027.

Rincian besaran Belanja Infrastruktur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Tabel 11.a. Besaran minimal Belanja Infrastruktur

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023	APBD-P 2023	Realisasi 2023
1	Total Belanja Daerah	1.638.517.086.602,00	1.755.977.469.566,00	1.711.410.699.681,15
2	belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
	a) belanja bagi hasil	2.465.265.000,00	3.735.259.000,00	3.735.259.000,00
	b) bantuan keuangan	341.860.783.000,00	349.261.809.000,00	348.540.912.458,00
	Jumlah(a+b)	344.326.048.000,00	352.997.068.000,00	352.276.171.458,00
3	Selisih (1-2)	1.294.191.038.602,00	1.402.980.401.566,00	1.359.134.528.223,15
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	517.676.415.440,80	561.192.160.626,40	543.653.811.289,26

Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Rincian perhitungan alokasi anggaran dan realisasi fungsi infrastruktur daerah dengan uraian sebagai berikut:

1. Belanja Modal peralatan dan mesin anggaran setelah perubahan sebesar Rp26.149.127.380,00 dengan realisasi sebesar Rp25.352.951.448,00.
2. Belanja Modal Bangunan dan Gedung anggaran setelah perubahan sebesar Rp135.663.968.459,00 dengan realisasi sebesar Rp132.663.818.494,86
3. Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp121.429.237.748,00 dengan realisasi sebesar Rp121.086.925.212,00
4. Belanja Modal aset tetap lainnya anggaran setelah perubahan sebesar Rp7.028.832.440,00 dengan realisasi sebesar Rp6.896.293.040,00
5. Belanja Modal aset lainnya anggaran setelah perubahan sebesar Rp445.430.000,00 dengan realisasi sebesar Rp445.032.992,00



Tabel 11.b. Alokasi Anggaran Fungsi Infrastruktur Daerah

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023	APBD-P 2023	REALISASI 2023
1	a) Belanja Modal:	256.626.860.267,00	290.716.596.027,00	286.445.021.186,86
	1) tanah	0,00	0,00	0,00
	2) peralatan dan mesin;	30.175.832.138,00	26.149.127.380,00	25.352.951.448,00
	3) bangunan dan Gedung;	157.391.756.089,00	135.663.968.459,00	132.663.818.494,86
	4) jalan, jaringan, dan irigasi;	66.995.437.040,00	121.429.237.748,00	121.086.925.212,00
	5) aset tetap lainnya;	1.793.405.000,00	7.028.832.440,00	6.896.293.040,00
	6) aset lainnya;	270.430.000,00	445.430.000,00	445.032.992,00
	b) Belanja Pemeliharaan	8.317.131.765,00	8.162.273.265,00	0,00
2	a) Belanja Hibah	78.293.005.842,00	134.097.755.952,00	131.751.463.597,82
	b) Belanja Bantuan Sosial	5.801.592.000,00	1.109.192.000,00	898.350.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	341.860.783.000,00	349.261.809.000,00	348.540.912.458,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	690.899.372.874,00	783.347.626.244,00	767.635.747.242,68

4. Alokasi Bidang Pengawasan

Alokasi *mandatory spending* bidang pengawasan dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp9.475.018.924,00 dan dengan Tingkat pencapaian sebesar Rp9.093.939.681,00 adapun alokasi anggaran dana dan realisasi *mandatory spending* bidang pengawasan dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi pada Belanja Pegawai dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp4.828.402.044,00 dan realisasi sampai dengan 31 desember 2023 sebesar Rp4.510.900.877,00
2. Belanja Operasi pada Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp4.269.316.880,00 dan realisasi sampai dengan 31 desember 2023 sebesar Rp4.208.545.804,00
3. Belanja Modal pada Peralatan dan Mesin dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp202.300.000,00 dan realisasi sampai dengan 31 desember 2023 sebesar Rp199.603.000,00
4. Belanja Modal pada Gedung dan Bangunan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp175.000.000,00 dan realisasi sampai dengan 31 desember 2023 sebesar Rp174.890.000,00

Tabel 12. Alokasi Anggaran Fungsi Pengawasan

No.	Komponen Perhitungan	APBD 2023		Realisasi 2023 Per 31 Des 2023
		Murni	Perubahan	
1	Belanja Operasi			
	Belanja Pegawai	4.344.507.877,00	4.828.402.044,00	4.510.900.877,00
	Belanja Barang dan Jasa	4.213.075.399,00	4.269.316.880,00	4.208.545.804,00
	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Operasi (1)	8.557.583.276,00	9.097.718.924,00	8.719.446.681,00
2	Belanja Modal			
	Peralatan dan Mesin	75.856.000,00	202.300.000,00	199.603.000,00
	Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	175.000.000,00	174.890.000,00



No.	Komponen Perhitungan	APBD 2023		Realisasi 2023 Per 31 Des 2023
		Murni	Perubahan	
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal (2)	250.856.000,00	377.300.000,00	374.493.000,00
3	Jumlah (1+2)	8.808.439.276,00	9.475.018.924,00	9.093.939.681,00
4	Jumlah Belanja Daerah (4)	1.638.517.086.602,00	1.755.977.469.566,00	1.711.167.248.686,15
5	% Alokasi Pengawasan terhadap Belanja Daerah	0,54%	0,54%	0,53%

5. Alokasi Anggaran Dana Bagi Hasil

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah. DAU dialokasikan kepada Daerah untuk memenuhi celah fiskal daerah untuk 1 (satu) TA dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Perhitungan DAU tersebut diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Alokasi DAU disusun menggunakan indikasi antara lain : a. perkiraan celah fiskal Daerah secara nasional; b. kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang meliputi pendanaan pegawai, belanja operasional dan pembangunan layanan publik. c. perkiraan DAU dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan d. perkiraan penerimaan dalam negeri netto. Sedangkan ketentuan penyaluran DAU dalam desain UU NO.1/2022, pagu mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kemampuan Keuangan Negara, pagu TKD secara keseluruhan dan target pembangunan.

Berbasis unit cost dengan memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, target layanan (jumlah penduduk), karakteristik wilayah (daerah kepulauan dan daerah berbasis sektor tertentu seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan).

Penghitungan berdasarkan klaster yang ditetapkan dengan memperhatikan letak geografis dan kondisi perekonomian.

Sebagian DAU dapat diarahkan penggunaannya untuk mendorong pemerataan kinerja layanan publik serta mendukung Pemda mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Proporsi penyaluran DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbalan 14,1% dan 85,9% dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 211/PMK.07/2022 dan PMK Nomor 212/PMK.07/2022 yang mengatur tentang pengelolaan DAU yang dilaksanakan untuk TA 2023. Dalam PMK tersebut diatur mengenai perubahan mekanisme dalam penyaluran DAU yang disesuaikan dengan kebutuhan Daerah. Pada awalnya, DAU merupakan dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah yang tidak ditentukan penggunaannya, sehingga Daerah dapat dengan leluasa mengalokasikan DAU sesuai dengan kebutuhan Daerah. Akan tetapi, kebijakan dari pemerintah yang baru membagi DAU menjadi 2 (dua) penyaluran yaitu

alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dengan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya.

Perubahan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan layanan publik daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, serta mendukung pendanaan untuk kelurahan melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*). Penjelasan mengenai alokasi DAU sesuai dengan kebijakan yang baru antara lain:

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH seringkali dikaitkan sebagai dana yang menyangkut ‘hajat hidup’ daerah sebab digunakan mendanai kebutuhan daerah. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diubah dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Secara umum DBH bertujuan menyeimbangkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah yang dalam pelaksanaannya sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara daerah penghasil dan daerah bukan penghasil sumber daya alam.

Prinsip penyaluran DBH dilakukan *by origin*, yaitu daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah bukan penghasil. Selain itu, penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *Based on Actual Revenue*. Artinya, penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan TA berjalan (Pasal 23 UU 33/2004). Jenis-jenis DBH meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan.

7.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.3.1 UMUM

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam nilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dalam kondisi pemerintah daerah

berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman.

5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi berbasis akrual yang diterapkan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Ketentuan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

7.3.2 ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.



Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah membentuk Susunan Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang terdiri dari:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
 - a. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik;
 - f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - h. Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata;
 - i. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Urusan pemerintahan pilihan
 - a. Dinas Perikanan;
 - b. Dinas Pertanian dan Pangan.
4. Urusan pendukung urusan pemerintahan
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD.
5. Urusan penunjang urusan pemerintahan
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Pendapatan Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Badan Pengelola Perbatasan.
6. Urusan pengawasan urusan pemerintahan
 - a. Inspektorat
7. Urusan kewilayahan
 - a. Kecamatan Putussibau Utara;
 - b. Kecamatan Putussibau Selatan;
 - c. Kecamatan Bika;
 - d. Kecamatan Kalis;
 - e. Kecamatan Embaloh Hilir;
 - f. Kecamatan Embaloh Hulu;

- g. Kecamatan Bunut Hilir;
 - h. Kecamatan Boyan Tanjung;
 - i. Kecamatan Bunut Hulu;
 - j. Kecamatan Mentebah;
 - k. Kecamatan Jongkong;
 - l. Kecamatan Pengkadan;
 - m. Kecamatan Hulu Gurung;
 - n. Kecamatan Selimbau;
 - o. Kecamatan Badau;
 - p. Kecamatan Batang Lupar;
 - q. Kecamatan Empanang;
 - r. Kecamatan Puring Kencana;
 - s. Kecamatan Semitau;
 - t. Kecamatan Suhaid;
 - u. Kecamatan Seberuang;
 - v. Kecamatan Silat Hilir;
 - w. Kecamatan Silat Hulu.
8. Urusan pemerintahan umum
- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

7.3.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas adalah pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

7.3.4 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

2. Prinsip Realisasi

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

3. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode tambahannya adalah periode bulanan, triwulanan, dan semesteran.

5. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tetap harus mempertimbangkan kenetralan dan keandalan laporan keuangan.

7.3.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

1. Aset Lancar

a. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima oleh Bendahara umum Daerah ditandai masuknya uang ke Rekening Bendahara Umum Daerah. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian Jumlah Kas di kas daerah; Klasifikasi kas di kas daerah dan jumlah masing-masing kas di kas daerah; dan Kas yang merupakan titipan pihak ketiga.

b. Kas di Bendahara

Kas di Bendahara adalah kas baik berupa saldo rekening bank maupun saldo uang tunai dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran ataupun Bendahara Penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat kas keluar dari Bendahara Umum Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Kas di Bendahara Penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke kas daerah.

Kas di Bendahara dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian jumlah kas di bendahara; dan Klasifikasi kas di bendahara dan jumlah masing-masing kas di bendahara.

c. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang dilakukan pada akhir tahun. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal.

d. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan bagian lancar TGR di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi bagian lancar TGR menurut umur dan klasifikasi bagian lancar TGR menurut debitor.

e. Piutang Pajak

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan piutang yang diakui atas pajak dan retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya (SKRD dan SKRDT) pada tanggal pelaporan tetapi belum ada realisasinya.

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui pada tanggal pelaporan berdasarkan inventarisasi. Perkiraan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dicatat sebesar nilai nominal. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan

disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

f. Piutang Lain-Lain

Akun Piutang Lain-Lain digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.

Piutang lain-lain diakui pada saat timbulnya piutang/tagihan lain-lain kepada debitur. Piutang lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang lain-lain di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

g. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pencatatan Persediaan dilakukan bukan pada saat perolehan dan penggunaannya tetapi pada akhir tahun anggaran sesuai dengan hasil inventarisasi fisik atas persediaan atau metode pencatatan persediaan menggunakan metode pencatatan periodik. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

2. Investasi Non Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- d. Bantuan ternak bergulir.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan pada tanggal perolehan.

Investasi Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen ini dapat berupa:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*). Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA. Sedangkan dividen dalam bentuk saham (*stock dividend*) yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, namun tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LRA.

Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, hasil investasi permanen jangka panjang berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan pengurang nilai investasi pemerintah daerah, namun tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LO. Sedangkan dividen dalam bentuk saham (*stock dividend*) yang diterima tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan di LRA dan LO, serta pencatatan nilai investasi.

Hasil pengelolaan investasi non permanen jangka panjang dalam bentuk dana bergulir berupa bunga, bagi hasil dan bentuk lainnya, diakui sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan LO. Jika hasil pengelolaan investasi non permanen dana bergulir tersebut digulirkan kembali ke masyarakat, maka pendapatan tersebut juga diakui sebagai penambah nilai investasi dan mempengaruhi pencatatan pengeluaran pembiayaan dalam LRA.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

3. ASET TETAP

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan tanah dilakukan bila tanah telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Suatu tanah dieliminasi dari neraca ketika dilepas atau dijual.

Tanah yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya. Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Tanah yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penilaian kembali atau revaluasi tanah dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan pos tanah sebagai berikut. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; Nilai tercatat tanah.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan bila peralatan dan mesin telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan atau mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan atau mesin yang bersangkutan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai

peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan mesin dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan/dihapuskan atau bila peralatan dan mesin secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Peralatan dan mesin yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tetapi masih ada manfaat ekonomik masa yang akan datang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa peralatan dan mesin tersebut ke kondisi yang membuat peralatan dan mesin tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya peralatan dan mesin sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan peralatan dan mesin atau membawa peralatan dan mesin ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan dan mesin yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka peralatan dan mesin akan disajikan dengan penyesuaian pada akun peralatan dan mesin dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap. Laporan keuangan mengungkapkan penambahan, pelepasan/penghapusan, perubahan nilai (jika ada) dan mutasi peralatan dan mesin lainnya.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan gedung dan bangunan dilakukan bila gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu gedung dan bangunan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka gedung dan bangunan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun gedung dan bangunan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap. Penilaian kembali atau revaluasi gedung dan bangunan dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Gedung dan bangunan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila gedung dan bangunan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Gedung dan bangunan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan mengungkapkan gedung dan bangunan sebagai berikut.

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); dan
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan jalan, irigasi dan jaringan dilakukan bila jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya

ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian jalan, irigasi dan jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai jalan, irigasi dan jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka jalan, irigasi dan jaringan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun jalan, irigasi dan jaringan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Jalan, irigasi dan jaringan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila jalan, irigasi dan jaringan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Jalan, irigasi dan jaringan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jalan, irigasi dan jaringan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan mengungkapkan jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut.

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); dan
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; Mutasi jalan, irigasi dan jaringan lainnya.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan aset tetap lainnya dilakukan bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap lainnya yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Aset tetap lainnya yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan mengungkapkan aset tetap lainnya.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan bagian dari aset tetap yang mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan aset dapat

dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan bila suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

g. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan adalah total biaya penyusutan yang berjalan untuk aset yang dicatat di neraca. Nilai asli aset disesuaikan selama setiap tahun fiskal untuk mencerminkan nilai saat ini yang disusutkan.

4. DANA CADANGAN

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

5. ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut umur dan klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur.

b. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan perbendaharaan diakui sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan. Tuntutan ganti rugi diakui sejak diterbitkannya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM). Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

c. Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisis terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*. Berhubung kolektibilitas piutang harus dipertimbangkan sebagai suatu *loss contingency*, maka metode penyisihan merupakan suatu hal yang memungkinkan untuk menjaga aset dari kemungkinan kerugian yang dapat diperhitungkan secara rasional.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran

kemungkinan tidak tertagih pada saat pelaporan keuangan. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca. Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan. Pemilihan dasar penyisihan ini hendaknya didasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, maupun kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menetapkan dan menagih piutang. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang.

Penghapusan piutang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan disajikan di neraca, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyisihan piutang hendaknya dibuat aturannya terlebih dahulu. Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih. Untuk kelengkapan informasi, jumlah piutang asal (nominal).

d. Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas :

- 1) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
- 2) Hak Paten atau Hak Cipta Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
- 3) Royalti Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
- 4) *Software* komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.
- 5) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- 6) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau

sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

- 7) Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- 8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika: Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

e. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan dan amortisasi menjadi pengurang aset tetap/aset tidak berwujud dalam neraca dimana harga perolehan aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan amortisasinya menjadi nilai buku (*book value*) aset tetap/aset tidak berwujudnya tersebut.

f. Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Aset Lain-lain dicatat berdasarkan nilai tercatatnya (*carrying amount*).

g. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi penyusutan adalah kumpulan beban penyusutan secara periodik. Keduanya pun berbeda di dalam pencatatan keuangan, yang mana beban penyusutan harus dicatat dalam laporan operasional, dan akumulasi penyusutan harus dicatat pada neraca. Besarnya akumulasi penyusutan di tahun pertama penggunaan aktiva tetap akan sama dengan besaran beban penyusutan selama satu tahun pertama pemakaian aktiva tetap tersebut. Lalu, pada tahun kedua penggunaan, besarnya akumulasi penyusutan adalah hasil dari penjumlahan beban penyusutan di tahun pertama dan kedua aktiva tetap. Pun sama halnya dengan tahun ketiga dan seterusnya lagi. Dalam laporan keuangan, sifat dari akumulasi penyusutan adalah mengurangi nilai pada aktiva tetap.

6. Utang/Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat

kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban yang tidak diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

7. Ekuitas Dana

Tujuan Kebijakan akuntansi kewajiban mengatur perlakuan akuntansi kewajiban. Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup: definisi, pengakuan dan pengungkapan kewajiban. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

8. Pendapatan-LO

Definisi Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*);
- b. Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari Transaksi Non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima Pemerintah Daerah tanpa kewajiban Pemerintah Daerah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam;
- c. Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan- LO untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

a. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

1) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

2) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

b. Pendapatan Transfer

Merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer diakui berdasarkan penetapan dalam dokumen resmi yang menginformasikan dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Pendapatan hibah diakui saat Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani.

d. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi enam, yaitu:

- 1) Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- 2) Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- 3) Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayarannya telah diterima.
- 4) Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- 5) Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.
- 6) Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya dilakukan bersamaan atau setelah Surat Ketetapan Retribusi terbit. Pendapatan retribusi ini diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

Pengukuran Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- 2) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

9. Beban

Pengertian

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau

timbulnya kewajiban.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengakuan Beban pada PPKD

1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah karena adanya perikatan/naskah perjanjian. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan uang, barang, atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah ditandatanganinya naskah perjanjian hibah.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

6) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Pengakuan Beban Pada SKPD

1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

2) Beban Barang

Beban Barang dicatat untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS. Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah disahkan oleh pengguna anggaran. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui saat Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Khusus untuk beban persediaan, pengakuan beban dapat menggunakan pendekatan aset atau pendekatan beban. Pendekatan aset, pengakuan beban persediaan dilakukan pada akhir tahun, sedangkan pendekatan beban, pengakuan beban persediaan dilakukan pada saat transaksi perolehan persediaan.

Pengukuran Beban

- a. Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- b. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

10. Koreksi Kesalahan

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya, sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang dan sistemik, dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 2) Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan ada beberapa macam.

Berikut beberapa macam koreksi kesalahan pada Pemerintah Daerah:

- 1) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak, dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- 2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- 3) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- 4) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- 5) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.
- 6) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi

kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

- 7) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- 8) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- 9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- 10) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

7.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran tertentu, LRA mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
7.4.1	PENDAPATAN DAERAH	1.740.301.847.350,33	1.723.722.235.976,12

Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.740.301.847.350,33 dan untuk realisasinya sebesar Rp1.723.722.235.976,12 atau mencapai 99,05%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 (Audited) sebesar Rp1.566.982.253.918,63 maka pada TA 2023 realisasi Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp156.739.982.057,49 atau 10,00%. Pendapatan Daerah TA 2023 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

Uraian		TA 2023		%	TA 2022	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84.625.985.965,70	73.407.843.892,73	86,74	70.668.853.866,21	2.738.992.626,52
a	Pajak Daerah	30.949.919.267,00	18.192.870.236,32	58,78	16.455.782.266,53	1.737.087.969,79
b	Retribusi Daerah	6.177.650.000,00	5.992.780.864,00	97,01	4.995.795.080,83	996.985.783,17
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.371.160.680,00	17.469.034.435,62	100,56	13.926.125.609,76	3.542.908.825,86
D	Lain-lain PAD yang Sah	30.127.256.018,70	31.753.158.356,79	105,4	35.291.150.909,09	(3.537.992.552,30)



Uraian	TA 2023		%	TA 2022	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
2 PENDAPATAN TRANSFER	1.644.923.583.384,63	1.640.262.373.303,62	99,72	1.439.460.492.812,23	200.801.880.491,39
a Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.516.932.902.946,00	1.519.215.578.697,00	100,15	1.375.285.294.638,00	143.930.284.059,00
b Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.990.680.438,63	121.046.794.606,62	94,57	64.176.198.174,23	56.870.596.432,39
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.752.278.000,00	10.052.018.779,77	93,49	56.852.907.240,19	(46.800.888.460,42)
a Pendapatan Hibah	0,00	490.788.549,77	100,00	845.878.194,71	(355.089.644,94)
b Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.752.278.000,00	9.561.230.230,00	88,92	56.007.029.045,48	(46.445.798.815,48)
Total	1.740.301.847.350,33	1.723.722.235.976,12	99,05	1.566.982.253.918,63	156.739.984.657,49

Sumber: LRA Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa secara umum Pendapatan Daerah kurang dari target sebesar (Rp16.579.611.374,21) atau (0,95%) dengan rincian yaitu Pendapatan Asli Daerah kurang dari target anggaran sebesar (Rp11.218.142.072,97) atau (13,26%) dan Pendapatan Transfer kurang dari target anggaran sebesar (Rp4.661.210.081,01) atau (0,28%), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah kurang dari target anggaran sebesar (Rp700.259.220,23) atau (6,51%).

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah tersebut di atas menggambarkan bahwa kontribusi pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah terhadap seluruh total dari realisasi Pendapatan Daerah adalah 4,26%, kontribusi dari Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu masih sangat tinggi dan mendominasi yaitu mencapai 95,16% sedangkan untuk kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih sangat rendah yaitu sebesar 0,58%. Target anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah disajikan berdasarkan kelompok, jenis dan objek pendapatan dengan uraian sebagai berikut.

7.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	84.625.985.965,70	73.407.843.892,73

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 ditargetkan sebesar Rp84.625.985.965,70 dan untuk pencapaian realisasinya sebesar Rp73.407.843.892,73 atau 86,74%. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2022 (*Audited*) sebesar Rp70.668.853.866,21 maka di TA 2023 realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar Rp2.738.990.026,52 atau 3,88%.

Tabel 14. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

Uraian	TA 2023		%	TA 2022	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1 Pajak Daerah	30.949.919.267,00	18.192.870.236,32	58,78	16.455.782.266,53	1.737.087.969,79
2 Retribusi Daerah	6.177.650.000,00	5.992.780.864,00	97,01	4.995.795.080,83	996.985.783,17
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.371.160.680,00	17.469.034.435,62	100,56	13.926.125.609,76	3.542.908.825,86
4 Lain-lain PAD yang Sah	30.127.256.018,70	31.753.158.356,79	105,40	35.291.150.909,09	(3.537.992.552,30)
Total	84.625.985.965,70	73.407.843.892,73	86,74	70.668.853.866,21	2.738.990.026,52

Sumber: LRA Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023



7.4.1.1.1 Pajak Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	30.949.919.267,00	18.192.870.236,32

Mekanisme dan payung hukum untuk pemungutan Pajak Daerah diatur berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
3. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2011 tentang Prosedur Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2011 tentang Prosedur Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 31 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 171 Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai Pasar Mineral Batuan di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Pajak Reklame;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Prosedur Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Kapuas Hulu;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kapuas Hulu;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu;
17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir;
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pajak BPHTB;
19. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 123 tahun 2019 tentang Penetapan Nilai Minimal Ketetapan PBB P2 di Kabupaten Kapuas Hulu; dan
20. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 7 tahun 2019 tentang Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP); Pajak Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Secara keseluruhan Pajak Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp30.949.919.267,00 dengan



realisasi Rp18.192.870.236,32 atau 58,78%. Jika dibandingkan dengan realisasi untuk Pajak Daerah TA 2022 (*Audited*) sebesar Rp16.455.782.266,53 maka realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.737.087.969,79 atau 10,56%. Untuk realisasi serta kenaikan atau penurunan dari masing-masing objek Pajak Daerah TA 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

Uraian	TA 2023		%	TA 2022	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
Pajak Hotel	525.000.000,00	644.846.745,80	122,83	618.915.125,90	25.931.619,90
Pajak Restoran	1.200.000.000,00	1.941.821.911,40	161,82	1.319.618.462,62	622.203.448,78
Pajak Hiburan	39.500.000,00	53.781.803,25	136,16	48.124.209,65	5.657.593,60
Pajak Reklame	450.000.000,00	471.534.402,80	104,79	408.872.851,88	62.661.550,92
Pajak Penerangan Jalan	10.657.000.000,00	11.186.253.572,25	104,97	10.296.763.693,60	889.489.878,65
Pajak Parkir	30.000.000,00	45.514.899,80	151,72	21.580.000,00	23.934.899,80
Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	33.505.000,00	67,01	43.386.200,00	(9.881.200,00)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.200.000.000,00	929.305.967,02	77,44	579.903.509,78	349.402.457,24
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.600.000.000,00	1.478.149.527,00	92,38	1.484.723.544,00	(6.574.017,00)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.198.419.267,00	1.408.156.407,00	9,27	1.633.894.669,10	(225.738.262,10)
Total	30.949.919.267,00	18.192.870.236,32	58,78	16.455.782.266,53	1.737.087.969,79

Sumber : LRA Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023

Berdasarkan rincian Pajak Daerah di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pajak Hotel TA 2023 memiliki anggaran sebesar Rp525.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp644.846.745,80 atau 122,83%; sehingga menyebabkan adanya pelampauan target realisasi Pajak Hotel TA 2023 sebesar Rp119.846.745,80 atau 22,83% Jika dibandingkan dengan realisasi untuk Pajak Hotel TA 2022 (*Audited*) sebesar Rp618.915.125,90 maka realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp25.931.619,90 atau 4,19% dengan jumlah realisasi di TA 2022 sebagai *standing point*
2. Pajak Restoran TA 2023 memiliki anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.941.821.911,40 atau 161,82%; sehingga menyebabkan adanya pelampauan target realisasi Pajak Restoran TA 2023 sebesar Rp741.821.911,40 atau 61,82% Jika dibandingkan dengan realisasi untuk Pajak Restoran TA 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.319.618.462,62 maka realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp622.203.448,78 atau 47,15% dengan jumlah realisasi di TA 2022 sebagai *standing point*
3. Pajak Hiburan TA 2023 memiliki anggaran sebesar Rp39.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp53.781.803,25 atau 136,16%; sehingga menyebabkan adanya pelampauan target realisasi Pajak Hiburan TA 2023 sebesar Rp14.281.803,25 atau 36,16% Jika dibandingkan dengan realisasi untuk Pajak Hiburan TA 2022 (*Audited*) sebesar Rp48.124.209,65 maka realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp5.657.593,60 atau 11,76% dengan jumlah realisasi di TA 2022 sebagai *standing point*
4. Pajak Reklame TA 2023 memiliki anggaran sebesar Rp450.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp471.534.402,80 atau 104,79%; sehingga menyebabkan adanya pelampauan target realisasi Pajak Reklame TA 2023 sebesar Rp21.534.402,80 atau 4,79% Jika dibandingkan dengan realisasi untuk Pajak Reklame TA 2022 (*Audited*) sebesar Rp408.872.851,88 maka realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp62.661.550,92 atau 15,33% dengan jumlah realisasi di TA 2022 sebagai *standing point*



5. Pajak Penerangan Jalan TA 2023 memiliki anggaran sebesar Rp10.657.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.186.253.572,25 atau 104,97%; sehingga menyebabkan adanya pelampauan target realisasi Pajak Penerangan Jalan TA 2023 sebesar Rp529.253.572,25 atau 4,97% Jika dibandingkan dengan realisasi untuk Pajak Penerangan Jalan TA 2022 (*Audited*) sebesar Rp10.296.763.693,60 maka realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp889.489.878,65 atau 8,64% dengan jumlah realisasi di TA 2022 sebagai *standing point*
6. Pajak Parkir TA 2023 memiliki anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp45.514.899,80 atau 151,72%; sehingga menyebabkan adanya pelampauan target realisasi Pajak Parkir TA 2023 sebesar Rp15.514.899,80 atau 51,72% Jika dibandingkan dengan realisasi untuk Pajak Parkir TA 2022 (*Audited*) sebesar Rp21.580.000,00 maka realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp23.934.899,80 atau 110,91% dengan jumlah realisasi di TA 2022 sebagai *standing point*
7. Pajak Sarang Burung Walet TA 2023 memiliki anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp33.505.000,00 atau 67,01%; sehingga terdapat tidak tercapainya target realisasi Pajak Sarang Burung Walet TA 2023 sebesar Rp16.495.000,00 atau 32,99%. Jika dibandingkan dengan realisasi untuk Pajak Sarang Burung Walet TA 2022 (*Audited*) sebesar Rp43.386.200,00 maka realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.881.200,00 atau (22,77%) dengan jumlah realisasi di TA 2022 sebagai *standing point*
8. Pajak Mineral Bukan Logam Batuan TA 2023 memiliki anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp929.305.967,02 atau 77,44%; sehingga terdapat tidak tercapainya target realisasi Pajak Mineral Bukan Logam Batuan TA 2023 sebesar Rp270.694.032,98 atau 22,56%. Jika dibandingkan dengan realisasi untuk Pajak Mineral Bukan Logam Batuan TA 2022 (*Audited*) sebesar Rp579.903.509,78 maka realisasi pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp349.402.457,24 atau 60,25% dengan jumlah realisasi di TA 2022 sebagai *standing point*
9. PBB-P2 TA 2023 memiliki anggaran sebesar Rp1.600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.478.149.527,00 atau 92,38%; sehingga terdapat tidak tercapainya target realisasi PBB-P2 TA 2023 sebesar Rp121.850.473,00 atau 7,62%. Jika dibandingkan dengan realisasi untuk PBB-P2 TA 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.484.723.544,00 maka realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6.574.017,00 atau (0,44%) dengan jumlah realisasi di TA 2022 sebagai *standing point*
10. BPHTB TA 2023 memiliki anggaran sebesar Rp 15.198.419.267,00 dengan realisasi sebesar Rp1.408.156.407,00 atau 9,27%; sehingga terdapat tidak tercapainya target realisasi BPHTB TA 2023 sebesar Rp13.790.262.860,00 atau 90,73%. Jika dibandingkan dengan realisasi untuk BPHTB TA 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.633.894.669,10 maka realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp225.738.262,10 atau (13,82%) dengan jumlah realisasi di TA 2022 sebagai *standing point*

7.4.1.1.2 Retribusi Daerah	Anggaran 2023 (Rp) 6.177.650.000,00	Realisasi 2023 (Rp) 5.992.783.464,00
----------------------------	--	---

Retribusi Daerah dihitung dan dipungut berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Retribusi Terminal;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr. Achmad Diponegoro;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;



4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelelangan Ikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Izin Mendirikan Bangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Trayek;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Retribusi Penyeberangan di Air;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelelangan Ikan.
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;
17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
18. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan PT PLN (Persero) Nomor 973/DPKAD/PDP-A/2012 dan Nomor 318/040/SGU/2012 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Kabupaten;
19. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 619 Tahun 2018 Tentang Penetapan Tarif Sewa Kamar dan Kantin Pada Mess Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 437 Pontianak; dan
20. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 529/UPT-BI/2021 Tentang Penetapan Harga Benih Ikan dan Persentase Penggunaan Hasil Penjualan Benih Ikan Konsumsi dan Ikan Arwana pada UPT-Benih Ikan (BI) Kelansin.

Anggaran pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2023 sebesar Rp6.177.650.000,00 dengan jumlah realisasi sebesar Rp5.992.780.864,00 atau 97,01% dari anggarannya, sehingga secara total Retribusi Daerah pada TA 2023 tidak mencapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp184.869.136,00) atau (2,99%) Jika dilakukan perbandingan dengan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.995.795.080,83 maka Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp996.985.783,17 atau 16,64% dengan jumlah realisasi di TA 2022 sebagai *standing point*.



Adapun realisasi dari seluruh objek Retribusi Daerah di TA 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

Uraian		Tahun 2023		%	Tahun 2022	Naik/Turun
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	(Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	4.880.650.000,00	5.260.327.364,00	107,78	4.122.804.009,00	1.137.525.955,00
a	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.423.650.000,00	4.701.955.164,00	106,29	3.545.206.209,00	1.156.751.555,00
b	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	69.100.000,00	900.000,00
c	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	27.500.000,00	40.544.000,00	147,43	48.651.000,00	(8.107.000,00)
d	Retribusi Pelayanan Pasar	309.500.000,00	380.639.200,00	122,99	382.078.800,00	(1.439.600,00)
e	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	13.049.000,00	86,99	21.125.000,00	(8.076.000,00)
f	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	35.000.000,00	54.140.000,00	154,69	56.643.000,00	(2.503.000,00)
2	Retribusi Jasa Usaha	1.169.000.000,00	652.564.000,00	55,82	870.373.071,83	(217.809.071,83)
a	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	350.000.000,00	72.145.000,00	20,61	231.014.171,83	(158.869.171,83)
b	Retribusi Tempat Pelelangan	55.000.000,00	57.500.000,00	104,55	78.197.900,00	(20.697.900,00)
c	Retribusi Terminal	7.000.000,00	6.705.000,00	95,79	7.500.000,00	(795.000,00)
d	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	485.500.000,00	208.920.000,00	43,03	260.460.000,00	(51.540.000,00)
e	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	31.500.000,00	36.124.000,00	114,68	32.900.000,00	3.224.000,00
f	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	64.250.000,00	100,00	16.960.000,00	47.290.000,00
g	Retribusi Penyeberangan di Air	40.000.000,00	5.750.000,00	14,38	42.500.000,00	(36.750.000,00)
h	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	200.000.000,00	201.170.000,00	100,59	200.841.000,00	329.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	128.000.000,00	79.889.500,00	62,41	2.618.000,00	77.271.500,00
a	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
b	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.000.000,00	1.400.000,00	46,67	2.616.000,00	(1.216.000,00)
c	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	125.000.000,00	78.489.500,00	62,79	0,00	78.489.500,00
Total		6.177.650.000,00	5.992.780.864,00	97,01	4.995.795.080,83	996.988.383,17

Sumber: LRA Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023

Berdasarkan rincian Retribusi Daerah tersebut di atas menunjukkan bahwa beberapa objek Retribusi Daerah sudah melampaui target penerimaan masing-masing objek Retribusi Daerah. Untuk penjelasannya dapat dilihat dengan uraian sebagai berikut.

1	Retribusi Jasa Umum	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		4.880.650.000,00	5.260.327.364,00

Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp4.880.650.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.260.327.364,00 atau 107,78%. sedangkan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 adanya pelampauan target dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp379.677.364,00 atau 9,21% Jika dibandingkan dengan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp4.122.804.009,00 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.137.523.355,00 atau 27,59%. dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebagai *standing point*.

Adapun realisasi dari Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Umum di Tahun Anggaran 2023

dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 17. Rincian Retribusi Jasa Umum Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.423.650.000,00	4.701.955.164,00	106,29	3.545.206.209,00	1.156.748.955,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	69.100.000,00	900.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	27.500.000,00	40.544.000,00	147,43	48.651.000,00	(8.107.000,00)
Retribusi Pelayanan Pasar	309.500.000,00	380.639.200,00	122,99	382.078.800,00	(1.439.600,00)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	13.049.000,00	86,99	21.125.000,00	(8.076.000,00)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	35.000.000,00	54.140.000,00	154,69	56.643.000,00	(2.503.000,00)
Total	4.880.650.000,00	5.260.327.364,00	107,78	4.122.804.009,00	1.137.523.355,00

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas TA 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp4.423.650.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp4.701.955.164,00 atau 106,29% terdapat pelampauan target dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp278.305.164,00 atau 6,29%. Jika dibandingkan dengan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas TA 2022 (*Audited*) sebesar Rp3.545.206.209,00 maka realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.156.748.955,00 atau 32,63%. dengan jumlah realisasi di TA 2022 sebagai *standing point*
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp70.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp70.000.000,00 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan TA 2022 (*Audited*) sebesar Rp69.100.000,00 maka realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp900.000,00 atau 1,30%. dengan jumlah realisasi di TA 2022 sebagai *standing point*
3. Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp27.500.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp40.544.000,00 atau 147,43 terdapat pelampauan target dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp13.044.000,00 atau 47,43%. Jika dibandingkan dengan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2022 (*Audited*) sebesar Rp48.651.000,00 maka realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp8.107.000,00) atau (16,66%). dengan jumlah realisasi di TA 2022 sebagai *standing point*
4. Retribusi Pelayanan Pasar TA 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp309.500.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir TA 2023 sebesar Rp380.639.200,00 atau 122,29%. terdapat pelampauan target dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp71.139.200,00 atau 22,99%. Jika dibandingkan dengan Retribusi Los Pelayanan Pasar 2022 (*Audited*) sebesar Rp382.078.800,00 maka realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp1.439.600,00) atau (0,38%) dengan jumlah realisasi di TA 2022 sebagai *standing point*
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp15.000.000,00 dengan realisasi sampai akhir TA 2023 sebesar Rp13.049.000,00 atau 86,99%. sedangkan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2023 tidak mencapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp1.951.000,00) atau (13,01%) Jika dibandingkan dengan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2022 (*Audited*) sebesar Rp21.125.000,00 maka realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp8.076.000,00) atau (38,23%) dengan jumlah realisasi di TA 2022 sebagai *standing point*



6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang TA 2023 ditargetkan sebesar Rp35.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir TA 2023 tercatat sebesar Rp54.140.000,00 atau 154,69%, pelampauan target dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp19.140.000,00 atau 54,69%. Dibandingkan dengan Realisasi Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya TA 2022 (Audited) sebesar Rp56.643.000,00 Realisasi Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp2.503.000,00) atau (4,42%). dengan jumlah realisasi di TA 2022 sebagai standing point.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
2 Retribusi Jasa Usaha	1.169.000.000,00	652.564.000,00

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp1.169.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp652.564.000,00 atau 55,82%. sedangkan realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2023 tidak mencapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp516.436.000,00) atau (44,18%) Jika dibandingkan dengan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2022 (Audited) sebesar Rp870.373.071,83 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp217.809.071,83) atau (25,02%). dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebagai standing point

Adapun realisasi dari Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Usaha di Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	350.000.000,00	72.145.000,00	20,61	231.014.171,83	(158.869.171,83)
Retribusi Tempat Pelelangan	55.000.000,00	57.500.000,00	104,55	78.197.900,00	(20.697.900,00)
Retribusi Terminal	7.000.000,00	6.705.000,00	95,79	7.500.000,00	(795.000,00)
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/Vila	485.500.000,00	208.920.000,00	43,03	260.460.000,00	(51.540.000,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	31.500.000,00	36.124.000,00	114,68	32.900.000,00	3.224.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	64.250.000,00	100,00	16.960.000,00	47.290.000,00
Retribusi Penyeberangan di Air	40.000.000,00	5.750.000,00	14,38	42.500.000,00	(36.750.000,00)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	200.000.000,00	201.170.000,00	100,59	200.841.000,00	329.000,00
Total	1.169.000.000,00	652.564.000,00	55,82	870.373.071,83	(217.809.071,83)

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
3 Retribusi Perizinan Tertentu	128.000.000,00	79.889.500,00

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp128.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp79.889.500,00 atau 62,41%. sedangkan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 tidak mencapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp48.110.500,00) atau (37,59%) Jika dibandingkan dengan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2022 (Audited) sebesar Rp2.618.000,00 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp77.271.500,00 atau 2.951,55%. dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebagai standing point



Adapun realisasi dari Retribusi Daerah pada Retribusi Perizinan Tertentu di Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 19. Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.000.000,00	1.400.000,00	46,67	2.616.000,00	(1.216.000,00)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	125.000.000,00	78.489.500,00	62,79	0,00	78.489.500,00
Total	128.000.000,00	79.889.500,00	62,41	2.618.000,00	77.271.500,00

1. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp3.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.400.000,00 atau 46,67%. sedangkan realisasi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Tahun Anggaran 2023 tidak mencapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp1.600.000,00) atau (53,33%) Jika dibandingkan dengan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp2.616.000,00 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp1.216.000,00) atau (46,48%). dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebagai *standing point*
2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp125.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp78.489.500,00 atau 62,79%. sedangkan realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2023 tidak mencapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp46.510.500,00) atau (37,21%) Jika dibandingkan dengan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp0,00 dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebagai *standing point*.

7.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	17.371.160.680,00	17.469.034.435,62

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp17.371.160.680,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp17.469.034.435,62 atau 100,56%. sedangkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 terjadi pelampauan target dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp97.873.755,62. Atau 0,56% Jika dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp13.926.125.609,76 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp3.542.908.825,86 atau 25,44%. dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebagai *standing point*.

**Tabel 20. Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022**

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	17.371.160.680,00	17.469.034.435,62	100,56	13.926.125.609,76	3.542.908.825,86
Total	17.371.160.680,00	17.469.034.435,62	100,56	13.926.125.609,76	3.542.908.825,86

7.4.1.1.4 Lain -Lain PAD yang Sah

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
---------------------------	----------------------------

30.474.928.888,44	35.291.150.909,09
--------------------------	--------------------------

Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp30.127.256.018,70 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp31.753.158.356,79 atau 105,40%. sedangkan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 terjadi pelampauan target dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.625.902.338,09. Atau 5,40% Jika dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp35.291.150.909,09 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp3.537.992.552,30) atau (10,03%). dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebagai *standing point*

Adapun realisasi dari Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 21. Rincian Lain-lain PAD yang Sah
Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022**

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	11.671.000,00	100,00	261.715.000,00	(250.044.000,00)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	148.956.659,67	100,00	97.439.646,27	51.517.013,40
Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.893.748.857,50	189,37	2.041.821.705,66	(148.072.848,16)
Pendapatan Bunga	373.972.602,70	373.972.602,70	100,00	2.328.287.671,12	(1.954.315.068,42)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	614.018.700,60	100,00	90.681.572,12	523.337.128,48
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	14.235.612,00	100,00	133.415.750,00	(119.180.138,00)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	113.074.500,00	(113.074.500,00)
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	492.553.260,32	100,00	997.254.913,92	(504.701.653,60)
Pendapatan BLUD	28.753.283.416,00	28.204.001.664,00	98,09	29.227.460.150,00	(1.023.458.486,00)
Total	30.127.256.018,70	31.753.158.356,79	105,40	35.291.150.909,09	(3.537.992.552,30)

- Hasil Penjualan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.671.000,00 atau 0,00%. sedangkan realisasi Hasil Penjualan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2023 adanya pelampauan target dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.671.000,00 Atau 100,00% Jika dibandingkan dengan Hasil Penjualan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp261.715.000,00 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp250.044.000,00) atau (95,54%). dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebagai *standing point*.



2. Hasil Sewa BMD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp148.956.659,67 atau 0,00%. sedangkan realisasi Hasil Sewa BMD Tahun Anggaran 2023 adanya pelampauan target dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp148.956.659,67 Atau 100,00% Jika dibandingkan dengan Retribusi Hasil Sewa BMD Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp97.439.646,27 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp51.517.013,40 atau 52,87%. dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebagai *standing point*.
3. Jasa Giro Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.893.748.857,50 atau 189,37%. sedangkan realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2023 adanya pelampauan target dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp893.748.857,50 Atau 89,37% Jika dibandingkan dengan Jasa Giro Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp2.041.821.705,66 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp148.072.848,16) atau (7,25%). dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebagai *standing point*.
4. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp373.972.602,70 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp373.972.602,70 atau 100,00%. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp2.328.287.671,12 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp1.954.315.068,42) atau (83,94%). dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebagai *standing point*
5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp614.018.700,60 atau 0,00%. sedangkan realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 Jika dibandingkan dengan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp90.681.572,12 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp523.337.128,48 atau 577,12%. dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebagai *standing point*.
6. Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.235.612,00 atau 100,00%. sedangkan realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 Jika dibandingkan dengan Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp133.415.750,00 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp119.180.138,00) atau (89,33%) dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebagai *standing point*.
7. Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp492.553.260,32 atau 100,00%. sedangkan realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2023 Jika dibandingkan dengan Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp997.254.913,92 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp504.701.653,60) atau (50,61%). dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebagai *standing point*.
8. Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp28.753.283.416,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar



Rp28.204.001.664,00 atau 98,09%. sedangkan realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023 yang tidak terealisasi sebesar (Rp549.281.752,00) atau (1,91%) dan Jika dibandingkan dengan Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2022 (Audited) sebesar Rp29.227.460.150,00 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp1.023.458.486,00) atau (3,50%). dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebagai *standing point*.

		Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
7.4.1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.644.923.583.384,63	1.640.262.373.303,62

Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp1.644.923.583.384,63 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 tercatat sebesar Rp1.640.262.373.303,62 atau 99,72% atau tidak mencapai target sebesar (Rp4.661.210.081,01) atau (0,72%) Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp1.439.460.492.812,23 Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 159.755.451.029,23 atau (10,79%). Adapun Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut :

**Tabel 22. Pendapatan Transfer
Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022**

	Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Naik/Turun (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.516.932.902.946,00	1.519.215.578.697,00	100,15	1.375.284.294.638,00	143.931.284.059,00
a	Dana Perimbangan	1.267.620.359.946,00	1.270.445.085.897,00	100,22	1.115.446.090.878,00	154.998.995.019,00
b	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	10.093.626.000,00	(10.093.626.000,00)
c	Dana Desa	249.312.543.000,00	248.770.492.800,00	99,78	249.744.577.760,00	(974.084.960,00)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	127.990.680.438,63	121.046.794.606,62	94,57	64.176.198.174,23	56.870.596.432,39
a	Pendapatan Bagi Hasil	75.535.680.438,63	69.707.044.651,62	92,28	60.410.525.024,23	9.296.519.627,39
b	Bantuan Keuangan	52.455.000.000,00	51.339.749.955,00	97,87	3.765.673.150,00	47.574.076.805,00
	Total	1.644.923.583.384,63	1.640.262.373.303,62	99,72	1.439.460.492.812,23	200.801.880.491,39

7.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		1.516.932.902.946,00	1.519.215.578.697,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp1.516.932.902.946,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.519.215.578.697,00 atau 100,15%. sedangkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 terdapat pelampauan target dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.282.675.751,00 Atau 0,15% Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022 (Audited) sebesar Rp1.423.636.325.842,00 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp143.931.284.059,00 atau 10,47%. dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2023 sebagai *standing point*.



**Tabel 23. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022**

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
Dana Perimbangan	1.267.620.359.946,00	1.270.445.085.897,00	100,22	1.115.446.090.878,00	154.998.995.019,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	10.093.626.000,00	(10.093.626.000,00)
Dana Desa	249.312.543.000,00	248.770.492.800,00	99,78	249.744.577.760,00	(974.084.960,00)
Total	1.516.932.902.946,00	1.519.215.578.697,00	100,15	1.375.284.294.638,00	143.931.284.059,00

7.4.1.2.1.1 Dana Perimbangan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	1.267.620.359.946,00	1.270.445.085.897,00

Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp1.267.620.359.946,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.270.445.085.897,00 atau 100,22%. sedangkan realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 terdapat pelampauan target dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.824.725.951,00 Atau 0,22% Jika dibandingkan dengan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.115.446.090.878,00 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp106.646.963.815,00 atau 13,90%. dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2023 sebagai *standing point*

Adapun realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 24. Rincian Dana Perimbangan
Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022**

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	89.923.736.946,00	95.409.899.317,00	106,10	62.875.626.821,00	32.534.272.496,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	924.278.715.000,00	924.278.715.000,00	100,00	892.260.063.000,00	32.018.652.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	88.301.465.000,00	87.192.364.246,00	98,74	75.748.773.102,00	11.443.591.144,0
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	165.116.443.000,00	163.564.107.334,00	99,06	84.561.627.955,00	30.650.448.175,00
Total	1.267.620.359.946,00	1.270.445.085.897,00	100,22	1.115.446.090.878,00	106.646.963.815,00

1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023(Rp)
	89.923.736.946,00	95.409.899.317,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp89.923.736.946,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp95.409.899.317,00 atau 106,10%. sedangkan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2023 terdapat pelampauan target dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.486.162.371,00 Atau 6,10% Jika dibandingkan dengan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp62.875.626.821,00 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp32.534.272.496,00 atau 51,74%. dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2023 sebagai *standing point*

Adapun realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 25. Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022**

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	12.255.290.912,00	16.642.935.576,00	135,80	23.514.438.322,00	(6.871.502.746,00)
DBH PPh Pasal 21	7.649.775.814,00	7.092.963.070,00	92,72	5.803.909.000,00	1.289.054.070,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	366.896.943,00	314.477.597,00	85,71	291.541.000,00	22.936.597,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	26.214.364,00	24.355.933,00	92,91	9.010.425,00	15.345.508,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	49.542.170.620,00	169.741.274,00	0,34	834.054.121,00	(664.312.847,00)
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	6.039.022.549,00	51.642.586.773,00	855,15	27.531.292.126,00	24.111.294.647,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	(4.483.648.117,00)	2.564.066.861,00	(57,19)	885.706.000,00	1.678.360.861,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	2.248.038.195,00	210.063.022,00	9,34	2.047.364.827,00	(1.837.301.805,00)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	15.223.400.000,00	15.223.400.000,00	100,00	0,00	15.223.400.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.056.575.666,00	1.525.309.211,00	144,36	1.958.311.000,00	(433.001.789,00)
Total	89.923.736.946,00	95.409.899.317,00	106,10	62.875.626.821,00	32.534.272.496,00

2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		924.278.715.000,00	924.278.715.000,00

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp924.278.715.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp924.278.715.000,00 atau 100,00%. dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebagai *standing point*

Adapun realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 26. Rincian Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022**

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
DAU	924.278.715.000,00	888.135.301.000,00	96,09	892.260.063.000,00	(4.124.762.000,00)
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	35.343.414.000,00	0,00	0,00	35.343.414.000,00
Total	924.278.715.000,00	924.278.715.000,00	100,00	892.260.063.000,00	32.018.652.000,00

3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		88.301.465.000,00	87.192.364.246,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp88.301.465.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp87.192.364.246,00 atau 98,74%. sedangkan realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp1.109.100.754,00) Atau (1,46%) Jika dibandingkan dengan



Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp75.748.773.102,00 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp11.443.591.144,00 atau 15,11%. dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebagai *standing point*

Adapun realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 27. Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022**

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	674.084.000,00	586.189.662,00	86,96	314.481.100,00	271.708.562,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.145.878.000,00	3.831.028.928,00	92,41	4.644.159.600,00	(813.130.672,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.740.894.000,00	3.717.561.344,00	99,38	2.335.628.150,00	1.381.933.194,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	10.130.744.055,00	(10.130.744.055,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	4.175.957.025,00	(4.175.957.025,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	2.669.233.255,00	(2.669.233.255,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.390.565.900,00	(1.390.565.900,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.160.460.000,00	1.120.785.000,00	96,58	261.555.000,00	859.230.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	360.343.000,00	(360.343.000,00)
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.109.352.146,00	(2.109.352.146,00)
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.049.512.547,00	(2.049.512.547,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	56.965.913.000,00	56.811.219.003,00	99,73	14.125.000.000,00	42.686.219.003,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	12.416.441.192,00	(12.416.441.192,00)
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	8.045.829.000,00	8.045.829.000,00	100,00	7.542.219.000,00	503.610.000,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.926.671.000,00	4.926.671.000,00	100,00	5.341.560.000,00	(414.889.000,00)
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.174.905.394,00	(1.174.905.394,00)
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.606.000.000,00	(1.606.000.000,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.101.115.738,00	(3.101.115.738,00)
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	339.931.000,00	301.966.550,00	88,83	0,00	301.966.550,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	2.881.006.000,00	2.569.236.388,00	89,18	0,00	2.569.236.388,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	1.505.426.000,00	1.481.951.400,00	98,44	0,00	1.481.951.400,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.915.373.000,00	3.799.925.971,00	97,05	0,00	3.799.925.971,00
Total	88.301.465.000,00	87.192.364.246,00	98,74	75.748.773.102,00	11.443.591.144,00



4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		165.116.443.000,00	163.564.107.334,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp165.116.443.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp163.564.107.334,00 atau 99,06%. sedangkan realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp1.552.335.666,00) Atau (0,95%) Jika dibandingkan dengan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp132.913.659.159,00 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp30.650.448.175,00 atau 23,06%. dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebagai *standing point*

Rincian Pendapatan DAK Non Fisik – BOS Reguler, Pendapatan DAK Non-Fisik – BOS Kinerja dan DAK Non Fisik – BOP PAUD dapat dilihat pada **Lampiran 1**. Adapun realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Naik/Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	(Rp)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	50.031.293.000,00	51.696.293.000,00	103,33	48.352.031.204,00	3.344.261.796,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.685.000.000,00	1.020.000.000,00	37,99	-	1.020.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	57.364.037.000,00	54.760.149.400,00	95,46	50.940.931.465,00	3.819.217.935,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.550.750.000,00	2.550.750.000,00	100,00	2.403.324.500,00	147.425.500,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.474.402.000,00	15.185.884.000,00	339,39	5.154.672.000,00	10.031.212.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.564.400.000,00	3.458.651.000,00	97,03	3.073.350.000,00	385.301.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	520.570.000,00	475.570.000,00	91,36	453.400.000,00	22.170.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	34.003.784.000,00	26.568.459.000,00	78,13	19.098.492.254,00	7.469.966.746,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	420.370.000,00	413.080.700,00	98,27	398.022.000,00	15.058.700,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	438.200.000,00	429.013.000,00	97,90	312.406.086,00	116.606.914,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	8.527.637.000,00	6.492.257.234,00	76,13	2.569.149.650,00	3.923.107.584,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	536.000.000,00	514.000.000,00	95,90	0,00	514.000.000,00
DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	157.880.000,00	(157.880.000,00)
Total	165.116.443.000,00	163.564.107.334,00	99,06	132.913.659.159,00	30.650.448.175,00

Sumber: LRA Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023

7.4.1.2.2	Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		249.312.543.000,00	248.770.492.800,00

Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya berupa Dana Desa Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp249.312.543.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp248.770.492.800,00 atau 99,78%. sedangkan realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp542.050.200,00) Atau (0,22%) Jika dibandingkan dengan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp249.744.577.760,00 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 terjadi penurunan sebesar (Rp974.084.960,00) atau (0,39%). dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebagai *standing point*.



	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
7.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.990.680.438,63	121.046.794.606,62

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp127.990.680.438,63 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp121.046.794.606,62 atau 94,57%. sedangkan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp6.943.885.832,01) Atau (5,74%) Jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp64.176.198.174,23 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp56.870.596.432,39 atau 88,62%. dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2022 sebagai *standing point*.

Tabel 29. Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
Pendapatan Bagi Hasil	75.535.680.438,63	69.707.044.651,62	92,28	60.410.525.024,23	9.296.519.627,39
Bantuan Keuangan	52.455.000.000,00	51.339.749.955,00	97,87	3.765.673.150,00	47.574.076.805,00
Total	127.990.680.438,63	121.046.794.606,62	94,57	64.176.198.174,23	56.870.596.432,39

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
7.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil	75.535.680.438,63	69.707.044.651,62

Pendapatan Bagi Hasil dengan anggaran yang ditargetkan sebesar Rp75.535.680.438,63 dan realisasi sebesar Rp69.707.044.651,62 atau 92,28% sedangkan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp5.828.635.787,01) atau (7,72%) Jika dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp60.410.525.024,23 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp9.296.519.627,39 atau 15,39%. dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2023 sebagai *standing point*.

Adapun realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.287.512.664,98	8.566.842.577,98	92,24	7.970.162.507,11	596.680.070,87
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.514.522.585,56	9.729.244.615,56	92,53	8.827.461.958,20	901.782.657,36
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	40.080.781.935,93	35.633.097.827,93	88,90	26.643.534.632,35	8.989.563.195,58
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	516.688.344,16	2.504.348.330,15	484,69	489.482.704,57	2.014.865.625,58
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	15.136.174.908,00	13.273.511.300,00	87,69	16.479.883.222,00	(3.206.371.922,00)
Total	75.535.680.438,63	69.707.044.651,62	92,28	60.410.525.024,23	9.296.519.627,39

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
7.4.1.2.3.2 Bantuan Keuangan	52.455.000.000,00	51.339.749.955,00

Bantuan Keuangan dengan anggaran yang ditargetkan sebesar Rp52.455.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp51.339.749.955,00 atau 97,87% sedangkan realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp1.115.250.045,00)



atau (2,13%) Jika dibandingkan dengan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 (Audited) sebesar Rp3.765.673.150,00 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp47.574.076.805,00 atau 1.263,36%. dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2023 sebagai standing point.

Adapun realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 31. Rincian Bantuan Keuangan Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	398.842.500,00	(398.842.500,00)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	52.455.000.000,00	51.339.749.955,00	97,87	3.366.830.650,00	47.972.919.305,00
Total	52.455.000.000,00	51.339.749.955,00	97,87	3.765.673.150,00	47.574.076.805,00

7.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	10.752.278.000,00	10.052.018.779,77

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam anggaran sebesar Rp10.752.278.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.052.018.779,77 atau 93,49%. sedangkan realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp700.259.220,23) atau (6,51%) Jika dibandingkan dengan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2022 (Audited) sebesar Rp56.852.907.240,19 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 terjadi penurunan sebesar (Rp46.800.888.460,42) atau 82,32%. dengan jumlah realisasi di Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Hibah dengan anggaran yang ditargetkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp490.788.549,77. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran yang ditargetkan sebesar Rp10.752.278.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.561.230.230,00 atau 88,92%.

Tabel 32. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Tahun 2023		%	Tahun 2022	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
Pendapatan Hibah	0,00	490.788.549,77	100,00	845.878.194,71	(355.089.644,94)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.752.278.000,00	9.561.230.230,00	88,92	56.007.029.045,48	(46.445.798.815,48)
Total	10.752.278.000,00	10.052.018.779,77	93,49	56.852.907.240,19	(46.800.888.460,42)

7.4.2 BELANJA DAERAH	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	1.766.688.951.566,00	1.711.410.699.681,15

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.766.688.951.566,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.711.423.599.681,15 atau 96,87%. sedangkan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp55.265.351.884,85) Atau (3,13%). Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Audited) sebesar Rp1.615.623.766.661,64 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp95.786.933.019,51 atau 5,93%. dengan jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :



Tabel 33. Rincian Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

Uraian	TA 2023		%	TA 2022	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1 Belanja Operasi	1.121.242.287.539,00	1.071.257.715.036,29	95,54	1.028.626.545.358,10	42.631.169.678,19
2 Belanja Modal	290.716.596.027,00	286.543.813.186,86	98,56	236.955.283.717,54	49.588.529.469,32
3 Belanja Tak Terduga	1.733.000.000,00	1.333.000.000,00	76,92	4.506.963.640,00	(3.173.963.640,00)
4 Belanja Transfer	352.997.068.000,00	352.276.171.458,00	99,80	345.534.973.946,00	6.741.197.512,00
Total	1.766.688.951.566,00	1.711.410.699.681,15	96,87	1.615.623.766.661,64	95.786.933.019,51

Sumber: LRA Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023

7.4.2.1 BELANJA OPERASI

Anggaran 2023 (Rp)
1.121.242.287.539,00

Realisasi 2023 (Rp)
1.071.257.715.036,29

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 1.121.242.287.539,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.071.257.715.036,29 atau 95,54%. sedangkan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp49.984.572.502,71) Atau (4,46%) Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.028.626.545.358,10 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp42.631.169.678,19 atau 4,14%. dengan jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Belanja Operasi Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

No.	Rincian Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	Belanja Pegawai	562.013.334.092,00	534.539.096.164,00	95,11	518.016.053.503,50	16.523.042.660,50
2	Belanja Barang dan Jasa	424.022.005.495,00	404.036.617.674,47	95,29	381.002.536.489,97	23.046.981.184,50
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	1.515.748.250,00	(1.515.748.250,00)
4	Belanja Hibah	134.097.755.952,00	131.783.651.197,82	98,27	121.091.269.614,63	10.692.381.583,19
5	Belanja Bantuan Sosial	1.109.192.000,00	898.350.000,00	80,99	7.000.937.500,00	(6.102.587.500,00)
	Jumlah	1.121.242.287.539,00	1.071.257.715.036,29	95,54	1.028.626.545.358,10	42.631.169.678,19

Sumber: LRA Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023

7.4.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran 2023 (Rp)
562.013.334.092,00

Realisasi 2023 (Rp)
534.539.096.164,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp562.013.334.092,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp534.539.096.164,00 atau 95,11%. sedangkan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp27.474.237.928,00) Atau (4,89%) Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp518.016.053.503,50 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp16.523.042.660,50 atau 3,19%. dengan jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

**Tabel 35. Rincian Belanja Pegawai Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022**

No.	Rincian Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Naik /Turun (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	351.890.840.495,00	332.082.290.728,00	94,37	322.767.677.017,50	9.314.613.710,50
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	105.549.985.492,00	102.698.557.192,00	97,30	98.977.904.991,00	3.720.652.201,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	85.789.658.380,00	81.091.587.337,00	94,52	77.606.109.368,00	3.485.477.969,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.537.824.555,00	17.499.823.536,00	99,78	17.499.823.536,00	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	277.332.150,00	233.237.371,00	84,10	230.938.591,00	2.298.780,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	712.480.000,00	712.440.000,00	99,99	712.440.000,00	0,00
7	Belanja Pegawai BLUD	255.213.020,00	221.160.000,00	86,66	221.160.000,00	0,00
	Jumlah	562.013.334.092,00	534.539.096.164,00	95,11	518.016.053.503,50	16.523.042.660,50

Sumber: LRA Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023

7.4.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
424.022.005.495,00	404.036.617.674,47

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp424.022.005.495,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp404.036.617.674,47 atau 95,29%. sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp19.985.387.820,53) Atau (4,71%) Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp381.002.536.489,97 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp23.034.081.184,50 atau 6,05%. dengan jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 36. Rincian Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

No.	Rincian Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	Belanja Barang	72.301.963.959,00	67.571.475.958,38	93,46	67.833.165.657,95	(261.689.699,57)
2	Belanja Jasa	142.597.047.612,00	138.170.831.799,91	96,90	122.252.453.700,73	15.918.378.099,18
3	Belanja Pemeliharaan	8.162.273.265,00	8.007.033.769,84	98,10	8.582.942.172,00	(575.908.402,16)
4	Belanja Perjalanan Dinas	98.638.727.692,00	91.683.563.659,01	92,95	86.588.736.313,41	5.094.827.345,60
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.416.256.068,00	23.720.102.882,00	93,33	27.746.085.691,00	(4.025.982.809,00)
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	44.988.533.288,00	44.785.433.835,67	99,55	38.920.691.561,88	5.864.742.273,79
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	31.917.203.611,00	30.098.175.769,66	94,30	29.078.461.393,00	1.019.714.376,66
	Jumlah	424.022.005.495,00	404.036.617.674,47	95,29	381.002.536.489,97	23.034.081.184,50

Sumber: LRA Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023



7.4.2.1.4 Belanja Hibah	Anggaran 2023	Realisasi 2023
	(Rp)	(Rp)
	134.097.755.952,00	131.783.651.197,82

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp134.097.755.952,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp131.783.651.197,82 atau 97,83%. sedangkan realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp2.314.104.754,18) Atau (1,73%) Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp121.091.269.614,63 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.692.381.583,19 atau 8,83%. dengan jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Belanja Hibah TA 2023 dianggarkan dan direalisasikan berpedoman pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 269/KESRA/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Nomor:98/Kesra/2023 Tentang Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga, Kelompok Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2023.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Belanja Hibah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

No.	Rincian Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.303.532.754,00	7.276.883.677,82	99,64	9.842.047.914,45	(2.565.164.236,63)
2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	21.715.256.000,00	21.715.256.000,00	100,00	0,00	21.715.256.000,00
3	Belanja Hibah kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	179.840.000,00	(179.840.000,00)
4	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.321.093.198,00	98.036.822.520,00	97,72	110.011.517.700,18	(11.974.695.180,18)
5	Belanja Hibah Dana BOS	3.700.010.000,00	3.696.825.000,00	99,91	0,00	3.696.825.000,00
6	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.057.864.000,00	1.057.864.000,00	100,00	1.057.864.000,00	0,00
	Jumlah	424.022.005.495,00	404.036.617.674,47	95,29	381.002.536.489,97	23.034.081.184,50

Sumber: LRA Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2023 memiliki anggaran sebesar Rp7.303.532.754,00 dan realisasi sebesar Rp7.276.883.677,82 atau tercapai 99,64%. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran Termin 45,48% - Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Putussibau Kelurahan Putussibau Kota Kec.Putussibau Utara sebesar Rp10.360.002.539,00.
2. Pembayaran Termin 100% - Perencanaan Pembangunan Gedung Pelayanan Polres Kab. KH Kel. Putussibau Kota Kec. Pts Utara sebesar Rp97.774.350,00.



3. Pembayaran Termin 45,35% - Pengawasan Teknis Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas hulu dan Rumah Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Kec. Putussibau Utara (Tahap II Lanjutan Tahun 2022) sebesar Rp44.952.281,00.
4. Pembayaran termin 5% dan 95% pembangunan rumah jabatan kepala kejaksaan negeri kapuas hulu kec.putussibau utara(tahap ii lanjutan tahun 2022) sebesar Rp199.200.000,00.
5. Pembayaran 5% Jaminan Pemeliharaan - Pengaspalan Halaman Kantor Pengadilan Negeri Putussibau Kel.Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara sebesar Rp5.989.850,00.
6. Pembayaran Termin 95% - Pengaspalan Halaman Kantor Pengadilan Negeri Putussibau Kel.Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara sebesar Rp113.807.150,00.
7. Pembayaran Termin 95% - Pembangunan Jalan Rabat Beton Jl Kom Yos Sudarso Komplek Perumahan Kejaksaan RT.003/RW.002 Kel. Pts Kota Kec. Pts Utara (Lanjutan 2022) sebesar Rp113.861.300,00.
8. Pembayaran 5% Jaminan Pemeliharaan - Pembangunan Jalan Rabat Beton Jl Kom Yos Sudarso Komplek Perumahan Kejaksaan RT.003/RW.002 Kel. Pts Kota Kec. Pts Utara (Lanjutan 2022) sebesar Rp5.992.700,00.
9. Pembayaran Retensi 5% Pembangunan Barak Siswa SPN Polda Kalbar di Kota singkawang (Tahap II) sebesar Rp117.249.628,00.
10. Pembayaran Termin 95% - Pembangunan Garasi Kepolisian Resor Kapuas Hulu Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara sebesar Rp189.905.000,00.
11. Pembayaran 5% Jaminan Pemeliharaan - Pembangunan Garasi Kepolisian Resor Kapuas Hulu Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara sebesar Rp9.995.000,00.
12. Pembayaran Termin 95% - Pembangunan Jalan Lingkungan SPN Polda Kalbar di Singkawang sebesar Rp1.419.772.596,33.
13. Termin 95 % pembangunan fasilitas umum (kolam) penunjang lingkungan spn polda kalbar di kota singkawang sebesar Rp189.857.500,00.
14. Pembayaran Termin 95% - Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Putussibau Kelurahan Putussibau Kota Kec.Putussibau Utara (Lanjutan Tahun 2022) sebesar Rp1.495.628.866,00.
15. Pembayaran Termin 95% - Pembangunan Gedung Pelayanan Polres Kapuas Hulu kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara sebesar Rp1.254.698.346,00.
16. Termin 5 % masa pemeliharaan pembangunan fasilitas umum (kolam) penunjang lingkungan spn polda kalbar di kota singkawang sebesar Rp9.992.500,00.
17. Pembayaran Termin 100% - Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan SPN Polda Kalbar di Kota Singkawang sebesar Rp66.075.000,00.
18. Pembayaran Termin 5% - Pembangunan Gedung Pelayanan Polres Kapuas Hulu kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara sebesar Rp59.183.884,00.
19. Pembayaran 5% Jaminan Pemeliharaan - Pembangunan Jalan Lingkungan SPN Polda Kalbar di Singkawangsebesar Rp74.724.873,49.
20. Pembayaran Termin 5% - Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Putussibau Kelurahan Putussibau Kota Kec.Putussibau Utara (Lanjutan Tahun 2022) sebesar Rp134.699.595,00.
21. Pembayaran Termin 100% - Pengawasan Teknis Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas hulu dan Rumah Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Kec. Putussibau Utara (Tahap II Lanjutan Tahun 2022) sebesar Rp54.170.719,00.



22. Pembayaran Termin 100% - Pengawasan Pembangunan Fasilitas Umum (Kolam) Penunjang Lingkungan SPN Polda Kalbar di Kota Singkawang sebesar Rp29.900.000,00.
23. Pembayaran Termin 100% - Pengawasan Pembangunan gedung Pelayanan Polres Kapuas hulu kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara sebesar Rp79.600.000,00.
24. Pembayaran Termin 95% - Penataan Halaman Rumah Dinas Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara sebesar Rp142.357.500,00.
25. Pembayaran 5% Jaminan Pemeliharaan - Penataan Halaman Rumah Dinas Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara sebesar Rp7.492.500,00.

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya TA 2023 memiliki anggaran sebesar Rp21.715.256.000,00 dan realisasi sebesar Rp21.715.256.000,00 atau tercapai 100,00%. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut

1. Pengajuan dana hibah kepada komisi pemilihan umum (kpu) tahun 2023 sebesar Rp14.172.349.200,00.
2. Pengajuan dana hibah kepada banwaslu tahun 2023 sebesar Rp7.542.906.800,00.

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2023 memiliki anggaran sebesar Rp100.321.093.198,00 dan realisasi sebesar Rp98.036.822.520,00 atau tercapai 97,73%. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 38. Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023

No.	Uraian	Jumlah
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	47.458.288.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	234.805.250,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.678.225.000,00
4	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	32.070.295.170,00
5	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.405.759.100,00
6	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	189.450.000,00
Jumlah		98.036.822.520,00

Belanja Hibah Dana BOS

Belanja Hibah Dana BOS pada tahun 2023 memiliki anggaran sebesar Rp3.700.010.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.696.825.000,00 atau 83,63% terlihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 39. Rincian Belanja Hibah Uang Dana BOS Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023**

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS Diterima HIBAH SMP	1.057.325.000,00
2	Belanja Hibah Uang Dana BOS Diterima HIBAH SD	2.639.500.000,00
Total		3.696.825.000,00

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada tahun 2023 memiliki anggaran sebesar Rp1.057.864.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.057.864.000,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 40. Rincian Belanja Hibah Uang Dana BOS Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 2023	150.848.000,00
2	Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada Partai 2023	159.704.000,00
3	Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada Partai 2023	98.032.000,00
4	Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 2023	59.912.000,00
5	Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 2023	49.496.000,00
6	Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 2023	93.304.000,00
7	Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 2023	112.608.000,00
8	Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 2023	105.296.000,00
9	Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada Partai 2023	123.664.000,00
10	Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 2023	100.000.000,00
11	Pengajuan Kekurangan Pencairan Dana Bantuan Parpol 2023 Partai Kebangkitan Bangsa	5.000.000,00
Jumlah		1.057.864.000,00

7.4.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2023	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)
		1.109.192.000,00	898.350.000,00

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.109.192.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp898.350.000,00 atau 80,99%. sedangkan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp210.842.000,00) Atau (19,01%) Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp7.000.937.500,00 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp6.102.587.500,00) atau (87,17%). dengan jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dianggarkan serta dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 269/KESRA/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Nomor:98/Kesra/2023 Tentang Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga, Kelompok Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2023. Rincian Belanja Bantuan Sosial dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 41. Rincian Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022**

No.	Rincian Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	200.000.000,00	0,00	0,00	1.445.200.000,00	(1.445.200.000,00)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	559.192.000,00	548.350.000,00	98,06	1.557.300.000,00	(1.008.950.000,00)
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	3.998.437.500,00	(3.648.437.500,00)
	Jumlah	1.109.192.000,00	898.350.000,00	80,99	7.000.937.500,00	(6.102.587.500,00)

Sumber: LRA Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023

7.4.2.2	Belanja Modal	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		290.716.596.027,00	286.543.813.186,86

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp290.716.596.027,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp286.543.813.186,86 atau 98,56%. sedangkan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp4.172.782.840,14) Atau (1,46%) Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp236.955.283.717,54 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp49.588.529.469,32 atau 20,93%. Rincian realisasi di Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 42. Rincian Belanja Modal Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

Uraian	TA 2023		%	TA 2022	Naik/Turun (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	8.932.275,00	(8.932.275,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.149.127.380,00	25.419.577.448,00	97,21	31.320.262.383,01	(5.900.684.935,01)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.663.968.459,00	132.663.818.494,86	97,79	86.778.054.668,79	45.885.763.826,07
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.429.237.748,00	121.086.925.212,00	99,72	114.323.298.911,74	6.763.626.300,26
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.028.832.440,00	6.928.459.040,00	98,57	4.524.735.479,00	2.403.723.561,00
Belanja Modal Aset Lainnya	445.430.000,00	445.032.992,00	99,91	0,00	445.032.992,00
Total	290.716.596.027,00	286.543.813.186,86	98,56	236.955.283.717,54	49.588.529.469,32

Sumber: LRA Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023

7.4.2.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		26.149.127.380,00	25.419.577.448,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp26.149.127.380,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.419.577.448,00 atau 97,21%. sedangkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp729.549.932,00) Atau (2,79%) Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp31.320.262.383,01 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp5.900.684.935,01) atau (18,84%). dengan jumlah rincian realisasi di Tahun



Anggaran 2023 Untuk rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
7.4.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.663.968.459,00	132.663.818.494,86

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp135.663.968.459,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp132.663.818.494,86 atau 97,79%. sedangkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp3.000.149.964,14) Atau (2,21%) Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp86.778.054.668,79 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp45.885.763.826,07 atau 52,88%. dengan jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2023 Untuk rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
7.4.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	121.429.237.748,00	121.086.925.212,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp121.429.237.748,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp121.086.925.212,00 atau 99,72%. sedangkan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp342.312.536,00) Atau (0,28%) Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp114.323.298.911,74 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp6.763.626.300,26 atau 5,92%. dengan jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2023 Untuk rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
7.4.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.028.832.440,00	6.928.459.040,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp7.028.832.440,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.928.459.040,00 atau 93,59%. sedangkan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp100.373.400,00) Atau (1,45%) Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp4.524.735.479,00 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.403.723.561,00 atau 53,12%. dengan jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2023 Untuk rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
7.4.2.2.5 Belanja Modal Aset Lainnya	445.430.000,00	445.032.992,00

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp445.430.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp445.032.992,00 atau 99,91%. sedangkan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp397.008,00) Atau (0,09%) Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp0,00 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp445.032.992,00 atau 0,00%. dengan



jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2023 Untuk rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

7.4.2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		1.733.000.000,00	1.333.000.000,00

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.733.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.333.000.000,00 atau 76,92%. sedangkan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp400.000.000,00) Atau (23,08%) Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp4.506.963.640,00 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp3.173.963.640,00) atau (70,42%). dengan jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2023 Untuk rincian Belanja Tidak Terduga dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 43. Rincian Belanja Tidak Terduga Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023

Tanggal	Uraian	Nomor Bukti SP2D	Jumlah (Rp)
14 April 2023	Belanja Bantuan Sosial yang tidak Direncanakan	1345/LS/BKAD/IV/2023	291.000.000,00
9 Juni 2023	Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan	2428/LS/BKAD/VI/2023	20.000.000,00
11 Juli 2023	Belanja Bantuan Sosial yang tidak Direncanakan	3134/LS/BKAD/VII/2023	95.000.000,00
29 Agustus 2023	Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023 Sesuai SK no 137/BPBD/2023 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Darurat Kerusakan Rumah Penduduk Akibat Musibah Kebakaran, Bencana Belanja, Puting Beliung dan Tanah Longsor di Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023	4450/LS/BKAD/VIII/2023	251.000.000,00
5 September 2023	Belanja Bantuan Sosial yang tidak Direncanakan	4651/LS/BKAD/IX/2023	50.500.000,00
22 September 2023	Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023 Sesuai SK No 193/BPBD/2023 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahap Kedua Untuk Penanganan Darurat Jembatan Gantung Desa Belimbing Kecamatan Silat Hulu Akibat Bencana Banjir di Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023	5197/LS/BKAD/IX/2023	140.000.000,00
20 Oktober 2023	Belanja Bantuan Sosial yang tidak Direncanakan	6019/LS/BKAD/X/2023	39.000.000,00
13 Desember 2023	Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023 Sesuai SK No 465/BPBD/2023 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahap Keempat Untuk Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir Pada Jembatan Desa Nanga Kelibang Kecamatan Bunut Hulu di Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023	8152/LS/BKAD/XII/2023	170.000.000,00
22 Desember 2023	Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023 Sesuai SK no 444/BPBD/2023 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahap Ketiga Untuk Penanganan Darurat Kerusakan Rumah Penduduk Akibat Musibah Kebakaran, Bencana Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor di Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023	8445/LS/BKAD/XII/2023	172.000.000,00
27 Desember 2023	Belanja Bantuan Sosial yang tidak Direncanakan	9073/LS/BKAD/XII/2023	104.500.000,00
Jumlah			1.333.000.000,00



7.4.2.4	BELANJA TRANSFER	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		352.997.068.000,00	352.276.171.458,00

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp352.997.068.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp352.276.171.458,00 atau 99,80%. sedangkan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp720.896.542,00) Atau (0,20%) Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp345.534.973.946,00 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp6.741.197.512,00 atau 1,95 %. dengan jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2023 Untuk rincian Belanja Transfer berupa transfer bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa, serta transfer bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Rincian Belanja Transfer dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 44. Rincian Belanja Transfer Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

No.	Rincian Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
BELANJA TRANSFER		352.997.068.000,00	352.276.171.458,00	99,80	345.534.973.946,00	6.741.197.512,00
A	Belanja Bagi Hasil	3.735.259.000,00	3.735.259.000,00	100,00	2.427.770.000,00	1.307.489.000,00
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.069.994.000,00	3.069.994.000,00	100,00	1.750.006.000,00	1.319.988.000,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	665.265.000,00	665.265.000,00	100,00	677.764.000,00	(12.499.000,00)
B	Belanja Bantuan Keuangan	349.261.809.000,00	348.540.912.458,00	99,79	343.107.203.946,00	5.433.708.512,00
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	349.261.809.000,00	348.540.912.458,00	99,79	343.107.203.946,00	5.433.708.512,00

Sumber: LRA Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023

7.4.2.4.1	Belanja Bagi Hasil	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		3.735.259.000,00	3.735.259.000,00

Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.735.259.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.735.259.000,00 atau 100,00%. sedangkan realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp2.427.770.000,00 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.307.489.000,00 atau 53,86%. dengan jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2023 Untuk rincian Belanja Bagi Hasil. dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 45. Rincian Belanja Bagi Hasil Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

No.	Rincian Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.069.994.000,00	3.069.994.000,00	100,00	1.750.006.000,00	1.319.988.000,00



No.	Rincian Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	665.265.000,00	665.265.000,00	100,00	677.764.000,00	(12.499.000,00)
Jumlah		3.735.259.000,00	3.735.259.000,00	100,00	2.427.770.000,00	1.307.489.000,00

Sumber: LRA Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023

7.4.2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		349.261.809.000,00	348.540.912.458,00

Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp349.261.809.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp348.540.912.458,00 atau 99,79%. sedangkan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 tidak tercapai target dari anggaran yang ditetapkan sebesar (Rp720.896.542,00) Atau (0,21%) Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 (*Audited*) sebesar Rp343.107.203.946,00 maka realisasi pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.433.708.512,00 atau 1,58%. dengan jumlah rincian realisasi di Tahun Anggaran 2023 Untuk rincian Belanja Bantuan Keuangan. dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 46. Rincian Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

No.	Rincian Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	349.261.809.000,00	348.540.912.458,00	99,79	343.107.203.946,00	5.433.708.512,00
Jumlah		349.261.809.000,00	348.540.912.458,00	99,79	343.107.203.946,00	5.433.708.512,00

SURPLUS/ (DEFISIT)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	12.311.536.294,97	(48.641.512.743,01)

Surplus TA 2023 adalah sebesar Rp12.311.536.294,97 yang merupakan selisih lebih antara total pendapatan dengan total belanja, artinya bahwa jumlah total realisasi Pendapatan Daerah di TA 2023 lebih tinggi dari pada jumlah total realisasi Belanja ditambah dengan realisasi Belanja Transfer, sehingga menyebabkan di TA 2023 terjadinya Surplus Anggaran. Sedangkan di TA 2022 (*Audited*) terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp48.641.512.743,01 hal tersebut disebabkan oleh jumlah Pendapatan Daerah yang dihasilkan lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Belanja ditambah dengan Belanja Transfer, sehingga menyebabkan terjadinya Defisit Anggaran di TA 2022 (*Audited*).

7.4.3	PEMBIAYAAN DAERAH	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		15.675.622.215,56	13.675.622.215,56

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah (Netto) TA 2023 masing-masing sebesar Rp15.675.622.215,56 dan realisasi Rp13.675.622.215,56, sedangkan realisasi TA 2022 (*Audited*) adalah sebesar Rp74.317.134.958,57. Rincian Pembiayaan Daerah dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 47. Rincian Pembiayaan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.675.622.215,56	13.675.622.215,56	87,24	74.317.134.958,57	(60.641.512.743,01)
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	15.675.622.215,56	13.675.622.215,56	87,24	74.317.134.958,57	(60.641.512.743,01)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00	(12.000.000.000,00)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)
PEMBIAYAAN NETTO	15.675.622.215,56	13.675.622.215,56	87,24	62.317.134.958,57	(48.641.512.743,01)

Sumber: LRA Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
7.4.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.675.622.215,56	13.675.622.215,56

Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 yaitu Rp15.675.622.215,56 dan realisasi Rp13.675.622.215,56 merupakan Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya, sedangkan realisasi TA 2022 (*Audited*) adalah sebesar Rp74.317.134.958,57 dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
7.4.3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	13.675.622.215,56	13.675.622.215,56

Realisasi penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya pada TA 2023 sebesar Rp13.675.622.215,56 dan Tahun 2021 (*Audited*) sebesar Rp74.317.134.958,57.

	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
7.4.3.2 Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00

Anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 masing masing sebesar Rp0,00 dan realisasi Rp0,00, sedangkan realisasi TA 2022 (*Audited*) adalah sebesar Rp12.000.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan tersebut adalah Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar dengan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 48. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dan TA 2022

Rincian Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00	(12.000.000.000,00)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00	(12.000.000.000,00)
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	(10.000.000.000,00)



7.4.3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		0,00	0,00

Anggaran dan realisasi Pembentukan Dana Cadangan TA 2023 masing masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, sedangkan realisasi TA 2022 (*Audited*) adalah sebesar Rp12.000.000.000,00.

7.4.3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
		0,00	0,00

Anggaran dan realisasi Penyertaan Modal Daerah merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2023 masing masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, sedangkan realisasi TA 2022 (*Audited*) adalah sebesar Rp10.000.000.000,00.

PEMBIAYAAN NETTO	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
	15.675.622.215,56	13.675.622.215,56

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto untuk TA 2023 masing-masing sebesar Rp15.675.622.215,56 dan Rp13.675.622.215,56, dan untuk TA 2022 (*Audited*) sebesar Rp62.317.134.958,57.

7.4.4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	SILPA 2023 (Rp)	SILPA 2022 (Rp)
		25.987.158.510,53	13.675.622.215,56

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu yang berakhir untuk periode 31 Desember 2023 menunjukkan SILPA sebesar Rp25.987.158.510,53 yang merupakan jumlah dari Surplus/(Defisit) dengan Pembiayaan Netto, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Surplus/(Defisit)	Rp	12.311.536.294,97
- Pembiayaan Netto	Rp	13.675.622.215,56 ±
SILPA	Rp	25.987.158.510,53

**7.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022. Komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Penjelasan dari komponen-komponen perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah sebagai berikut:

7.5.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		13.675.622.215,56	74.317.134.958,57

Saldo Anggaran Lebih Awal Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 sebesar Rp13.675.622.215,56 merupakan nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp74.317.134.958,57.

7.5.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		(13.675.622.215,56)	(74.317.134.958,57)

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 sebesar (13.675.622.215,56) merupakan Saldo Anggaran Lebih TA 2022 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.

7.5.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		25.987.158.510,53	13.675.622.215,56

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar **Rp25.987.158.510,53** merupakan sisa lebih atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp13.675.622.215.

7.5.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		0,00	0,00

Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*).

7.5.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		25.987.158.510,53	13.675.622.215,56

Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.675.622.215,56 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp25.987.158.510,53.



7.6 RINCIAN PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan perbandingannya dengan 31 Desember 2022 yang merupakan penyajian untuk saldo awal Tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut:

7.6.1	ASET	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
		3.517.760.441.785,85	3.450.378.563.925,49

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp3.517.760.441.785,85 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp3.450.378.563.925,49 dengan rincian sebagai berikut.

7.6.1.1	ASET LANCAR	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
		66.205.197.289,92	87.371.782.083,56

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp66.205.197.289,92 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp87.371.782.083,56 terdiri dari Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar di Muka, dan Persediaan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 49. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1	Kas di Kas Daerah	20.222.108.325,97	10.024.218.586,38
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	283.177.600,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	8.165.000,00	0,00
3	Kas Lainnya - Kas Di BLUD	1.322.334.839,61	3.536.907.815,27
4	Kas Lainnya - Sisa Dana BOS	74.132.505,20	24.507.678,87
5	Kas Lainnya - FKTP	106.741.380,75	89.988.135,04
6	Kas Lainnya - BOK	3.970.498.859,00	0,00
7	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran - PFK	0,00	3.726.430,00
8	Kas Lainnya - Sisa Dana Tidak Terduga	0,00	20.300.000,00
9	Piutang Pajak	1.053.033.392,38	671.084.847,21
10	Piutang Retribusi	0,00	93.219.104,00
11	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah-Piutang BLUD	4.123.876.057,00	0,00
12	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah-Piutang Lainnya	1.818.541.380,14	4.924.418.577,74
13	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	3.965.972.179,00	12.807.839.369,63
14	Penyisihan Piutang	(2.290.927.008,45)	(2.186.617.319,56)
15	Persediaan	31.547.542.779,32	57.362.188.858,98
Jumlah Aset Lancar		66.205.197.289,92	87.371.782.083,56



	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
7.6.1.1.1 Kas di Kas Daerah	20.222.108.325,97	10.024.218.586,38

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp20.222.108.325,97 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp10.024.218.586,38. Saldo tersebut merupakan nilai Kas Daerah di Bendahara Umum Daerah pada Rekening Bank Kalbar Cabang Kapuas Hulu dengan nomor rekening 6001003906.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
7.6.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	283.177.600,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 (*Audited*) belum disetor ke rekening bank sebesar Rp283.177.600,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
7.6.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan	8.167.600,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp8.167.600,00 dan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
7.6.1.1.4 Kas di BLUD	1.322.334.839,61	3.536.907.815,27

Saldo Kas di BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro di Bank Kalbar dengan nomor rekening 6001000266 per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp1.322.334.839,61 dan saldo kas di BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp3.536.907.815,27.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
7.6.1.1.5 Kas Dana BOS	74.132.505,20	24.507.678,87

Merupakan sisa dana BOS per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp74.132.505,20 dan Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp24.507.678,87. Kas Dana BOS digunakan untuk mencatat kas dana BOS atas satuan pendidikan dasar negeri di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai nilai akumulasi dari total dana BOS yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOS yang belum dibelanjakan per 31 Desember 2023.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
7.6.1.1.6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP	106.741.380,75	89.988.135,04

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan saldo kas pada Puskesmas-Puskesmas di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp106.741.380,75 dan Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp89.988.135,04.



7.6.1.1.7	Kas Lainnya - Sisa Dana Tak Terduga	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		0,00	20.300.000,00

Kas Lainnya - Sisa Dana Tak Terduga per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp20.300.000,00.

7.6.1.1.9	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran - PFK	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		0,00	3.726.430,00

Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran PFK per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp3.726.430,00.

7.6.1.1.10	Piutang Pajak Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		1.053.033.392,38	671.084.847,21

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp1.053.033.392,38 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp671.084.847,21. Rincian saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 50. Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Piutang	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1	Piutang Pajak Restoran	0,00	146.500,00
2	Piutang PPJU	33.613.075,69	22.666.228,76
3	Piutang Pajak Reklame	48.642.955,20	5.224.800,00
4	Piutang PBB	758.043.992,04	510.866.919,00
5	Piutang Pajak Hiburan	1.765.000,00	1.765.000,00
6	Piutang Pajak MBLB	209.282.369,45	130.415.399,45
7	Piutang Pajak Parkir	1.686.000,00	0,00
JUMLAH		1.053.033.392,38	671.084.847,21

Penjelasan:

- Jumlah Piutang Pajak Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp671.084.847,21. Piutang Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp381.948.545,17 di tahun 2023 sehingga saldo akhir Piutang Pajak Daerah pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.053.033.392,38.
- Mutasi masing-masing jenis rincian Piutang Pajak Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 51. Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2023

No	Piutang	Per 31 Des 2022	Bertambah / Berkurang 2023	Per 31 Des 2023
1	Piutang Pajak Restoran	146.500,00	(146.500,00)	0,00
2	Piutang PPJU	22.666.228,76	10.946.846,93	33.613.075,69
3	Piutang Pajak Reklame	5.224.800,00	43.418.155,20	48.642.955,20



No	Piutang	Per 31 Des 2022	Bertambah / Berkurang 2023	Per 31 Des 2023
4	Piutang PBB	510.866.919,00	247.177.073,04	758.043.992,04
5	Piutang Pajak Hiburan	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00
6	Piutang Pajak MBLB	130.415.399,45	78.866.970,00	209.282.369,45
7	Piutang Pajak Parkir	0,00	1.686.000,00	1.686.000,00
JUMLAH		671.084.847,21	381.948.545,17	1.053.033.392,38

7.6.1.1.11	Piutang Retribusi Daerah	31 Desember 2023 (Rp) 0,00	31 Desember 2022 (Rp) 93.219.104,00
-------------------	---------------------------------	---	--

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp93.219.104,00.

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 merupakan saldo Piutang Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan - Retribusi Sewa Tanah dan Rumah Pemda sebesar Rp93.219.104,00 yang telah terealisasi di tahun 2023 sebesar Rp93.219.104,00 sehingga saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

7.6.1.1.12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang BLUD	31 Desember 2023 (Rp) 4.123.876.057,00	31 Desember 2022 (Rp) 3.024.156.759,00
-------------------	--	---	---

Merupakan piutang klaim BPJS pada BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau pada Estimasi BPJS Tahun 2023, dan Piutang Pelayanan Kesehatan Pasien 2023 per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp4.123.876.057,00 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp3.024.156.759,00

7.6.1.1.13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Lainnya	31 Desember 2023 (Rp) 1.818.541.380,14	31 Desember 2022 (Rp) 1.900.261.818,74
-------------------	---	---	---

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp1.818.541.380,14 sedangkan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.900.261.818,74 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Lainnya dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 52. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Piutang Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Piutang Peminjam Dana di Sekretariat Daerah	340.179.000,00	340.179.000,00
2	Piutang Pembangunan Kantor Camat Hulu Kapuas	51.587.400,00	51.587.400,00
3	Piutang Bunga Dana Bergulir	1.378.500.000,00	1.378.500.000,00
4	Piutang Gaji dan Tunjangan	26.712.800,00	64.073.991,00
5	Piutang Sewa Tanah dan Bangunan	21.562.180,14	22.049.099,18
6	Piutang Lainnya - Bunga TDF	0,00	1.200.374,56
7	Piutang Lainnya Dinas PU - Lebih Salur	0,00	42.671.954,00
Jumlah		1.818.541.380,14	1.900.261.818,74



Penjelasan masing-masing jenis Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Lainnya dengan uraian sebagai berikut:

- a. Piutang kepada Peminjaman Dana di Sekretariat Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp340.179.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53. Rincian Piutang Peminjaman Dana di Sekretariat Daerah per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Pembayaran Kegiatan perbaikan Mess Camat Badau menyambut kedatangan menteri ke Badau tanggal 10 November 2003 an. Abdurahman Yacob, SH	75.000.000,00
2	Pembayaran Kegiatan penyambutan Menteri di Kecamatan Badau tanggal 10 November 2003 an. Abdurahman Yacob, SH	50.000.000,00
3	Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam kegiatan Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ke Kabupaten Kutai Kerta Negara tanggal 28 April 2004 an. M. Keding Lyah (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu)	100.000.000,00
4	Perjalanan Dinas staf Sekretariat DPRD untuk mendampingi Anggota DPRD dalam Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu an. Herry Ardiansyah	3.885.000,00
5	Perjalanan Dinas Anggota DPRD yang belum teranggarkan dalam DASK Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu an. M. Keding Lyah (tanggal 1 April 2004), Suhardi (tanggal 20 April 2004 dan 1 April 2004), M. Syafril (tanggal 11 Maret dan 20 April 2004), Ade Zulkifli (tanggal 14 Januari dan 31 Maret 2004), Filipus Piyan (tanggal 21 April 2004) an. Masing-masing Anggota DPRD tersebut..	65.400.000,00
6	Perjalanan Dinas Camat Badau ke Jakarta untuk mengikuti pertemuan camat perbatasan di Jakarta tanggal 25 Juni 2004 an. Abdurahman Yacob, SH.	5.000.000,00
7	Perjalanan Dinas Pegawai Dinas Tata Kota Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untuk mengikuti pertemuan di Pontianak tanggal 14 Juni 2004 an. Buyung Sarifuddin.	3.000.000,00
8	Perjalanan Dinas Pegawai Kantor Pengolahan Data dan Informasi Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untuk berkoordinasi ke Pontianak tanggal 11 Juni 2004 an. Elham Syukur.	2.000.000,00
9	Perjalanan Dinas Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untuk berkoordinasi ke Pontianak tanggal 26 Agustus 2004 an. Jantan, SH.	2.110.000,00
10	Perjalanan Dinas Pegawai Kecamatan Silat Hilir dan bantuan transportasi masyarakat Kecamatan Silat Hilir ke putussibau untuk berkoordinasi tanggal 6 Agustus 2004 an. A.M. Yohan YS.	2.000.000,00
11	Pembayaran operasional BBI Kelansin (pembayaran rekening listrik) tanggal 13 Mei 2004 an. Wan Kusnadi.	15.000.000,00
12	Bantuan kepada pegawai yang rumahnya digusur tanggal 27 Mei 2005 an Kurniawan.	5.500.000,00
13	Perjalanan Dinas pegawai di Kantor PUKM Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untuk berkoordinasi ke Dinas PUKM Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 19 Mei 2005 an. Y.M. Sri Purwani	2.460.000,00
14	Perjalanan Dinas Kepala PPSDM Kabupaten Kapuas Hulu ke Jakarta dalam rangka koordinasi ke kementerian di Jakarta an. Drs. Subandi	6.000.000,00
15	Perjalanan Dinas Staf Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untuk berkoordinasi ke Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 30 Juli 2005 an. Mahadi	2.824.000,00
Jumlah		340.179.000,00

- b. Piutang pada pihak ketiga CV. Krakatau sebesar Rp51.587.400,00 merupakan uang muka pembangunan Gedung Kantor Camat Hulu Kapuas yang tidak dilanjutkan pembangunan akibat pembatalan status pengembangan ibu kota Kecamatan Hulu Kapuas.
- c. Piutang bunga dana bergulir sebesar Rp1.378.500.000,00 adalah merupakan hasil inventarisasi ulang pemisahan antara pokok dana bergulir dengan bunga yang belum pernah dibayarkan oleh koperasi-koperasi penerima dana bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- d. Piutang Gaji dan Tunjangan sebesar Rp26.712.800,00 merupakan piutang kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan untuk PNS yang pensiun dan mutasi yang belum tertagih



per 31 Desember 2023.

- e. Piutang Sewa Tanah dan Bangunan merupakan piutang yang tidak tertagih sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.562.180,14 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

7.6.1.1.15	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		3.965.972.179,00	12.807.839.369,63

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp3.965.972.179,00 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp12.807.839.369,63. Pencatatan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat TA 2023. Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 54. Rincian Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Pajak	Per 31 Des 2023	Per 31 Des 2022
1	Pajak Kendaraan Bermotor	720.670.087,00	639.471.617,98
2	BBN-KB	785.277.970,00	1.091.186.944,56
3	PAP	31.006.914,00	144.605.368,16
4	PBB-KB	2.429.017.208,00	10.932.575.438,93
Jumlah		3.965.972.179,00	12.807.839.369,63

7.6.1.1.16	Penyisihan Piutang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		(2.290.927.008,45)	(2.186.617.319,56)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar (Rp2.290.927.008,45) dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar (Rp2.186.617.319,56). Rincian Penyisihan Piutang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 55. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
A.	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	449.226.624,92	309.132.609,64
1	Pajak Restoran	0	732,5
2	Pajak Hiburan	1.765.000,00	882.500,00
3	Pajak MBLB	113.932.298,05	112.237.065,45
4	PBB	331.474.121,09	194.528.040,55
5	PPJU	639.321,00	113.331,14
6	Pajak Reklame	1.407.454,78	1.370.940,00
7	Pajak Parkir	8.430,00	0,00
B.	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	960.095,52
1	Retribusi Sewa Tanah dan Rumah	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi Dinas Kesehatan	0,00	960.095,52



No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
C.	Penyisihan Piutang Lainnya	1.821.870.522,63	1.812.485.417,55
1	Piutang Pemijanaan Dana	340.179.000,00	340.179.000,00
2	Piutang Kepada Pihak Ketiga	51.587.400,00	51.587.400,00
3	Piutang Bunga Dana Bergulir	1.378.500.000,00	1.378.500.000,00
4	Piutang BLUD	26.816.812,35	15.120.783,80
5	Piutang Gaji dan Tunjangan	14.586.400,00	18.096.506,50
6	Sewa Tanah dan Rumah	10.200.910,28	8.782.365,61
7	Piutang Bunga- saldo TDF	0,00	6.001,87
8	Piutang Lainnya Dinas PU- Lebih bayar	0,00	213.359,77
D.	Piutang Transfer	19.829.860,90	64.039.196,85
1	Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi	19.829.860,90	64.039.196,85
E.	Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Jumlah A + B + C + D + E		2.290.927.008,45	2.186.617.319,56

Rincian Penyisihan Piutang dengan uraian sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan piutang pajak mengacu pada Kebijakan Akuntansi tentang Penyisihan Piutang Pajak yaitu dengan menggolongkan Kualitas Piutang Pajak berdasarkan ketentuan di bawah ini:

- Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun disisihkan sebesar 0,5%;
- Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun disisihkan sebesar 10%;
- Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun disisihkan sebesar 50%;
- Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun disisihkan sebesar 100%.

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah dengan uraian sebagai berikut:

- Penyisihan Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp732,50.

- Penyisihan Piutang Pajak Hiburan

Penyisihan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.765.000,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp882.500,00.

- Penyisihan piutang Pajak MBLB

Rincian penyisihan Piutang Pajak MBLB per 31 Desember 2023 sebesar Rp113.932.298,05 dengan uraian sebagai berikut :



Tabel 56. Penyisihan Piutang Pajak MBLB per 31 Desember 2023

No	Piutang	Tahun Pengakuan	Pokok	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		Nilai Residu
				Tarif 2023 (%)	Jumlah	
1	Tahun 2011	2011	17.895,15	100%	17.895,15	0,00
2	Tahun 2012	2012	83.665.394,30	100%	83.665.394,30	0,00
3	Tahun 2013	2013	21.915.000,00	100%	21.915.000,00	0,00
4	Tahun 2017	2017	1.669.250,00	100%	1.669.250,00	0,00
5	Tahun 2019	2019	9.393.910,00	50%	4.696.955,00	0,00
6	Tahun 2021	2021	2.080.200,00	50%	1.040.100,00	832.080,00
7	Tahun 2022	2022	5.000.000,00	10%	500.000,00	475.000,00
8	Tahun 2023	2023	85.540.720,00	0,5%	427.703,60	427.703,60
	JUMLAH		209.282.369,45		113.932.298,05	1.734.783,60

d) Penyisihan Piutang PBB

Rincian penyisihan Piutang Pajak PBB per 31 Desember 2023 sebesar Rp331.474.121,09 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 57. Penyisihan Piutang Pajak PBB per 31 Desember 2023

No	Tahun Piutang	Tahun Pengakuan	Pokok	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		Nilai Residu
				Tarif 2023 (%)	Jumlah	
1	2008	2008	2.170.885	100%	2.170.884,72	0,00
2	2009	2009	4.140.845	100%	4.140.845,04	0,00
3	2010	2010	7.918.814	100%	7.918.814,20	0,00
4	2011	2011	5.103.073	100%	5.103.072,76	0,00
5	2012	2012	13.903.717	100%	13.903.717,24	0,00
6	2013	2013	27.224.367	100%	27.224.367,16	0,00
7	2014	2014	22.716.105	100%	22.716.104,56	0,00
8	2015	2015	23.566.473	100%	23.566.472,64	0,00
9	2016	2016	22.342.894	100%	22.342.894,00	0,00
10	2017	2017	30.200.849	100%	30.200.849,12	0,00
11	2018	2018	32.590.608	100%	32.590.607,96	0,00
12	2019	2019	45.788.799	50%	22.894.399,72	0,00
13	2020	2020	98.025.604	50%	49.012.802,10	0,00
14	2021	2021	104.746.157	50%	52.373.078,50	41.898.462,80
15	2022	2022	144.496.709	10%	14.449.670,90	13.727.187,36
16	2023	2023	173.108.093	0,50%	865.540,47	865.540,47
	JUMLAH		758.043.992,04		331.474.121,09	56.491.190,62

e) Penyisihan Piutang PPJU

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Penerangan atas Jalan Umum (PPJU) per 31



Desember 2023 sebesar Rp639.231,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 58. Penyisihan Piutang Pajak PPJU per 31 Desember 2023

No	Piutang	Tahun Pengakuan	Pokok	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		Nilai Residu
				Tarif 2023 (%)	Jumlah	
1	PT. Persada Graha Mandiri	2022	4.223.772	10%	422.377,20	401.258,34
2	PT. Citranusa Indomakmur	2022	736.814	10%	73.681,36	69.997,29
3	PT. Anugerah Makmur Sejati	2023	2.311.088,22	0,50%	11.555,44	11.555,44
4	PT. Buana Tunas Sejahtera	2023	1.528.850,09	0,50%	7.644,25	7.644,25
5	PT. Citranusa Indomakmur	2023	1.533.495,60	0,50%	7.667,48	7.667,48
6	PT. Dinamika Multi Prakasa	2023	993.458,45	0,50%	4.967,29	4.967,29
7	PT. Dutanusa Lestari	2023	1.799.051,00	0,50%	8.995,26	8.995,26
8	PT. Kapuasindo Palm Industry	2023	5.424.867,53	0,50%	27.124,34	27.124,34
9	PT. Paramitra Internusa Pratama	2023	2.853.900,00	0,50%	14.269,50	14.269,50
10	PT. Persada Graha Mandiri	2023	4.223.772,00	0,50%	21.118,86	21.118,86
11	PT. Primanusa Mitraserasi	2023	914.785,94	0,50%	4.573,93	4.573,93
12	PT. Sawit Kapuas Kencana	2023	4.127.563,87	0,50%	20.637,82	20.637,82
13	PT. Sentrakarya Manunggal	2023	2.941.657,43	0,50%	14.708,29	14.708,29
JUMLAH			33.613.076,13		639.321,02	614.518,09

f) Penyisihan Piutang Pajak Reklame

Penyisihan Piutang Reklame per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.407.454,78 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.370.940,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 59. Penyisihan Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023

No	Piutang	Tahun Pengakuan	Pokok	Penyisihan Piutang Tak Tertagih		Nilai Residu
				Tarif 2023 (%)	Jumlah	
1.	PT. Nusantara Indah Makmur	2021	210.000	50%	105.000,00	0,00
2.	PT. Nusantara Indah Makmur	2021	157.500	50%	78.750,00	0,00
3.	PT. Nusantara Indah Makmur	2021	1.543.500	50%	771.750,00	0,00
4.	PT. Nusantara Indah Makmur	2021	441.000	50%	220.500,00	0,00
5.	Kopi Dari Hati	2023	213.811,20	0,50%	1.069,06	1.069,06
6.	Bank Kalbar Cab. Semitau	2023	10.886.400,00	0,50%	54.432,00	54.432,00
7.	PT. Win Access Telecommunication	2023	835.200,00	0,50%	4.176,00	4.176,00
8.	PT. World Innovative Telecommunication	2023	25.204.500,00	0,50%	126.022,50	126.022,50
9.	CV. Borneo Grafis	2023	9.151.044,00	0,50%	45.755,22	45.755,22
JUMLAH			48.642.955,20		1.407.454,78	1.176.000,00



2. Penyisihan Piutang Lainnya

a) Penyisihan Piutang Peminjam Dana di Sekretariat Daerah

Jumlah penyisihan piutang peminjam dana pada Sekretariat Daerah yang telah disajikan di dalam laporan keuangan per 31 Desember 2023 dan 2022 serta tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel di bawah telah disisihkan sebesar 100% sesuai dengan kebijakan penyisihan piutang selain piutang pajak, retribusi dan transfer dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 60. Rincian Penyisihan Piutang Peminjam Dana per 31 Desember 2023

No	Uraian	Tahun	Jumlah	Kualitas	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
					%	Jumlah
1	Pembayaran Kegiatan perbaikan Mess Camat Badau menyambut kedatangan menteri ke Badau tanggal 10 November 2003 an. Abdurahman Yacob, SH	2003	75.000.000,00	Macet	100	75.000.000,00
2	Pembayaran Kegiatan penyambutan Menteri di Kecamatan Badau tanggal 10 November 2003 an. Abdurahman Yacob, SH	2003	50.000.000,00	Macet	100	50.000.000,00
3	Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam kegiatan Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu ke Kabupaten Kutai Kerta Negara tanggal 28 April 2004 an. M. Keping Lyah (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu)	2004	100.000.000,00	Macet	100	100.000.000,00
4	Perjalanan Dinas staf Sekretariat DPRD untuk mendampingi Anggota DPRD dalam Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu an. Herry Ardiansyah		3.885.000,00	Macet	100	3.885.000,00
5	Perjalanan Dinas Anggota DPRD yang belum teranggarkan dalam DASK Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu an. M. Keping Lyah (tanggal 1 April 2004), Suhardi (tanggal 20 April 2004 dan 1 April 2004), M. Syafril (tanggal 11 Maret dan 20 April 2004), Ade Zulkifli (tanggal 14 Januari dan 31 Maret 2004), Filipus Piyan (tanggal 21 April 2004) an. Masing-masing Anggota DPRD tersebut..	2004	65.400.000,00	Macet	100	65.400.000,00
6	Perjalanan Dinas Camat Badau ke Jakarta untuk mengikuti pertemuan camat perbatasan di Jakarta tanggal 25 Juni 2004 an. Abdurahman Yacob, SH.	2004	5.000.000,00	Macet	100	5.000.000,00
7	Perjalanan Dinas Pegawai Dinas Tata Kota Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untuk mengikuti pertemuan di Pontianak tanggal 14 Juni 2004 an. Buyung Sarifuddin	2004	3.000.000,00	Macet	100	3.000.000,00
8	Perjalanan Dinas Pegawai Kantor Pengolahan Data dan Informasi Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untuk berkoordinasi ke Pontianak tanggal 11 Juni 2004 an. Elham Syukur.	2004	2.000.000,00	Macet	100	2.000.000,00
9	Perjadin Pegawai Dinas Pendidikan Kab. Kapuas Hulu ke Pontianak untuk berkoordinasi ke Pontianak	2004	2.110.000,00	Macet	100	2.110.000,00



No	Uraian	Tahun	Jumlah	Kualitas	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
					%	Jumlah
	tanggal 26 Agustus 2004 an. Jantan, SH.					
10	Perjalanan Dinas Pegawai Kecamatan Silat Hilir dan bantuan transportasi masyarakat Kecamatan Silat Hilir ke putussibau untuk berkoordinasi tanggal 6 Agustus 2004 an. A.M. Yohan YS.	2004	2.000.000,00	Macet	100	2.000.000,00
11	Pembayaran operasional BBI Kelansin (pembayaran rekening listrik) tanggal 13 Mei 2004 an. Wan Kusnadi.	2004	15.000.000,00	Macet	100	15.000.000,00
12	Bantuan kepada pegawai yang rumahnya digusur tanggal 27 Mei 2005 an Kurniawan.	2005	5.500.000,00	Macet	100	5.500.000,00
13	Perjalanan Dinas pegawai di Kantor PUKM Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untuk berkoordinasi ke Dinas PUKM Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 19 Mei 2005 an. Y.M. Sri Purwani	2005	2.460.000,00	Macet	100	2.460.000,00
14	Perjalanan Dinas Kepala PPSPDM Kabupaten Kapuas Hulu ke Jakarta dalam rangka koordinasi ke kementrian di Jakarta an. Drs. Subandi		6.000.000,00	Macet	100	6.000.000,00
15	Perjalanan Dinas Staf Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu ke Pontianak untuk berkoordinasi ke Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 30 Juli 2005 an. Mahadi	2005	2.824.000,00	Macet	100	2.824.000,00
Jumlah			340.179.000,00			340.179.000,00

b) Penyisihan Piutang Kepada Pihak Ketiga

Saldo penyisihan piutang bunga dana bergulir per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp51.587.400,00 dan saldo per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp51.587.400,00.

c) Penyisihan Piutang Bunga Dana Bergulir

Penyisihan piutang bunga dana bergulir mengacu penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun dengan persentase 0,5%.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun dengan persentase 10%.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun dengan persentase 50%.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun disisihkan 100%.

Saldo Penyisihan Piutang Bunga Dana Bergulir per 31 Desember 2023 (*Audited*)

sebesar Rp1.378.500.000,00 dan saldo per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.378.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 61. Rincian Penyisihan Piutang Bunga Dana Bergulir per 31 Desember 2023

No.	Uraian Piutang	Tahun Pengakuan	Nilai	Kualitas	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
					%	Jumlah
1	Koppontren Assalam	2004	322.000.000,00	Macet	100	322.000.000,00
2	KUD Bukit Senara	2004	70.000.000,00	Macet	100	70.000.000,00
3	Koptan Asri Jaya	2004	35.000.000,00	Macet	100	35.000.000,00
4	KUD Hemat	2004	70.000.000,00	Macet	100	70.000.000,00
5	KUD Sentausa	2004	70.000.000,00	Macet	100	70.000.000,00
6	KSU Usaha Bersama	2004	70.000.000,00	Macet	100	70.000.000,00
7	KSU Regas 2000	2004	182.000.000,00	Macet	100	182.000.000,00
8	KSU Mabung Pangau	2004	70.000.000,00	Macet	100	70.000.000,00
9	KSU Ready Mitra	2004	35.000.000,00	Macet	100	35.000.000,00
10	KSU Perintis	2005	70.000.000,00	Macet	100	70.000.000,00
11	KSU Sepakat Bersama	2005	70.000.000,00	Macet	100	70.000.000,00
12	KSU Uncak Kapuas Mandiri	2005	70.000.000,00	Macet	100	70.000.000,00
13	Koppas Mega Karya	2005	70.000.000,00	Macet	100	70.000.000,00
14	UKM Riska	2005	70.000.000,00	Macet	100	70.000.000,00
15	KSU Pasifik Mandiri	2006	16.800.000,00	Macet	100	16.800.000,00
16	KSU KPD Hue Hiam Sadu	2006	16.800.000,00	Macet	100	16.800.000,00
17	KSU Riza Pratama	2006	16.800.000,00	Macet	100	16.800.000,00
18	KSU Uncak Citra Mandiri	2006	16.800.000,00	Macet	100	16.800.000,00
19	UKM Indag	2006	6.300.000,00	Macet	100	6.300.000,00
20	UKM Rita	2006	7.900.000,00	Macet	100	7.900.000,00
21	UKM Jean Pratama	2006	6.300.000,00	Macet	100	6.300.000,00
22	UKM Dama Sport	2006	8.400.000,00	Macet	100	8.400.000,00
23	UKM Sinar Lintas	2006	8.400.000,00	Macet	100	8.400.000,00
Jumlah			1.378.500.000,00			1.378.500.000,00

Pada TA 2023 tidak terdapat penyetoran bunga dana bergulir sehingga posisi saldo piutang bunga dana bergulir masih belum mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

d) Penyisihan Piutang BLUD

Saldo Penyisihan Piutang BLUD per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp26.816.812,35 merupakan klaim atas pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan mengacu pada Kebijakan Akuntansi tentang Penyisihan Piutang Lainnya dikategorikan sebagai Penyisihan piutang lancar disisihkan sebesar 0,5% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62. Penyisihan Piutang Estimasi BPJS pada RSUD. Achmad Diponegoro per 31 Desember 2023

No	Jenis Piutang	Bulan	Tahun	Jumlah	Kualitas	Penyisihan		Nilai Residu
						%	Jumlah Penyisihan	
1	Estimasi BPJS Agust-Des 2022	Agustus - Desember	2022	0,00	Lancar	0,50%	0,00	0,00
2	Estimasi Jampersal Okt-Des 2022	Oktober-Desember	2022	0,00	Lancar	0,50%	0,00	0,00



No	Jenis Piutang	Bulan	Tahun	Jumlah	Kualitas	Penyisihan		Nilai Residu
						%	Jumlah Penyisihan	
3	Estimasi Covid 19 Nov-Des 2022	November-Desember	2022	0,00	Lancar	0,50%	0,00	0,00
4	Estimasi BPJS Ketenagakerjaan Agust-Des 2022	Agustus -Desember	2022	0,00	Lancar	0,50%	0,00	0,00
Sub Jumlah				0,00			0,00	0,00

**Tabel 63. Penyisihan Piutang Pasien Rawat Inap
pada BLUD RSUD. Achmad Diponegoro per 31 Desember 2023**

No	Jenis Piutang	Tanggal masuk	Tanggal Keluar	Jumlah	Kualitas	Penyisihan		Nilai Residu
						%	Jumlah Penyisihan	
1	Pasien Rawat Inap	01-Jan-22	03-Jan-22	895.765,00	Lancar	0,50%	89.576,50	806.188,50
2	Pasien Rawat Inap	01-Apr-22	21-May-22	7.743.016,00	Lancar	0,50%	774.301,60	6.968.714,40
3	Pasien Rawat Inap	02-Apr-22	06-Apr-22	588.500,00	Lancar	0,50%	58.850,00	529.650,00
4	Pasien Rawat Inap	13-May-22	08-Jun-22	25.822.690,00	Lancar	0,50%	2.582.269,00	23.240.421,00
5	Pasien Rawat Inap	14-Jun-22	14-Jun-22	3.241.418,00	Lancar	0,50%	324.141,80	2.917.276,20
6	Pasien Rawat Inap	05-Jul-22	08-Jul-22	5.734.400,00	Lancar	0,50%	573.440,00	5.160.960,00
7	Pasien Rawat Inap	09-Sep-22	11-Sep-22	6.473.301,00	Lancar	0,50%	647.330,10	5.825.970,90
8	Pasien Rawat Inap	28-Sep-22	01-Oct-22	9.865.368,00	Lancar	0,50%	986.536,80	8.878.831,20
9	Pasien Rawat Inap	07-Oct-22	13-Oct-22	4.871.669,00	Lancar	0,50%	487.166,90	4.384.502,10
Sub Jumlah				65.236.127,00			6.523.612,70	58.712.514,30

**Tabel 64. Penyisihan Piutang Retribusi RITL/RJTL
pada BLUD RSUD. Achmad Diponegoro per 31 Desember 2023**

No	Jenis Piutang	Tanggal masuk	Tanggal Keluar	Jumlah	Umur	Penyisihan		Nilai Residu
						%	Jumlah Penyisihan	
1	Piutang Retribusi RITL/RJTL	27-Aug-23	30-Aug-23	6.029.338,00	4 Bulan	0,50%	30.146,69	5.999.191,31
2	Piutang Retribusi RITL/RJTL	29-Jan-23	01-Feb-23	5.285.000,00	11 Bulan	0,50%	26.425,00	5.258.575,00
3	Piutang Retribusi RITL/RJTL	02-Mar-23	17-Mar-23	11.397.268,00	10 Bulan	0,50%	56.986,34	11.340.281,66
4	Piutang Retribusi RITL/RJTL	12-Mar-23	12-Mar-23	513.167,00	10 Bulan	0,50%	2.565,84	510.601,17
5	Piutang Retribusi RITL/RJTL	26-Mar-23	26-Mar-23	5.111.116,00	9 Bulan	0,50%	25.555,58	5.085.560,42
6	Piutang Retribusi RITL/RJTL	30-Mar-23	31-Mar-23	218.100,00	9 Bulan	0,50%	1.090,50	217.009,50
7	Piutang Retribusi RITL/RJTL	01-Apr-23	01-Apr-23	53.000,00	9 Bulan	0,50%	265	52.735,00
8	Piutang Retribusi RITL/RJTL	12-Apr-23	12-Apr-23	2.200.925,00	9 Bulan	0,50%	11.004,63	2.189.920,38
9	Piutang Retribusi RITL/RJTL	18-Apr-23	20-Apr-23	6.368.465,00	8 Bulan	0,50%	31.842,33	6.336.622,68
10	Piutang Retribusi RITL/RJTL	03-May-23	15-May-23	4.636.000,00	8 Bulan	0,50%	23.180,00	4.612.820,00
11	Piutang Retribusi RITL/RJTL	12-Jun-23	19-Jun-23	11.919.255,00	6 Bulan	0,50%	59.596,28	11.859.658,73
12	Piutang Retribusi RITL/RJTL	26-Jun-23	30-Jun-23	1.269.971,00	6 Bulan	0,50%	6.349,86	1.263.621,15
13	Piutang Retribusi RITL/RJTL	05-Jul-23	10-Jul-23	20.815.968,00	6 Bulan	0,50%	104.079,84	20.711.888,16
14	Piutang Retribusi RITL/RJTL	09-Jul-23	14-Jul-23	3.201.230,00	6 Bulan	0,50%	16.006,15	3.185.223,85
15	Piutang Retribusi RITL/RJTL	15-Jul-23	20-Jul-23	12.501.577,00	5 Bulan	0,50%	62.507,89	12.439.069,12
16	Piutang Retribusi RITL/RJTL	16-Jul-23	18-Jul-23	4.752.000,00	5 Bulan	0,50%	23.760,00	4.728.240,00
17	Piutang Retribusi RITL/RJTL	22-Jul-23	23-Jul-23	218.100,00	5 Bulan	0,50%	1.090,50	217.009,50



No	Jenis Piutang	Tanggal masuk	Tanggal Keluar	Jumlah	Umur	Penyisihan		Nilai Residu
						%	Jumlah Penyisihan	
18	Piutang Retribusi RITL/RJTL	29-Sep-23	29-Sep-23	326.350,00	3 Bulan	0,50%	1.631,75	324.718,25
Sub Jumlah				96.816.830,00			484.084,15	96.332.745,85

**Tabel 65. Penyisihan Piutang Pasien Rawat Inap
pada BLUD RSUD. Achmad Diponegoro per 31 Desember 2023**

NO	Jenis Piutang	Umur	Jumlah	Kualitas	Penyisihan		Nilai Residu
					%	Jumlah Penyisihan	
1	Pasien Rawat Inap	Sept - Desember 2023	87.250.400,00	Lancar	0,50%	436.252,00	86.814.148,00
2	Pasien Rawat Inap	Oktober - Desember	83.451.900,00	Lancar	0,50%	417.259,50	83.034.640,50
3	Pasien Rawat Inap	Nov - Desember	1.418.432.000,00	Lancar	0,50%	7.092.160,00	1.411.339.840,00
4	Pasien Rawat Inap	susulan Nov- Des	53.665.200,00	Lancar	0,50%	268.326,00	53.396.874,00
5	Pasien Rawat Inap	Desember	1.635.046.500,00	Lancar	0,50%	8.175.232,50	1.626.871.267,50
Sub Jumlah			3.277.846.000	3.277.846.000,00		16.389.230,00	3.261.456.770

**Tabel 66. Penyisihan Piutang Pasien Rawat Inap
pada BLUD RSUD. Achmad Diponegoro per 31 Desember 2023**

NO	Jenis Piutang	Tahun	Jumlah	Kualitas	Penyisihan		Nilai Residu
					%	Jumlah Penyisihan	
1	Kadaluarsa 2020	2020	41.360.000,00	Lancar	0,50%	206.800,00	41.153.200,00
2	Kadaluarsa 2021	2021	636.471.100,00	Lancar	0,50%	3.182.355,50	633.288.744,50
3	Reguler 2022	2022	6.146.000,00	Lancar	0,50%	30.730,00	6.115.270,00
Sub Jumlah			683.977.100,00			3.419.885,50	680.557.214,50

e) Penyisihan Gaji dan Tunjangan

Jumlah Penyisihan Piutang Gaji Dan Tunjangan per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp14.586.400,00 dan tahun 2022 (*Audited*) adalah sebesar Rp18.096.506,50. mengacu pada Kebijakan Akuntansi tentang penggolongan kualitas piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun disisihkan sebesar 0,5%;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun disisihkan sebesar 10%;
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun disisihkan sebesar 50%; dan
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun disisihkan sebesar 100%.

f) Penyisihan Piutang Sewa Tanah dan Rumah

Jumlah penyisihan Sewa Tanah dan Rumah per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp10.200.910,28 dan tahun 2022 (*Audited*) adalah sebesar Rp8.782.365,61. Penyisihan mengacu pada Kebijakan Akuntansi tentang penggolongan kualitas piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan yaitu Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun disisihkan sebesar 0,5%.

g) Penyisihan Piutang Bunga – Saldo TDF

Saldo Penyisihan Piutang Bunga- saldo TDF per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp0,00 dan saldo per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp6.001,87

h) Penyisihan Piutang Lainnya Dinas PUPR – Lebih Bayar

Saldo Penyisihan Penyisihan Piutang Lainnya Dinas PU- Lebih bayar per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp0,00 dan saldo per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp213.359,77.

i) Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi

Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi per 31 Desember 2023 (*Audited*) dengan menggunakan kriteria piutang lancar disisihkan sebesar 0,5% dari jumlah piutang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67. Penyisihan Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2023

No.	Jenis Pajak	Jumlah	Tahun	Kualitas	Penyisihan	
					%	Jumlah Penyisihan
1	PKB	720.670.087,00	2023	Lancar	0,50%	3.603.350,44
2	BBN-KB	785.277.970,00	2023	Lancar	0,50%	3.926.389,85
3	PBB-KB	2.429.017.208,00	2023	Lancar	0,50%	12.145.086,04
4	PAP	31.006.914,00	2023	Lancar	0,50%	155.034,57
	Jumlah	3.965.972.179,00				19.829.860,90

7.6.1.1.18 Persediaan

**31 Desember 2023
(Rp)**

31.547.542.779,32

**31 Desember 2022
(Rp)**

57.362.188.858,98

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp31.547.542.779,32 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp57.362.188.858,98. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 tersebut merupakan persediaan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah yang masih tersisa sampai dengan akhir tahun dan persediaan barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 68. Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Persediaan Bahan-Bahan Lainnya Oksigen	25.319.526,00	27.229.245,00
2	Persediaan Bahan- Bahan Lainnya Alat Laboratorium	455.217.437,00	128.094.314,00
3	Persediaan Bahan- Bahan Lainnya Alat Radiologi	79.050.000,00	169.365.000,00
4	Persediaan Bahan- Bahan Lainnya CSSD	132.831.755,00	611.470.893,00
5	Persediaan Bahan- Bahan Lainnya Alat Kesehatan Habis Pakai	729.189.287,00	708.547.805,00



No.	Jenis Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
6	Persediaan Bahan- Bahan Lainnya Alat penanganan DBD	103.675.000,00	2.068.095,00
7	Persediaan Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	10.000.000,00	3.160.000,00
8	Persediaan Bahan-Bahan Lainnya - Alat Keamanan/rompi dan helm	6.122.043,25	6.122.043,25
9	Persediaan Bahan-Bahan Lainnya Pembersih	0,00	1.046.500,00
10	Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	2.953.000,00
11	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	692.048.050,00	134.878.910,00
12	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	236.693.530,00	1.051.524.698,00
13	Persediaan Obat-Obatan-Obat	11.472.616.918,00	12.875.720.633,16
14	Persediaan Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.554.100,00	8.073.200,00
15	Persediaan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.602.225.133,07	41.631.719.522,57
16	Persediaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	215.000,00
Jumlah		31.547.542.779,32	57.362.188.858,98

7.6.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		167.713.814.716,96	166.218.859.778,77

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp167.713.814.716,96 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp166.218.859.778,77. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Rincian Investasi Jangka Panjang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 69. Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	167.713.814.716,96	166.218.859.778,77
Jumlah		167.713.814.716,96	166.218.859.778,77

Nilai penyertaan modal berdasarkan komposisi penyertaan modal per 31 Desember 2023.

7.6.1.2.1	Investasi Non Permanen – Dana Bergulir	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		0,00	0,00

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp0,00. Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 terdiri dari Dana Bergulir sebesar Rp862.539.000,00 yang telah disisihkan 100% pada 2022 sebesar Rp862.539.000,00. Pada tahun 2023 tidak ada penyetoran pokok dana bergulir sehingga tidak mengurangi jumlah pokok dana bergulir per 31 Desember 2023. Rincian Pokok Dana Bergulir dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 70. Rincian Pokok Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun Pengakuan	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
1	Koppontren Assalam	2004	213.901.000,00	213.901.000,00
2	Koptan Asri Jaya	2004	20.674.000,00	20.674.000,00
3	KUD Hemat	2004	3.214.000,00	3.214.000,00



No	Uraian	Tahun Pengakuan	Per 31 Des 2023 (Rp)	Per 31 Des 2022 (Rp)
4	KSU Usaha Bersama	2004	50.000.000,00	50.000.000,00
5	KSU Regas 2000	2004	116.350.000,00	116.350.000,00
6	KSU Mabung Pangau	2004	44.750.000,00	44.750.000,00
7	KSU Ready Mitra	2004	23.250.000,00	23.250.000,00
8	KSU Perintis	2005	5.250.000,00	5.250.000,00
9	KSU Sepakat Bersama	2005	46.500.000,00	46.500.000,00
10	KSU Uncak Kapuas Mandiri	2005	41.250.000,00	41.250.000,00
11	Koppas Mega Karya	2005	50.000.000,00	50.000.000,00
12	UKM Riska	2005	50.000.000,00	50.000.000,00
13	KSU Pasifik Mandiri	2006	36.800.000,00	36.800.000,00
14	KSU KPD Hue Hiam Sadu	2006	40.000.000,00	40.000.000,00
15	KSU Riza Pratama	2006	40.000.000,00	40.000.000,00
16	KSU Uncak Citra Mandiri	2006	40.000.000,00	40.000.000,00
17	UKM Jean Pratama	2006	800.000,00	800.000,00
18	UKM Dama Sport	2006	19.800.000,00	19.800.000,00
19	UKM Sinar Lintas	2006	20.000.000,00	20.000.000,00
Jumlah			862.539.000,00	862.539.000,00

7.6.1.2.2 Investasi Permanen

31 Desember 2023
(Rp)
167.713.814.716,96

31 Desember 2022
(Rp)
166.218.859.778,77

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp167.713.814.716,96 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp166.218.859.778,77. Rincian Investasi Permanen per 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 71. Rincian Investasi Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar	119.106.000.000,00	119.106.000.000,00
2	Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Kapuas Hulu	20.120.983.477,25	17.261.743.818,58
3	Penyertaan Modal pada Perumda Uncak Kapuas	19.549.460.051,16	19.549.460.051,16
4	Penyertaan Modal pada JAMKRIDA	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
5	Penyertaan Modal BUMD PT Uncak Kapuas	5.437.371.188,55	6.801.655.909,03
Jumlah		167.713.814.716,96	166.218.859.778,77

a Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar

31 Desember 2023
(Rp)
119.106.000.000,00

31 Desember 2022
(Rp)
119.106.000.000,00

Saldo Investasi Permanen Penyertaan pada PT. Bank Kalbar per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp119.106.000.000,00 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp119.106.000.000,00 Rincian Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar per 31 Desember 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 72. Investasi Permanen Penyertaan pada Bank Kalbar per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Penyertaan sampai dengan Tahun 2005	4.707.000.000,00	4.707.000.000,00
2	Penyertaan Modal Tahun 2006	1.599.000.000,00	1.599.000.000,00



No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
3	Penyertaan Modal Tahun 2008	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00
4	Penyertaan Modal Tahun 2009	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
5	Penyertaan Modal Tahun 2010	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
6	Penyertaan Modal Tahun 2011	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
7	Penyertaan Modal Tahun 2012	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00
8	Penyertaan Modal Tahun 2013	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
9	Penyertaan Modal Tahun 2014	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
10	Penyertaan Modal Tahun 2015	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
11	Penyertaan Modal Tahun 2016	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
12	Penyertaan Modal Tahun 2017	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
13	Penyertaan Modal Tahun 2018	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
14	Penyertaan Modal Tahun 2019	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
15	Penyertaan Modal Tahun 2020	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
16	Penyertaan Modal Tahun 2021	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
17	Penyertaan Modal Tahun 2022	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Jumlah		119.106.000.000,00	119.106.000.000,00

Rincian nilai saham pada PT. Bank Kalbar per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 73. Rincian Nilai Saham pada PT. Bank Kalbar per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Rincian Saham	Tahun 2023	Tahun 2022
1	DNA/SHM-08/99: 30-04-1999 (869 lbr)	869.000.000,00	869.000.000,00
2	DNA/SHM-16/99: 31-03-1999 (750 lbr)	750.000.000,00	750.000.000,00
3	DNA/SHM-32/04: 30-04-2004 (3.023 lbr)	3.023.000.000,00	3.023.000.000,00
4	DNA/SHM 66/06: 05-12-2006 (1.500 lbr)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
5	TSI/SHM-43/05 : 27-05-2005 (65 lbr)	65.000.000,00	65.000.000,00
6	TSI/SHM-93/09: 26-08-2009 (1.500 lbr)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
7	Diterbitkan dengan DNA/SHM 86/08: 31-12-2008 (4.300 lbr)	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00
8	DNA/SHM 59/05: 14-07-2006 (1.500 lbr)	99.000.000,00	99.000.000,00
9	DNA/SHM 105/2011: 23-05-2011 (3.500 lbr)	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
10	DNA/SHM 106/2011: 23-05-2011 (2.000 lbr)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
11	DNA/SHM 111/2011: 30-12-2011 (2.000 lbr)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
12	DNA/SHM 118/2012: 30-05-2012 (3.500 lbr)	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00
13	TSI/SHM-128/2013 :19-02-2013 (1.000 lbr)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
14	TSI/SHM-141/2014: 28-04-2014 (10.000 lbr)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
15	TSI/SHM-154/2014: 31-12-2014 (10.000 lbr)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
16	TSI/SHM-154/2015: 31-12-2015 (10.000 lbr)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
17	TSI/SHM-154/2015: 31-12-2016 (10.000 lbr)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
18	TSI/SHM-154/2015: 31-12-2017 (10.000 lbr)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
19	TSI/SHM-196/2019:09-01-2019 (10.000 lbr)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
20	TSI/SHM-211/2019:30 April 2019 (10.000 lbr)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
21	TSI/SHM-211/2020:30 April 2020 (10.000 lbr)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
22	Konversi saham 2021 (5.000 lbr)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
23	Konversi saham 2022 (10.000 lbr)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Jumlah		119.106.000.000,00	119.106.000.000,00

Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.



b	Penyertaan Modal pada PDAM Kapas Hulu	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		20.120.983.477,25	17.261.743.818,58

Nilai penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp20.120.983.477,25 sedangkan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp17.261.743.818,58. Rincian penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Kapuas Hulu dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 74. Nilai Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan / penurunan
1.	Penyertaan sampai dengan 2003	4.682.000.000,00	4.682.000.000,00	0,00
2.	Penyertaan tahun 2004	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
3.	Penyertaan tahun 2005	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.	Penyertaan tahun 2006	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
5.	Penyertaan tahun 2007	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.	Penyertaan Modal Tahun 2008	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
7.	Penyertaan Modal Tahun 2009	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
8.	Penyertaan Modal Tahun 2010	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
9.	Penyertaan Modal Tahun 2011	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
10.	Penyertaan Modal Tahun 2012	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
13.	Penyertaan Modal Tahun 2013	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
14.	Penyertaan Modal Tahun 2014	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
15.	Rekon By admin aset PU yang belum dicatat sebagai penambah nilai	136.443.930,00	136.443.930,00	0,00
16.	Akumulasi Kerugian 2003- 2014 (perhitungan Ekuitas)	(10.949.240.124,72)	(10.949.240.124,72)	0,00
17.	Koreksi ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan PDAM setelah Audit	32.575.970.490,72	32.575.970.490,72	0,00
18.	Koreksi ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan PDAM 2015	(31.632.415.529,42)	(31.632.415.529,42)	0,00
19.	Penyertaan Modal 2016	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
20.	Koreksi ekuitas s.d 2016	(4.935.873.596,38)	(4.935.873.596,38)	0,00
21.	Penyertaan Modal 2017	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
22.	Koreksi Ekuitas s.d 2017	(4.507.207.900,71)	(4.507.207.900,71)	0,00
23.	Penyertaan Modal 2018	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
24.	Koreksi Ekuitas 2018	(3.200.108.272,10)	(3.200.108.272,10)	0,00
25.	Koreksi Ekuitas 2019	(940.037.208,95)	(940.037.208,95)	0,00
27.	Koreksi Ekuitas 2020	(1.188.109.738,70)	(1.188.109.738,70)	0,00
28.	Koreksi Ekuitas 2021	(727.947.001,03)	(727.947.001,03)	0,00
29.	Koreksi Ekuitas 2022	448.268.769,87	448.268.769,87	0,00
30.	Koreksi Ekuitas Tahun 2023	2.859.239.658,67	0,00	2.859.239.658,67
	Jumlah	20.120.983.477,25	17.261.743.818,58	2.859.239.658,67

Saldo Penyertaan Modal pada PDAM per 31 Desember 2023 setelah dilakukan perhitungan metode ekuitas sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan untuk kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas, dan PDAM merupakan Perusahaan Daerah dengan demikian Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan



mempengaruhi komposisi dewan komisaris dan manajemen inti. Berdasarkan perhitungan ekuitas nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp20.120.983.477,25.

1	Rincian seluruh modal PDAM dalam Laporan Keuangan :	Jumlah
	Kekayaan Pemda Dipisahkan	47.182.000.000,00
	Penyertaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	13.295.577.000,00
	Penyertaan Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya	49.736.328.325,00
	Modal Pemda Kabupaten Kapuas Hulu	11.909.545,00
2	Jumlah	110.225.814.870,00
	Persentase Penyertaan Modal Pemda KH :	
	Total Penyertaan Modal Pemda KH Per 31 Desember 2022 (dibagi)	47.182.000.000,00
	Total Modal PDAM	110.225.814.870,00
3	Jumlah	42,80%
	Perhitungan Nilai Penyertaan Modal Metode Ekuitas :	
	Persentase Penyertaan Modal Pemda	42,80%
	Nilai Ekuitas Laporan Keuangan PDAM <i>Unaudited</i> 2022 (dikali)	47.006.311.724,09
	Jumlah	20.120.983.477,25

c	Penyertaan Modal pada Uncak Kapuas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp) 19.549.460.051,16	(Rp) 19.549.460.051,16

Saldo Penyertaan Modal pada Perumda Uncak Kapuas per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp19.549.460.051,16 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar 19.549.460.051,16 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 75. Nilai Penyertaan Modal pada Uncak Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023	2022
1	Penyertaan TA 2005	356.575.250,00	356.575.250,00
2	Penyertaan TA 2006	450.000.000,00	450.000.000,00
3	Penyertaan TA 2008	500.000.000,00	500.000.000,00
4	Koreksi Kurang	(852.212.039,00)	(852.212.039,00)
5	Penyertaan TA 2012	750.000.000,00	750.000.000,00
6	Koreksi metode ekuitas Tahun 2013	(148.549.490,00)	(148.549.490,00)
7	Akumulasi Rugi sampai Tahun 2014 (koreksi Audited)	(666.644.563,00)	(666.644.563,00)
8	Koreksi berdasar Ekuitas Dana Lapkeu PD. Uncak Kapuas <i>Unaudited</i> 2015	9.027.735.878,00	9.027.735.878,00
9	Laba Perusahaan Tahun 2016	4.772.507,00	4.772.507,00
10	Koreksi Ekuitas 2016	(17.184.362,00)	(17.184.362,00)
11	Laba Perusahaan Tahun 2017	89.677.064,00	89.677.064,00
12	Penyertaan modal (uang)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00



No.	Uraian	2023	2022
13	Penyertaan modal aset tanah	8.238.285.000,00	8.238.285.000,00
14	Laba Tahun 2018	5.297.764,00	5.297.764,00
15	Rugi Perusahaan Tahun 2019	(68.969.079,14)	(68.969.079,14)
16	Laba Perusahaan Tahun 2020	115.039.637,00	115.039.637,00
18	Koreksi ekuitas atas rugi tahun 2021	(576.088.067,32)	(576.088.067,32)
19	Koreksi ekuitas atas rugi tahun 2022	(1.269.031.540,70)	(1.269.031.540,70)
20	Koreksi atas Jasa Giro Tahun 2021 Rek Perumda Bank Kalbar 6003001677	1.736.800,00	1.736.800,00
21	Koreksi atas Rugi Audited tahun 2021	(390.980.707,68)	(390.980.707,68)
	Jumlah	19.549.460.051,16	19.549.460.051,16

d	Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida	31 Desember 2023 (Rp) 3.500.000.000,00	31 Desember 2022 (Rp) 3.500.000.000,00
----------	---	---	---

Pada Tahun 2023 tidak terdapat Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida sehingga nilai penyertaan modal per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp3.500.000.000,00 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp3.500.000.000,00. Rincian Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 76. Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023	2022	Kenaikan / penurunan
1.	Penyertaan Modal Tahun 2015	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00
2.	Penyertaan Modal Tahun 2016	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00
3.	Penyertaan Modal Tahun 2017	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00
4.	Penyertaan Modal Tahun 2018	875.000.000,00	875.000.000,00	0,00
	Jumlah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00

e	Penyertaan Modal pada BUMD PT. Uncak Kapuas Mandiri	31 Desember 2023 (Rp) 5.437.371.188,55	31 Desember 2022 (Rp) 6.801.655.909,03
----------	--	---	---

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp5.437.371.188,55 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp6.801.655.909,03. Pada tahun 2023 tidak terdapat penyertaan modal pada PT. Uncak Kapuas Mandiri. Perhitungan penyertaan modal menggunakan metode ekuitas.

7.6.1.3	Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp) 3.108.744.622.048,72	31 Desember 2022 (Rp) 3.041.430.168.420,55
----------------	-------------------	---	---

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.108.744.622.048,72 (*Audited*) sedangkan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp3.041.430.168.420,55. Nilai Aset Tetap di atas merupakan akumulasi dari Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 ditambah dengan mutasi Aset Tetap dalam TA 2023 yang meliputi Realisasi Belanja Modal TA 2023, maupun koreksi dan reklasifikasi yang dilakukan dengan menelusuri kembali Aset Tetap serta Akumulasi Penyusutan sampai dengan tahun 2023 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

yang berlaku. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Masa Manfaat dalam rangka penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, penyusutan dilaksanakan semenjak aset tetap telah siap dioperasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Perhitungan beban penyusutan pada tanggal 31 Desember menggunakan metode garis lurus yaitu mengalokasikan nilai perolehan aset tetap secara rata pada setiap tahun pengoperasian aset tetap meskipun aset tetap tersebut baru dioperasikan 1 hari pada tanggal 31 Desember.

Secara umum Kebijakan Akuntansi pengakuan Belanja Modal Aset Tetap yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah apabila nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran atau perolehan pertama untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana tabel ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 77. Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Harga/Unit	Keterangan
1	Tanah		Tidak dibatasi
2	Peralatan dan Mesin		
	Alat Berat	100.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Angkutan	1.500.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Pertanian	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Studio dan Komunikasi	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Kedokteran	1.400.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Peraga/ Praktek Sekolah	1.500.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Laboratorium	1.500.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Keamanan	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Rambu-rambu	1.000.000	Sama dengan atau lebih
3	Gedung dan Bangunan		
	Gedung dan Bangunan	30.000.000	Sama dengan atau lebih
	Bangunan Monumen	25.000.000	Sama dengan atau lebih
4	Jalan, jembatan, Irigasi dan Jaringan		
	Jalan		Tidak dibatasi
	Jembatan		Tidak dibatasi
	Bangunan Air		Tidak dibatasi
	Instalasi		Tidak dibatasi
	Jaringan Air		Tidak dibatasi
	Jaringan Listrik dan telepon, Penerangan Jalan/Taman/hutan kota	3.000.000	Sama dengan atau lebih
5	Aset Tetap Lainnya		
	Barang bercorak seni dan budaya	1.000.000	Sama dengan atau lebih

Kemudian kebijakan akuntansi untuk belanja pemeliharaan atau pengeluaran berikutnya menetapkan batasan nilai kapitalisasi minimum dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 78. Batasan Minimal Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan

No	Uraian	Harga/Unit	Ket.
1	Tanah		Tidak dibatasi
2	Peralatan dan Mesin		
	Alat Berat	100.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Angkutan	1.500.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Pertanian	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Studio dan Komunikasi	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Kedokteran	1.400.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Peraga/ Praktek Sekolah	1.500.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Laboratorium	1.500.000	Sama dengan atau lebih
	Alat Keamanan	1.000.000	Sama dengan atau lebih
	Rambu-rambu	1.000.000	Sama dengan atau lebih
3	Gedung dan Bangunan		
	Gedung dan Bangunan	30.000.000	Sama dengan atau lebih
	Bangunan Monumen	25.000.000	Sama dengan atau lebih
4	Jalan, jembatan, Irigasi dan Jaringan		
	Jalan	50.000.000,00	Sama dengan atau lebih
	Jembatan	50.000.000,00	Sama dengan atau lebih
	Bangunan Air	50.000.000,00	Sama dengan atau lebih
	Instalasi	50.000.000,00	Sama dengan atau lebih
	Jaringan Air	50.000.000,00	Sama dengan atau lebih
	Jaringan Listrik dan telepon, Penerangan Jalan/Taman/hutan kota	3.000.000	Sama dengan atau lebih
5	Aset Tetap Lainnya		
	Barang bercorak seni dan budaya	1.000.000	Sama dengan atau lebih

Aset tetap yang memiliki nilai di bawah nilai kapitalisasi minimum akan dilakukan reklasifikasi pencatatan ke aset tetap bernilai di bawah nilai kapitalisasi minimum (Ekstrakomptabel).

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- biaya perencanaan;
- biaya lelang;
- biaya persiapan tempat;
- biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- biaya pemasangan (*installation cost*);
- biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- biaya konstruksi.

Metode yang digunakan untuk mengatribusi biaya perolehan aset tetap adalah dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Di luar Penyusutan) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dan penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Properti Investasi

Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas properti investasi dilakukan oleh setiap entitas pelaporan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi. PSAP Berbasis Akrual Nomor 17 tersebut digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2022.

Sampai dengan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu belum mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi Properti Investasi.

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah sebesar Rp3.108.744.622.048,72 sedangkan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp3.041.430.168.420,55. Rincian saldo per jenis Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 79. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Aset Tetap	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Naik/(Turun)
1	Tanah	245.223.965.474,30	245.372.760.053,30	(148.794.579,00)
2	Peralatan dan Mesin	472.436.594.827,14	454.706.682.342,78	17.729.912.484,36
3	Gedung dan Bangunan	1.565.166.693.079,84	1.470.064.233.742,98	95.102.459.336,86
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.451.332.811.932,59	3.281.427.166.820,11	169.905.645.112,48
5	Aset Tetap Lainnya	27.226.058.034,59	23.875.832.084,59	3.350.225.950,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	213.723.215.632,27	195.182.018.864,19	18.541.196.768,08
7	Akumulasi Penyusutan	(2.866.364.716.932,01)	(2.629.198.525.487,40)	(237.166.191.444,61)
	JUMLAH	3.108.744.622.048,72	3.041.430.168.420,55	67.314.453.628,17

7.6.1.3.1	Tanah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		245.223.965.474,30	245.372.760.053,30

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap tanah dapat dijelaskan secara ringkas. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp245.223.965.474,30 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp245.372.760.053,30 sehingga pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp148.794.579,00).

Mutasi aset tetap tanah pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun 2023 dan 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 80. Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		245.372.760.053,30	250.405.607.679,30
Penambahan		107.031.421,00	13.959.077.650,00
1	Belanja Modal	0.00	8.932.275,00
2	Mutasi Masuk antar SKPD	40.000,00	13.488.036.275,00
3	Kapitalisasi/Koreksi/Penilaian	0,00	407.149.100,00
4	Hibah Masuk	107.031.421,00	54.960.000,00
Pengurangan		(255.826.000,00)	(18.991.925.276,00)
5	Mutasi Keluar antar SKPD	(40.000,00)	(13.488.036.275,00)
6	Koreksi	(67.526.000,00)	(2.000.001,00)
7	Hibah Keluar	(188.300.000,00)	(5.501.889.000,00)
Saldo Akhir		245.223.965.474,30	245.372.760.053,30

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Penjelasan mutasi Aset Tetap Tanah dengan uraian sebagai berikut:

1. Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar dengan jumlah total sebesar Rp40.000,00. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerima mutasi keluar dari Kecamatan Silat Hilir berupa Tanah bangunan negara golongan II pada Desa Bongkong tahun 1975 SMPN Bongkong dan Tanah bangunan negara golongan II pada Desa Bongkong tahun 1980 SDN Bongkong sebesar Rp40.000,00.
2. Hibah Masuk Tanah tahun 2023 sebesar Rp107.031.421,00 pada:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp51.067.421,00 yaitu Tanah di bawah jalan untuk Paket pekerjaan Jalan Hasan Basri; dan
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistic sebesar Rp55.964.000,00 terdiri dari Tower bts dusun sawah, Desa Benuis, Kec.selimbau Rp4.000.000,00, Tower Bts Dusun Keluin, Desa Mensiau, Kec.Batang Lupar Rp4.000.000,00, Tower Bts Dusun Sungai Mawang, Desa Sungai Mawang, Kec.Puring Kencana Rp4.000.000,00 Tower Bts Dusun Repun, Desa Pinang Laka, Kec.Pengkadan Rp4.000.000,00 Tower Bts Jl. Dusun Sadap, Desa Benua Sadap, Kec.Embaloh Hulu Rp4.000.000,00 Tower Bts Jalan Sungai Dhian, Desa Emperiang, Kec.Seberuang Rp4.000.000,00 Tower Bts Dusun Teluk Saka, Desa Jongkong Kiri Hulu, Kec.Jongkong Rp4.000.000,00 Tower Bts Jl.Manggis, Dusun Kedaung 2, Desa Nibung, Kec.Selimbau Rp4.000.000,00 tanah untuk bangunan Tower Bts Dusun Nanga Lot, Desa Nanga Lot, Kec.Seberuang Rp2.000.000,00 Tower Bts Desa Bati, Kec.Seberuang Rp4.000.000,00 Tower Bts Dusun Suka Makmur jalan mersat Desa Belimbing Kec.Silat Hulu Rp4.000.000,00 Tower Bts jalan Singa Layang Dusun Sepan Padang Desa Bahenap Kec.Kalis Rp4.000.000,00 Tower Bts jalan lintas timur Dusun Roban Desa Tanjung Kec.Mentebah Rp364.000,00 Tower Bts jalan. Lintas Batang Kalis Dusun Landau Belaban Desa Kensuray Kec.Kalis Rp4.000.000,00 Tower Bts jalan bbm Dusun Segitak Kanan Desa Segitak Kec.Bunut Hulu Rp5.600.000,00.
3. Koreksi Pencatatan:
 - a. Koreksi keluar Tanah 2023 sebesar (Rp7.526.000,00) pada Sekretariat Daerah dengan nomor Koreksi Hapus Double catat dengan BKAD No.000.2.5/2647/SET

DA/UM dan Koreksi hapus *double* catat dengan KIB Selimbau No. 000.2.5/2786/SET DA/UM; dan

- b. Koreksi keluar Tanah sebesar (Rp60.000.000,00) pada Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata yaitu koreksi hapus *double* catat tanah stasiun olah raga tahun 2024 di Kecamatan Seberuang.
4. Hibah Keluar tahun 2023 sebesar (Rp188.300.000,00) berupa hibah tanah kepada Kepolisian.

7.6.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023
(Rp)

472.436.594.827,14

31 Desember 2022
(Rp)

454.706.682.342,78

Kebijakan Akuntansi terkait Peralatan dan Mesin terkait biaya perolehan peralatan dan mesin yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap antara lain, biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp472.436.594.827,14 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp454.706.682.342,78. Mutasi aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 81. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Saldo per 31 Desember 2023	Saldo per 31 Desember 2022	Naik/(Turun)
1	Alat Berat	23.387.819.142,37	23.387.819.142,37	0,00
2	Alat Angkutan	113.388.076.929,72	110.654.954.133,31	2.733.122.796,41
3	Alat Bengkel dan Ukur	3.365.163.064,63	3.309.509.202,63	55.653.862,00
4	Alat Pertanian dan Peternakan	1.745.496.726,32	1.813.111.226,32	(67.614.500,00)
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	64.590.617.660,57	63.428.150.542,15	1.162.467.118,42
6	Alat Komputer	97.588.878.023,71	92.462.126.135,85	5.126.751.887,86
7	Alat Studio dan Komunikasi	12.681.796.218,54	13.093.169.695,58	(411.373.477,04)
8	Alat Kedokteran	115.760.619.037,58	110.333.739.771,69	5.426.879.265,89
9	Alat Laboratorium	24.723.048.231,25	21.361.752.835,00	3.361.295.396,25
10	Alat Praktek dan alat peraga	7.473.689.264,78	7.130.959.130,21	342.730.134,57
11	Alat Keamanan dan keselamatan	66.806.439,69	66.806.439,69	0,00
12	Rambu-rambu	6.734.454.161,71	6.734.454.161,71	0,00
13	Alat-alat Olah Raga	633.227.543,36	633.227.543,36	0,00
14	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	296.902.382,91	296.902.382,91	0,00
	Jumlah	472.436.594.827,14	454.706.682.342,78	17.729.912.484,36

Mutasi aset tetap peralatan dan mesin TA 2023 dan TA 2022 secara keseluruhan dapat dilihat dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 82. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		454.706.682.342,78	428.630.039.670,71
Penambahan		34.721.369.520,81	44.161.128.597,54
1	Belanja Modal	25.419.577.448,00	31.320.262.383,01
2	Mutasi Masuk	1.895.252.226,70	8.114.400.561,34
3	Atribusi/Penunjang	97.020.475,73	119.610.865,49
4	Reklasifikasi Masuk	5.609.741.052,81	4.277.988.340,40
5	Reklas ke Aset Lain-lain	22.411.250,00	0,00
6	Belanja Jasa ke Modal	0,00	316.366.447,05
7	Koreksi Tambah	5.382.207,57	12.500.000,25
8	Hibah masuk	1.671.984.860,00	0,00
Pengurangan		(16.991.457.036,45)	(18.084.485.925,47)
9	Mutasi Keluar	(1.844.262.227,10)	(8.118.031.811,34)
10	Reklasifikasi Kurang	(5.164.394.071,01)	(5.791.300.221,72)
11	Reklas ke Aset Lain-lain	(5.814.412.983,03)	0,00
13	Penghapusan	(1.547.352.919,67)	0,00
14	Ekstrakomptabel	(2.521.891.765,98)	(2.447.912.872,93)
15	Koreksi Kurang	(99.143.069,66)	(1.727.241.019,48)
Saldo Akhir		472.436.594.827,14	454.706.682.342,78

Penjelasan rincian masih-masing jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan uraian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin Alat-alat Berat

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Berat per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp23.387.819.142,37 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp23.387.819.142,37 Adapun rincian mutasi peralatan dan mesin alat berat per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 83. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Berat Tahun 2023 dan 2022

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		23.387.819.142,37	20.513.842.874,04
Penambahan		38.003.214,83	2.873.976.268,33
1	Belanja Modal	37.999.053,00	432.217.480,00
2	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	4.161,83	3.518.693,90
3	Reklasifikasi Masuk	0,00	2.438.240.094,43
Pengurangan		(38.003.214,83)	(0,00)
4	Mutasi Keluar	(38.003.214,83)	(0,00)
Saldo Akhir		23.387.819.142,37	23.387.819.142,37

Rekapitulasi koreksi dan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Berat pada **Lampiran 8**.

1. Belanja Modal dengan jumlah total sebesar Rp37.999.053,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp17.000.053,00, belanja modal pada Kecamatan Embaloh Hulu sebesar Rp10.500.000,00 dan belanja modal pada Kecamatan Silat Hulu sebesar Rp10.499.000,00
2. Atribusi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp4.161,83
3. Reklas Keluar sebesar (Rp38.003.214,83) pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar (Rp17.004.214,83) dari alat berat ke alat rumah tangga 1 unit genset tahun 2023, pada Kecamatan Embaloh Hulu sebesar (Rp10.500.000,00) dari alat berat ke alat rumah tangga 1 unit genset tahun 2023 dan

pada Kecamatan Silat hulu sebesar (Rp10.499.000,00) dari alat berat ke alat rumah tangga 1 unit genset tahun 2023.

2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Angkutan

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Angkutan per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp113.388.076.929,72 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp110.654.954.133,31 Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Angkutan per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 84. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan Tahun 2023 dan 2022

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		110.654.954.133,31	106.723.110.566,84
Penambahan		4.936.930.746,83	11.513.708.075,26
1	Belanja Modal	3.104.691.500,00	5.520.297.100,00
2	Mutasi Masuk	1.319.437.662,50	5.471.122.239,63
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	5.600.334,34	15.108.735,58
4	Reklas ke aset Lain-lain	22.411.250,00	0,00
5	Reklasifikasi Masuk	0,00	494.680.000,05
6	Koreksi Tambah	50.989.999,99	12.500.000,00
7	Hibah masuk	433.800.000,00	0,00
Pengurangan		(2.203.807.950,42)	(7.581.864.508,79)
8	Mutasi Keluar	(1.319.437.662,50)	(5.471.122.239,63)
9	Koreksi Kurang	(91.392.785,36)	(2.110.742.269,16)
10	Reklas ke aset Lain-lain	(784.742.502,56)	(0,00)
11	Penghapusan	(8.235.000,00)	(0,00)
Saldo Akhir		113.388.076.929,72	110.654.954.133,31

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Angkutan dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklasifikasi pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Angkutan dengan uraian sebagai berikut:

- Realisasi belanja modal alat-alat angkutan tahun 2023 telah direalisasikan Belanja Modal sebesar Rp3.104.691.500,00 dari beberapa SKPD antara lain:
 - Dinas pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp140.400.000,00;
 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.629.800.500,00;
 - Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan lingkungan hidup sebesar Rp39.920.000,00;
 - Sekretariat daerah sebesar Rp93.649.000,00;
 - Sekretariat DPRD sebesar Rp34.700.000,00;
 - Kecamatan boyan tanjung sebesar Rp39.920.000,00;
 - Kecamatan bunut hulu sebesar Rp51.781.000,00;
 - Kecamatan pengkadan sebesar Rp27.889.000,00;
 - Kecamatan hulu gurung sebesar Rp23.232.000,00; dan
 - Kecamatan seberuang sebesar Rp23.400.000,00.



b. Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar antar SKPD

Mutasi masuk dan mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp1.319.437.662,50 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dengan surat persetujuan mutasi barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 dengan Surat Persetujuan Mutasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu nomor 900.1.6.3/BKAD/ASD tahun 2023. Rincian mutasi masuk dan mutasi keluar antar SKPD dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 85. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	HONDA GL15B1DF	2013	18.891.908,59	Kecamatan Putussibau Selatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	YAMAHA 3C1	2012	26.000.000,00	Kecamatan Silat Hulu
Jumlah			44.891.908,59	

Tabel 86. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KAWASAKI TRAIL	2014	28.483.333,33	Sekretariat Daerah
Jumlah			28.483.333,33	

Tabel 87. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	YAMAHA AEROX	2016	19.706.627,25	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	YAMAHA VIXION	2012	23.500.000,00	Kecamatan Batang Lupar
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	HONDA CB 150R	2016	27.850.382,14	Kecamatan Putussibau Utara
Jumlah			71.057.009,39	

Tabel 88. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	YAMAHA 2TP	2015	25.310.000,00	Kecamatan Putussibau Utara
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Yamaha IS7 Jupiter MX	2006	14.300.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Jumlah			39.610.000,00	

**Tabel 89. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan**

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas Pertanian dan Pangan	YAMAHA RX KING	2007	17.000.000,00	BPBD
Jumlah			17.000.000,00	

Tabel 90. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Honda A/T	2018	19.274.817,71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah			19.274.817,71	

Tabel 91. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas Perhubungan	HONDA MEGA PRO GL 160 B	2010	16.795.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Perhubungan	HONDA MEGA PRO GL 15A 1RR M/T	2013	21.444.000,00	Sekretariat Daerah
Dinas Perhubungan	YAMAHA FINO BJ8 W	2018	18.511.705,76	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata
Dinas Perhubungan	YAMAHA AEROX B65	2019	24.332.178,60	Kecamatan Batang Lupar
Jumlah			81.082.884,36	

Tabel 92. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	KAWASAKI KLX	2016	30.808.870,82	Sekretariat Daerah
Jumlah			30.808.870,82	

Tabel 93. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	YAMAHA JUPITER MX CW NEW	2012	17.160.038,00	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata
Jumlah			45.160.038,00	



Tabel 94. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	KAWASAKI D- TRACKER	2016	32.487.928,12	Kecamatan Silat Hulu
Jumlah			32.487.928,12	

Tabel 95. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	RX KING	2007	18.235.800,00	Badan Pengelola Perbatasan
Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	Yamaha Jupiter MX	2011	18.507.358,00	Kecamatan Bika
Jumlah			36.743.158,00	

Tabel 96. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Kecamatan Pengkadan	MEGA PRO	2012	20.100.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah			20.100.000,00	

Tabel 97. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	YAMAHA JUPITER Z CW F1	2015	16.620.000,00	Inspektorat
Jumlah			16.620.000,00	

Tabel 98. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Kecamatan Kalis	YAMAHA WR.155	2021	36.508.737,00	Kecamatan Bunut Hilir
Jumlah			36.508.737,00	

Tabel 99. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Kecamatan Bunut Hulu	YAMAHA VIXION	2015	25.990.000,00	Kecamatan Putussibau Selatan
Kecamatan Bunut Hulu	YAMAHA AEROX	2020	25.000.000,00	Kecamatan Putussibau Selatan
Jumlah			50.990.000,00	



Tabel 100. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Setda	YAMAHA ALL NEW VIXION	2018	27.813.428,66	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Setda	ALL NEW NMAX / YAMAHA B6H-AI A/T	2022	35.034.353,41	Dinas Perikanan
Jumlah			62.847.782,07	

Tabel 101. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Bapenda	YAMAHA AEROX 155 CONNECTED	2021	27.634.245,93	Dinas Perikanan
Bapenda	YAMAHA ALL NEW SOUL GT 125 AKS	2018	19.388.555,25	Dinas Perikanan
Bapenda	SUZUKI SMASH	2010	18.979.273,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah			66.002.074,18	

Tabel 102. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Inspektorat	YAMAHA VIXION	2012	23.500.000,00	Badan Pengelola Perbatasan
Inspektorat	YAMAHA NEW VIXION	2010	25.055.000,00	Bappeda
Jumlah			48.555.000,00	

Tabel 103. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Kecamatan Bika	YAMAHA UE11	2016	17.310.434,00	Kecamatan Bunut Hulu
Jumlah			17.310.434,00	

Tabel 104. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis / Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Bappeda	HONDAVARI O125	2014	25.564.074,75	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Bappeda	HONDAFER ZA	2016	20.330.000,00	Kecamatan Putussibau Utara
Bappeda	HONDASUP RAX125F1S W	2015	18.140.721,09	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Jumlah			64.034.795,84	



Tabel 105. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Kecamatan Batang Lupar	SUZUKI EN125	2012	16.996.250,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah			16.996.250,00	

Tabel 106. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Badan Pengelola Perbatasan	HONDA VARIO	2019	27.433.526,61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Pengelola Perbatasan	YAMAHA BK8	2018	27.873.532,33	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Badan Pengelola Perbatasan	HONDA VERZA	2016	20.410.000,00	Kecamatan Putussibau Utara
Badan Pengelola Perbatasan	HONDA VARIO	2020	26.240.318,01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah			101.957.376,95	

Tabel 107. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Sekretariat Daerah	YAMAHA / VIXION	2018	27.951.317,73	Sekretariat DPRD
Sekretariat Daerah	Honda GLI5AIRR M/T	2012	27.202.153,00	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sekretariat Daerah	Yamaha Mio M3	2018	17.322.745,24	Kecamatan Putussibau Utara
Sekretariat Daerah	HONDA CBR	2016	26.150.000,00	Dinas Perhubungan
Sekretariat Daerah	Yamaha All New Soul GT 125	2015	16.990.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sekretariat Daerah	Trael / Yamaha RX King	2008	22.411.250,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Jumlah			138.027.465,97	

Tabel 108. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Yamaha Aerox 125 LC	2016	19.706.627,25	Dinas Perikanan
Jumlah			19.706.627,25	

Tabel 109. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Kecamatan Semitau	YAMAHA 2PV (MX KING)	2018	22.652.000,00	Kecamatan Mentebah
Jumlah			22.652.000,00	

Tabel 110. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas Perikanan	YAMAHA 2P2 JUPITER Z	2008	18.608.000,00	Sekretariat Daerah
Dinas Perikanan	Honda NF 100 SE	2008	15.000.000,00	Sekretariat Daerah
Dinas Perikanan	Jupiter Z1	2014	16.160.000,00	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata
Dinas Perikanan	HONDA GL 15A1DM	2011	33.079.887,64	Kecamatan Putussibau Selatan
Dinas Perikanan	YAMAHA VIXION	2019	29.718.021,28	Kecamatan Pengkadan
Dinas Perikanan	YAMAHA VIXION / 1PA	2013	19.772.000,00	Kecamatan Selimbau
Jumlah			132.337.908,92	

Tabel 111. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Angkutan

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Kecamatan Puring Kencana	YAMAHA VIXION	2012	23.171.262,00	Kecamatan Batang Lupar
Kecamatan Puring Kencana	CRF	2020	35.020.000,00	Sekretariat Daerah
Jumlah			58.191.262,00	

- c. Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang Tahun 2023 pada alat angkutan sebesar Rp5.600.334,34 terdapat pada SKPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp643.809,22 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.737.596,41 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.492.107,41 pada Kecamatan Pengkadan sebesar Rp645.172,40 pada Kecamatan Hulu Gurung sebesar Rp628.960,42 pada Kecamatan Seberuang sebesar Rp452.688,48.
- d. Reklas masuk ke aset Lain-lain sebesar Rp22.411.250,00 tahun 2023 pada Sekretariat Daerah
- e. Koreksi Tambah sebesar Rp50.989.999,99 pada Kecamatan Bunut Hulu, ke Kecamatan Putussibau Selatan.
- f. Hibah masuk pada aset tetap peralatan dan mesin alat angkutan tahun 2023 sebesar Rp433.800.000,00 Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kapuas hulu
- g. Koreksi Kurang sebesar (Rp91.392.785,31) pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar (Rp0,05).

- h. Reklas ke aset Lain-lain sebesar (Rp784.742.502,56) terdiri dari beberapa SKPD antara lain: pada dinas Kesehatan sebesar (Rp26.000.000,00), pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar (Rp124.730.000,00), pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan (Rp17.275.500,00), pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar (Rp25.300.000,00), pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar (Rp184.000.000,00) pada Dinas Perikanan sebesar (Rp16.996.250,00), pada Sekretariat Daerah sebesar (Rp278.585.234,00), pada Kecamatan Bunut Hulu sebesar (Rp35.185.800,00), pada Kecamatan Silat Hilir sebesar (Rp76.669.718,56)
- i. Penghapusan aset tetap peralatan dan mesin alat angkutan tahun 2023 sebesar (Rp8.235.000,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan Ukur

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp3.365.163.064,63 dan 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp3.309.509.202,63 terdapat kenaikan sebesar Rp55.653.862,00 Pada tahun 2023 terdapat koreksi-koreksi sebagaimana rincian mutasi tetap peralatan dan mesin alat bengkel dan alat ukur per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 112. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan Alat Ukur
Tahun 2023 dan 2022**

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		3.309.509.202,63	3.332.102.347,72
Penambahan		103.534.362,00	383.606.618,41
1	Belanja Modal	6.680.900,00	285.775.000,00
2	Mutasi Masuk	4.000.000,00	69.771.689,28
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	1.635,57	1.788.382,30
4	Reklas ke aset Lain-lain	0,00	0,00
5	Reklasifikasi Masuk	3.226.576,43	26.271.546,84
6	Koreksi Tambah	0,00	0,00
7	Hibah masuk	89.625.250,00	0,00
Pengurangan		(47.880.500,00)	(406.199.763,50)
8	Mutasi Keluar	(4.000.000,00)	(69.771.689,28)
9	Reklas ke aset Lain-lain	(42.960.000,00)	(0,00)
10	Reklasifikasi Kurang	(0,00)	(140.966.113,52)
11	Ekstrakomptabel	(920.500,00)	(191.580.000,00)
12	Koreksi Kurang	(0,00)	(3.881.960,70)
Saldo Akhir		3.365.163.064,63	3.309.509.202,63

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan Ukur dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

Penjelasan koreksi aset tetap Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan Ukur dengan uraian sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp6.680.900,00 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Mutasi Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan Ukur pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp4.000.000,00

- c. Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang sebesar Rp1.635,57 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan Ukur sebesar Rp3.226.576,43 pada dinas pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp920.500,00 dan pada dinas perpustakaan dan kearsipan sebesar Rp2.306.076,43
- e. Reklas ke aset Lain-lain. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan Ukur sebesar (Rp42.960.000,00) pada Dinas Perikanan
- f. Ekstrakomptabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Bengkel dan Ukur sebesar (Rp920.500,00) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pertanian dan Peternakan

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Pertanian dan Peternakan Per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp1.745.496.726,32 dan saldo per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.813.111.226,32 terdapat Penurunan sebesar (Rp67.614.500,00) sementara penurunan tersebut diakibatkan dari reklasifikasi dan mutasi tahun 2023.

Rincian Peralatan dan Mesin Alat Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 113. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pertanian dan Peternakan Tahun 2023 dan 2022

Uraian		Saldo 2022	Saldo 2021
Saldo Awal		1.813.111.226,32	1.835.967.843,67
Penambahan		-	104.311.332,25
1	Belanja Modal	0,00	99.888.000,00
2	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00	4.423.332,25
Pengurangan		(67.614.500,00)	(127.167.949,60)
3	Reklasifikasi Kurang	(0,00)	(71.069.544,43)
4	Reklas ke aset Lain-lain	(67.614.500,00)	(0,00)
5	Ekstrakomptabel	(0,00)	(0,00)
6	Koreksi Kurang	(0,00)	(56.098.405,17)
Saldo Akhir		1.745.496.726,32	1.813.111.226,32

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Pertanian dan Peternakan dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

Penjelasan koreksi aset tetap Peralatan dan Mesin Alat Pertanian dan Peternakan dengan uraian Reklas ke aset Lain-lain sebesar (Rp67.614.500,00) pada Dinas Perikanan.

5. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga Per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp64.590.617.660,57 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp63.428.150.542,15, terdapat kenaikan sebesar Rp1.162.467.118,42 dari tahun 2022. Adapun rincian koreksi-koreksi tambah dan kurang tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 114. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2023 dan 2022**

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		63.428.150.542,15	60.182.012.451,14
Penambahan		6.269.975.717,35	7.481.932.332,96
1	Belanja Modal	3.158.998.287,00	3.315.095.177,00
2	Mutasi Masuk	0,00	889.512.329,26
3	Kapitalisasi/atribusi/Penunjang	33.200.035,53	12.676.850,80
4	Reklasifikasi Masuk	2.891.551.394,82	3.071.738.128,85
5	Hibah Masuk	126.226.000,00	0,00
6	Belanja Barang dan Jasa ke Modal	60.000.000,00	192.909.847,05
Pengurangan		(5.107.508.598,93)	(4.235.794.241,95)
7	Mutasi Keluar	(0,00)	(889.512.329,26)
8	Reklas Kurang	(48.892.517,69)	(1.222.149.533,58)
9	Reklas ke Aset Lain-lain	(1.811.965.793,20)	(0,00)
10	Ekstracomptabel	(2.408.532.440,41)	(2.124.132.379,11)
11	Penghapusan	(836.366.889,54)	(0,00)
12	Koreksi	(1.750.958,09)	(0,00)
Saldo Akhir		64.590.617.660,57	63.428.150.542,15

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

Penjelasan mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga dengan uraian sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Modal tahun 2023 terdapat pada skpd Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.291.485.500,00, pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp257.821.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp26.000.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp8.091.900,00 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp8.545.000,00 pada Dinas Pertanian dan Pangan Rp100.335.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp35.292.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp4.570.000,00 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp11.932.500,00 pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebesar Rp19.565.000,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebesar Rp9.950.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp13.740.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp16.574.000,00 pada Dinas Perikanan sebesar Rp22.240.000,00 pada Inspektorat sebesar Rp43.300.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp195.500.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp30.570.000,00 pada Badan Pengelola Perbatasan sebesar Rp24.114.375,00 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp809.824.250,00 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp52.657.500,00 pada Kecamatan Putussibau Utara sebesar Rp13.348.000,00 pada Kecamatan Kalis sebesar Rp27.987.000,00 pada Kecamatan Embaloh Hulu sebesar Rp12.600.000,00 pada Kecamatan Mentebah sebesar Rp13.796.482,00 pada Kecamatan Pengkadan sebesar Rp30.900.000,00 pada Kecamatan Hulu Gurung sebesar Rp67.609.780,00 pada Kecamatan Suhaid sebesar Rp4.549.000,00 pada Kecamatan Silat Hulu sebesar Rp300.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp5.800.000,00



- b. Kapitalisasi/atribusi/Penunjang Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2023 sebesar Rp33.200.035,53
- c. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2023 sebesar Rp2.891.551.394,82 terdiri dari skpd Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.728.371.989,60 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp72.486.714,38 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp49.813.659,35 pada Kecamatan Putussibau Utara sebesar Rp10.630.031,49 pada Kecamatan Embaloh Hulu sebesar Rp14.500.000,00 pada Kecamatan Silat Hulu sebesar Rp15.749.000,00
- d. Hibah Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2023 sebesar Rp126.226.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp33.300.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp92.926.000,00
- e. Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Modal pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp60.000.000,00 pada Sekretariat Daerah
- f. Reklas Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2023 sebesar (Rp 48.892.517,69) terdapat pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar (Rp37.232.000,00) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar (Rp5.906.686,63) dan pada Kecamatan Silat Hulu sebesar (Rp5.753.831,06)
- g. Reklas ke Aset Lain-lain Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2023 sebesar (Rp1.811.965.793,20) terdiri dari SKPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar (Rp610.252.882,40) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar (Rp11.746.966,16) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar (Rp58.265.768,34) pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar (Rp15.272.700,00) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar (Rp15.022.652,11) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebesar (Rp022.420.044,50) pada Dinas Perikanan sebesar (Rp109.871.283,40) pada Inspektorat sebesar (Rp41.500.000,00) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar (Rp237.190.816,17) pada Sekretariat Daerah sebesar (Rp395.658.375,41) pada Kecamatan Embaloh Hilir sebesar (Rp12.184.500,00) pada Kecamatan Boyan Tanjung sebesar (Rp7.049.916,81) pada Kecamatan Bunut Hulu sebesar (Rp1.000.000,00) pada Kecamatan Empanang sebesar (Rp42.845.291,48) pada Kecamatan Puring Kencana sebesar (Rp50.480.000,00) pada Kecamatan Seberuang sebesar (Rp35.700.000,00) pada Kecamatan Silat Hilir sebesar (Rp20.750.000,00) dan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar (Rp124.754.596,42)
- h. Ekstracomptabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2023 sebesar (Rp2.408.532.440,41)
- i. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2023 sebesar (Rp836.366.889,54)
- j. Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2023 sebesar (Rp1.750.958,09)

6. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Peralatan Komputer

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Peralatan Komputer Per 31 Desember 2023 sebesar Rp97.588.878.023,71 (*Audited*) dan saldo Per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp92.462.126.135,85. Pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengakui Penambahan Aset Tetap Peralatan Komputer dari Realisasi Belanja Modal bersumber dari APBD sebesar Rp5.248.463.502,00 selain itu juga terjadi mutasi Aset Tetap dan koreksi bertambah maupun koreksi berkurang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 115. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Peralatan Komputer Tahun 2023 dan 2022

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		92.462.126.135,85	83.887.234.460,71
Penambahan		8.203.513.453,75	10.509.797.567,76
1	Belanja Modal	5.248.463.502,00	8.614.991.286,01
2	Mutasi Masuk	566.274.256,79	1.386.727.961,47
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	47.915.339,56	44.077.774,68
4	Reklasifikasi Masuk	2.201.375.105,92	362.435.545,37
5	Hibah Masuk	135.854.000,00	0,00
6	Belanja Jasa ke Modal	0,00	101.565.000,00
7	Koreksi Tambah	3.631.249,48	0,23
Pengurangan		(3.076.761.565,89)	(1.934.905.892,62)
8	Mutasi Keluar	(566.274.257,18)	(1.386.727.961,47)
9	Reklas Kurang	(85.292.277,06)	(525.289.341,53)
10	Reklas ke Aset Lain-lain	(1.972.700.892,96)	(0,00)
11	Ekstrakomptabel	(11.096.417,00)	(6.140.189,62)
12	Penghapusan	(441.397.721,69)	(0,00)
13	Ekstrakomptabel BOS	(0,00)	(16.748.400,00)
Saldo Akhir		97.588.878.023,71	92.462.126.135,85

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Peralatan Komputer dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

Penjelasan koreksi aset tetap Peralatan dan Mesin Peralatan Komputer dengan uraian sebagai berikut:

- Aset Tetap Peralatan Komputer TA 2023 adalah sebesar Rp97.542.108.023,71 yang terdiri atas belanja modal peralatan komputer sebesar Rp5.248.463.502,00 Rincian per SKPD dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 116. Belanja Modal Aset Tetap Peralatan Komputer

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.071.628.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.277.162.427,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	165.045.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	56.800.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	67.285.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan	21.145.000,00
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	34.960.000,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	45.200.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	58.700.000,00
10	Dinas Perhubungan	26.728.000,00



No	SKPD	Jumlah
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik	61.681.000,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	19.490.900,00
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	3.999.375,00
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	84.591.000,00
15	Dinas Perikanan	11.790.000,00
16	Inspektorat	156.303.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	75.525.000,00
18	Badan Keuangan Daerah	138.468.200,00
19	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	97.895.000,00
20	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	21.624.000,00
21	Sekretariat Daerah	317.585.500,00
22	Sekretariat Dprd	59.369.000,00
23	Kecamatan Embaloh Hilir	27.470.000,00
24	Kecamatan Embaloh Hulu	13.990.000,00
25	Kecamatan Boyan Tanjung	32.850.900,00
26	Kecamatan Bunut Hulu	21.990.000,00
27	Kecamatan Mentebah	25.999.700,00
28	Kecamatan Jongkong	14.000.000,00
29	Kecamatan Hulu Gurung	34.744.500,00
30	Kecamatan Badau	19.900.000,00
31	Kecamatan Batang Lupar	27.570.000,00
32	Kecamatan Puring Kencana	39.568.000,00
33	Kecamatan Suhaid	26.978.000,00
34	Kecamatan Seberuang	11.750.000,00
35	Kecamatan Silat Hulu	32.498.000,00
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	27.099.000,00
37	Badan Pendapatan Daerah	19.080.000,00
Jumlah Total		5.248.463.502,00

- b. Mutasi Masuk selama tahun berjalan pada tahun 2023 berdasarkan Surat nomor : 900.1.6.3/BKAD/ASD tahun 2023 terdiri dari beberapa SKPD dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 117. Mutasi Aset Tetap Komputer

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas perhubungan	TOSHIBA SATELITE L745-S4210	2012	14.960.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas perhubungan	ASUS	2014	6.947.514,01	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata
Dinas perhubungan	HP SPECTRA	2021	29.181.739,48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jumlah			51.089.253,49	



Tabel 118. Mutasi Aset Tetap Komputer

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	ASUS / FX553V	2018	18.414.111,97	Kecamatan Silat Hilir
Jumlah			18.414.111,97	

Tabel 119. Mutasi Aset Tetap Komputer

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	ASUS	2018	8.861.743,20	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	LENOVO	2015	12.503.656,12	Kecamatan Putussibau Utara
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	DELL INSPIRON	2018	18.414.111,97	Kecamatan Batang Lupar
Jumlah			39.779.511,29	

Tabel 120. Mutasi Aset Tetap Komputer

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Sekretariat DPRD	ASUS CORE i7	2020	14.912.482,96	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Sekretariat DPRD	Asus Core i7	2018	18.414.111,97	Dinas Perikanan
Jumlah			29.824.965,92	

Tabel 127. Mutasi Aset Tetap Komputer

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Badan Pendapatan Daerah	ASUS / FX553V	2018	18.414.111,97	Dinas Perikanan
Badan Pendapatan Daerah	ACER ONE 14Z1402-5731	2016	10.184.303,49	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah			28.598.415,46	

Tabel 128. Mutasi Aset Tetap Komputer

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	ASUS VIVO SLATE T3300KA	2022	12.991.249,49	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	ASUS	2016	12.087.943,44	Satuan Polisi Pamong Praja



Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	ASUS	2016	12.087.943,44	Kecamatan Bika
Jumlah			37.167.136,37	

Tabel 129. Mutasi Aset Tetap Komputer

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Inspektorat	ACER / ASPIRE 5	2020	16.299.910,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Inspektorat	ACER / E5-473G-51CL	2015	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah			26.299.910,00	

Tabel 130. Mutasi Aset Tetap Komputer

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	GALAXY TAB S7	2021	17.957.993,53	Dinas Perhubungan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	ASUS	2016	8.337.386,88	Kecamatan Bika
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	GPD POCKET 2	2021	13.356.257,69	Dinas Perhubungan
Jumlah			39.651.638,10	

Tabel 131. Mutasi Aset Tetap Komputer

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas Pertanian dan Pangan	ACER	2021	10.140.538,66	BPBD
Dinas Pertanian dan Pangan	ACER	2021	10.140.538,66	Bappeda
Dinas Pertanian dan Pangan	ASUS ZENBOOK	2022	15.772.233,13	Dinas PUPR
Jumlah			36.053.310,45	

Tabel 132. Mutasi Aset Tetap Komputer

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	LENOVO	2015	12.503.656,12	Sekretariat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ACER E 14	2016	9.202.069,41	Kecamatan Putussibau Utara
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ACER	2019	7.065.329,93	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Jumlah			28.771.055,46	



Tabel 133. Mutasi Aset Tetap Komputer

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	ASUS	2019	7.746.089,34	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	HP PAVILION	2020	11.388.639,16	Dinas Pertanian dan Pangan
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	ASUS	2019	8.546.097,94	Sekretariat Daerah
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	APPLE	2019	13.928.157,82	Sekretariat Daerah
Jumlah			41.608.984,26	

Tabel 134. Mutasi Aset Tetap Komputer

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Badan Pengelola Perbatasan	ASUS FX553V	2018	18.414.111,97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah			18.414.111,97	

Tabel 135. Mutasi Aset Tetap Komputer

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	ASUS A455L	2015	10.453.840,00	Kecamatan Putussibau Selatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	ASUS GL552V	2016	16.249.628,53	Kecamatan Mentebah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	MSI	2022	13.751.936,60	Kecamatan Putussibau Utara
Jumlah			40.455.405,13	

Tabel 136. Mutasi Aset Tetap Komputer

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	LENOVO	2018	6.720.616,51	Kecamatan Putussibau Utara
Jumlah			6.720.616,51	



Tabel 137. Mutasi Aset Tetap Komputer

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Kecamatan Embaloh Hilir	ASUS A46C	2013	10.811.800,00	Kecamatan Suhaid
Jumlah			10.811.800,00	

Tabel 138. Mutasi Aset Tetap Komputer

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
Sekretariat Daerah	Lenovo Yoga	2018	9.980.000,00	Kecamatan Mentebah
Sekretariat Daerah	Asus A455LD-WX104D	2015	10.140.013,43	Bappeda
Sekretariat Daerah	ACER	2018	10.107.142,86	Kecamatan Putussibau Utara
Sekretariat Daerah	APPLE	2016	10.981.400,00	Dinas Perhubungan
Jumlah			41.208.556,29	

Tabel 139. Mutasi Aset Tetap Komputer

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
DUKCAPIL	ASUS R7	2020	16.593.241,03	DINAS KOPERASI
Jumlah			16.593.241,03	

Tabel 140. Mutasi Aset Tetap Komputer

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
BKAD	Asus Zenbook Flip	2022	20.188.517,67	DINAS PERIKANAN
Jumlah			20.188.517,67	

Tabel 141. Mutasi Aset Tetap Komputer

Nama SKPD	Jenis/Merk TIPE	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Mutasi Ke
DINAS PERIKANAN	HP	2021	12.839.429,70	Setda
DINAS PERIKANAN	ASUS	2017	10.250.000,00	KEC.PENGKADAN
DINAS PERIKANAN	TOSHIBA	2013	11.534.285,72	KEC. SELIMBAU
Jumlah			34.623.715,42	

- c. Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang aset tetap Peralatan dan Mesin Alat komputer tahun 2023 sebesar Rp47.915.339,56 terdiri dari beberapa SKPD pada Dinas Kesehatan sebesar Rp312.665,95 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp47.219,41 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar Rp2.472.331,58 pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp1.164.087,68 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.172.717,98 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp221.420,35 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp827.239,76 pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik sebesar Rp694.789,38 pada Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata sebesar Rp17.162,76

pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp297.299,12 pada Dinas Perikanan sebesar Rp2.827.105,50 pada Inspektorat sebesar Rp5.108.636,79 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp10.316.730,02 pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp3.383.257,78 pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebesar Rp2.893.388,32 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp2.552.879,67 pada Kecamatan Embaloh Hilir sebesar Rp2.040.000,00 pada Kecamatan Embaloh Hulu sebesar Rp463.042,10 pada Kecamatan Hulu Gurung sebesar Rp940.638,58 pada Kecamatan Suhaid sebesar Rp581.883,46 pada Kecamatan Seberuang sebesar Rp227.311,52 pada Kecamatan Silat Hulu sebesar Rp1.193.531,85 dan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp8.160.000,00.

- d. Reklasifikasi Masuk aset tetap Peralatan dan Mesin Alat komputer tahun 2023 sebesar Rp2.201.375.105,92 terdiri dari SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.181.352.074,00 dan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik sebesar Rp20.023.031,89
- e. Hibah Masuk aset tetap Peralatan dan Mesin Alat komputer tahun 2023 sebesar Rp89.084.000,00 pada Badan dan Aset Daerah dan sebesar Rp46.770.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa Laptop.
- f. Koreksi Tambah aset tetap Peralatan dan Mesin Alat komputer tahun 2023 sebesar Rp3.631.249,48 pada Badan Pendapatan Daerah.
- g. Reklas Kurang aset tetap Peralatan dan Mesin Alat komputer tahun 2023 sebesar (Rp85.292.277,06) terdapat pada SKPD Dinas Kesehatan sebesar (Rp79.292.277,06) dan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan sebesar (Rp6.000.000,00)
- h. Reklas ke Aset Lain-lain aset tetap Peralatan dan Mesin Alat komputer tahun 2023 sebesar (Rp1.972.700.892,96)
- i. Ekstrakomptabel aset tetap Peralatan dan Mesin Alat komputer tahun 2023 sebesar (Rp11.096.417,00)
- j. Penghapusan aset tetap Peralatan dan Mesin Alat komputer tahun 2023 sebesar (Rp441.397.721,69)

7. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Studio dan Komunikasi

Saldo Aset Tetap Alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp12.681.796.218,53 dan Saldo per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp13.093.169.695,58 Dimana selama TA 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengakui Penambahan Aset Tetap Alat Studio dan Komunikasi dari Realisasi Belanja Modal sebesar Rp215.702.000,00. Dan selama Tahun berjalan tersebut juga terjadi kegiatan Mutasi Aset Tetap dan Koreksi bertambah maupun Koreksi berkurang dengan rincian sebagai berikut:

Rincian peralatan dan mesin alat studio dan komunikasi per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 142. Mutasi Peralatan dan Mesin Alat Studio dan Komunikasi
Tahun 2023 dan 2022**

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		13.093.169.695,58	12.094.543.342,88
Penambahan		276.452.622,86	1.589.353.267,73
1	Belanja Modal	215.702.000,00	878.466.470,00
2	Mutasi Masuk	5.540.307,41	297.266.341,70



Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	5.171.019,84	10.456.371,86
4	Reklasifikasi Masuk	46.011.337,52	381.272.484,17
5	Hibah Masuk	2.277.000,00	0,00
6	Belanja Jasa ke Modal	0,00	21.891.600,00
7	Koreksi Tambah	1.750.958,09	0,00
Pengurangan		(687.826.099,91)	(590.726.915,03)
8	Mutasi Keluar	(5.540.307,41)	(297.266.341,70)
9	Reklasifikasi Kurang	(20.023.031,89)	(249.891.012,37)
10	Reklas ke Aset Lain-lain	(431.250.312,27)	(0,00)
11	Penghapusan	(215.799.383,07)	(0,00)
12	Ekstrakomptabel	(15.213.065,27)	(18.788.560,96)
13	Ekstrakomptabel BOS	(0,00)	(24.781.000,00)
Saldo Akhir		12.681.796.218,53	13.093.169.695,58

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Studio dan Komunikasi dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

Penjelasan koreksi aset tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Studio dan Komunikasi dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat-alat Studio dan Komunikasi adalah sebesar Rp215.702.000,00 yang terdapat pada beberapa SKPD dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 143. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat-alat Studio dan Komunikasi

No	SKPD	Realisasi 2023
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	9.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	35.450.000,00
3	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	19.750.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	3.108.000,00
5	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik	71.925.000,00
6	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	5.000.000,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.980.000,00
8	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.500.000,00
9	Sekretariat DPRD	43.040.000,00
10	Kecamatan Bunut Hulu	1.950.000,00
11	Kecamatan Silat Hulu	6.999.000,00
Jumlah Total		215.702.000,00

- Mutasi Masuk peralatan dan mesin alat-alat studio dan komunikasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ke Dinas Perhubungan sebesar Rp5.540.307,41;
- Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang Aset Tetap Peralatan dan Mesin alat-alat studio dan komunikasi sebesar Rp5.171.019,84 terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 144. Rincian Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang Peralatan dan Mesin Alat-alat Studio dan Komunikasi

No	Nama SKPD	Atribusi Belanja Modal
1	Dinas Kesehatan	8.678,62
2	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	859.657,54



No	Nama SKPD	Atribusi Belanja Modal
3	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik	810.180,22
4	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	21.456,80
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.363.269,98
6	Sekretariat DPRD	1.850.729,19
7	Kecamatan Silat Hulu	257.047,49
JUMLAH		5.171.019,84

- d. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin alat-alat studio dan komunikasi tahun 2023 sebesar Rp46.011.337,52 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 145. Rincian Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Studio dan Komunikasi

No	Nama SKPD	Reklas Tambah
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	10.652.000,00
2	Dinas Kesehatan	20.004.896,26
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan	6.000.000,00
4	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.600.610,20
5	Kecamatan Silat Hulu	5.753.831,06
JUMLAH		46.011.337,52

- e. Hibah Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin alat-alat studio dan komunikasi tahun 2023 sebesar Rp 2.277.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Koreksi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin alat-alat studio dan komunikasi tahun 2023 sebesar Rp1.750.958,09 pada Kecamatan Kalis;
- g. Reklasifikasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin alat-alat studio dan komunikasi tahun 2023 sebesar (Rp20.023.031,89) pada Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Statistik;
- h. Reklas ke Aset Lain-lain Aset Tetap Peralatan dan Mesin alat-alat studio dan komunikasi tahun 2023 sebesar (Rp431.250.312,27) terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 146. Rincian Reklas ke Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin Alat-alat Studio dan Komunikasi

No	Nama SKPD	Reklas ke Aset Lain-lain
1	Dinas Pertanian dan Pangan	(29.645.180,80)
2	Dinas Komunikasi dan Informatika Dan Statistik	(124.017.000,00)
3	Dinas Perikanan	(95.900.000,00)
4	Sekretariat Daerah	(130.466.131,47)
5	Kecamatan Embaloh Hilir	(15.722.000,00)
6	Kecamatan Boyan Tanjung	(12.000.000,00)
7	Kecamatan Seberuang	(5.500.000,00)
8	Kecamatan Silat Hilir	(18.000.000,00)
JUMLAH		(431.250.312,27)



- i. Penghapusan peralatan dan mesin alat-alat studio dan komunikasi tahun 2023 sebesar (Rp215.799.383,07) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (Rp15.628.000,00) dan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar (Rp9.500.000,00);
- j. Ekstrakomptabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin alat-alat studio dan komunikasi tahun 2023 sebesar (Rp15.213.065,27).

**Tabel 147. Rincian Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin
Alat-alat Studio dan Komunikasi**

No	Nama SKPD	Ekstrakomptabel
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	(860.000,00)
2	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik	(2.791.089,29)
3	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(9.500.000,00)
4	Kecamatan Kalis	(1.750.958,08)
5	Kecamatan Silat Hulu	(311.017,90)
JUMLAH		(15.213.065,27)

8. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kedokteran

Saldo Aset Tetap Alat Kedokteran per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp115.760.619.037,58 dan saldo per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp110.333.739.771,69. Pada TA 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengakui penambahan Aset Tetap Alat Kedokteran dari Realisasi Belanja Modal sebesar Rp5.295.242.255,00. Selain itu juga terjadi mutasi Aset Tetap dan koreksi bertambah maupun Koreksi berkurang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 148. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Alat-alat Kedokteran Tahun 2023 dan 2022**

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		110.333.739.771,69	104.930.538.076,89
Penambahan		6.144.742.891,49	5.522.572.252,44
1	Belanja Modal	5.295.242.255,00	5.519.699.487,00
2	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	1.488.248,97	2.872.765,44
3	Reklas Masuk	23.809.777,52	0,00
4	Hibah	824.202.610,00	0,00
Pengurangan		(717.863.625,60)	(119.370.557,64)
4	Reklasifikasi Kurang	(0,00)	(100.052.166,80)
5	Koreksi	(5.999.326,26)	(0,00)
6	Ekstrakomptabel	(11.494.163,30)	(19.318.390,84)
7	Reklas ke Aset Lain-lain	(700.370.136,04)	(0,00)
Saldo Akhir		115.760.619.037,58	110.333.739.771,69

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kedokteran dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

Penjelasan koreksi dan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kedokteran dengan uraian sebagai berikut:

- a. Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kedokteran tahun 2023 sebesar Rp5.295.242.255,00 adapun rincian terdiri dari beberapa SKPD antara lain : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp5.289.436.255,00 dan Dinas Pertanian dan Pangan Rp12.815.000,00.
- b. Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kedokteran tahun 2023 sebesar Rp1.488.248,97 pada SKPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.294.922,51 dan Dinas Pertanian dan Pangan Rp193.326,46.
- c. Reklas Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kedokteran tahun 2023 sebesar Rp23.809.777,52 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d. Hibah masuk sebesar Rp824.202.610,00 dari Kementrian Kesehatan pada Dinas Kesehatan berupa Alat-alat kedokteran
- e. Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kedokteran tahun 2022 sebesar (Rp5.999.326,26) pada dinas pertanian dan pangan
- f. Ekstrakomptabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kedokteran tahun 2022 sebesar (Rp11.494.163,30) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- g. Reklas ke Aset Lain-lain Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kedokteran tahun 2022 sebesar (Rp700.370.136,04) pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

9. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Laboratorium

Saldo Aset Tetap Alat Laboratorium per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.723.048.231,25 (*Audited*) dan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.361.752.835,00 (*Audited*). Pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengakui penambahan Aset Tetap Alat Laboratorium dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp3.380.478.953,00 selain itu juga terjadi mutasi Aset Tetap dan koreksi bertambah maupun koreksi berkurang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 149. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Alat Laboratorium Tahun 2023 dan 2022

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		21.361.752.835,00	21.075.153.926,46
Penambahan		3.460.709.501,62	1.802.407.580,76
1	Belanja Modal	3.380.478.953,00	1.617.906.000,00
2	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	2.777.668,60	9.208.750,50
3	Reklasifikasi Masuk	77.452.880,02	175.292.830,26
Pengurangan		(99.414.105,37)	(1.515.808.672,22)
4	Reklasifikasi Kurang		(1.414.105.482,39)
5	Ekstrakomptabel	(53.860.180,00)	(25.091.395,79)
6	Penghapusan	(45.553.925,37)	
7	Koreksi Kurang		(76.611.794,04)
Saldo Akhir		24.723.048.231,25	21.361.752.835,00

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Laboratorium dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

Penjelasan koreksi dan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Laboratorium dengan uraian sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Laboratorium sebesar Rp3.380.478.953,00 realisasi tersebut pada SKPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp3.277.668.953,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp57.810.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup sebesar Rp45.000.000,00
- Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Laboratorium sebesar Rp2.777.668,60 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp802.415,76 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sebesar Rp16.539,45 Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Sebesar Rp1.958.713,39
- Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Laboratorium sebesar Rp77.452.880,02 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Ekstrakomptabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Laboratorium sebesar (Rp53.860.180,00) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Laboratorium sebesar (Rp45.553.925,37) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

10. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Praktek

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Praktek per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.473.689.264,78 (*Audited*) dan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.130.959.130,21 (*Audited*). Pada TA 2023. Mutasi Aset Tetap dan koreksi bertambah maupun koreksi berkurang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 150. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Alat-alat Praktek Tahun 2023 dan 2022

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		7.130.959.130,21	7.115.623.499,05
Penambahan		366.313.980,57	53.400.000,00
1	Belanja Modal		16.650.000,00
2	Reklasifikasi Masuk	366.313.980,57	36.750.000,00
Pengurangan		(23.583.846,00)	(38.064.368,84)
3	Reklasifikasi Kurang		(11.153.743,50)
4	Reklas ke Aset Lain-lain	(2.808.846,00)	
5	Ekstrakomptabel	(20.775.000,00)	(3.068.006,61)
6	Koreksi Kurang		(23.842.618,73)
Saldo Akhir		7.473.689.264,78	7.130.959.130,21

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Praktek dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

Penjelasan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Praktek tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

- Reklasifikasi Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Alat-alat Praktek tahun 2023 sebesar Rp366.313.980,57 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan sebesar Rp166.460.000,00 dan pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebesar

- Rp199.853.980,57;
- Reklas ke Aset Lain-lain Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Praktek tahun 2023 sebesar (Rp2.808.846,00) pada Dinas Perikanan;
 - Ekstrakomptabel Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Praktek tahun 2023 sebesar (Rp20.775.000,00) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

11. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Keamanan

Saldo Peralatan dan Mesin Alat-Alat Keamanan per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp66.806.439,69 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp66.806.439,69 tidak terdapat kenaikan dan penurunan aset alat-alat keamanan tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-Alat Keamanan dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 151. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Keamanan
Tahun 2023 dan 2022**

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		66.806.439,69	66.806.439,69
Penambahan		-	94.810.764,46
1	Belanja Modal		94.445.500,00
2	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang		365.264,46
Pengurangan		-	(94.810.764,46)
3	Reklasifikasi keluar		(90.315.264,46)
4	Ekstrakomptabel		(4.495.500,00)
Saldo Akhir		66.806.439,69	66.806.439,69

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Keamanan dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

12. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Aset Tetap Rambu-Rambu

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Aset Tetap Rambu-Rambu per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp6.734.454.161,71 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp6.402.321.458,71 terdapat kenaikan sebesar Rp332.132.703,00 pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rambu-Rambu dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

**Tabel 152. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Aset Tetap Rambu-Rambu Tahun 2023 dan 2022**

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		6.734.454.161,71	6.402.321.458,71
Penambahan		0,00	1.758.135.943,82
1	Belanja Modal	0,00	1.743.022.000,00
2	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	0,00	15.113.943,82
Pengurangan		0,00	(1.426.003.240,82)
3	Reklasifikasi Kurang	0,00	0,00
4	Koreksi Kurang	0,00	(1.426.003.240,82)
Saldo Akhir		6.734.454.161,71	6.734.454.161,71

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Aset Tetap Rambu-Rambu dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

13. Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Olah Raga

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Aset Tetap Alat-alat Olah Raga per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp633.227.543,36 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar

Rp633.227.543,36 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Aset Tetap Alat-alat Olah Raga dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 153. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Alat-Alat Olah Raga Tahun 2023 dan 2022**

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		633.227.543,36	173.880.000,00
Penambahan		0,00	473.116.593,36
1	Belanja Modal	0,00	62.881.250,00
2	Reklasifikasi Masuk	0,00	410.235.343,36
Pengurangan		0,00	(13.769.050,00)
3	Ekstrakomptabel	0,00	(13.769.050,00)
Saldo Akhir		633.227.543,36	633.227.543,36

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Olah Raga dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

14. Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp296.902.382,91 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp296.902.382,91. Pada Tahun 2023 tidak terdapat kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dapat dilihat pada:

Tabel 154. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Tahun 2023 dan 2022

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		296.902.382,91	296.902.382,91
1	Penambahan	0,00	0,00
2	Pengurangan	0,00	0,00
Saldo Akhir		296.902.382,91	296.902.382,91

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

15. Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat-alat Eksplorasi

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Eksplorasi per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp0,00. Pada Tahun 2023 tidak terdapat kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Eksplorasi, dapat dilihat pada:

**Tabel 155. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Eksplorasi
Tahun 2023 dan 2022**

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		0,00	0,00
Penambahan		19.880.031,49	0,00
1	Belanja Modal	19.018.000,00	0,00
2	Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
3	Atribusi	862.031,49	
Pengurangan		(19.880.031,49)	0,00
4	Reklas Berkurang	(19.880.031,49)	0,00
Saldo Akhir		0,00	0,00

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Eksplorasi dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

16. Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Peralatan dan Mesin BOS

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin BOS per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp0,00 Pada Tahun 2023 tidak terdapat kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin BOS dapat dilihat pada

Tabel 156. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin BOS Tahun 2023 dan 2022

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		0,00	0,00
Penambahan		4.952.302.998,00	0,00
1	Belanja Modal	4.952.302.998,00	0,00
2	Kapitalisasi/atribusi/Penunjang	0,00	0,00
3	Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
4	Belanja Jasa ke Modal	0,00	0,00
5	Koreksi Tambah	0,00	0,00
Pengurangan		(4.952.302.998,00)	(0,00)
1	Reklas Kurang	(4.952.302.998,00)	(0,00)
2	Penghapusan	(0,00)	(0,00)
3	Koreksi Kurang	(0,00)	(0,00)
Saldo Akhir		0,00	0,00

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Peralatan dan Mesin BOS dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

17. Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp0,00 Pada Tahun 2023 tidak terdapat kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 157. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2023 dan 2022

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		0,00	0,00
Penambahan		99.238.870,00	0,00
1	Belanja Modal	99.238.870,00	0,00
2	Kapitalisasi/atribusi/Penunjang	0,00	0,00
3	Reklasifikasi Masuk	0,00	0,00
4	Belanja Jasa ke Modal	0,00	0,00
5	Koreksi Tambah	0,00	0,00
Pengurangan		(99.238.870,00)	0,00
1	Reklas Kurang	(99.238.870,00)	(0,00)
2	Penghapusan	(0,00)	(0,00)
3	Koreksi Kurang	(0,00)	(0,00)
Saldo Akhir		0,00	0,00

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Peralatan dan Mesin BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

7.6.1.3.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	1.565.166.693.079,84	1.470.064.233.742,98

Kebijakan Akuntansi terkait Aset Tetap Gedung dan Bangunan terkait biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap antara lain, biaya perolehan atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan tersebut sampai siap digunakan. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai siap digunakan.

Saldo Aset Tetap Bangunan Gedung per 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah sebesar Rp1.565.166.693.079,84 sedangkan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.470.064.233.742,98. Mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan tahun 2023 pada tabel berikut:

Tabel 158. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Saldo per 31 Desember 2023	Saldo per 31 Desember 2022	Naik/(Turun)
1	Bangunan dan Gedung Kantor, Mess, Rumdin, Fasum	1.533.651.955.948,72	1.443.013.721.104,66	90.638.234.844,06
2	Monumen dan Tugu	31.514.737.131,12	27.050.512.638,32	4.464.224.492,80
	Jumlah	1.565.166.693.079,84	1.470.064.233.742,98	95.102.459.336,86

Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 159. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian		Saldo 2023
Saldo Awal		1.470.064.233.742,98
Penambahan		161.238.051.435,22
1	Belanja Modal	132.663.818.494,86
2	Kapitalisasi/atribusi/Penunjang	295.618.352,26
3	Reklasifikasi Masuk	151.050.934,10
4	Hibah masuk	27.449.788.854,00
5	Utang Belanja	677.774.800,00
Pengurangan		(66.135.592.098,36)
5	Reklas Kurang	(61.444.577.834,93)
6	Ekstracountable	(98.521.179,32)
7	Koreksi Kurang	(1.342.006,98)
8	Penghapusan	(2.965.013.293,00)
9	Kapitalisasi Pencatatan	(1.626.137.784,13)
Saldo Akhir		1.565.166.693.079,84

Sedangkan penjelasan rincian masih-masing jenis aset tetap Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kantor, Rumah Dinas/Jabatan, Mess dan Fasilitas Umum

Saldo aset tetap Bangunan Gedung dan Bangunan (*Audited*) per 31 Desember 2023 Rp1.533.651.955.948,72 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) adalah sebesar Rp1.443.013.721.104,66. Adapun rincian mutasi Aset Tetap Bangunan Gedung per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 160. Mutasi Aset Tetap Bangunan Gedung

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		1.443.013.721.104,66	1.420.056.009.105,94
Penambahan		165.272.064.881,03	132.449.568.132,02
1	Belanja Modal	128.322.780.484,86	85.136.054.214,26
2	Mutasi Masuk	8.498.237.938,62	30.504.102.423,35
3	Kapitalisasi/atribusi/Penunjang	286.010.192,21	40.821.439,73
4	Reklasifikasi Masuk	37.472.611,34	7.520.998.689,21
5	Hibah masuk	27.449.788.854,00	0,00
6	Belanja Jasa ke Modal	0,00	2.029.351.071,47
7	Koreksi Tambah	0,00	2.999.500.623,00
8	Hibah masuk	0,00	4.218.739.671,00
9	Utang Belanja	677.774.800,00	0,00
Pengurangan		(74.633.830.036,97)	(109.491.856.133,30)
9	Reklas Kurang	(61.444.577.834,93)	(635.182.935,44)
10	Mutasi Keluar	(8.498.237.938,62)	(30.504.102.423,35)
11	Ekstracountable	(98.521.179,32)	(48.803.000,00)
12	Penghapusan	(2.965.013.293,00)	(9.146.666.652,22)
13	Koreksi Kurang	(1.342.006,97)	(69.153.161.122,12)
14	Koreksi Desimal	(0,00)	(0,17)
15	Kapitalisasi Pencatatan	(1.626.137.784,13)	(0,00)
16	Hibah keluar	(0,00)	(3.940.000,00)
Saldo Akhir		1.533.651.955.948,72	1.443.013.721.104,66

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklas pada Aset Tetap Bangunan Gedung adalah sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Modal dan Atribusi/Penunjang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kantor, Rumah dinas/jabatan, Mess dan Fasilitas Umum per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 161. Belanja Modal Aset Tetap Bangunan Gedung

No	SKPD	Realisasi Belanja Modal
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60.440.945.028,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	11.475.055.217,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	52.367.328.100,08
4	Dinas Pertanian Dan Pangan	328.601.075,00
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	181.600.000,00
6	Dinas Perhubungan	708.343.447,78
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	154.332.550,00
8	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	1.892.495.867,00
9	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	49.639.200,00
10	Inspektorat	174.890.000,00
11	Sekretariat Daerah	549.550.000,00
Jumlah		128.322.780.484,86

- b. Mutasi masuk dan keluar Aset Tetap Bangunan Gedung dari Dinas Dinas Perikanan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp772.044.000,00 dan mutasi dari Dinas PUPR senilai Rp7.726.193.938,62 terdiri dari mutasi ke Sekretariat Daerah Rp7.453.837.376,41, mutasi ke Kecamatan Putussibau Utara Rp99.516.007,16 dan mutasi ke Kecamatan Bika Rp172.840.555,05.
- c. Realisasi atas Atribusi/Penunjang Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kabupaten Kapuas Hulu senilai Rp286.010.192,21 dengan rincian

Tabel 162. Atribusi/Penunjang Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023

No	SKPD	Realisasi Atribusi/Penunjang
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.809.242,14
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	14.982.303,86
3	Dinas Pertanian Dan Pangan	10.941.660,87
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.711.627,98
5	Dinas Perhubungan	21.923.445,74
6	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	224.751.314,45
7	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	174.459,35
8	Inspektorat	5.716.137,82
Jumlah		286.010.192,21

- d. Reklasifikasi atas Pencatatan Aset Tetap Bangunan Gedung dari KDP ke Bangunan Gedung senilai Rp37.472.611,34. Reklas Pencatatan dari Aset Tetap Bangunan Gedung ke KDP senilai (Rp60.603.207.535,69). Reklas dari Bangunan Kantor ke Peralatan dan Mesin senilai (Rp425.342.085,52). Reklas ke Monumen dan Tugu senilai (Rp113.578.322,75) serta Reklas ke Jalan Irigasi dan Jaringan senilai (Rp302.449.890,97).
- e. Hibah Bangunan Gedung dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat senilai Rp27.449.788.854,00.
- f. Utang Belanja atas paket fisik gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp677.774.800,00.
- g. Ekstracountable atas Belanja Modal senilai Rp(98.521.179,32).
- h. Penghapusan Aset Tetap Bangunan Gedung pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Rp(2.116.112.400,00), pada Dinas Pertanian Dan Pangan Rp(93.824.893,00) dan pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp(755.076.000,00).
- i. Koreksi atas Pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kantor, Rumah Dinas/Jabatan, Mess dan Fasilitas Umum senilai Rp(1.342.006,97).
- j. Koreksi atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kantor, Rumah Dinas/Jabatan, Mess dan Fasilitas Umum. Koreksi atas Pekerjaan Pengecatan atau Pemeliharaan yang dibelanjakan melalui Rekening Kegiatan Belanja Modal senilai Rp(1.626.137.784,13).

2. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Monumen dan Tugu

Saldo Aset Tetap Monumen dan Tugu Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 (Audited) sebesar Rp31.514.737.131,12 dan 2022 (Audited) sebesar



Rp27.050.512.638,32. Rincian mutasi Aset Tetap Monumen dan Tugu per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 163. Mutasi Aset Tetap Monumen dan Tugu

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		27.050.512.638,32	25.081.239.060,05
Penambahan		4.464.224.492,80	3.154.942.044,57
1	Belanja Modal	4.341.038.010,00	1.642.000.543,00
2	Mutasi Masuk	0,00	908.633.376,83
3	Kapitalisasi/atribusi/Penunjang	9.608.160,05	0,00
4	Reklasifikasi Masuk	113.578.322,75	476.121.182,58
5	Belanja Jasa ke Modal	0,00	128.186.942,16
Pengurangan			(1.185.668.466,30)
6	Mutasi Keluar	(0,00)	(908.633.376,83)
7	Reklas Kurang	(0,00)	(219.945.000,00)
8	Ekstracountable	(0,00)	(57.090.000,00)
9	Sebab Lain karena Peraturan	(0,00)	(89,47)
Saldo Akhir		31.514.737.131,12	27.050.512.638,32

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan – Monumen dan Tugu dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklas pada Aset Tetap Monumen dan Tugu adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi belanja modal Aset Tetap Monumen dan Tugu tahun 2023 telah direalisasikan Belanja Modal sebesar Rp4.341.038.010,00.

Tabel 164. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Monumen dan Tugu Tahun 2023

No	SKPD	Realisasi Belanja Modal
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.713.793.130,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	149.930.500,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	179.850.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	195.557.480,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	101.906.900,00
Jumlah		4.341.038.010,00

- b. Biaya Atribusi atas Belanja Modal Aset Tetap Monumen dan Tugu tahun 2023 senilai Rp9.608.160,05 dengan rincian:

Tabel 165. Rincian Biaya Atribusi atas Belanja Modal Aset Tetap Monumen dan Tugu Tahun 2023

No	SKPD	Realisasi Atribusi/Penunjang
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36.704,93
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	51.455,12
3	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	9.520.000,00
Jumlah		9.608.160,05

- c. Reklas Bertambah dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kantor, Rumah Dinas/Jabatan, Mess dan Fasilitas Umum senilai Rp113.578.322,75.

7.6.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	3.451.332.811.932,59	3.281.427.166.820,11

Kebijakan Akuntansi terkait Jalan Irigasi dan Jaringan terkait biaya perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan yang dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap antara lain, biaya perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh Jalan Irigasi dan Jaringan tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai siap digunakan.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah sebesar Rp3.451.332.811.932,59 sedangkan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp3.281.427.166.820,11. Mutasi aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2023 pada tabel berikut.

Tabel 166. Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Saldo per 31 Desember 2023	Saldo per 31 Desember 2022	Naik/(Turun)
1	Jalan dan Jembatan	3.099.089.080.330,53	2.938.544.368.851,43	160.544.711.479,10
2	Bangunan Air (Irigasi) dan jaringan air	179.106.413.763,97	169.177.547.172,07	9.928.866.591,90
3	Instalasi dan Jaringan	173.137.317.838,09	173.705.250.796,61	(567.932.958,52)
	Jumlah	3.451.332.811.932,59	3.281.427.166.820,11	169.905.645.112,48

Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 167. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian		Saldo 2023
Saldo Awal		3.281.427.166.820,11
Penambahan		174.731.386.624,51
1	Belanja Modal	121.086.925.212,00
2	Kapitalisasi/atribusi/Penunjang	42.151.564,14
3	Reklasifikasi Masuk	45.730.115.016,37
4	Hibah masuk	7.872.194.832,00
Pengurangan		(4.825.741.512,03)
1	Reklas Kurang	(3.253.231.959,22)
2	Ekstracountable	(0,00)
3	Koreksi Kurang	(511.304.498,81)
4	Penghapusan	(1.061.205.054,00)
5	Sebab Lain Karena Peraturan	(0,00)
Saldo Akhir		3.451.332.811.932,59

Sedangkan penjelasan rincian masih-masing jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan

Saldo aset tetap Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp3.099.089.080.330,53 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) adalah sebesar



Rp2.938.544.368.851,43. Adapun rincian mutasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 168. Mutasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		2.938.544.368.851,43	2.876.637.793.323,92
Penambahan		161.882.491.412,41	110.174.428.224,82
1	Belanja Modal	118.830.683.474,00	109.155.601.208,00
2	Kapitalisasi/atribusi/Penunjang	41.310.792,49	34.894.939,29
3	Mutasi Masuk	0,00	413.276.382,44
4	Reklasifikasi Masuk	43.010.497.145,92	564.043.559,09
5	Belanja Jasa ke Modal	0,00	3.330.000,00
6	Koreksi Tambah	0,00	3.282.136,00
Pengurangan		(1.337.779.933,31)	(48.267.852.697,31)
1	Reklas Kurang	(1.237.879.933,31)	(45.661.233.616,36)
2	Penghapusan	(99.900.000,00)	(0,00)
3	Koreksi Kurang	(0,00)	(2.193.342.698,51)
4	Mutasi Keluar		(413.276.382,44)
Saldo Akhir		3.099.089.080.330,53	2.938.544.368.851,43

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Jalan dan Jembatan dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklas pada Aset Tetap Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Modal dan Atribusi/Penunjang Aset Tetap Jalan dan Jembatan per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 169. Belanja Modal Aset Tetap Jalan dan Jembatan

No	SKPD	Realisasi Belanja Modal
1	Dinas Kesehatan	174.933.225,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	116.555.750.249,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.100.000.000,00
Jumlah		118.830.683.474,00

- b. Biaya Atribusi/Penunjang Belanja Modal Aset Tetap Jalan dan Jembatan Kabupaten Kapuas Hulu senilai Rp41.310.792,49 dengan rincian

Tabel 170. Biaya Atribusi/Penunjang Belanja Modal Aset Tetap Jalan dan Jembatan

No	SKPD	Realisasi Atribusi/Penunjang
1	Dinas Kesehatan	42.825,92
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	33.346.625,27
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.921.341,30
Jumlah		41.310.792,49

- c. Reklasifikasi atas Pencatatan Aset Tetap Jalan dan Jembatan dari KDP ke Jalan dan Jembatan senilai Rp43.010.497.145,92. Sedangkan Reklas dari Jalan dan Jembatan ke KDP senilai Rp(1.237.879.933,31).

d. Penghapusan Aset Tetap Jalan dan Jembatan senilai Rp(99.900.000,00).

2. Mutasi Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) dan Jaringan Air

Saldo Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) dan jaringan air Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp179.106.413.763,97 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp169.177.547.172,07. Rincian mutasi Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) dan jaringan air per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 171. Mutasi Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) dan jaringan air

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		169.177.547.172,07	165.849.706.323,22
Penambahan		10.811.722.726,09	4.912.096.147,48
1	Belanja Modal	783.127.610,00	2.819.690.336,74
2	Reklas Tambah	2.156.400.284,09	0,00
3	Kapitalisasi/atribusi/Penunjang	0,00	887.997,72
4	Koreksi Tambah	0,00	0,02
5	Sebab Lain Karena Peraturan	0,00	729.575.390,00
6	Hibah	7.872.194.832,00	0,00
7	Reklas Masuk	0,00	1.361.942.423,00
Pengurangan		(882.856.134,19)	(1.584.255.298,63)
1	Reklas Kurang	(882.856.134,19)	(536.874.326,98)
2	Ekstracountable	(0,00)	(125.960.690,14)
3	Koreksi Kurang	(0,00)	(921.420.281,51)
Saldo Akhir		Rp179.106.413.763,97	169.177.547.172,07

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) dan Jaringan Air dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklas pada Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) dan jaringan air adalah berupa:

- Realisasi belanja modal Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) dan jaringan air tahun 2023 telah direalisasikan Belanja Modal sebesar Rp783.127.610,00.

Tabel 172. Belanja Modal Aset Tetap Bangunan Air (Irigasi) dan jaringan air

No	SKPD	Realisasi Belanja Modal
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	783.127.610,00
Jumlah		783.127.610,00

- Reklas Bertambah dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kantor, Rumah Dinas/Jabatan, Mess dan Fasilitas Umum senilai Rp302.449.890,97 berupa Aset Bangunan Tambatan Perahu. Reklas dari Jaringan senilai Rp1.132.495.891,71. Reklas dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp501.544.477,76. Reklas berkurang ke Aset Tetap Instalasi dan Jaringan senilai (Rp783.127.610,00) dan Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp(99.728.524,19).
- Hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 1232 /BA/DC/2022 030/3011/BKAD/ASD-2022 senilai Rp7.872.194.832,00.

3. Mutasi Aset Tetap Instalasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Instalasi dan Jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp173.137.317.838,09 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp173.705.250.796,61. Rincian mutasi Aset Tetap Instalasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 173. Mutasi Aset Instalasi dan Jaringan Listrik

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		173.705.250.796,61	174.272.580.615,07
Penambahan		2.257.082.509,65	3.196.153.087,56
	Belanja Modal	1.473.114.128,00	2.348.007.367,00
	Mutasi Masuk	0,00	460.302.680,00
	Reklas Tambah	783.127.610,00	385.916.538,85
	Kapitalisasi/atribusi/Penunjang	840.771,65	1.926.501,71
	Koreksi Tambah	0,00	0,00
	Sebab Lain Karena Peraturan	0,00	0,00
	Hibah	0,00	0,00
Pengurangan		(2.825.015.468,17)	(3.763.482.906,02)
	Mutasi Kurang	(0,00)	(460.302.680,00)
	Reklas Kurang	(1.352.405.915,36)	(3.097.470.667,17)
	Ekstracountable	(0,00)	(205.709.558,85)
	Penghapusan	(961.305.054,00)	(0,00)
	Koreksi Kurang	(511.304.498,81)	(0,00)
Saldo Akhir		Rp173.137.317.838,09	173.705.250.796,61

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Instalasi dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklas pada Aset Tetap Instalasi dan Jaringan adalah sebagai berikut.

- Realisasi belanja modal Aset Tetap Instalasi dan Jaringan tahun 2023 telah direalisasikan Belanja Modal sebesar Rp1.473.114.128,00 dengan biaya Atribusi/Penunjang senilai Rp840.771,65. Adapun rincian belanja modal dan Atribusi/Penunjang Aset Tetap Instalasi dan jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 174. Belanja Modal Aset Tetap Instalasi dan Jaringan

No	SKPD	Realisasi Belanja Modal
1	Dinas Kesehatan	387.738.300,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.019.936.000,00
3	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	65.439.828,00
Jumlah		1.473.114.128,00

- Realisasi atas Belanja Atribusi/Penunjang Aset Tetap Instalasi dan Jaringan senilai Rp.840.771,65 dengan Rincian

Tabel 175. Rincian Atribusi/Penunjang Aset Tetap Instalasi dan Jaringan

No	SKPD	Realisasi Atribusi / Penunjang
1	Dinas Kesehatan	94.923,35
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	515.856,89
3	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	229.991,41
Jumlah		840.771,65

- c. Reklas dari Instalasi dan Jaringan ke Bangunan Air senilai Rp(1.352.405.915,36) dan Reklas dari Bangunan Air ke Instalasi dan Jaringan senilai Rp783.127.610,00.
- d. Penghapusan atas dampak dari kebakaran pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp(961.305.054,00).
- e. Koreksi Aset Tetap Instalasi dan Jaringan senilai Rp(511.304.498,81). Koreksi tersebut dikarenakan pekerjaan tersebut dilakukan dengan kegiatan pemeliharaan yang dianggarkan dan dibelanjakan melalui rekening kegiatan belanja modal.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
7.6.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	27.226.058.034,59	23.875.832.084,59

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah sebesar Rp27.226.058.034,59 sedangkan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp23.875.832.084,59 mengalami kenaikan sebesar Rp3.350.225.950,00 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 176. Kenaikan/Penurunan Aset Tetap Lainnya

No	Jenis Aset Tetap Lainnya	Saldo per 31 Desember 2023	Saldo per 31 Desember 2022	Naik/(Turun)
1	Buku dan Perpustakaan	Rp22.863.466.248,81	Rp19.513.240.298,81	Rp3.350.225.950,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp2.186.334.869,73	Rp2.186.334.869,73	0,00
3	Hewan Ternak dan Tumbuhan	Rp2.176.256.916,05	Rp2.176.256.916,05	0,00
	Jumlah	Rp27.226.058.034,59	Rp23.875.832.084,59	Rp3.350.225.950,00

1. Aset Tetap lainnya Buku dan Kepustakaan

Saldo Aset Tetap Lainnya Buku dan Kepustakaan per 31 Desember 2023 (*Audited*) Rp22.863.466.248,81 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) adalah sebesar Rp19.513.240.298,81. Adapun rincian mutasi Aset Tetap Lainnya Buku dan Kepustakaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 177. Mutasi Aset Tetap lainnya Buku dan Kepustakaan

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		19.513.240.298,81	16.757.585.452,81
1	Belanja Modal	3.734.198.550,00	893.570.000,00
2	Atribusi/Penunjang	4.896,26	0,00
2	Reklasifikasi Masuk	3.166.327.340,00	3.529.571.529,00
3	Reklasifikasi Keluar	(20.004.896,26)	(0,00)
3	Ekstracountable	(3.530.299.940,00)	(252.488.000,00)
4	Ekstracountable BOS	(0,00)	(1.414.998.683,00)
Saldo Akhir		22.863.466.248,81	19.513.240.298,81

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Lainnya Buku dan Kepustakaan dapat dilihat pada **Lampiran 30**

Penjelasan mutasi, koreksi dan reklas pada Aset Tetap lainnya Buku dan Kepustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp3.714.198.550,00;

- b. Belanja Modal pada Dinas Kesehatan senilai Rp20.000.000,00 dengan nilai Atribusi/Penunjang Rp4.896,26;
- c. Reklas bertambah karena adanya Belanja Modal Aset Lainnya BOS senilai Rp3.166.327.340,00;
- d. Reklas keluar senilai Rp(20.004.896,26) merupakan reklasifikasi pencatatan aset tetap dari Aset Tetap lainnya Buku dan Kepustakaan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat Studio;
- e. *Ekstracountable* Aset Tetap Lainnya Buku dan Kepustakaan senilai Rp(3.530.299.940,00).

2. Aset Tetap lainnya Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Saldo Aset Tetap lainnya Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp2.186.334.869,73 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp2.186.334.869,73. Rincian mutasi Aset Tetap lainnya Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan Air per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 178. Mutasi Aset Tetap lainnya Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		2.186.334.869,73	2.262.797.619,73
1	Reklasifikasi Masuk	0,00	30.339.250,00
2	<i>Extracountable</i>	(0,00)	(5.212.000,00)
3	Reklas Kurang	(0,00)	(101.590.000,00)
Saldo Akhir		2.186.334.869,73	2.186.334.869,73

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

Selama Tahun Anggaran 2023 tidak ada kegiatan yang bisa menambah maupun mengurangi Saldo Aset Tetap Lainnya Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan. Sehingga saldo akhir Aset Tetap Lainnya Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan masih sama dengan Saldo Audited 2022.

3. Aset Tetap lainnya Hewan Ternak dan Tumbuhan

Saldo Aset Tetap Lainnya Hewan, Ternak dan Tanaman Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp2.176.256.916,05 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp2.176.256.916,05.

Selama Tahun Anggaran 2023 pada Aset Tetap Lainnya Hewan Ternak dan Tumbuhan tidak terjadi kegiatan yang menambah maupun mengurangi nilai Aset tersebut. Sehingga pada saat Tahun Anggaran 2023 berakhir saldo akhir Aset Tetap Lainnya Hewan Ternak dan Tumbuhan masih sama dengan nilai saldo audited 2022 senilai Rp Rp2.176.256.916,05.

Tabel 179. Mutasi Aset Tetap lainnya Hewan Ternak dan Tumbuhan

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		2.176.256.916,05	2.176.256.916,05
1	Aset Bertambah	0,00	0,00
2	Aset Berkurang	0,00	0,00
Saldo Akhir		2.176.256.916,05	2.176.256.916,05

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap lainnya Hewan Ternak dan Tumbuhan dapat dilihat pada **Lampiran 32**

7.6.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	213.723.215.632,27	195.182.018.864,19

Suatu benda berwujud diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika :

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pekerjaan konstruksi tertentu dinyatakan selesai direpresentasikan dengan dokumen berita acara serah terima (BAST) atau dokumen sejenis dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa.

Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah sebesar Rp213.723.215.632,27 sedangkan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp195.182.018.864,19. Mutasi aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 180. Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		195.182.018.864,19	105.054.874.104,03
Penambahan		62.090.711.003,11	98.839.075.215,06
1	Mutasi Masuk	0,00	552.985.000,00
2	Reklasifikasi Masuk	61.940.815.993,19	98.286.090.215,06
3	Koreksi Tambah	149.895.009,92	0,00
Pengurangan		(43.549.514.235,03)	(8.711.930.454,90)
4	Mutasi Keluar	(0,00)	(552.985.000,00)
5	Reklas Kurang	(43.549.514.235,03)	(7.588.997.954,90)
6	Koreksi Kurang	(0,00)	(569.947.500,00)
Saldo Akhir		213.723.215.632,27	195.182.018.864,19

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 33**.

Penjelasan koreksi aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan antara lain:

1. Reklas bertambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap Bangunan Gedung senilai Rp60.603.207.535,69 Reklas dari Jalan dan Jembatan senilai Rp1.237.879.933,31 dan Reklas dari Bangunan Air senilai Rp 99.728.524,19
2. Koreksi Tambah sebesar Rp149.895.009,92 adalah nilai Utang Retensi tahun 2023 yaitu Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Kelurahan Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara pada KSO. CIMENDANG MAS SUKSES SENTOSA dengan nomor Kontrak 640.6/17/PUPR/PPK.1-BGJL-B/2022 tanggal 20 Juli 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp50.630.000.000,00 sedangkan Realisasi sebesar Rp50.480.104.990,08 sehingga diketahui yang menjadi hutang adalah anggaran sebesar nilai kontrak dikurangi realisasi maka hutang sebesar Rp149.895.009,92



3. Reklas berkurang ke Bangunan dan Gedung senilai Rp(37.472.611,35) Reklas berkurang ke Jalan Dan Jembatan senilai Rp(43.010.497.145,92) dan Reklas berkurang Bangunan Air senilai Rp(501.544.477,76).

7.6.1.3.7	Akumulasi Tetap	Penyusutan Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022
			(Rp) (2.866.364.716.932,01)	(Rp) (2.629.198.525.487,40)

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan penyusutan terhadap aset-asetnya dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 tahun 2018 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Revisi lampiran kebijakan akuntansi pemerintah Kapuas Hulu dilakukan dengan terbitnya Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 telah mengakomodir perubahan penetapan masa manfaat, ketentuan kapitalisasi renovasi dan pemeliharaan serta nilai kapitalisasi minimum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap sebagaimana yang tersaji dalam kertas kerja konsolidasi akumulasi penyusutan aset tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 yang menjadi lampiran dalam laporan keuangan ini dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 181. Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan		Kenaikan / Penurunan
		Tahun 2023	Tahun 2022	
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(390.711.617.193,48)	(356.844.093.454,14)	(33.867.523.739,34)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	(9.835.573.368,86)	(7.758.546.559,43)	(2.077.026.809,44)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(98.053.067.706,05)	(92.348.775.200,00)	(5.704.292.506,05)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin dan alat ukur Alat Bengkel Bermesin Lainnya	(3.239.600.436,72)	(2.987.709.930,73)	(251.890.505,99)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Pertanian Tanah dan Tanaman	(1.735.424.661,70)	(1.787.586.746,01)	52.162.084,31
6	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan dan Pemurnian Air	(178.141.429,74)	(118.760.953,16)	(59.380.476,58)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor dan Rumah Tangga	(54.754.853.300,94)	(51.608.875.931,25)	(3.145.977.369,69)
8	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio dan Komunikasi	(11.124.712.361,65)	(10.631.416.934,35)	(493.295.427,30)
9	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	(100.062.964.285,68)	(91.468.321.653,23)	(8.954.642.632,45)
10	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum	(19.614.507.168,61)	(17.690.641.707,55)	(1.923.865.461,06)
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Komputer	(79.047.742.297,12)	(68.550.100.105,81)	(10.506.996.191,31)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan-Alat Pelindung dan Keselamatan	(63.100.239,69)	(58.793.271,75)	(4.306.967,94)



No	Uraian	Akumulasi Penyusutan		Kenaikan / Penurunan
		Tahun 2023	Tahun 2022	
13	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	(6.608.962.094,99)	(6.137.006.585,62)	(471.955.509,37)
14	Akumulasi Penyusutan Alat -alat Olah Raga	(288.067.017,35)	(161.421.508,67)	(126.645.508,68)
15	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	(6.095.546.824,38)	(5.536.136.366,58)	(559.410.457,80)
16	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Eksplorasi	(0,00)	(0,00)	(0,00)
17	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(490.743.994.684,89)	(456.387.369.372,52)	(34.356.625.312,37)
18	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(485.277.363.001,28)	(451.692.741.650,63)	(33.584.621.350,65)
19	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	(5.466.631.683,61)	(4.694.627.721,89)	(772.003.961,72)
20	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.982.808.120.319,70)	(1.813.902.077.562,59)	(168.906.042.757,11)
21	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1.897.594.152.846,10)	(1.736.799.275.962,23)	(160.794.876.883,87)
22	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya	(35.329.154.233,73)	(31.541.797.851,88)	(3.787.356.381,85)
23	Akumulasi Penyusutan Instalasi dan Jaringan	(49.884.813.239,87)	(45.561.003.748,48)	(4.323.809.491,39)
24	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(2.100.984.733,94)	(2.064.985.098,15)	(35.999.635,79)
25	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian Lainnya	(2.100.984.733,94)	(2.064.985.098,15)	(35.999.635,79)
Jumlah		(2.866.364.716.932,01)	(2.629.198.525.487,40)	(237.166.191.444,61)

7.6.1.4	DANA CADANGAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp2.000.000.000,00 sedangkan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp2.000.000.000,00. Dana Cadangan dibentuk berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024.

7.6.1.5	ASET LAINNYA	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		173.096.807.730,25	153.357.753.642,60

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp173.096.807.730,25 sedangkan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp153.357.753.642,60. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 182. Rincian Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Turun/naik
1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-
2	Tuntutan Ganti Rugi	1.987.894.004,00	2.067.894.004,00	(80.000.000,00)
3	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	(1.094.105.254,00)	(1.134.105.254,00)	40.000.000,00
4	Kemitraan Dengan Pihak	-	-	-
5	Aset Tak Berwujud	1.583.495.787,61	1.011.415.000,00	572.080.787,61
6	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(987.718.964,60)	(807.182.666,67)	(180.536.297,93)
7	Aset Lain-lain	304.412.505.302,94	298.166.383.785,59	6.246.121.517,35
8	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(156.081.104.145,70)	(150.896.028.718,32)	(5.185.075.427,38)
9	Kas- Setara KAS (TDF)	23.275.841.000,00	4.949.377.492,00	18.326.463.508,00
	Jumlah	173.096.807.730,25	153.357.753.642,60	19.739.054.087,65

7.6.1.5.2	Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		1.987.894.004,00	2.067.894.004,00

Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 terdiri dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (*Audited*) sebesar Rp1.987.894.004,00 sedangkan tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp2.067.894.004,00. Rincian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 183. Rincian Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2022
1	UUDP Tahun 2003	104.154.456,00	104.154.456,00
2	UYHD Tahun 2007	96.162.048,00	96.162.048,00
3	TGR Tahun 2019	1.787.577.500,00	1.867.577.500,00
	Jumlah	1.987.894.004,00	2.067.894.004,00

Penjelasan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

- Tunggakan UUDP Tahun 2003 sebesar Rp104.154.456,00 merupakan sisa kas pada Dinas Kimpraswil yang belum disetor ke Kas Daerah;
- Tunggakan UYHD Tahun 2007 merupakan sisa kas pada Dinas Pendidikan sebesar Rp96.162.048,00; dan
- Tuntutan ganti rugi Kapal Ferry sebesar Rp1.787.577.500,00 yang merupakan sisa atas temuan pengadaan kapal tidak sesuai spesifikasi kontrak. Pada Tahun 2023 terdapat mutasi kurang melalui penyetoran ke Kas Daerah berdasarkan Surat Tanda Setoran sebesar Rp80.000.000,00.

7.6.1.5.3	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi Perbendaharaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		(1.094.105.254,00)	(1.134.105.254,00)

Saldo Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.094.105.254,00) sedangkan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar (Rp1.134.105.254,00). Rincian Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 184. Rincian Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Tahun	Jumlah	Kondisi	%	Jumlah Penyisihan
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	2007	96.162.048,00	Macet	100%	96.162.048,00
2	Dinas Kimpraswil	2003	104.154.456,00	Macet	100%	104.154.456,00
3	TGR Kapal Ferry Dinas Perhubungan	2019	1.787.577.500,00	Lancar	50,0%	893.788.750,00
			1.987.894.004,00			1.094.105.254,00

7.6.1.5.5 Aset Tidak Berwujud
31 Desember 2023
(Rp)
1.583.495.787,61
31 Desember 2022
(Rp)
1.011.415.000,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp1.583.495.787,61 sedangkan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.011.415.000,00 Mutasi Aset Tidak Berwujud dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 185. Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 dan 2022

Uraian		Saldo 2023	Saldo 2022
Saldo Awal		1.011.415.000,00	1.011.415.000,00
Penambahan		572.280.787,61	291.741.043,51
1	Belanja Modal	472.966.142,00	83.268.000,00
2	Mutasi Masuk	0,00	208.440.000,00
3	Kapitalisasi/Atribusi/Penunjang	314.645,61	33.043,51
4	Belanja Jasa Ke Belanja Modal	98.800.000,00	0,00
Pengurangan		0,00	(291.741.043,51)
5	Mutasi Keluar	0,00	(208.440.000,00)
6	Reklas Kurang	0,00	(83.301.043,51)
7	Koreksi Kurang	0,00	0,00
Saldo Akhir		1.583.495.787,61	1.011.415.000,00

Rekapitulasi Koreksi dan Mutasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 34**.

Penjelasan mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dengan uraian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud tahun 2023 pada dinas komunikasi dan informatika dan statistik yaitu pembuatan Website dengan nilai pada belanja modal sebesar Rp27.933.150,00 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pembuatan Website dengan nilai pada belanja modal sebesar Rp125.208.000,00 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud tahun 2023 pada Sekretariat Daerah (1). Aplikasi Colocation Server LPSE sebesar Rp100.000.000,00 (2). Aplikasi E-Risk PBJ sebesar Rp99.900.000,00 (3). Aplikasi Simbaja sebesar Rp44.999.992,00 (4). Aplikasi e-Arsip sebesar Rp74.925.000,00 dengan total belanja modal Rp472.966.142,00
2. Atribusi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud tahun 2023 pada dinas komunikasi dan informatika dan statistik pada pembuatan Website dengan nilai atribusi sebesar Rp314.645,61
3. Belanja Jasa ke Belanja Modal Aset Tidak Berwujud tahun 2023 berupa Aplikasi SIMNANGKIS pada dinas Bappeda sebesar Rp98.800.000,00.

**Tabel 186. Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 per SKPD**

No	SKPD	Per 31 Des 2022	Bertambah / Berkurang	Per 31 Des 2023
1	Dinas pendidikan dan kebudayaan	0,00	125.208.000,00	125.208.000,00
2	Dinas kesehatan	397.855.000,00	0,00	397.855.000,00
3	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	49.907.000,00	0,00	49.907.000,00
4	Dinas komunikasi dan informatika dan statistik	25.000.000,00	28.247.795,61	53.247.795,61
5	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan	50.923.000,00	0,00	50.923.000,00
6	Dinas kepemudaan, olah raga dan pariwisata	227.790.000,00	0,00	227.790.000,00
7	Sekretariat daerah	51.500.000,00	319.824.992,00	371.324.992,00
8	Badan pendapatan daerah	208.440.000,00	0,00	208.440.000,00
9	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	0,00	98.800.000,00	98.800.000,00
	Jumlah	1.011.415.000,00	573.080.787,61	1.583.495.787,61

7.6.1.5.6 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2023
(Rp)
(987.718.964,60)

31 Desember 2022
(Rp)
(807.182.666,67)

Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar (Rp987.718.964,60) sedangkan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp(807.182.666,67) Mutasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 187. Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 per SKPD

NO	SKPD	Per 31 Des 2022	Bertambah / Berkurang	Per 31 Des 2023
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	(0,00)	(20.868.000,00)	(20.868.000,00)
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	(397.855.000,00)	(0,00)	(397.855.000,00)
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(33.271.333,34)	(8.317.833,33)	(41.589.166,67)
4	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik	(12.500.000,00)	(8.874.632,60)	(21.374.632,60)
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	(50.923.000,00)	(0,00)	(50.923.000,00)
6	Dinas Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata	(171.693.333,33)	(37.965.000,00)	(209.658.333,33)
7	Sekretariat Daerah	(51.500.000,00)	(53.304.165,33)	(104.804.165,33)
8	Badan Pendapatan Daerah	(89.440.000,00)	(34.740.000,00)	(124.180.000,00)
9	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	(0,00)	(16.466.666,67)	(16.466.666,67)
	JUMLAH	(807.182.666,67)	(180.536.297,93)	(987.718.964,60)



7.6.1.5.7	Aset Lain – Lain	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
		304.412.505.302,94	298.138.283.785,59

Saldo Aset Lain – Lain per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp304.412.505.302,94 sedangkan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp298.138.283.785,59 Mutasi Aset Lain – Lain dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 188. Mutasi Aset Lain – Lain

Uraian		Saldo 2023
Saldo Awal		298.166.383.785,59
Penambahan		8.362.530.385,59
	Reklasifikasi Masuk	5.814.412.983,03
	Dari <i>Extracountable</i>	56.220.000,00
	Koreksi Tambah	2.491.897.401,56
Pengurangan		(2.116.408.867,24)
	Reklas Kurang	(22.411.250,00)
	Koreksi Kurang	(84.323.619,23)
	Penghapusan	(2.009.673.998,01)
Saldo Akhir		304.412.505.302,94

- a. Reklas ke Aset Lain-lain dari Aset Tetap senilai Rp5.814.412.983,03. Rincian reklas adalah sebagai berikut:
 - Alat Angkutan Rp784.742.502,56
 - Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp42.960.000,00
 - Alat Pertanian Rp67.614.500,00
 - Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp1.811.965.793,20
 - Alat Komputer Rp1.972.700.892,96
 - Alat Studio dan Komunikasi Rp431.250.312,27
 - Alat Kedokteran Rp700.370.136,04
 - Alat Praktek Rp2.808.846,00
- b. Reklas keluar ke Alat Angkutan senilai Rp(22.411.250,00).
- c. Reklas dari *Extacountable* senilai Rp56.220.000,00
- d. Koreksi bertambah karena Reklas pencatatan atas Kapal Fery yang sebelumnya dicatat pada Tuntutan Ganti Rugi untuk selanjutnya dicatat pada Aset lain-lain senilai Rp2.491.897.401,56. Koreksi berkurang senilai Rp(84.323.619,23).
- e. Penghapusan Aset lain-lain senilai Rp(2.009.673.998,01).



7.6.1.5.8	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp) (156.081.104.145,70)	(Rp) (150.896.028.718,32)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar (Rp156.081.104.145,70) sedangkan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar (Rp150.896.028.718,32) Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 189. Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Per SKPD per 31 Desember 2023

NO	SKPD	Per 31 Des 2022	Bertambah / Berkurang	Per 31 Des 2023
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	(1.963.781.495)	(1.618.806.077)	(3.582.587.572)
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(133.551.286.201)	58.683.982	(133.492.602.219)
3	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup	(1.694.425.689)	(188.211.196)	(1.882.636.885)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	(186.443.709)	(0,00)	(186.443.709)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(131.845.736)	(0,00)	(131.845.736)
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	(93.000.428)	(197.481.082)	(290.481.510)
7	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	(172.853.103)	(0,00)	(172.853.103)
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(35.730.800)	(244.214.483)	(279.945.283)
9	Dinas Perhubungan	(29.597.519)	(0,00)	(29.597.519)
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik	(0,00)	(198.950.506)	(198.950.506)
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	(208.246.442)	(0,00)	(208.246.442)
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(29.211.787)	(0,00)	(29.211.787)
13	Dinas Perikanan	(0,00)	(524.540.237)	(524.540.237)
14	Dinas Pertanian Dan Pangan	(12.412.500)	(326.680.835)	(339.093.335)
15	Sekretariat Daerah	(12.361.405.581)	(386.921.786)	(12.748.327.367)
16	Sekretariat DPRD	(126.114.717)	(0,00)	(126.114.717)
17	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	(73.983.589)	(600.465.824)	(674.449.413)
18	Badan Pendapatan Daerah	(0,00)	(266.101.047)	(266.101.047)
19	Inspektorat	(0,00)	(110.892.500)	(110.892.500)
20	Kecamatan Putussibau Utara	(53.250.000)	(0,00)	(53.250.000)
21	Kecamatan Putussibau Selatan	(9.202.069)	(0,00)	(9.202.069)
22	Kecamatan Bika	(77.888.102)	(0,00)	(77.888.102)
23	Kecamatan Kalis	(13.800.000)	(6.150.000)	(19.950.000)
24	Kecamatan Embaloh Hilir	(0,00)	(51.906.500)	(51.906.500)
25	Kecamatan Bunut Hilir	(14.350.000)	(0,00)	(14.350.000)
26	Kecamatan Boyan Tanjung	(0,00)	(34.344.536)	(34.344.536)
27	Kecamatan Bunut Hulu	(0,00)	(50.483.800)	(50.483.800)
28	Kecamatan Pengkadan	(0,00)	(54.050.000)	(54.050.000)
29	Kecamatan Empanang	(0,00)	(42.845.291)	(42.845.291)
30	Kecamatan Puring Kencana	(0,00)	(64.480.000)	(64.480.000)



NO	SKPD	Per 31 Des 2022	Bertambah / Berkurang	Per 31 Des 2023
31	Kecamatan Suhaid	(28.759.250)	(0,00)	(28.759.250)
32	Kecamatan Seberuang	(28.100.001)	(59.299.999)	(87.400.000)
33	Kecamatan Silat Hilir	(0,00)	(180.119.719)	(180.119.719)
34	Kecamatan Silat Hulu	(340.000)	340.000	(0,00)
35	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(0,00)	(37.153.992)	(37.153.992)
JUMLAH		(150.896.028.718)	(5.185.075.428)	(156.081.104.146)

7.6.1.5.9	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		23.275.841.000,00	4.949.377.492,00

Saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp23.275.841.000,00 sedangkan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp4.949.377.492,00 Mutasi Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF).

7.6.2	KEWAJIBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		30.976.916.273,18	21.596.751.405,01

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.976.916.273,18 (*Audited*) dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp21.596.751.405,01 Kewajiban tersebut berupa Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

Rincian 190. Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Turun/naik
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	3.726.430,00	(3.726.430,00)
2	Utang Obat-obatan	2.849.989.597,27	1.162.919.572,00	1.687.070.025,27
3	Utang Jasa Medis	6.708.333.176,00	9.165.899.675,00	(2.457.566.499,00)
4	Utang Honorarium Pegawai BLUD	0,00	618.000.000,00	(618.000.000,00)
5	Utang Belanja TPP PNS	6.760.613.987,37	5.701.497.268,00	1.059.116.719,37
6	Utang Belanja TPP Non PNS	305.773.296,00	213.000.000,00	92.773.296,00
7	Utang Belanja TPP PNS Berdasarkan Kelangkaan Profesi	605.000.000,00	0,00	0,00
8	Utang Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	1.793.875.000,00	(1.793.875.000,00)
9	Utang Jasa Tenaga Administrasi	35.300.000,00	0,00	0,00
10	Utang Tagihan Telepon	25.866,00	0,00	0,00
11	Utang Tagihan Air	35.781.900,00	50.158.850,00	(14.376.950,00)
12	Utang Tagihan Listrik	201.140.647,00	232.445.724,00	(31.305.077,00)
13	Utang Tagihan Telepon/Internet/TV	24.964.378,00	22.121.690,00	2.842.688,00
14	Utang Jaminan Kesehatan PNS	8.062.985.332,40	0,00	0,00



No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Turun/naik
15	Utang Jaminan Kesehatan Non PNS	64.929.640,00	1.422.000,00	63.507.640,00
16	Utang Retensi	858.987.992,93	157.872.182,01	701.115.810,92
17	Utang Belanja Pajak, Bea dan Perizinan	2.246.500,00	0,00	0,00
18	Utang Jangka Pendek Bahan Lainnya- BLUD	4.460.843.960,21	0,00	0,00
19	Utang Jangka Pendek Bahan Lainnya-Retribusi / jampersal / non kapitasi	0,00	2.473.813.014,00	(2.473.813.014,00)
	Jumlah	30.976.916.273,18	21.596.751.405,01	(3.786.236.790,44)

7.6.3	EKUITAS	31 Desember 2023 (Rp) 3.486.783.525.512,67	31 Desember 2022 (Rp) 3.428.781.812.520,48
--------------	----------------	---	---

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp3.486.783.525.512,67 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp3.428.781.812.520,48 Ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

7.6.4	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	31 Desember 2023 (Rp) 3.517.760.441.785,85	31 Desember 2022 (Rp) 3.450.378.563.925,49
--------------	------------------------------	---	---

Merupakan saldo Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp3.517.760.441.785,85 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp3.450.378.563.925,49.

7.7 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

7.7.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain – Lain Pendapatan yang Sah tahun 2023 sebagaimana rincian di bawah ini mengalami penurunan sebesar 35,56% dari tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 231. Rincian Realisasi Pendapatan – LO

No	Rincian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Naik/Turun	%
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	77.616.486.405,98	49.092.088.707,51	28.524.397.698,47	58,10
2	Pendapatan Transfer-LO	1.400.976.476.820,99	1.202.244.000.493,63	198.732.476.327,36	16,53
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	46.950.046.792,77	56.757.867.240,19	(9.807.820.447,42)	(17,28)
Jumlah		1.525.543.010.019,74	1.308.093.956.441,33	217.449.053.578,41	

Realisasi masing-masing akun pendapatan dengan uraian sebagai berikut:

7.7.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO

Merupakan seluruh Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya di tambah pengakuan secara akrual atas hak atau piutang yang menjadi hak daerah sesuai dokumen yang sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp77.941.147.720,74 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp49.092.088.707,51. Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp28.849.059.013,23 atau 58,77% dari Tahun 2022. Rincian mutasi Pendapatan Asli Daerah-LO dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 232. Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

No	Uraian	LRA 2023	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Pendapatan - LO
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	18.192.870.236,32	481.483.507,37	99.534.962,20	18.574.818.781,49
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	5.992.780.864,00	0,00	93.219.104,00	5.899.561.760,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	17.469.034.435,62	0,00	0,00	17.469.034.435,62
4	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO	31.753.158.356,79	6.917.879.588,68	2.997.969.116,60	35.673.068.828,87
Jumlah		73.407.843.892,73	7.399.363.096,05	3.190.723.182,80	77.616.483.805,98

7.7.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah LO Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.899.480.096,25 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.397.568.006,74. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.501.912.089,51 atau 15,26% dari tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 233. Rincian Pendapatan Pajak – LO

No	Uraian	LRA 2023	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Pendapatan - LO
1	Pajak Hotel	515.988.145,80	0,00	0,00	515.988.145,80
2	Pajak Motel	39.609.600,00	0,00	0,00	39.609.600,00
3	Pajak Losmen	89.249.000,00	0,00	0,00	89.249.000,00
4	Pajak Restoran dan Sejenisnya	151.051.496,00	0,00	146.500,00	150.904.996,00
5	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	371.277.568,40	0,00	0,00	371.277.568,40
6	Pajak Kantin dan Sejenisnya	33.368.363,00	0,00	0,00	33.368.363,00
7	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.386.124.484,00	0,00	0,00	1.386.124.484,00
8	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
9	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	39.625.075,50	0,00	0,00	39.625.075,50
10	Pajak Permainan Billiard dan Bowling	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.312.727,75	0,00	0,00	5.312.727,75
13	Pajak Pertandingan Olahraga	6.244.000,00	0,00	0,00	6.244.000,00
14	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	338.988.307,80	46.290.955,20	2.872.800,00	382.406.463,00
15	Pajak Reklame Kain	132.546.095,00	0,00	0,00	132.546.095,00
16	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	351.456.060,25	28.652.490,13	17.705.643,20	362.402.907,18
17	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	10.834.797.512,00	0,00	0,00	10.834.797.512,00
18	Pajak Parkir	45.514.899,80	1.686.000,00	0,00	47.200.899,80
19	Pajak Sarang Burung Walet	33.505.000,00	0,00	0,00	33.505.000,00
20	Pajak Pasir dan Kerikil	482.195.097,02	83.538.720,00	6.673.750,00	559.060.067,02
21	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	447.110.870,00	2.002.000,00	0,00	449.112.870,00
22	PBBP2	1.478.149.527,00	319.313.342,04	72.136.269,00	1.725.326.600,04
23	BPHTB-Pemindahan Hak	1.408.156.407,00	0,00	0,00	1.408.156.407,00
Jumlah		18.192.870.236,32	481.483.507,37	99.534.962,20	18.574.818.781,49

Penjelasan:

- Terdapat koreksi untuk mengakui Piutang 2023 sebagai pendapatan pajak LO sebagaimana rincian penyesuaian pada tabel di atas sebesar Rp481.483.507,37.

- b. Dilakukan koreksi kurang atas penerimaan piutang Pajak 2022 pada pendapatan pajak LO 2023 sebesar Rp99.534.962,20.

Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO dengan uraian sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Rincian pendapatan Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 sebesar Rp644.846.745,80 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp618.915.125,90. Kenaikan pendapatan pajak hotel – LO tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp25.931.619,90 atau 4,19% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 234. Rincian Pajak Hotel – LO

No	Uraian	Pendapatan LO 2023	Pendapatan LO 2022	Naik/turun	%
1	Hotel	515.988.145,80	498.620.095,90	17.368.049,90	3,48
2	Motel (Hotel Melati Dua)	39.609.600,00	37.871.230,00	1.738.370,00	4,59
3	Losmen	89.249.000,00	82.423.800,00	6.825.200,00	8,28
Jumlah		644.846.745,80	618.915.125,90	25.931.619,90	4,19

b. Pajak Restoran

Rincian pendapatan Pajak Restoran per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.941.675.411,40 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.319.414.962,62 mengalami peningkatan sebesar Rp622.260.448,78 atau 47,16% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 235. Rincian Pajak Restoran – LO

No	Uraian	Pendapatan LO 2023	Pendapatan LO 2022	Naik/turun	%
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	150.904.996,00	201.068.322,30	(50.163.326,30)	(24,95)
2	Kafetaria dan sejenisnya	371.277.568,40	169.464.097,70	201.813.470,70	119,09
3	Kantin dan sejenisnya	33.368.363,00	55.319.306,30	(21.950.943,30)	(39,68)
4	Jasa Boga/ Katering	1.386.124.484,00	893.563.236,32	492.561.247,68	55,12
Jumlah		1.941.675.411,40	1.319.414.962,62	622.260.448,78	47,16

c. Pajak Hiburan

Rincian pendapatan Pajak Hiburan per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.781.803,25 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp48.124.209,65 pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp5.657.593,60 atau 11,76% dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 236. Rincian Pajak Hiburan – LO

No	Uraian	Pendapatan LO 2023	Pendapatan LO 2022	Naik/turun	%
1	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	2.600.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	160
2	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya	39.625.075,50	35.954.860,35	3.670.215,15	10,21
3	Permainan Bilyar, Golf, Bowling	0,00	540.000,00	(540.000,00)	(100)
4	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	0,00	605.000,00	(605.000,00)	(100)
5	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center)	5.312.727,75	4.664.349,30	648.378,45	13,90



No	Uraian	Pendapatan LO 2023	Pendapatan LO 2022	Naik/turun	%
6	Pajak Pertandingan Olahraga	6.244.000,00	5.360.000,00	884.000,00	16,49
Jumlah		53.781.803,25	48.124.209,65	5.657.593,60	11,76

d. Pajak Reklame

Rincian pendapatan Pajak Reklame per 31 Desember 2023 sebesar Rp514.952.558,00 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp403.113.868,88. Tahun 2023 meningkat sebesar Rp111.838.689,12 atau 27,74% dari tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 237. Rincian Pajak Reklame – LO

No	Uraian	Pendapatan LO 2023	Pendapatan LO 2022	Naik/turun	%
1	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	382.406.463,00	281.700.668,88	100.705.794,12	35,75
2	Reklame Kain	132.546.095,00	121.413.200,00	11.132.895,00	9,17
Jumlah		514.952.558,00	403.113.868,88	111.838.689,12	27,74

e. Pajak Penerangan Jalan Umum

Merupakan seluruh pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum – LO setelah disesuaikan dengan Piutang Penerangan Jalan Umum per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.197.200.419,18 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp10.283.427.181,09. Tahun 2023 meningkat sebesar Rp913.773.238,09 atau 8,89% dari Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 238. Rincian Pajak Penerangan Jalan – LO

No	Uraian	Pendapatan LO 2023	Pendapatan LO 2022	Naik/turun	%
1	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri (swasta)	362.402.907,18	375.491.263,60	(13.088.356,42)	(3,49)
2	Pajak Penerangan Jalan sumber lain (PLN)	10.834.797.512,00	9.907.935.917,49	926.861.594,51	9,35
Jumlah		11.197.200.419,18	10.283.427.181,09	913.773.238,09	8,89

f. Pajak Parkir

Merupakan seluruh pendapatan Pajak Parkir per 31 Desember 2023 sebesar Rp47.200.899,80 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp21.580.000,00. Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp25.620.899,80 atau 118,73% dari Tahun 2022.

g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Merupakan seluruh pendapatan Pajak MBLB per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.008.172.937,02 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp591.522.709,78. Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp416.650.227,24 atau 70,44% dari Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 239. Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Uraian	Pendapatan LO 2023	Pendapatan LO 2022	Naik/turun	%
1	Pajak Pasir dan Kerikil	559.060.067,02	114.808.449,78	444.251.617,24	386,95
2	Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)	449.112.870,00	476.714.260,00	(27.601.390,00)	(5,79)
Jumlah		1.008.172.937,02	591.522.709,78	416.650.227,24	70,44

h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.725.326.600,04 merupakan seluruh pendapatan PBB-P2 yang diakui sebagai pendapatan LO setelah disesuaikan dengan piutang tahun 2023 sebesar Rp319.313.342,04 dan piutang tahun 2022 sebesar Rp72.136.269,00 dan tahun 2022 sebesar Rp1.434.189.079,72. Dibandingkan dengan tahun 2022, PBB-P2- LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp291.137.520,32 atau 20,30%.

i. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Merupakan seluruh pendapatan Pajak atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) per 31 Desember 2023 yang diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp1.408.156.407,00 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.633.894.669,10. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, pendapatan pajak BPHTB mengalami penurunan sebesar (Rp225.738.262,10) atau (13,82%).

j. Pajak Sarang Burung Walet

Merupakan seluruh pendapatan Pajak Sarang Burung Walet per 31 Desember 2023 yang diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp33.505.000,00 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp43.386.200,00 menurun sebesar (Rp9.881.200,00) atau (22,77%).

7.7.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Merupakan seluruh pendapatan dan piutang yang diakui sebagai Pendapatan Retribusi Daerah- LO 2023 sebesar Rp5.899.564.360,00 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp5.046.690.684,83. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, total Pendapatan Retribusi Daerah – LO tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp852.873.675,17 atau 16,90%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 240. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

No	Uraian	LRA 2023	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Pendapatan - LO
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.701.955.164,00	0,00	93.219.104,00	4.608.736.060,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	40.544.000,00	0,00	0,00	40.544.000,00
4	Retribusi Los	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
5	Retribusi Kios	380.029.200,00	0,00	0,00	380.029.200,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	13.049.000,00	0,00	0,00	13.049.000,00
7	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	54.140.000,00	0,00	0,00	54.140.000,00
8	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Retribusi Penyewaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Retribusi Pemakaian Laboratorium	32.865.000,00	0,00	0,00	32.865.000,00



No	Uraian	LRA 2023	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Pendapatan - LO
11	Retribusi Pemakaian Ruangan	39.280.000,00	0,00	0,00	39.280.000,00
12	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	57.500.000,00	0,00	0,00	57.500.000,00
13	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	6.705.000,00	0,00	0,00	6.705.000,00
14	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	208.920.000,00	0,00	0,00	208.920.000,00
15	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	36.124.000,00	0,00	0,00	36.124.000,00
16	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	64.250.000,00	0,00	0,00	64.250.000,00
17	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00
18	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	201.170.000,00	0,00	0,00	201.170.000,00
19	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
21	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	78.489.500,00	0,00	0,00	78.489.500,00
Jumlah		5.992.780.864,00	0,00	93.219.104,00	5.899.561.760,00

Penjelasan rincian pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Adalah seluruh pendapatan retribusi jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas yang diakui sebagai pendapatan Retribusi Daerah- LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.616.901.060,00 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp3.596.101.813,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, pendapatan retribusi pelayanan kesehatan tahun 2022 meningkat sebesar Rp1.020.799.247,00 atau 28,39% dengan. Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 241. Rincian Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO

No	Uraian	Pendapatan LO 2023	Pendapatan LO 2022	Naik/turun	%
1	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	4.616.901.060,00	3.596.101.813,00	1.020.799.247,00	28,39
Jumlah		4.616.901.060,00	3.596.101.813,00	1.020.799.247,00	28,39

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Merupakan seluruh pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp70.000.000,00 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp69.100.000,00. Peningkatan Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 adalah sebesar Rp900.000,00 atau sebesar 1,30%.

c. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

Merupakan seluruh Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum per 31 Desember 2023 yang diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp40.544.000,00 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp48.651.000,00. Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp8.107.000,00) atau (16,66%) dari tahun 2022.

d. Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan

Merupakan seluruh pendapatan Retribusi Sewa Kios Dan Los per 31 Desember 2023 yang diakui sebagai pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar LO sebesar Rp380.639.200,00 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp382.078.800. tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp2.049.600,00) atau (0,54%).

e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Merupakan seluruh pendapatan pengujian kendaraan bermotor per 31 Desember 2023 yang diakui sebagai pendapatan LO sebesar Rp13.049.000,00 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp21.125.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, pendapatan pengujian kendaraan bermotor tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp8.076.000,00) atau (38,23%) dari tahun 2022.

f. Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya

Merupakan seluruh pendapatan pelayanan tera ulang per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.140.000,00 dan tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp56.643.000,00. Jika tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat penurunan sebesar (Rp2.503.000,00) atau (4,42%) dari tahun 2022.

g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Merupakan seluruh pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diakui sebagai bagian dari pendapatan retribusi-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp72.145.000,00 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp218.514.172,83. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp146.369.172,83) atau (66,98%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 242. Rincian Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO

No	Uraian	Pendapatan LO 2023	Pendapatan LO 2022	Naik/turun	%
1	Retribusi Penyewaan Bangunan	0,00	6.922.752,48	(6.922.752,48)	(100,00)
2	Retribusi Penyewaan Tanah	0,00	1.656.419,35	(1.656.419,35)	(100,00)
3	Retribusi Pemakaian Laboratorium	32.865.000,00	209.935.000,00	(177.070.000,00)	(84,35)
4	Retribusi Pemakaian Ruangan	39.280.000,00	0,00	39.280.000,00	0,00
Jumlah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		72.145.000,00	218.514.171,83	(146.369.171,83)	(66,98)

h. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan

Merupakan seluruh pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan per 31 Desember 2023 yang diakui sebagai bagian dari pendapatan retribusi daerah LO sebesar Rp57.500.000,00 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp78.197.900,00. Tahun 2023, pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan – LO mengalami penurunan sebesar (Rp20.697.900) atau (26,47%) dari tahun 2022.

i. Retribusi Terminal

Merupakan seluruh pendapatan retribusi terminal per 31 Desember 2023 yang diakui sebagai bagian dari pendapatan retribusi daerah LO sebesar Rp6.705.000,00 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp7.500.000,00. Tahun 2023, pendapatan retribusi terminal – LO mengalami penurunan sebesar (Rp795.000,00) atau (10,60%) dari tahun 2022.

j. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Merupakan seluruh Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila per 31 Desember 2023 sebesar Rp208.920.000,00 dan tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp260.460.000,00. Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp51.540.000,00) atau (19,79%) dibandingkan dengan tahun 2022.

k. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Merupakan seluruh pendapatan retribusi pelayanan kepelabuhanan per 31 Desember 2023 yang diakui sebagai bagian dari pendapatan retribusi LO sebesar Rp36.124.000,00 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp32.900.000,00. Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp3.224.000,00 atau 9,80% dibandingkan dengan tahun 2022.

l. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Merupakan seluruh Pendapatan Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga per 31 Desember 2023 sebesar Rp64.250.000,00 dan tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp16.960.000,00. Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp47.290.000,00 atau 278,83% dibandingkan dengan tahun 2022.

m. Retribusi Penyeberangan Air

Adalah seluruh pendapatan Retribusi Penyeberangan Air per 31 Desember 2023 yang diakui sebagai bagian dari pendapatan retribusi daerah LO sebesar Rp5.750.000,00 dan tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp42.500.000,00. Tahun 2023 pendapatan Retribusi Penyeberangan Air mengalami penurunan sebesar (Rp36.750.000,00) atau (86,47%) dibandingkan dengan tahun 2022.

n. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan

Adalah seluruh pendapatan Retribusi Izin Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa bibit atau benih ikan per 31 Desember 2023 yang diakui sebagai bagian dari pendapatan retribusi daerah LO sebesar Rp201.170.000,00 dan tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp200.841.000,00. Tahun 2023 pendapatan Retribusi Izin Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp329.000,00 atau 0,16% dibandingkan dengan tahun 2022.

o. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Merupakan seluruh pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan per 31 Desember 2023 yang diakui sebagai bagian dari pendapatan retribusi daerah LO sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp2.000,00. Pada tahun 2023 pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar (Rp2.000,00) atau (100%) dibandingkan dengan tahun 2022.

p. Retribusi Izin Trayek

Adalah seluruh pendapatan Retribusi Izin Trayek angkutan umum per 31 Desember 2023 yang diakui sebagai bagian dari pendapatan retribusi daerah LO sebesar Rp1.400.000,00 dan tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp2.616.000,00. Pada tahun 2023 pendapatan Retribusi Izin



Trayek angkutan umum mengalami penurunan sebesar (Rp1.216.000,00) atau (46,48%) dari tahun 2022.

q. Retribusi Persetujuan Bangunan

Adalah seluruh pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan per 31 Desember 2023 yang diakui sebagai bagian dari pendapatan retribusi daerah LO sebesar Rp78.489.500,00 dan tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp0,00.

7.7.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO merupakan seluruh pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2023 yang diakui sebagai pendapatan daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 243. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

No	Uraian	LRA 2023	Piutang 2023	Piutang 2022	Pendapatan – LO
1	Hasil Tagihan Collection Kredit AMU Bank Kalbar	13.803.915,62	0,00	0,00	13.803.915,62
2	PT. Bank Kalbar (Deviden dari penyertaan modal)	17.226.376.430,00	0,00	0,00	17.226.376.430,00
3	Deviden Tahun Buku 2022 PT. Jamkrida	144.784.250,00	0,00	0,00	144.784.250,00
4	Bagi Hasil Laba Perumda Tirta Uncak Kapuas	84.069.840,00	0,00	0,00	84.069.840,00
Jumlah		17.469.034.435,62	0,00	0,00	17.469.034.435,62

7.7.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO

Merupakan seluruh pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah yang diakui sebagai bagian dari Pendapatan Daerah Per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.673.068.828,87 dan tahun 2022 sebesar Rp27.647.830.015,94, yaitu meningkat sebesar Rp8.025.238.812,93 atau 29,03% dari Tahun 2022, dengan rincian dengan berikut:

Tabel 244. Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LO

No	Uraian	LRA 2023	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Pendapatan - LO
1	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	11.671.000,00	0,00	0,00	11.671.000,00
2	Hasil Sewa BMD	148.956.659,67	0,00	486.919,04	148.469.740,63
3	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.720.079.627,32	0,00	0,00	1.720.079.627,32
4	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	173.669.230,18	0,00	0,00	173.669.230,18
5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	373.972.602,70	0,00	1.200.374,56	372.772.228,14
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	614.018.700,60	0,00	0,00	614.018.700,60
7	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan Denda PBBP2	14.235.612,00	0,00	0,00	14.235.612,00



No	Uraian	LRA 2023	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Pendapatan - LO
9	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	491.344.160,32	0,00	37.361.191,00	453.982.969,32
12	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.209.100,00	0,00	0,00	1.209.100,00
14	Pendapatan BLUD	28.204.001.664,00	4.058.639.930,00	2.958.920.632,00	29.303.720.962,00
15	Kenaikan Nilai Investasi PDAM	0,00	2.859.239.658,68	0,00	2.859.239.658,68
Jumlah		31.753.158.356,79	6.917.879.588,68	2.997.969.116,60	35.673.068.828,87

Penjelasan koreksi tambah sebesar Rp6.917.879.588,68 dengan uraian sebagai berikut:

1. Koreksi atas pengakuan piutang pada BLUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau tahun 2023 yang merupakan hak BLUD tahun 2023 namun masih belum tertagih per 31 Desember 2023. sehingga sejumlah itu dilakukan koreksi atas pendapatan BLUD LO tahun 2023.
2. Koreksi atas kenaikan nilai investasi pada PDAM sebesar Rp2.859.239.658,68, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selaku penyerta modal dengan komposisi 43% melakukan koreksi atas nilai penyertaan modal berdasarkan metode ekuitas.

Penjelasan koreksi kurang sebesar Rp2.997.969.116,60 dengan uraian sebagai berikut:

1. Koreksi atas pelunasan piutang sewa Tanah dan Bangunan selama tahun 2023 sebesar Rp486.919,04
2. Koreksi atas penerimaan piutang bunga Dana Transfer Deposit Facility pada Bank Indonesia tahun 2022 telah tersalur ke daerah tahun 2023 sebesar Rp1.200.374,56.
3. Koreksi kurang pendapatan LO atas penerimaan piutang gaji dan Tunjangan tahun 2022 selama tahun 2023 sebesar Rp37.361.191,00.
4. Koreksi atas piutang BLUD tahun 2022 yang telah tertagih pada tahun 2023 sebesar Rp2.958.920.632,00 sehingga mengurangi pendapatan BLUD LO tahun 2023.

7.7.1.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO

Adalah seluruh pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.400.976.476.820,99 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.202.244.000.493,63. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp198.732.476.327,36 atau 16,53% dari tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 246. Rincian Pendapatan Transfer – LO

No	Uraian	2023	2022	Turun/Naik	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	1.288.771.549.405,00	1.120.395.468.370,00	168.376.081.035,00	15,03
a	Bagi Hasil Pajak – LO	24.855.935.825,00	32.627.046.098,00	(7.771.110.273,00)	(23,82)
b	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	88.880.427.000,00	35.197.958.215,00	53.682.468.785,00	152,52
c	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	924.278.715.000,00	892.260.063.000,00	32.018.652.000,00	3,59
d	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	250.756.471.580,00	160.310.401.057,00	90.446.070.523,00	56,42
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	0,00	10.093.626.000,00	(10.093.626.000,00)	(100,00)
a	Dana Insentif Desa (DID)	0,00	10.093.626.000,00	(10.093.626.000,00)	(100,00)
b	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Dana Penyesuaian – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	60.865.177.460,99	67.989.232.973,63	(7.124.055.512,64)	(10,48)
a	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	60.865.177.460,99	67.989.232.973,63	(7.124.055.512,64)	(10,48)
4	Bantuan Keuangan	51.339.749.955,00	3.765.673.150,00	47.574.076.805,00	1263,36
a	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	0,00	398.842.500,00	(398.842.500,00)	(100,00)
b	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	51.339.749.955,00	3.366.830.650,00	47.972.919.305,00	1424,87
Jumlah Pendapatan Transfer		1.400.976.476.820,99	1.202.244.000.493,63	198.732.476.327,36	16,53

Penjelasan selisih Pendapatan Transfer antara realisasi LRA dengan Laporan Operasional dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Rincian koreksi atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 247. Rincian Koreksi Pendapatan Transfer Pusat-LO

No	Uraian	LRA 2023	Piutang 2023	Piutang 2022	Pendapatan - LO
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	95.409.899.317,00	23.275.841.000,00	4.949.377.492,00	113.736.362.825,00



No	Uraian	LRA 2023	Piutang 2023	Piutang 2022	Pendapatan - LO
2	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	16.642.935.576,00	2.532.087.000,00	2.252.973.576,00	16.922.049.000,00
3	DBH PPh Pasal 21	7.092.963.070,00	1.249.433.000,00	717.943.070,00	7.624.453.000,00
4	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	314.477.597,00	7.831.000,00	36.063.597,00	286.245.000,00
5	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	24.355.933,00	0,00	1.167.108,00	23.188.825,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	169.741.274,00	37.339.000,00	57.886.274,00	149.194.000,00
7	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	51.642.586.773,00	19.311.885.000,00	1.365.755.773,00	69.588.716.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.564.066.861,00	137.266.000,00	95.771.861,00	2.605.561.000,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	210.063.022,00	0,00	210.063.022,00	0,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	15.223.400.000,00	0,00	0,00	15.223.400.000,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.525.309.211,00	0,00	211.753.211,00	1.313.556.000,00
12	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	924.278.715.000,00	0,00	0,00	924.278.715.000,00
13	DAU	888.135.301.000,00	0,00	0,00	888.135.301.000,00
14	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00
15	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	35.343.414.000,00	0,00	0,00	35.343.414.000,00



No	Uraian	LRA 2023	Piutang 2023	Piutang 2022	Pendapatan - LO
16	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	87.192.364.246,00	0,00	0,00	87.192.364.246,00
17	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	586.189.662,00	0,00	0,00	586.189.662,00
18	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.831.028.928,00	0,00	0,00	3.831.028.928,00
19	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.717.561.344,00	0,00	0,00	3.717.561.344,00
20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.120.785.000,00	0,00	0,00	1.120.785.000,00
21	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	56.811.219.003,00	0,00	0,00	56.811.219.003,00
22	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	8.045.829.000,00	0,00	0,00	8.045.829.000,00
23	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.926.671.000,00	0,00	0,00	4.926.671.000,00
24	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	301.966.550,00	0,00	0,00	301.966.550,00
25	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	2.569.236.388,00	0,00	0,00	2.569.236.388,00
26	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	1.481.951.400,00	0,00	0,00	1.481.951.400,00
27	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.799.925.971,00	0,00	0,00	3.799.925.971,00
28	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	163.564.107.334,00	0,00	0,00	163.564.107.334,00
29	DAK Non Fisik-BOS Reguler	51.696.293.000,00	0,00	0,00	51.696.293.000,00
30	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.020.000.000,00	0,00	0,00	1.020.000.000,00
31	DAK Non Fisik-TPG PNSD	54.760.149.400,00	0,00	0,00	54.760.149.400,00
32	DAK Non Fisik-Tamsil Guru	2.550.750.000,00	0,00	0,00	2.550.750.000,00



No	Uraian	LRA 2023	Piutang 2023	Piutang 2022	Pendapatan - LO
	PNSD				
33	DAK Non Fisik-TKG PNSD	15.185.884.000,00	0,00	0,00	15.185.884.000,00
34	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.458.651.000,00	0,00	0,00	3.458.651.000,00
35	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	475.570.000,00	0,00	0,00	475.570.000,00
36	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	26.568.459.000,00	0,00	0,00	26.568.459.000,00
37	DAK Non Fisik-PK2UKM	413.080.700,00	0,00	0,00	413.080.700,00
38	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	429.013.000,00	0,00	0,00	429.013.000,00
39	DAK Non Fisik-BOKB-KB	6.492.257.234,00	0,00	0,00	6.492.257.234,00
40	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	514.000.000,00	0,00	0,00	514.000.000,00
41	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	DID	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Dana Desa	248.770.492.800,00	0,00	248.770.492.800,00	0,00
44	Dana Desa	248.770.492.800,00	0,00	248.770.492.800,00	0,00
Jumlah		1.519.215.578.697,00	23.275.841.000,00	253.719.870.292,00	1.288.771.549.405,00

Koreksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dengan uraian sebagai berikut:

- Koreksi tambah sebesar Rp23.275.841.000,00 terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp3.789.351.000,00 dan Dana Bagi Hasil SDA sebesar Rp19.486.490.000,00 Penyaluran Dana Bagi Hasil melalui Rekening *Treasury Defocit Facility* Transfer ke Rekening Daerah yang masih belum terealisasi per 31 Desember 2023 namun karena merupakan hak pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dana tersebut dilakukan pengakuan sebagai pendapatan LO. Sedangkan perlakuan akuntansi dana tersebut bisa disajikan sebagai Kas/setara kas atau investasi jangka pendek sesuai waktu penyimpanan, dan Bunga Kas TDF dapat disajikan sebagai Piutang Bunga (Neraca) dan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah (Laporan Operasional).
- Koreksi kurang sebesar Rp253.719.870.292,00 terdiri dari koreksi atas penerimaan kas TDF tahun 2022 pada pendapatan transfer LO sebesar Rp4.949.377.492,00 karena secara akrual bahwa sejumlah itu *merupakan* hak pemerintah daerah tahun anggaran 2022. Serta koreksi kurang atas pendapatan Dana Desa sebesar Rp248.770.492.800,00 atas pendapatan yang telah dilakukan penyaluran kepada Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023.

2. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi terdapat perbedaan antara realisasi Pendapatan transfer provinsi dalam LRA dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi – LO sebesar (Rp8.841.867.190,63) dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 248. Rincian Koreksi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

No	Uraian	LRA	Piutang 2023	Piutang 2022	Pendapatan LO
	Bagi Hasil Pajak	69.707.044.651,62	3.965.972.179,00	12.807.839.369,63	60.865.177.460,99
1	Pendapatan Bagi Hasil PKB	8.566.842.577,98	720.670.087,00	639.471.617,98	8.648.041.047,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.729.244.615,56	785.277.970,00	1.091.186.944,56	9.423.335.641,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.633.097.827,93	2.429.017.208,00	10.932.575.438,93	27.129.539.597,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.504.348.330,15	31.006.914,00	144.605.368,16	2.390.749.875,99
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	13.273.511.300,00	0,00	0,00	13.273.511.300,00
	Bantuan Keuangan	51.339.749.955,00	0,00	0,00	51.339.749.955,00
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	51.339.749.955,00	0,00	0,00	51.339.749.955,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Provinsi	121.046.794.606,62	3.965.972.179,00	12.807.839.369,63	112.204.927.415,99

Penjelasan selisih Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi – LO dengan uraian sebagai berikut:

- Koreksi tambah sebesar Rp3.965.972.179,00 merupakan piutang tahun 2023 yang telah disajikan di dalam neraca Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023.
- Koreksi kurang sebesar Rp12.807.839.369,63 merupakan koreksi atas penerimaan piutang pajak bagi hasil provinsi tahun 2022.

7.7.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah per 31 Desember 2023 dengan uraian berikut:

- Pendapatan Hibah Sumbangan Pihak Ketiga-LO sebesar Rp37.388.816.562,77 yang merupakan pendapatan yang tidak bisa dikategorikan sebagai pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer berupa setoran temuan pemeriksaan dan tindak lanjut, setoran UYHD tahun sebelumnya dan setoran ke kasda yang tidak disertai STS atau uraian yang tidak bisa ditelusuri sebesar Rp490.788.549,77 dan sumbangan berupa hibah pihak ketiga sebesar Rp37.040.999.967,00 dan koreksi-koreksi lain dengan rincian mutasi :

1	Pendapatan Lain-lain Daerah Yang Sah LRA	10.052.018.779,77
2	Koreksi Tambah dari Hibah Aset Tetap:	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27.449.788.854,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.923.262.253,00
	Dinas Perumahan dan Permukiman, Pertanahan dan LH	33.300.000,00
	Dinas Komunikasi dan Informasi dan Statistik	55.964.000,00
	Badan Keuangan dan Aset Daerah	707.712.250,00
	Dinas Kesehatan	870.972.610,00
3	Sub Jumlah	37.040.999.967,00

**4 Koreksi kurang:**

Setoran TGR Kapal Ferry pada Dinas Perhubungan	80.000.000,00
Setoran Sisa Dana Tidak Terduga tahun 2022	20.300.000,00
Setoran Piutang lebih salur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2022	42.671.954,00

5 Sub Jumlah **142.971.954,00**

6 Jumlah Pendapatan Lain-lain Daerah Yang Sah LO **46.950.046.792,77**

2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - Lain-lain Pendapatan yaitu Pendapatan Lainnya - FKTP pada Puskesmas-Puskesmas yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.561.230.230,00.

7.7.2 BEBAN – LO

Beban LO merupakan Beban atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun 2023 dan Tahun 2022. Beban LO terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer, dan Beban Tak Terduga dengan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp 1.464.494.391.338,95 dan tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.365.472.041.181,24 dengan rincian sebagai berikut:

7.7.2.1 BEBAN OPERASI – LO

Realisasi Beban Operasi- LO pada Tahun 2023 sebesar Rp1.360.988.712.680,95 dan tahun 2022 (*Audited*) sebesar Rp1.265.194.981.355,24. Tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp95.793.731.325,71 atau 7,57. Rincian Realisasi Beban Operasi-LO dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 249. Rincian Beban Operasi – LO

No	Uraian	2023	2022	Turun/Naik	%
1	Beban Pegawai	541.802.124.151,77	526.138.215.771,51	15.663.908.380,26	2,98
2	Beban Persediaan	87.025.800.098,14	78.981.079.932,00	8.044.720.166,14	10,19
3	Beban Jasa	151.197.058.726,92	132.032.472.298,73	19.164.586.428,19	14,52
4	Beban Pemeliharaan	9.409.595.568,00	9.944.036.594,11	(534.441.026,11)	(5,37)
5	Beban Perjalanan Dinas	91.823.592.586,01	86.610.059.401,41	5.213.533.184,60	6,02
6	Beban Uang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga /Masyarakat	23.720.102.882,00	27.746.085.691,00	(4.025.982.809,00)	(14,51)
7	Beban Penyisihan Piutang	111.307.905,74	920.961.335,43	(809.653.429,69)	(87,91)
8	Beban Penyusutan	246.846.712.650,66	242.379.580.976,61	4.467.131.674,05	1,84
9	Beban Amortisasi	180.536.297,94	93.676.666,67	86.859.631,27	92,72
10	Beban Subsidi	0,00	1.515.748.250,00	(1.515.748.250,00)	(100,00)
11	Beban Hibah	155.673.100.372,32	109.447.688.924,58	46.225.411.447,74	42,24
12	Beban Bantuan Sosial	898.350.000,00	3.167.177.500,00	(2.268.827.500,00)	(71,64)
13	Beban Ekstrakomtabel	6.150.712.885,30	4.384.012.296,22	1.766.700.589,08	40,30
14	Beban Lain-Lain	46.149.718.556,15	41.834.185.716,97	4.315.532.839,18	10,32
Jumlah		1.360.988.712.680,95	1.265.194.981.355,24	95.793.731.325,71	7,57

**7.7.2.1.1 Beban Pegawai – LO**

Merupakan seluruh Beban Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 sebesar Rp541.802.124.151,77 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp526.138.215.771,51. Tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp15.663.908.380,26 atau 2,98 dari tahun 2022. Rincian Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 250. Rincian Beban Pegawai – LO

No	Uraian	2023
A	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	340.210.799.740,40
1	Beban Gaji Pokok PNS	227.967.124.648,00
2	Beban Gaji Pokok PPPK	24.583.761.200,00
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	20.952.868.333,00
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	2.013.483.094,00
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	4.712.597.804,00
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	17.276.657.400,00
7	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.705.311.200,00
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.554.900.000,00
9	Beban Tunjangan Beras PNS	12.595.793.340,00
10	Beban Tunjangan Beras PPPK	1.571.658.840,00
11	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	213.215.192,00
12	Beban Pembulatan Gaji PNS	3.246.124,00
13	Beban Pembulatan Gaji PPPK	384.322,00
14	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	20.787.915.105,40
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.171.322.359,00
16	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	466.960.545,00
17	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	52.293.102,00
18	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.423.258.590,00
19	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	158.048.542,00
B	Beban Tambahan Penghasilan ASN	103.845.431.167,37
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	92.157.928.866,37
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.029.990.301,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.117.300.000,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	7.540.212.000,00
C	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	79.079.232.337,00
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	14.078.750,00
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	32.978.750,00
3	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.035.012,00



No	Uraian	2023
4	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	11.001.750,00
5	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	263.814.750,00
6	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	824.100,00
7	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	756.250,00
8	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.750.000,00
9	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	43.987.299,00
10	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	27.425.000,00
11	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.227.000,00
12	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.267.750,00
13	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	14.152.700,00
14	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	524.388,00
15	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.613.000,00
16	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	4.610.000,00
17	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	2.535.500,00
18	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	209.755,00
19	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	8.913.780,00
20	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	1.425.003,00
21	Beban TPG PNSD	51.987.357.800,00
22	Beban TKG PNSD	12.162.449.000,00
23	Beban Tamsil Guru PNSD	475.000,00
24	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.205.240.000,00
25	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	441.660.000,00
26	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	117.000.000,00
27	Beban TPG PPPK	1.317.126.000,00
28	Beban TKG PPPK	2.776.644.000,00
29	Beban Tamsil Guru PPPK	623.150.000,00
D	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	17.499.823.536,00
1	Beban Uang Representasi DPRD	671.790.000,00
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	69.589.800,00



No	Uraian	2023
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	80.820.720,00
4	Beban Uang Paket DPRD	57.582.000,00
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	974.095.500,00
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	84.042.000,00
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	12.971.700,00
8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.292.000.000,00
9	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.323.000.000,00
10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	387.648,00
11	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	58.816.296,00
12	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.381.968,00
13	Beban Jaminan Kematian DPRD	4.145.904,00
14	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	5.208.000.000,00
15	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.661.200.000,00
E	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	233.237.371,00
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.140.000,00
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160,00
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	292.728,00
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.040,00
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.486.400,00
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.998.750,00
11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	4.678.050,00
12	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	146.932,00
13	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1.561.950,00
14	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	37.451.700,00
15	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	117.000,00
16	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	107.250,00
17	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.950.000,00
18	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.680.000,00
19	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.900.000,00



No	Uraian	2023
20	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	273.000,00
21	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	144.787,00
22	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	1.197.300,00
23	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	44.362,00
24	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	136.500,00
25	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	390.000,00
26	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	214.500,00
27	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	17.745,00
28	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	757.380,00
29	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	122.557,00
F	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	712.440.000,00
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	399.960.000,00
G	Beban Pegawai BLUD	221.160.000,00
1	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan BLUD	192.000.000,00
2	Beban Honorarium Pengadaan Barang / Jasa BLUD	29.160.000,00
Jumlah		541.802.124.151,77

Penjelasan selisih antara realisasi Beban Pegawai – LO dengan realisasi Beban Pegawai LRA dengan uraian sebagai berikut:

Jika dibandingkan antara realisasi Beban Pegawai – LO Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 dengan realisasi Belanja Pegawai LRA terdapat selisih sebesar Rp7.484.187.987,77. Selisih tersebut merupakan beban honorarium pengadaan barang dan jasa yang telah diatribusikan kedalam aset tetap dari perolehan Beban modal tahun 2023 sebesar Rp221.160.000,00, jumlah utang tahun 2023 dan utang tahun 2022 yang menjadi koreksi atas beban pegawai LO sebagaimana tabel dibawah:

Tabel 251. Rincian Jenis Utang Koreksi Beban Pegawai – LO

No	Uraian	Utang Beban 2023	Utang Beban 2022	Selisih Utang 2023/2022
1	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.063.850.668	0,00	8.063.850.668
2	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	64.929.640	1.422.000	63.507.640
3	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.150.704	0,00	1.150.704
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan	6.757.442.787	5.698.326.068	1.059.116.719



No	Uraian	Utang Beban 2023	Utang Beban 2022	Selisih Utang 2023/2022
	Beban Kerja PNS			
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	303.757.256	213.000.000	90.757.256,77
6	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	605.000.000	608.000.000	(3.000.000)
7	Beban Tamsil Guru PNSD	0,00	1.266.275.000	(1.266.275.000)
8	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	218.480.000	(218.480.000)
9	Beban Tamsil Guru PPPK	0,00	527.600.000	(527.600.000)
	Sub Jumlah	15.796.131.056	8.533.103.068	7.263.027.987,77
10	Beban Pegawai BLUD	221.160.000,00	0,00	221.160.000
	Sub Jumlah	221.160.000,00	0,00	221.160.000,00
	Jumlah selisih Belanja Pegawai LRA dengan Beban Pegawai LO	16.017.291.055,77	8.533.103.068,00	7.484.187.987,77

Sedangkan honorarium Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diatribusikan ke dalam aset tetap dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 252. Rincian Beban Pegawai per SKPD – LO

No	Nama OPD	Realisasi LRA	Diatribusi	Beban LO
1	Sekretariat Daerah	286.150.000,00	0,00	286.150.000,00
2	Sekretariat DPRD	8.160.000,00	(8.160.000,00)	0,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	8.160.000,00	0,00	8.160.000,00
4	Dinas Kesehatan	6.120.000,00	(6.120.000,00)	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48.960.000,00	(48.960.000,00)	0,00
6	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	9.520.000,00	(9.520.000,00)	0,00
7	Dinas Pertanian Dan Pangan	15.640.000,00	(15.640.000,00)	0,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.800.000,00	(6.800.000,00)	0,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8.160.000,00	(8.160.000,00)	0,00
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika Dan Statistik	2.040.000,00	(2.040.000,00)	0,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	8.160.000,00	(8.160.000,00)	0,00
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	760.000,00	(760.000,00)	0,00
14	Dinas Perikanan	17.260.000,00	(8.160.000,00)	9.100.000,00
15	Inspektorat	12.240.000,00	(12.240.000,00)	0,00



No	Nama OPD	Realisasi LRA	Diatribusi	Beban LO
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	118.900.000,00	(11.680.000,00)	107.220.000,00
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	8.160.000,00	(8.160.000,00)	0,00
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan LH	8.160.000,00	(8.160.000,00)	0,00
19	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	8.160.000,00	0,00	8.160.000,00
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.720.000,00	(2.720.000,00)	0,00
21	Dinas Perhubungan	23.120.000,00	(23.120.000,00)	0,00
22	Satuan Polisi Pamong Praja	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00
23	Badan Pengelola Perbatasan	6.120.000,00	(6.120.000,00)	0,00
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.190.000,00	0,00	5.190.000,00
25	Badan Pendapatan Daerah	8.160.000,00	(8.160.000,00)	0,00
26	Kecamatan Putussibau Utara	2.040.000,00	(2.040.000,00)	0,00
27	Kecamatan Kalis	2.040.000,00	(2.040.000,00)	0,00
28	Kecamatan Embaloh Hilir	2.040.000,00	(2.040.000,00)	0,00
29	Kecamatan Embaloh Hulu	1.360.000,00	(1.360.000,00)	0,00
30	Kecamatan Mentebah	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
31	Kecamatan Pengkadan	1.360.000,00	(1.360.000,00)	0,00
32	Kecamatan Hulu Gurung	3.400.000,00	(3.400.000,00)	0,00
33	Kecamatan Batang Lupar	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
34	Kecamatan Suhaid	680.000,00	(680.000,00)	0,00
35	Kecamatan Seberuang	680.000,00	(680.000,00)	0,00
36	Kecamatan Silat Hulu	2.040.000,00	(2.040.000,00)	0,00
JUMLAH		660.140.000,00	(218.480.000,00)	441.660.000,00

7.7.2.1.2 Beban Persediaan - LO

Merupakan seluruh pengeluaran beban persediaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 sebesar Rp87.025.800.098,14 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebesar Rp78.981.079.932,00. Tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar Rp8.044.720.166,14 atau 10,19 dari tahun 2022. Pada Beban Persediaan tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi Beban persediaan habis pakai LRA Per 31 Desember 2023 terdapat selisih lebih sebesar Rp.19.454.324.139,76 yang merupakan koreksi-koreksi atas Beban Persediaan tahun 2023 dan tahun 2022 serta koreksi atas utang Beban tahun 2023 dan tahun 2022, koreksi reklas beban BLUD yang digunakan untuk Beban habis pakai dengan rincian koreksi sebagai berikut:

Tabel 253. Rincian Beban Persediaan – LO

No	Uraian	LRA	Reklas BLUD	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Beban LO
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	498.544.400,00	0,00	0,00	0,00	498.544.400,00



No	Uraian	LRA	Reklas BLUD	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Beban LO
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	78.021.000,00	0,00	0,00	0,00	78.021.000,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.641.683.303,00	0,00	0,00	0,00	11.641.683.303,00
4	Beban Bahan-Barang dalam Proses	43.850.000,00	0,00	0,00	0,00	43.850.000,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.382.000,00	0,00	0,00	0,00	2.382.000,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	57.357.500,00	0,00	0,00	0,00	57.357.500,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	61.625.000,00	0,00	0,00	0,00	61.625.000,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	7.590.000,00	0,00	3.160.000,00	10.000.000,00	750.000,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	739.799.501,00	0,00	9.113.921,46	210.362.398,00	538.551.024,46
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.816.610.107,00	0,00	0,00	0,00	2.816.610.107,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	39.716.100,00	0,00	2.953.000,00	0,00	42.669.100,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.346.912.498,90	0,00	134.878.910,00	36.173.050,00	5.445.618.358,90
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.107.780,00	0,00	0,00	0,00	25.107.780,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.717.921.188,41	0,00	1.051.524.698,00	892.568.530,00	6.876.877.356,41
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	397.258.000,00	0,00	0,00	0,00	397.258.000,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.148.364.664,64	0,00	0,00	0,00	2.148.364.664,64
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.987.000,00	0,00	0,00	0,00	14.987.000,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.524.099.393,00	0,00	0,00	0,00	1.524.099.393,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	160.005.000,00	0,00	0,00	0,00	160.005.000,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/ cendera mata	417.662.125,00	0,00	0,00	0,00	417.662.125,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.386.932.599,85	0,00	0,00	0,00	5.386.932.599,85
25	Beban Obat-Obatan-Obat	4.027.535.687,58	0,00	12.185.880.491,16	11.564.218.329,00	4.649.197.849,74
26	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.802.752.480,00	0,00	8.073.200,00	2.554.100,00	2.808.271.580,00
27	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	485.160.000,00	0,00	0,00	0,00	485.160.000,00



No	Uraian	LRA	Reklas BLUD	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Beban LO
28	Beban Natura dan Pakan-Pakan	171.161.800,00	0,00	0,00	0,00	171.161.800,00
29	Beban Makanan dan Minuman Rapat	8.795.442.030,00	0,00	0,00	0,00	8.795.442.030,00
30	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.991.342.540,00	0,00	215.000,00	0,00	2.991.557.540,00
31	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
32	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	940.150.400,00	0,00	0,00	0,00	940.150.400,00
33	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	181.365.000,00	0,00	0,00	0,00	181.365.000,00
34	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	72.624.000,00	0,00	0,00	0,00	72.624.000,00
35	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.155.709.830,00	0,00	0,00	0,00	7.155.709.830,00
36	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	49.900.000,00	0,00	0,00	0,00	49.900.000,00
37	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
38	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	417.571.200,00	0,00	0,00	0,00	417.571.200,00
40	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	251.448.000,00	0,00	0,00	0,00	251.448.000,00
41	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	109.500.000,00	0,00	0,00	0,00	109.500.000,00
42	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	39.928.500,00	0,00	0,00	0,00	39.928.500,00
43	Beban Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	13.134.000,00	0,00	0,00	0,00	13.134.000,00
45	Beban Pakaian KORPRI	200.804.200,00	0,00	0,00	0,00	200.804.200,00
46	Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Beban Pakaian Batik Tradisional	261.826.100,00	0,00	0,00	0,00	261.826.100,00
48	Beban Pakaian Olahraga	259.211.900,00	0,00	0,00	0,00	259.211.900,00
49	Beban Pakaian Paskibraka	133.142.330,00	0,00	0,00	0,00	133.142.330,00
50	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	4.336.800,00	0,00	0,00	0,00	4.336.800,00
51	Mapping Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Beban Bahan-Bahan Bangunan & Konstruksi	0,00	32.392.194,00	0,00	0,00	32.392.194,00
53	Beban Bahan-Bahan Bakar & Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Beban Bahan Barang Dlm Proses Untuk Linen,Batal,Sarung Bantal & Selimut	0,00	94.217.775,00	0,00	0,00	94.217.775,00
55	Beban Bahan Pengisian Tabung Untuk Oksigen	0,00	781.994.454,00	1.170.305.646,00	25.319.526,00	1.926.980.574,00



No	Uraian	LRA	Reklas BLUD	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Beban LO
	Medis					
56	Beban Bahan Pengisian Tabung Untuk Oksigen Medis (Hutang BLUD TA 2022)	0,00	325.619.877,20	0,00	325.619.877,00	0,20
57	Beban Bahan Pengisian Tabung Gas Untuk Gas Elpiji	0,00	48.719.530,00	0,00	0,00	48.719.530,00
58	Beban Bahan-Bahan Lainnya Untuk Bahan Pakai Habis Kesehatan	0,00	2.074.836.796,00	3.213.924.143,21	729.189.287,00	4.559.571.652,21
59	Beban Bahan-Bahan Lainnya Untuk Bahan Pakai Habis Kesehatan (Hutang BLUD TA 2022)	0,00	1.044.879.634,00	0,00	1.044.879.700,00	-66,00
60	Beban Bahan-Bahan Lainnya Untuk Bahan Pakai Habis Radiologi	0,00	94.627.500,00	373.605.000,00	79.050.000,00	389.182.500,00
61	Beban Bahan-Bahan Lainnya Untuk Bahan Pakai Habis Radiologi (Hutang BLUD TA 2022)	0,00	87.928.900,00	0,00	87.928.900,00	0,00
62	Beban Bahan-Bahan Lainnya Untuk Bahan Pakai Habis CSSD	0,00	171.690.734,00	648.685.566,00	132.831.755,00	687.544.545,00
63	Beban Bahan-Bahan Lainnya Untuk Bahan Pakai Habis CSSD (Hutang BLUD TA.2022)	0,00	13.445.984,00	0,00	13.445.984,00	0,00
64	Beban Bahan-Bahan Lainnya Untuk Bahan Pakai Habis Laboratorium	0,00	1.751.782.344,00	594.557.143,54	361.342.842,08	1.984.996.645,46
65	Beban Bahan-Bahan Lainnya Untuk Bahan Pakai Habis Laboratorium (Hutang BLUD TA 2022)	0,00	995.532.151,46	0,00	995.532.151,46	0,00
66	Beban Suku Cadang-Suku Cabang Alat Kedokteran	0,00	22.911.530,00	0,00	0,00	22.911.530,00
67	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	0,00	404.274.687,00	91.353.000,00	0,00	495.627.687,00
68	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Untuk Kegiatan Kantor Penggandaan	0,00	99.004.178,00	0,00	0,00	99.004.178,00
69	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	0,00	367.469.013,00	0,00	0,00	367.469.013,00
70	Beban Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya & Buku Cek Bendahara Pengeluaran BLUD	0,00	19.700.000,00	0,00	0,00	19.700.000,00
71	Beban Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	0,00	4.742.500,00	0,00	0,00	4.742.500,00
72	Beban Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor	0,00	25.799.798,00	18.093.000,00	0,00	43.892.798,00
73	Beban Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik	0,00	58.308.702,00	0,00	0,00	58.308.702,00
74	Beban Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cendera Mata	0,00	9.934.733,00	0,00	0,00	9.934.733,00
75	Beban Alat Bahan - Bahan Kebersihan Untuk Cleaning Service	0,00	357.470.437,00	0,00	0,00	357.470.437,00
76	Beban Alat Bahan - Bahan Untuk Laundry	0,00	1.887.000,00	1.434.120,00	0,00	3.321.120,00



No	Uraian	LRA	Reklas BLUD	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Beban LO
77	Beban Obat-Obatan	0,00	2.735.765.930,00	3.515.312.814,27	1.046.801.236,00	5.204.277.508,27
78	Beban Obat-Obatan (Hutang BLUD TA 2022)	0,00	1.139.746.497,00	0,00	0,00	1.139.746.497,00
79	Beban Makanan & Minum Rapat	0,00	73.673.471,00	0,00	0,00	73.673.471,00
80	Beban Makanan & Minum Jamuan Tamu	0,00	23.149.720,00	0,00	0,00	23.149.720,00
81	Beban Makanan & Minum Pada Fasilitas Pelayanan Urusan kesehatan	0,00	1.127.566.082,00	0,00	0,00	1.127.566.082,00
JUMLAH		67.571.475.958,38	13.989.072.151,66	23.023.069.653,64	17.557.817.665,54	87.025.800.098,14

Penjelasan koreksi tambah Rp23.023.069.653,63 dengan uraian sebagai berikut:

1. Total koreksi tambah beban persediaan dari persediaan tahun 2022 sebesar Rp15.735.409.171,16
2. Penambahan beban persediaan dari utang Belanja barang habis pakai dan obat-obatan tahun 2023 sebesar Rp7.287.660.482,48.

Penjelasan koreksi kurang Rp17.557.817.665,54 dengan uraian sebagai berikut:

1. Koreksi kurang atas beban persediaan karena masih menjadi persediaan per 31 Desember 2023 pada seluruh SKPD sebesar Rp13.944.258.154,54
2. Koreksi atas realisasi pembayaran utang beban persediaan tahun 2022 sebesar Rp3.613.559.511,00

Mutasi tambah kurang beban persediaan LO sebagaimana di bawah ini:

1	Realisasi LRA Pemda Tahun 2023	67.571.475.958,38
	Koreksi Tambah:	
	Reklas Belanja BLUD untuk Barang Habis Pakai	13.989.072.151,66
	Persediaan tahun 2022	15.735.409.171,16
	Utang Belanja 2023 untuk Barang Habis Pakai dan Obat	7.287.660.482,48
2	Sub Jumlah	37.012.141.805,30
	Koreksi Kurang :	
	Persediaan tahun 2023	13.944.258.154,54
	Utang Belanja 2022 untuk Barang Habis Pakai dan Obat	3.613.559.511,00
3	Sub Jumlah	17.557.817.665,54
	Jumlah Beban Persediaan LO (1+2-3)	87.025.800.098,14

7.7.2.1.3 Beban Jasa - LO

Merupakan seluruh pengeluaran beban jasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 sebesar Rp151.197.058.726,92 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp132.032.472.298,73. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar Rp19.164.586.428,19 atau 14,52 dari tahun 2022. Jika dibandingkan antara realisasi Beban Jasa LO dengan realisasi Beban Jasa LRA per 31 Desember 2023 terdapat selisih sebesar Rp13.125.026.927,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 254. Rincian Beban Jasa – LO

No	Rincian	Beban LO
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.147.589.000,00



No	Rincian	Beban LO
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.809.987.500,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	0,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	172.700.000,00
5	Honorarium Rohaniwan	4.800.000,00
6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	181.400.000,00
7	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	298.151.200,00
8	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	141.700.000,00
9	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	10.708.152.000,00
10	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	28.516.098.890,92
11	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	57.210.000,00
12	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.423.750.000,00
13	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Linmas	1.633.740.000,00
14	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	529.800.000,00
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	63.000.000,00
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	234.000.000,00
17	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.350.653.500,00
18	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	203.700.000,00
19	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	144.000.000,00
20	Beban Jasa Tenaga Administrasi	24.888.004.520,00
21	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	3.190.450.000,00
22	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.677.300.000,00
23	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.467.770.000,00
24	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.453.573.000,00
25	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.618.500.000,00
26	Beban Jasa Tenaga Caraka	0,00
27	Beban Jasa Tenaga Supir	132.275.500,00
28	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	247.500.000,00
29	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	4.200.000,00
30	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	99.000.000,00
31	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	15.250.000,00
32	Beban Jasa Tata Rias	16.560.000,00
33	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00
34	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	41.469.515,00
35	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	273.638.810,00



No	Rincian	Beban LO
36	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	7.500.000,00
37	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	137.970.800,00
38	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	25.650.000,00
39	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian, Kebudayaan, & Alat Rumah Tangga	164.699.850,00
40	Beban Jasa Kalibrasi	223.387.060,00
41	Beban Jasa Pengolahan Sampah	0,00
42	Beban Jasa Pengukuran Tanah	8.297.459,00
43	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	483.400.000,00
44	Beban Tagihan Telepon	170.411.860,00
45	Beban Tagihan Air	955.108.129,00
46	Beban Tagihan Listrik	5.947.044.907,00
47	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	442.300.000,00
48	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.094.916.867,00
49	Beban Paket/Pengiriman	108.686.997,00
50	Beban Penambahan Daya	36.757.721,00
51	Beban Registrasi/Keanggotaan	187.717.922,00
52	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	271.613.274,00
53	Beban Pengolahan Air Limbah	2.886.000,00
54	Beban Lembur	0,00
55	Beban Medical Check Up	30.760.216,00
56	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.313.955.976,00
57	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	0,00
58	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.451.981.405,00
59	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	478.800.000,00
60	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.757.964.994,00
61	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	344.305.668,00
62	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	427.431.155,00
63	Beban Sewa Electric Generating Set	45.000.000,00
64	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	39.950.000,00
65	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	178.250.000,00
66	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00
67	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	310.200.000,00
68	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	0,00
69	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	234.550.000,00
70	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	0,00



No	Rincian	Beban LO
71	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	248.550.000,00
72	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	197.100.000,00
73	Beban Sewa Peralatan Umum	671.690.000,00
74	Beban Sewa Peralatan Jaringan	0,00
75	Beban Sewa Peralatan Bantu	0,00
76	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	23.000.000,00
77	Beban Sewa Bangunan Gudang	0,00
78	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	279.840.000,00
79	Beban Sewa Bangunan Parkir	14.400.000,00
80	Beban Sewa Hotel	144.100.000,00
81	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	393.200.000,00
82	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	13.710.000,00
83	Beban Sewa Audio Visual	0,00
84	Beban Sewa Alat Musik	4.500.000,00
85	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	171.606.100,00
86	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00
87	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	46.719.900,00
88	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00
89	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	800.310.000,00
90	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	341.478.735,00
91	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00
92	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	89.198.000,00
93	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00
94	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	105.760.700,00
95	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	64.542.260,00
96	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	284.800.000,00
97	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	81.993.200,00
98	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	2.500.000,00
99	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	70.048.000,00
100	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	0,00



No	Rincian	Beban LO
101	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	0,00
102	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	21.420.000,00
103	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	14.863.335.000,00
104	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	263.824.600,00
105	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	0,00
106	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata	0,00
107	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	772.910.567,00
108	Beban Sosialisasi	0,00
109	Beban Bimbingan Teknis	944.193.078,00
110	Beban Diklat Kepemimpinan	1.248.037.497,00
111	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	9.502.921,00
112	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	22.209.003,00
113	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	698.404,00
114	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	7.429.407,00
115	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	178.067.606,00
116	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	555.387,00
117	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	510.000,00
118	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak MBLB	9.242.982,00
119	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	14.606.327,00
120	Beban Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	11.556.250,00
121	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00
122	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	125.208.000,00
123	Mapping Beban Jasa BLUD	
124	Beban Jasa Tenaga Kesehatan Untuk Jasa Pelayanan	6.905.923.668,00
125	Beban Jasa Tenaga Kesehatan Untuk Jasa Pelayanan (Hutang BLUD TA 2021 & 2022)	6.814.181.915,00
126	Beban Jasa Tenaga Kesehatan Untuk Rujukan & Pemulangan Pasien Peserta JKN	78.740.100,00
127	Beban Tenaga Admin Pengelola Keuangan BLUD (3 Org x 12 Bulan)	14.400.000,00
128	Beban Tenaga Operator Komputer Pengelola Keuangan BLUD (20 Org x 12 Bulan)	79.450.000,00
129	Beban Jasa Tenaga Cleaning Service (20 Org x 12 Bulan)	569.000.000,00
130	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon,Air dan Listrik	29.908.000,00
131	Beban Jasa Kalibrasi	79.995.036,00
132	Beban Paket/Pengiriman	962.500,00



No	Rincian	Beban LO
133	Beban Registrasi/Keanggotaan	127.310.000,00
134	Beban Pengolahan Air Limbah	3.509.820,00
135	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00
136	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.550.000,00
137	Beban Sewa Rumah Dokter	88.784.000,00
138	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	0,00
139	Beban Jasa Survei Akreditasi	98.081.244,00
140	Beban Jasa Khusus Pengangkutan Limbah B3 Dengan Pihak Transport	0,00
141	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	32.089.252,00
142	Beban Bimbingan Teknis	102.397.572,00
JUMLAH BEBAN JASA LO		151.197.058.726,92

Jika dibandingkan dengan realisasi Beban Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terdapat selisih lebih sebesar Rp13.026.226.927,00 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 255. Penjelasan Koreksi Beban Jasa – LO

No	Uraian	Jumlah
1	Realisasi Beban Jasa LRA TA 2023	138.170.831.799,92
2	Penambahan:	
	Mapping Beban SPJ BLUD 2023	15.597.860.399,00
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Untuk Jasa Pelayanan(Hutang BLUD TA 2021 & 2022)	6.170.147.369,00
	Pengakuan Utang Jasa Medis Dinas Kesehatan	538.185.807,00
	Utang Jasa Tenaga Administrasi	35.300.000,00
	Utang Tagihan Telepon	25.866,00
	Utang Tagihan Air	35.781.900,00
	Utang Tagihan Listrik	201.140.647,00
	Utang Tagihan Telepon/Internet/TV	24.964.378,00
	Utang Belanja Pajak, Bea dan Perizinan	2.246.500,00
	Sub Jumlah	22.605.652.866,00
3	Pengurangan:	
	Utang Jasa medis Dinas Kesehatan	2.435.175.014,00
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Untuk Jasa Pelayanan BLUD	6.740.724.661,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	98.800.000,00
	Utang Tagihan Air	50.158.850,00
	Utang Tagihan Listrik	232.445.724,00
	Utang Tagihan Telepon/Internet/TV	22.121.690,00
	Sub Jumlah	9.579.425.939,00
4	Jumlah Beban Jasa setelah koreksi (1 + 2 - 3)	151.197.058.726,92

7.7.2.1.4 Beban Pemeliharaan - LO

Merupakan seluruh Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.409.595.568,00 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp9.944.036.594,11. Di tahun 2023 terdapat penurunan sebesar (Rp534.441.026,11) atau (5,37%) dari tahun 2022. Jika dibandingkan antara Beban Pemeliharaan LO dengan realisasi Beban Pemeliharaan LRA, terdapat total selisih lebih sebesar Rp1.307.977.440,16 terdiri dari reklas dari Belanja modal Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp792.126.514,43, Reklas dari Belanja Modal pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp4.546.426,92 dan pemeliharaan Instalasi Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp511.304.498,81. Dan koreksi kurang sebesar Rp276.629.934,00 terdiri dari reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp216.629.934,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga dan reklasifikasi ke Aset tetap peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah sebesar Rp60.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 256. Rincian Beban Pemeliharaan – LO

No	Uraian	LRA 2023	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Beban-LO
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	54.991.500,00	0,00	0,00	54.991.500,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	105.095.900,00	0,00	0,00	105.095.900,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	133.222.000,00	0,00	0,00	133.222.000,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.272.519.552,00	0,00	0,00	1.272.519.552,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	386.254.970,00	0,00	0,00	386.254.970,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	61.806.000,00	0,00	0,00	61.806.000,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	97.450.000,00	0,00	0,00	97.450.000,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	141.237.200,00	0,00	0,00	141.237.200,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	20.200.000,00	0,00	0,00	20.200.000,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	3.710.000,00	0,00	0,00	3.710.000,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	68.809.000,00	0,00	0,00	68.809.000,00



No	Uraian	LRA 2023	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Beban-LO
12	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	441.677.850,00	0,00	0,00	441.677.850,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	87.849.886,00	0,00	0,00	87.849.886,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	49.966.650,00	0,00	0,00	49.966.650,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	1.402.353,00	0,00	0,00	1.402.353,00
17	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	489.615.300,00	0,00	0,00	489.615.300,00
18	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	210.135.700,00	0,00	0,00	210.135.700,00
19	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	826.762.102,34	796.672.941,35	216.629.934,00	1.406.805.109,69
20	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	127.801.182,00	0,00	0,00	127.801.182,00
21	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	40.960.426,00	0,00	0,00	40.960.426,00
22	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
23	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	199.500.000,00	0,00	60.000.000,00	139.500.000,00
24	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
25	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/ Tempat Peristirahatan	299.600.000,00	0,00	0,00	299.600.000,00
26	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
27	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.230.074.392,50	0,00	0,00	1.230.074.392,50



No	Uraian	LRA 2023	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Beban-LO
28	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
29	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	199.850.000,00	0,00	0,00	199.850.000,00
30	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	856.639.525,00	0,00	0,00	856.639.525,00
31	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
32	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	114.398.210,00	0,00	0,00	114.398.210,00
33	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	111.665.571,00	0,00	0,00	111.665.571,00
34	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	17.038.500,00	0,00	0,00	17.038.500,00
35	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Drainase	0,00	511.304.498,81	0,00	511.304.498,81
36	Beban Pemeliharaan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.735.000,00	0,00	0,00	1.735.000,00
38	Beban Pemeliharaan Alat Kantor & Alat Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	126.374.520,00	0,00	0,00	126.374.520,00
39	Beban Pemeliharaan Alat Kantor & Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	40.893.375,00	0,00	0,00	40.893.375,00
40	Beban Pemeliharaan Alat Kantor & Alat Rumah Tangga-Alat Lainnya(Home Use)	54.001.528,00	0,00	0,00	54.001.528,00
41	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	19.551.540,00	0,00	0,00	19.551.540,00
42	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	33.802.169,00	0,00	0,00	33.802.169,00
43	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	94.856.160,00	0,00	0,00	94.856.160,00
Jumlah		8.378.248.061,84	1.307.977.440,16	276.629.934,00	9.409.595.568,00

7.7.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas - LO

Merupakan seluruh Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 sebesar Rp91.823.592.586,01 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp86.610.059.401,41. Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.213.533.184,60 atau 6,02 dari tahun 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi LRA, Beban Perjalanan Dinas LO terdapat selisih sebesar Rp140.028.927,00. Selisih tersebut merupakan reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas sesuai Surat Pertanggungjawaban Dana BLUD Per 31 Desember 2023. Rincian Beban Perjalanan Dinas-LO dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 257. Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	37.070.069.067,01	31.831.073.236,41
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	54.534.374.319,00	54.714.461.564,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	219.149.200,00	64.524.601,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00
Jumlah		91.823.592.586,01	86.610.059.401,41

7.7.2.1.6 Beban Uang/Jasa yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat

Beban Uang/Jasa yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp23.720.102.882,00 dan per 31 Desember 2022 (*Audited*) adalah Rp27.746.085.691,00. Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.025.982.809,00 atau (14,51) dari tahun 2022. Rincian Beban Uang/Jasa yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 258. Rincian Beban Uang/Jasa Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat – LO

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.668.204.000,00	830.600.000,00
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	809.000.000,00	2.000.000,00
3	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	13.401.635,00	21.792.901.000,00
4	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	12.323.916.450,00	2.842.627.183,00
5	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.205.350.797,00	2.277.957.508,00
6	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.700.230.000,00	0,00
Jumlah Beban		23.720.102.882,00	27.746.085.691,00

Jumlah Beban Uang/Jasa yang Diserahkan ke Pihak Ketiga/Masyarakat per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 259. Rincian Beban Uang/Jasa Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat per SKPD – LO

No	Nama OPD	Jumlah Per SKPD
1	Sekretariat Daerah	2.292.709.800,00
2	Sekretariat DPRD	130.022.004,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	464.726.320,00
4	Dinas Kesehatan	2.476.761.590,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.323.916.450,00
6	Dinas Pertanian Dan Pangan	36.600.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	351.000.000,00
8	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	3.494.974.665,00



No	Nama OPD	Jumlah Per SKPD
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	237.600.000,00
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan LH	5.780.000,00
11	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan PA	13.401.635,00
12	Badan Pendapatan Daerah	79.665.800,00
13	Kecamatan Putussibau Utara	638.500.000,00
14	Kecamatan Putussibau Selatan	539.400.000,00
15	Kecamatan Bika	65.000.000,00
16	Kecamatan Kalis	55.000.000,00
17	Kecamatan Bunut Hilir	130.000.000,00
18	Kecamatan Bunut Hulu	1.000.000,00
19	Kecamatan Boyan Tanjung	37.000.000,00
20	Kecamatan Mentebah	20.000.000,00
21	Kecamatan Hulu Gurung	125.000.000,00
22	Kecamatan Selimbau	38.000.000,00
23	Kecamatan Batang Lupa	15.000.000,00
24	Kecamatan Puring Kencana	38.000.000,00
25	Kecamatan Suhaid	106.244.618,00
26	Kecamatan Silat Hilir	4.800.000,00
Jumlah Beban - LO		23.720.102.882,00

7.7.2.1.7 Beban Penyisihan Piutang

Terdapat penyajian penyisihan piutang yang terjadi dalam Tahun 2023 sebesar Rp111.307.905,74 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp920.961.335,43 sebagai beban di LO. Rincian beban penyisihan piutang LO per 31 Desember 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 260. Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
A.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	59.677.813,86	81.188.663,18
1	Pajak Rumah Makan/Restoran	0,00	732,5
2	Pajak MBLB	1.728.328,60	261.847,25
3	Pajak PBB	56.491.190,62	80.627.316,29
4	Pajak PPJU	525.989,86	113.331,14
5	Pajak Reklame	41.374,78	185.436,00
6	Pajak Hiburan	882.500,00	0,00
7	Pajak Parkir	8.430,00	0,00
B.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	960.095,52
1	Retribusi Sewa Tanah dan Rumah	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi Dinas Kesehatan	0,00	960.095,52
C.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	31.800.230,98	774.773.379,88
1	Piutang BLUD	26.490.631,72	15.120.783,80
2	Piutang Gaji dan Tunjangan	3.888.620,00	4.106.587,00
3	Piutang Bunga Deposito	0,00	0,00
4	Sewa Tanah dan Rumah	1.420.979,27	8.295.647,44
5	Piutang Bunga- Saldo TDF	0,00	6.001,87
6	Piutang Lainnya Dinas PU- Lebih bayar	0,00	213.359,77
7	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	747.031.000,00



No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
D.	Beban Penyisihan Piutang Transfer	19.829.860,90	64.039.196,85
1	Piutang Transfer Bagi Hasil Provinsi	19.829.860,90	64.039.196,85
E	Beban Penyisihan Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
1	Piutang Deviden dan AMU PT. Bank Kalbar	0,00	0,00
Jumlah A + B + C + D + E		111.307.905,75	920.961.335,43

7.7.2.1.8 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 sebesar Rp246.846.712.650,66 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp242.379.580.976,61 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 261. Rincian Beban Penyusutan per Jenis Aset Tetap – LO

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Beban Penyusutan Alat-alat Besar	2.077.026.809,44	2.116.063.728,52
2	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu/Pengolah Air	59.380.476,58	59.380.476,58
3	Beban Penyusutan Alat-alat angkutan	6.022.768.584,87	6.906.375.828,81
4	Beban Penyusutan Alat bengkel dan alat ukur	205.225.256,00	216.719.870,30
5	Beban Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan	15.452.415,69	36.432.655,67
6	Beban Penyusutan Alat-alat kantor dan Rumah Tangga	5.699.807.364,83	6.002.362.766,98
7	Beban Penyusutan Alat-alat Komputer	12.823.331.948,58	12.745.881.986,94
8	Beban Penyusutan Alat-alat Studio dan Komunikasi	1.066.564.584,05	1.264.711.095,53
9	Beban Penyusutan Alat-alat Kedokteran	9.274.386.664,26	9.791.111.897,24
10	Beban Penyusutan Alat-alat Laboratorium	1.966.549.386,44	1.404.275.073,91
11	Beban Penyusutan Alat-alat Peraga/Praktek sekolah	474.764.355,35	412.141.742,39
12	Beban Penyusutan Alat-alat Keamanan	4.306.967,94	4.306.967,94
13	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	559.410.457,79	625.869.481,31
14	Beban Penyusutan Alat-alat Olah Raga	126.645.508,67	178.794.546,42
15	Beban Penyusutan Gedung dan bangunan tempat kerja / mess/fasilitas umum	34.552.721.567,63	36.630.187.858,16
16	Beban Penyusutan Tugu dan Monumen	772.003.961,72	672.275.082,27
17	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	162.770.303.912,15	155.115.550.074,84
18	Beban Penyusutan Bangunan Air dan Jaringan Air	3.472.468.588,57	3.273.891.256,73
19	Beban Penyusutan Instalasi dan Jaringan	4.817.678.204,31	4.833.145.950,28
20	Beban Penyusutan Barang Bercorak Seni	85.915.635,79	90.102.635,79
Jumlah		246.846.712.650,66	242.379.580.976,61

7.7.2.1.9 Beban Amortisasi

Terdapat Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang terjadi dalam Tahun 2023 sebesar Rp180.536.297,94 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp93.676.666,67 sebagai beban di LO, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 262. Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud – LO

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.317.833,33	8.317.833,33



No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022
2	Dinas Informasi, Informatika dan Statistik	8.874.632,60	4.166.666,67
3	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	0,00	8.487.166,67
4	Sekretariat Daerah	53.304.165,33	0,00
5	Badan Pendapatan Daerah	34.740.000,00	34.740.000,00
6	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	37.965.000,00	37.965.000,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.868.000,00	0,00
8	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	16.466.666,67	0,00
Jumlah		180.536.297,94	93.676.666,67

7.7.2.1.10 Beban Subsidi

Beban Subsidi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 Rp1.515.748.250,00.

7.7.2.1.11 Beban Hibah

Beban Hibah per 31 Desember 2023 sebesar Rp155.673.100.372,32 dan tahun 2022 sebesar Rp109.447.688.924,58. Kenaikan beban hibah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 dari tahun 2022 adalah sebesar Rp46.225.411.447,74 atau 42,24. Adapun rincian beban hibah tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 263. Rincian Beban Hibah – LO

No	Uraian Beban	Nilai/Jenis	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Beban LO
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	7.276.883.677,82	13.365.729.270,05	1.694.347.469,82	18.948.265.478,05
3	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	21.715.256.000,00	0,00	0,00	21.715.256.000,00
4	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	47.458.288.000,00	0,00	0,00	47.458.288.000,00
6	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	234.805.250,00	0,00	0,00	234.805.250,00
7	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.678.225.000,00	0,00	0,00	11.678.225.000,00
8	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	32.070.295.170,00	21.457.794.416,52	12.463.766.042,25	41.064.323.544,27
9	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.405.759.100,00	0,00	0,00	6.405.759.100,00
10	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	3.224.039.000,00	0,00	3.224.039.000,00
11	Belanja Hibah Barang kepada	189.450.000,00	0,00	0,00	189.450.000,00



No	Uraian Beban	Nilai/Jenis	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Beban LO
	Koperasi				
12	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.696.825.000,00	0,00	0,00	3.696.825.000,00
13	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.057.864.000,00	0,00	0,00	1.057.864.000,00
Jumlah Beban Hibah-LO		131.783.651.197,82	38.047.562.686,57	14.158.113.512,07	155.673.100.372,32

Penjelasan koreksi tambah sebesar Rp38.047.562.686,57, dengan uraian sebagai berikut:

1. Koreksi tambah pada Beban Hibah Barang pada Pemerintah Pusat sebesar Rp38.047.562.686,57 adalah Koreksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan reklas dari Persediaan diserahkan pada Masyarakat/Pihak Ketiga tahun 2022 belum diserahkan karena belum ada BAST dan baru dilakukan penyerahan secara lengkap pada tahun 2023 dengan rincian koreksi beban hibah:

Uraian	Jumlah
• Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	13.365.729.270,05
• Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.224.039.000,00
• Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20.663.262.055,68
• Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (atribusi belanja perencanaan & pengawasan)	794.232.360,84
Jumlah	38.047.262.686,57

Penjelasan koreksi kurang sebesar Rp14.158.113.512,07, dengan uraian sebagai berikut:

1. Koreksi kurang sebesar (Rp14.158.113.512,07) merupakan koreksi dari Beban Hibah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian koreksi atas beban hibah:

• Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.694.347.469,82
• Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	
• Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12.463.766.042,25
Jumlah	14.158.113.512,07
2. Koreksi kurang sebesar (Rp300.000,00) merupakan koreksi dari Beban Hibah yang digunakan untuk pembayaran utang retensi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

7.7.2.1.12 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 sebesar Rp898.350.000,00 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp3.167.177.500,00 merupakan seluruh Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 264. Rincian Beban Bantuan Sosial per Jenis Beban – LO

No	Uraian Jenis Beban Bantuan Sosial	2023	2022
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	110.000.000	1.390.000.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	0,00	1.554.800.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	438.350.000	57.700.000,00
4	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	350.000.000	40.000.000,00



No	Uraian Jenis Beban Bantuan Sosial	2023	2022
5	Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	124.677.500,00
Jumlah Beban Bantuan Sosial		898.350.000	3.167.177.500

Jumlah Beban Bantuan Sosial per SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 265. Rincian Beban Bantuan Sosial per SKPD – LO

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	350.000.000,00
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	438.350.000,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	110.000.000,00
Jumlah Beban Bantuan Sosial Per SKPD		898.350.000,00

7.7.2.1.14 Beban Ekstrakomtabel

Beban Ekstrakomtabel per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.150.712.885,30 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp4.384.012.296,22.

7.7.2.1.15 Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.149.718.556,15 dan 2022 (*Audited*) sebesar Rp41.834.185.716,97 adalah untuk menampung beban yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas, serta beban lainnya yang berasal dari Beban Barang dan Jasa. Rincian Beban Lain-Lain dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 267. Rincian Beban Lain-Lain – LO

No	Uraian Jenis Beban	Jumlah
1	Beban Lain-Lain - Beban penurunan Investasi Penyertaan Modal pada PT. UKM	1.364.284.720,48
2	Beban Lain-Lain - Barang dan Jasa BOS	44.785.433.835,67
Jumlah Beban Lain-lain – LO		46.149.718.556,15

7.7.2.2 BEBAN TRANSFER

Beban Transfer periode 31 Desember 2023 terealisasi masing-masing sebesar Rp103.505.678.658,00 dan 2022 (*Audited*) Rp95.790.396.186,00. Realisasi Beban Transfer merupakan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ke desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 268. Rincian Beban Transfer – LO

No	Uraian Jenis Beban	2023	2022
1	Beban Bagi Hasil Pajak	3.069.994.000,00	1.750.006.000,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi	665.265.000,00	677.764.000,00
3	Beban Bantuan Keuangan ke Desa	99.770.419.658,00	93.362.626.186,00
Jumlah Beban Transfer		103.505.678.658,00	95.790.396.186,00



7.7.2.3 BEBAN TAK TERDUGA

Jumlah Beban Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 adalah sebesar Rp1.333.000.000,00 dan disajikan sebagai Pos Luar Biasa. Pada Tahun 2022 sebesar Rp4.486.663.640,00. Pada Tahun 2022 Beban Tak Terduga disajikan sebagai Beban Luar Biasa sebesar Rp4.486.663.640,00. Rincian penggunaan dan mutasi Beban Tak Terduga dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 269. Rincian Beban Tak Terduga – LO

Tanggal	Uraian	Ref	Jumlah
1	2	3	4
14 April 2023	Belanja Bantuan Sosial yang tidak Direncanakan	1345/LS/BKAD/IV/2023	291.000.000,00
9 Juni 2023	Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan	2428/LS/BKAD/VI/2023	20.000.000,00
11 Juli 2023	Belanja Bantuan Sosial yang tidak Direncanakan	3134/LS/BKAD/VII/2023	95.000.000,00
29 Agustus 2023	Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023 Sesuai SK no 137/BPBD/2023 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Darurat Kerusakan Rumah Penduduk Akibat Musibah Kebakaran, Bencana Belanja, Puting Beliung dan Tanah Longsor di Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023	4450/LS/BKAD/VIII/2023	251.000.000,00
5 September 2023	Belanja Bantuan Sosial yang tidak Direncanakan	4651/LS/BKAD/IX/2023	50.500.000,00
22 September 2023	Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023 Sesuai SK No 193/BPBD/2023 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahap Kedua Untuk Penanganan Darurat Jembatan Gantung Desa Belimbing Kecamatan Silat Hulu Akibat Bencana Banjir di Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023	5197/LS/BKAD/IX/2023	140.000.000,00
20 Oktober 2023	Belanja Bantuan Sosial yang tidak Direncanakan	6019/LS/BKAD/X/2023	39.000.000,00
13 Desember 2023	Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023 Sesuai SK No 465/BPBD/2023 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahap Keempat Untuk Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir Pada Jembatan Desa Nanga Kelibang Kecamatan Bunut Hulu di Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023	8152/LS/BKAD/XII/2023	170.000.000,00
22 Desember 2023	Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023 Sesuai SK no 444/BPBD/2023 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahap Ketiga Untuk Penanganan Darurat Kerusakan Rumah Penduduk Akibat Musibah Kebakaran,	8445/LS/BKAD/XII/2023	172.000.000,00



Tanggal	Uraian	Ref	Jumlah
1	2	3	4
	Bencana Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor di Kab. Kapuas Hulu Tahun 2023		
27 Desember 2023	Belanja Bantuan Sosial yang tidak Direncanakan	9073/LS/BKAD/XII/2023	104.500.000,00
Jumlah Beban Tidak Terduga LO			1.333.000.000,00

7.7.3 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari Operasi Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 adalah terdiri dari:

1. Jumlah Pendapatan Rp 1.525.543.010.019,74
2. Jumlah Beban dan Transfer (Rp1.464.494.391.338,95)

Surplus/Defisit dari Operasi Rp61.048.618.680,79

7.7.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.699.655.667,02) dan 2022 sebesar (Rp2.075.021.036,74).

Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi penyisihan atas pelunasan piutang daerah sebesar Rp101.607.973,45;
2. Koreksi penyisihan pelunasan Tuntutan Ganti Rugi Kapal Ferry yang disetor tahun 2023 sebesar Rp80.000.000,00 dengan penyisihan sebesar Rp40.000.000,00;
3. Koreksi atas penghapusan aset tetap total sebesar (Rp67.932.000,00);
4. Defisit penghapusan aset tetap total sebesar (Rp2.773.331.640,47).

7.7.5 POS LUAR BIASA

Merupakan jumlah Beban Luar Biasa dari Beban Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.333.000.000,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pos Luar Biasa LO adalah untuk memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
2. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
3. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Pada Tahun 2023 Beban Luar Biasa disajikan dalam Beban Tak Terduga.

**7.7.6 Surplus/Defisit Laporan Operasional**

Merupakan keseluruhan Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.015.960.413,77 dan 2022 (*Audited*) sebesar (Rp59.453.105.776,65).

7.8 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

7.8.1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		298.843.678.481,83	188.052.055.974,53

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu TA 2023 sebesar Rp298.843.678.481,83 sedangkan untuk TA 2022 (*Audited*) sebesar Rp188.052.055.974,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 270. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	1.723.710.564.976,12	1.566.720.538.918,63
2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	1.424.866.886.494,29	1.378.668.482.944,10
	Arus Kas Bersih	298.843.678.481,83	188.052.055.974,53

7.8.1.1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		1.723.710.564.976,12	1.566.720.538.918,63

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi TA 2023 sebesar Rp1.723.702.399.976,12, sedangkan TA 2022 (*Audited*) adalah sebesar Rp1.566.720.538.918,63,. Rincian arus kas masuk dari aktivitas operasi sebagai berikut:

Tabel 271. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Penerimaan Pajak Daerah	18.192.870.236,32	16.455.782.266,53
2	Penerimaan Retribusi Daerah	5.992.780.864,00	4.995.795.080,83
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.469.034.435,62	13.926.125.609,76
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	31.741.487.356,79	35.029.435.909,09
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	24.074.732.176,00	29.618.898.747,00
6	Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam	71.335.167.141,00	33.256.728.074,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	924.278.715.000,00	892.260.063.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	250.756.471.580,00	160.310.401.057,00
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	10.093.626.000,00
10	Penerimaan Dana Desa	248.770.492.800,00	249.744.577.760,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	69.707.044.651,62	60.410.525.024,23
12	Penerimaan Bantuan Keuangan	51.339.749.955,00	3.765.673.150,00
13	Penerimaan Hibah	490.788.549,77	1.141.511.272,95
14	Penerimaan Lainnya	9.561.230.230,00	55.711.395.967,24
	Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi	1.723.702.399.976,12	1.566.720.538.918,63



7.8.1.2	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		1.424.866.886.494,29	1.378.668.482.944,10

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2023 sebesar Rp1.424.866.886.494,29 sedangkan TA 2022 (*Audited*) adalah sebesar Rp1.378.668.482.944,10. Rincian arus kas keluar dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 272. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	2023	2022
1	Pembayaran Pegawai	534.539.096.164,00	518.016.053.503,50
2	Pembayaran Barang dan Jasa	404.036.617.674,47	381.002.536.489,97
3	Pembayaran Subsidi	0	1.515.748.250,00
4	Pembayaran Hibah	131.783.651.197,82	121.091.269.614,63
5	Pembayaran Bantuan Sosial	898.350.000,00	7.000.937.500,00
6	Pembayaran Bantuan Keuangan	348.540.912.458,00	343.107.203.946,00
7	Pembayaran Tidak Terduga	1.333.000.000,00	4.506.963.640,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	3.069.994.000,00	1.750.006.000,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	665.265.000,00	677.764.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	1.424.866.886.494,29	1.378.668.482.944,10

7.8.2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(286.532.142.186,86)	(248.693.568.717,54)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2023 adalah sebesar (Rp286.532.142.186,86) sedangkan TA 2022 (*Audited*) adalah sebesar (Rp248.693.568.717,54) Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 273. Rincian Arus Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	11.671.000,00	261.715.000,00
2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	286.543.813.186,86	248.955.283.717,54
	Arus Kas Bersih	(286.532.142.186,86)	(248.693.568.717,54)

7.8.2.1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		11.671.000,00	261.715.000,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2023 adalah sebesar Rp11.671.000,00 sedangkan TA 2022 (*Audited*) adalah sebesar Rp261.715.000,00. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 274. Rincian Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

No	Uraian	2023	2022
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	11.671.000,00	261.715.000,00
3	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
	Total	11.671.000,00	261.715.000,00



7.8.2.2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		286.543.813.186,86	248.955.283.717,54

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2023 adalah sebesar Rp286.543.813.186,86 sedangkan TA 2022 (*Audited*) adalah sebesar Rp248.955.283.717,54 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 275. Rincian Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

No.	uraian	2023	2022
1	Pembentukan Dana Cadangan		2.000.000.000,00
2	Perolehan Tanah	0,00	8.932.275,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	25.419.577.448,00	31.320.262.383,01
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	132.663.818.494,86	86.778.054.668,79
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	121.086.925.212,00	114.323.298.911,74
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.928.459.040,00	4.524.735.479,00
7	Perolehan Aset Lainnya	445.032.992,00	
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		10.000.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar	286.543.813.186,86	248.955.283.717,54

7.8.3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		0,00	0,00

Tidak ada Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2023 maupun TA 2022 (*Audited*).

7.8.3.1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		0,00	0,00

Tidak ada Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan TA 2023 maupun TA 2022 (*Audited*).

7.8.3.2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		0,00	0,00

Tidak ada Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan TA 2023 maupun TA 2022 (*Audited*).

7.8.4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		(3.726.430,00)	3.726.430,00

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2023 adalah sebesar (Rp3.726.430,00) sedangkan TA 2022 sebesar Rp3.726.430,00. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah sebagai berikut:

Tabel 276. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	92.588.805.416,00	94.393.732.865,20
2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	92.592.531.846,00	94.390.006.435,20
	Arus Kas Bersih	(3.726.430,00)	3.726.430,00

7.8.4.1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		92.588.805.416,00	94.393.732.865,20

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2023 adalah sebesar Rp92.588.805.416,00 sedangkan TA 2022 (*Audited*) adalah sebesar Rp94.393.732.865,20. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris merupakan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

7.8.4.2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		92.592.531.846,00	94.390.006.435,20

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris TA 2023 adalah sebesar Rp92.592.531.846,00 sedangkan TA 2022 (*Audited*) adalah sebesar Rp94.390.006.435,20. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris merupakan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sisa Kas Bendahara Pengeluaran tahun berjalan.

7.8.5	Kenaikan / Penurunan Kas Bersih	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		12.307.809.864,97	(60.637.786.313,01)

Penurunan Kas Bersih TA 2023 adalah sebesar Rp12.307.809.864,97 sedangkan Kenaikan Kas Bersih TA 2022 (*Audited*) adalah sebesar (Rp60.637.786.313,01). Rincian Kenaikan/Penurunan Kas Bersih tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 277. Rincian Kenaikan/Penurunan Kas Bersih

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	298.843.678.481,83	188.052.055.974,53
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	-286.532.142.186,86	-248.693.568.717,54
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	0,00	3.726.430,00
	Kenaikan/Penurunan Kas Bersih	12.307.809.864,97	-60.637.786.313,01

7.8.6	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BLUD, BOS, dan FKTP	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		13.679.348.645,56	74.317.134.958,57

Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BLUD, BOS, dan FKTP TA 2023 adalah sebesar Rp13.679.348.645,56 yang merupakan saldo akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, saldo di BLUD, saldo BOS dan saldo di FKTP yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2022 (*audited*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo Awal Kas di BUD sebesar Rp10.024.218.586,38;
2. Saldo Awal Kas BLUD sebesar Rp3.536.907.815,27
3. Saldo Awal Kas FKTP sebesar Rp89.988.135,04; dan
4. Saldo Awal Kas BOS Pusat sebesar Rp24.507.678,87; dan
5. Saldo awal PFK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar

7.8.7	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP, BOS dan Kas Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		25.978.993.510,53	13.679.348.645,56

Rp3.726.430,00.

Jumlah saldo akhir Kas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebagaimana rincian di bawah ini:

Tabel 278. Rincian Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, FKTP, BOS, BOK dan Kas Lainnya

No.	Uraian	2023	2022
1	Kas di Kas Daerah	20.222.108.325,97	10.024.218.586,38
2	Kas di Bendahara Penerimaan	8.165.000,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	283.177.600,00	0,00
4	Kas di BLUD	1.322.334.839,61	3.536.907.815,27
5	Kas Dana BOS	74.132.505,20	24.507.678,87
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	106.741.380,75	89.988.135,04
7	Kas Dana BOK	3.970.498.859,00	0,00
8	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran - PFK	0,00	3.726.430,00
	Jumlah LAK per 31 Desember 2023	25.978.993.510,53	13.679.348.645,56

7.9. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:

- 7.9.1** Saldo awal ekuitas Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.428.781.812.520,47 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2022, sesuai dengan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022 (*Audited*).
- 7.9.2** Surplus/Defisit - LO per 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah sebesar Rp57.015.960.413,77 dan saldo tahun 2022 (*Audited*) adalah sebesar (Rp59.453.105.776,65) merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional Tahun 2022 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 merupakan selisih pendapatan LO dikurangi beban operasional dan transfer LO.
- 7.9.3** Selain adanya pengurang ekuitas dari defisit atas kegiatan operasional pemerintah daerah Tahun 2023, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi dan penyesuaian pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut:
- Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp(13.491.216,00) merupakan koreksi atas pembayaran retensi Jalan Desa Marsedan Raya Kec Semitau yang dicatat di persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022.
 - Koreksi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp(94.609.756,60). Koreksi tersebut merupakan nilai Penyisihan Piutang akibat penambahan denda piutang.
 - Koreksi Aset Tetap sebesar Rp(2.558.080.383,62) terdiri dari:
 - Koreksi atas Double Pencatatan Aset Tetap Tanah senilai Rp(67.526.000,00).
 - Koreksi Pencatatan atas Aset Tetap Bangunan Gedung Rp(1.342.006,97). Koreksi Pencatatan pada Kecamatan Embaloh Hulu senilai Rp(156.278.006,97) dan pada Kecamatan Suhaid senilai Rp 154.936.000,00.



- c. Koreksi Pencatatan atas Beban Ekstrakomtabel ke Aset Lain-lain senilai Rp35.900.000,00.
 - d. Koreksi atas Aset Tetap Peralatan Komputer yang tidak dicatat senilai Rp3.631.250,00.
 - e. Koreksi Desimal senilai Rp(0,30).
 - f. Koreksi atas Penghapusan Aset Tetap senilai Rp(2.579.733.625,95).
 - Dinas Pertanian dan Pangan melakukan penghapusan Aset Tetap Bangunan Gedung senilai Rp(93.824.893,00).
 - Penghapusan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menghapus Aset Tetap senilai Rp(2.297.608.732,95) adapun rincian Penghapusan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Penghapusan pada Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp(771.534.628,19), Alat Komputer Rp(441.397.721,69), Alat Studio dan Komunikasi Rp(200.171.383,07), Bangunan Gedung Rp(755.076.000,00), Instalasi dan Jaringan Rp(129.429.000,00).
 - Penghapusan pada Sekretariat Daerah atas Aset Tetap Tanah senilai Rp (188.300.000,00) yang merupakan Hibah ke Polsek Kota dengan No SK PENGHAPUSAN NO.381/BKAD/2023.
 - g. Koreksi atas Selisih Mutasi Aset Tetap Kendaraan senilai Rp50.990.000,00 dimana pada Aset Tetap Kendaraan pada Kecamatan Putussibau Selatan telah mencatat mutasi bertambah dari Kecamatan Bunut Hulu sementara Kecamatan Bunut Hulu tidak memutasikan Aset Tetap Kendaraannya.
4. Koreksi Penyusutan sebesar Rp1.165.016.170,34 dengan uraian sebagai berikut:
- a. Koreksi atas Penyusutan Mutasi Aset Tetap senilai Rp(32.933.166,98) dengan rincian sebagai berikut:
 - Koreksi penyusutan atas Mutasi pada Aset Tetap Alat Angkutan sebesar Rp(35.683.554,46) merupakan koreksi atas Akumulasi Penyusutan Kendaraan yang dimutasikan dari Kecamatan Bunut Hulu ke Kecamatan Putussibau Selatan yang tidak dikeluarkan oleh Kecamatan Bunut Hulu tetapi dicatat oleh Kecamatan Putussibau Selatan.
 - Koreksi Penyusutan atas Mutasi Aset Tetap Bangunan Gedung senilai Rp1.020.731,25 merupakan Koreksi atas kurang catat penyusutan yang dimutasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Kecamatan Bika.
 - b. Koreksi Penyusutan Aset tetap atas Penghapusan Aset Tetap senilai Rp1.892.281.026,35 dengan uraian sebagai berikut:
 - Koreksi atas Penghapusan Bangunan Gedung pada Dinas Pertanian dan Pangan senilai Rp23.195.370,04.
 - Koreksi atas Penghapusan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp1.869.085.656,31. Rincian Penghapusan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut Penghapusan Aset Tetap alat kantor Rp769.957.940,59, Aset Tetap alat Komputer Rp424.292.682,65, Aset Tetap alat studio komunikasi Rp200.171.383,07, Aset Tetap Gedung Rp422.892.050,00, Instalasi dan Jaringan Rp51.771.600,00.

- c. Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer pada Badan Pendapatan Daerah senilai Rp(3.631.250,00).
 - d. Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung senilai Rp(172.940.696,63) dengan rincian:
 - Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Rp(39.893.403,50).
 - Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata Rp24.387.192,50 akibat dari Kapitalisasi Belanja.
 - Sekretariat Daerah Rp1.661.390,39 koreksi akibat salah pencatatan tahun.
 - Kecamatan Putussibau Utara Rp(148.220.792,05)
 - Kecamatan Putussibau Selatan Rp(26.840.391,80)
 - Kecamatan Embaloh Hulu Rp43.993.944,23
 - Kecamatan Pengkadan Rp(28.028.636,40)
 - e. Koreksi Penyusutan akibat Reklas Ekstrakom ke Aset Lain-lain senilai Rp(1.050.000,00);
 - f. Koreksi Penyusutan atas Hibah Alat Angkutan Rp(433.800.000,00), Hibah Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp(89.625.250,00), Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp(92.926.000,00), Alat Komputer Rp(89.084.000,00), Alat Studio dan Komunikasi Rp(2.277.000,00), Bangunan Gedung Rp(1.372.489.442,70), Bangunan Air (Irigasi) Rp(314.887.793,28).
 - g. Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah senilai Rp(91.392.785,31)
5. Koreksi Aset Lainnya senilai Rp2.486.917.764,33.
- a. Koreksi Aset Lainnya pada Dinas Perhubungan senilai Rp2.491.897.401,56 merupakan koreksi atas Pencatatan Kapal Ferry yang sebelumnya dicatat atas Tuntutan Ganti Rugi menjadi Aset Lain-lain.
 - b. Koreksi Aset Lainnya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp8.830.000,00 dan koreksi pencatatan asset lain-lain senilai Rp(25.299.637,23).
 - c. Koreksi Aset Lainnya pada Kecamatan Embaloh Hilir senilai Rp11.490.000,00 merupakan Koreksi atas pencatatan dari Ekstrakomtabel ke Aset Lain-lain.

7.9.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2023 (*Audited*) sebesar Rp3.486.783.525.512,67 dan Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2022 (*Audited*) adalah sebesar Rp3.428.781.812.520,48.

LAMPIRAN

Rincian Pendapatan Hibah Dana BOS TA 2023

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOS REGULER	Alokasi Dana BOS KINERJA	
1	SD NEGERI 01 BADAU	SD	176.000.000,00	-	176.000.000,00
2	SD NEGERI 02 PULAU MAJANG	SD	93.500.000,00	-	93.500.000,00
3	SD NEGERI 03 TANGIT IV	SD	39.600.000,00	-	39.600.000,00
4	SD NEGERI 04 KURAK	SD	41.800.000,00	-	41.800.000,00
5	SD NEGERI 05 SERIANG	SD	28.600.000,00	22.500.000,00	51.100.000,00
6	SD NEGERI 06 SUNGAI TEMBAGA	SD	33.000.000,00	-	33.000.000,00
7	SD NEGERI 07 SEMUNTIK	SD	15.400.000,00	-	15.400.000,00
8	SD NEGERI 08 SEBINDANG	SD	244.200.000,00	22.500.000,00	266.700.000,00
9	SD NEGERI 09 EMPAIK	SD	6.600.000,00	-	6.600.000,00
10	SD NEGERI 10 TANGIT I	SD	17.600.000,00	-	17.600.000,00
11	SD NEGERI NO. 11 JANTING	SD	47.300.000,00	22.500.000,00	69.800.000,00
12	SMP NEGERI 1 BADAU	SMP	313.730.000,00	-	313.730.000,00
13	SMP NEGERI 2 SATAP BADAU	SMP	52.060.000,00	-	52.060.000,00
14	SMP NEGERI 3 BERASRAMA BADAU	SMP	35.620.000,00	-	35.620.000,00
15	SD NEGERI 01 LANJAK	SD	118.800.000,00	80.000.000,00	198.800.000,00
16	SD NEGERI 02 LANJAK	SD	221.100.000,00	-	221.100.000,00
17	SD NEGERI 03 KAPAR	SD	29.700.000,00	-	29.700.000,00
18	SD NEGERI 04 BAKUL	SD	36.300.000,00	-	36.300.000,00
19	SD NEGERI 05 KAPAR TEKALONG	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
20	SD NEGERI 06 MELIAU	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
21	SD NEGERI 07 SUNGAI SEDIK	SD	16.500.000,00	-	16.500.000,00
22	SD NEGERI 08 KELADAN	SD	15.400.000,00	-	15.400.000,00
23	SD NEGERI 09 UKIT-UKIT	SD	35.200.000,00	-	35.200.000,00
24	SD NEGERI 10 LIBUNG	SD	2.200.000,00	-	2.200.000,00
25	SD NEGERI 11 KELAWIK	SD	14.300.000,00	22.500.000,00	36.800.000,00
26	SD NEGERI 12 NGAUNG KERUH	SD	2.200.000,00	-	2.200.000,00
27	SD NEGERI 13 UKIT-UKIT	SD	64.900.000,00	-	64.900.000,00
28	SD NEGERI 15 MANGIN	SD	65.340.000,00	-	65.340.000,00
29	SMP NEGERI 1 BATANG LUPAR	SMP	286.330.000,00	-	286.330.000,00

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOS REGULER	Alokasi Dana BOS KINERJA	
30	SMP NEGERI 2 BATANG LUPAR	SMP	71.240.000,00	-	71.240.000,00
31	SD NEGERI 01 TELUK SINDUR	SD	110.000.000,00	-	110.000.000,00
32	SD NEGERI 02 NANGA MANDAY	SD	53.900.000,00	-	53.900.000,00
33	SD NEGERI 03 MELAPI MANDAY	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
34	SD NEGERI 04 JELEMUK	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
35	SD NEGERI 05 BIKI HULU	SD	71.500.000,00	-	71.500.000,00
36	SD NEGERI 06 JONGKONG MANDAY	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
37	SD NEGERI 07 UJUNG PINANG	SD	61.600.000,00	-	61.600.000,00
38	SD NEGERI 08 BIKI	SD	99.000.000,00	-	99.000.000,00
39	SD NEGERI 09 PATAH SANDUNG	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
40	SD NEGERI 10 PENYELUANG	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
41	SMP NEGERI 1 BIKI	SMP	202.760.000,00	-	202.760.000,00
42	SD NEGERI 01 LANDAU MAWANG	SD	144.100.000,00	-	144.100.000,00
43	SD NEGERI 02 BOYAN TANJUNG	SD	200.200.000,00	-	200.200.000,00
44	SD NEGERI 03 RIAM MENGELAI	SD	174.900.000,00	22.500.000,00	197.400.000,00
45	SD NEGERI 04 SERAI WANGI	SD	93.500.000,00	45.000.000,00	138.500.000,00
46	SD NEGERI 05 NANGA RET	SD	71.500.000,00	-	71.500.000,00
47	SD NEGERI 06 NANGA SANGAN	SD	138.600.000,00	22.500.000,00	161.100.000,00
48	SD NEGERI 07 SUNGKIN	SD	69.300.000,00	-	69.300.000,00
49	SD NEGERI 08 NANGA BETUNG	SD	95.700.000,00	-	95.700.000,00
50	SD NEGERI 09 SUKMA	SD	67.100.000,00	22.500.000,00	89.600.000,00
51	SD NEGERI 10 NANGA JEMAH	SD	93.500.000,00	22.500.000,00	116.000.000,00
52	SD NEGERI 11 LANDAU BUNUS	SD	83.600.000,00	-	83.600.000,00
53	SD NEGERI 12 PENEMUR	SD	113.300.000,00	-	113.300.000,00
54	SD NEGERI 13 NANGA BOYAN	SD	227.700.000,00	-	227.700.000,00
55	SD NEGERI 14 USAHA BARU	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
56	SD NEGERI 15 LANDAU MENTAIL	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
57	SD NEGERI 16 UPT XV BOYAN TANJUNG	SD	62.700.000,00	-	62.700.000,00
58	SD NEGERI 17 TANJUNG HARAPAN	SD	44.000.000,00	-	44.000.000,00
59	SD NEGERI 18 BANGIK	SD	28.600.000,00	22.500.000,00	51.100.000,00
60	SD NEGERI 19 BENIT	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOS REGULER	Alokasi Dana BOS KINERJA	
61	SMP NEGERI 1 BOYAN TANJUNG	SMP	317.840.000,00	-	317.840.000,00
62	SMP NEGERI 2 BOYAN TANJUNG	SMP	104.120.000,00	-	104.120.000,00
63	SMP NEGERI 3 SATU ATAP BOYAN TANJUNG	SMP	90.420.000,00	-	90.420.000,00
64	SMP NEGERI 4 BOYAN TANJUNG	SMP	86.310.000,00	-	86.310.000,00
65	SMP NEGERI 5 BOYAN TANJUNG	SMP	72.610.000,00	-	72.610.000,00
66	SD NEGERI 01 NANGA BUNUT	SD	80.300.000,00	-	80.300.000,00
67	SD NEGERI 02 NANGA BUNUT	SD	48.400.000,00	22.500.000,00	70.900.000,00
68	SD NEGERI 03 NANGA EMPANGAU	SD	190.300.000,00	-	190.300.000,00
69	SD NEGERI 04 NANGA BUNUT	SD	78.100.000,00	-	78.100.000,00
70	SD NEGERI 05 TEMBANG	SD	70.400.000,00	-	70.400.000,00
71	SD NEGERI 06 TELUK AUR	SD	78.100.000,00	-	78.100.000,00
72	SD NEGERI 07 KUALA BUIH	SD	62.700.000,00	-	62.700.000,00
73	SD NEGERI 08 NANGA BUNUT	SD	26.400.000,00	-	26.400.000,00
74	SD NEGERI 09 SUNGAI JAUNG II	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
75	SD NEGERI 10 NANGA TUAN	SD	125.400.000,00	-	125.400.000,00
76	SD NEGERI 11 TANJUNG ENTIBAB	SD	106.700.000,00	-	106.700.000,00
77	SD NEGERI 12 SUNGAI JAUNG I	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
78	SD NEGERI 13 PENGELANG	SD	13.200.000,00	-	13.200.000,00
79	SD NEGERI 14 TANJUNG KAPUAS	SD	28.600.000,00	-	28.600.000,00
80	SMP NEGERI 1 BUNUT HILIR	SMP	68.500.000,00	-	68.500.000,00
81	SMP NEGERI 2 BUNUT HILIR	SMP	121.930.000,00	-	121.930.000,00
82	SMP NEGERI 3 SATAP BUNUT HILIR	SMP	15.070.000,00	70.000.000,00	85.070.000,00
83	SMP NEGERI 4 SATAP BUNUT HILIR	SMP	82.200.000,00	-	82.200.000,00
84	SMP NEGERI 5 BUNUT HILIR	SMP	47.950.000,00	-	47.950.000,00
85	SD NEGERI 01 NANGA SEMANGUT	SD	161.700.000,00	-	161.700.000,00
86	SD NEGERI 02 NANGA SURUK	SD	138.600.000,00	-	138.600.000,00
87	SD NEGERI 03 NANGA DUA	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
88	SD NEGERI 04 LANDAU APUS	SD	40.700.000,00	-	40.700.000,00
89	SD NEGERI 05 NANGA SEBILIT	SD	93.500.000,00	-	93.500.000,00
90	SD NEGERI 06 NANGA KELIBANG	SD	85.800.000,00	-	85.800.000,00
91	SD NEGERI 07 TEMUYUK	SD	179.300.000,00	-	179.300.000,00

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOS REGULER	Alokasi Dana BOS KINERJA	
92	SD NEGERI 08 DESA BARU	SD	46.200.000,00	-	46.200.000,00
93	SD NEGERI 09 RIAM PIANG	SD	201.300.000,00	-	201.300.000,00
94	SD NEGERI 10 SELAUP	SD	68.200.000,00	-	68.200.000,00
95	SD NEGERI 11 SUNGAI BESAR	SD	123.200.000,00	-	123.200.000,00
96	SD NEGERI 12 NANGA SEMANGUT	SD	69.300.000,00	-	69.300.000,00
97	SD NEGERI 13 NANGA PAYANG	SD	90.200.000,00	-	90.200.000,00
98	SD NEGERI 14 LANDAU KALOI	SD	77.000.000,00	-	77.000.000,00
99	SD NEGERI 15 KERANTIK	SD	90.387.000,00	-	90.387.000,00
100	SD NEGERI 16 SEGITAK	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
101	SD NEGERI 17 NANGA SURUK	SD	64.900.000,00	-	64.900.000,00
102	SD NEGERI 18 TRAN NANGA SURUK	SD	44.000.000,00	-	44.000.000,00
103	SD NEGERI 19 SIMPANG 4 NANGA SURUK	SD	27.500.000,00	-	27.500.000,00
104	SMP NEGERI 1 BUNUT HULU	SMP	149.330.000,00	-	149.330.000,00
105	SMP NEGERI 2 BUNUT HULU	SMP	238.380.000,00	-	238.380.000,00
106	SMP NEGERI 3 BUNUT HULU	SMP	164.400.000,00	-	164.400.000,00
107	SMP NEGERI 4 BUNUT HULU	SMP	109.600.000,00	-	109.600.000,00
108	SMP NEGERI 5 BUNUT HULU	SMP	54.800.000,00	-	54.800.000,00
109	SMP NEGERI 6 SATAP BUNUT HULU	SMP	52.060.000,00	35.000.000,00	87.060.000,00
110	SD NEGERI 01 EMBALOH HILIR	SD	111.100.000,00	-	111.100.000,00
111	SD NEGERI 02 NANGA EMBALOH	SD	40.700.000,00	-	40.700.000,00
112	SD NEGERI 03 KELILING SEMULUNG	SD	66.000.000,00	22.500.000,00	88.500.000,00
113	SD NEGERI 04 BELATUNG	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
114	SD NEGERI 05 KIRIN NANGKA	SD	82.500.000,00	-	82.500.000,00
115	SD NEGERI 06 LAWIK	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
116	SD NEGERI 07 UJUNG BAYUR	SD	66.000.000,00	22.500.000,00	88.500.000,00
117	SD NEGERI 08 NANGA LAUK	SD	105.600.000,00	22.500.000,00	128.100.000,00
118	SD NEGERI 09 PALA PINTAS	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
119	SD NEGERI 10 SENGKUANG KUNING	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
120	SMP NEGERI 1 EMBALOH HILIR	SMP	176.730.000,00	-	176.730.000,00
121	SMP NEGERI 2 SATAP EMBALOH HILIR	SMP	82.200.000,00	-	82.200.000,00
122	SMP NEGERI 3 SATAP EMBALOH HILIR	SMP	82.200.000,00	-	82.200.000,00

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOS REGULER	Alokasi Dana BOS KINERJA	
123	SMP NEGERI 4 SATAP EMBALOH HILIR	SMP	82.200.000,00	-	82.200.000,00
124	SD NEGERI 01 ULAK PAOK	SD	52.800.000,00	-	52.800.000,00
125	SD NEGERI 02 BENUA MARTINUS	SD	73.700.000,00	-	73.700.000,00
126	SD NEGERI 04 SUNGAI UTIK	SD	31.900.000,00	22.500.000,00	54.400.000,00
127	SD NEGERI 05 PINJAWAN	SD	97.900.000,00	-	97.900.000,00
128	SD NEGERI 06 APAN	SD	29.700.000,00	-	29.700.000,00
129	SD NEGERI 07 LAUK RUGUN	SD	14.300.000,00	-	14.300.000,00
130	SD NEGERI 08 BENUA UJUNG	SD	79.200.000,00	-	79.200.000,00
131	SD NEGERI 09 MUNGGUIK	SD	24.200.000,00	-	24.200.000,00
132	SD NEGERI 10 NANGA SUNGAI	SD	19.800.000,00	-	19.800.000,00
133	SD NEGERI 11 PAAT	SD	19.800.000,00	-	19.800.000,00
134	SD NEGERI 12 TEMAU	SD	39.600.000,00	-	39.600.000,00
135	SD NEGERI 13 PULAN	SD	30.800.000,00	-	30.800.000,00
136	SD NEGERI 15 SADAP	SD	7.700.000,00	-	7.700.000,00
137	SMP NEGERI 1 EMBALOH HULU	SMP	217.830.000,00	35.000.000,00	252.830.000,00
138	SMP NEGERI 2 SATU ATAP EMBALOH HULU SUNGAI UTIK	SMP	38.360.000,00	-	38.360.000,00
139	SMP NEGERI 3 EMBALOH HULU	SMP	58.910.000,00	35.000.000,00	93.910.000,00
140	SD NEGERI 01 NANGA KANTUK	SD	143.000.000,00	-	143.000.000,00
141	SD NEGERI 02 BATU AMPAR	SD	71.500.000,00	-	71.500.000,00
142	SD NEGERI 03 UPAK HILIR	SD	24.200.000,00	-	24.200.000,00
143	SD NEGERI 04 GERUGUK	SD	13.200.000,00	-	13.200.000,00
144	SD NEGERI 05 ENSANAK	SD	22.000.000,00	-	22.000.000,00
145	SD NEGERI 06 BATU PANSAP	SD	12.100.000,00	-	12.100.000,00
146	SD NEGERI 07 PIYAM	SD	14.300.000,00	-	14.300.000,00
147	SD NEGERI 08 SEBANGKANG	SD	7.700.000,00	-	7.700.000,00
148	SD NEGERI 09 SEMIRAH	SD	14.300.000,00	-	14.300.000,00
149	SD NEGERI 10 SERIDAN	SD	19.800.000,00	-	19.800.000,00
150	SD NEGERI 11 TELUTUK	SD	60.500.000,00	-	60.500.000,00
151	SMP NEGERI 1 EMPANANG	SMP	232.900.000,00	-	232.900.000,00
152	SD NEGERI 01 NANGA TEPUAI	SD	151.800.000,00	22.500.000,00	174.300.000,00
153	SD NEGERI 02 LUBUK ANTUK	SD	113.300.000,00	-	113.300.000,00

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOS REGULER	Alokasi Dana BOS KINERJA	
154	SD NEGERI 03 PARANG	SD	77.000.000,00	-	77.000.000,00
155	SD NEGERI 04 NANGA KEDUAI	SD	58.300.000,00	-	58.300.000,00
156	SD NEGERI 05 ENTURIN	SD	18.700.000,00	-	18.700.000,00
157	SD NEGERI 06 LANDAU KUMPANG	SD	107.800.000,00	-	107.800.000,00
158	SD NEGERI 07 NANGA LETUH	SD	89.100.000,00	-	89.100.000,00
159	SD NEGERI 08 NANGA SERAWAK	SD	42.900.000,00	-	42.900.000,00
160	SD NEGERI 09 NANGA YEN	SD	72.600.000,00	22.500.000,00	95.100.000,00
161	SD NEGERI 10 NANGA TAMAN	SD	52.800.000,00	22.500.000,00	75.300.000,00
162	SD NEGERI 11 NANGA TEMPIAU	SD	80.300.000,00	-	80.300.000,00
163	SD NEGERI 12 SIMPANG MAS	SD	80.300.000,00	-	80.300.000,00
164	SD NEGERI 13 BUGANG	SD	57.200.000,00	22.500.000,00	79.700.000,00
165	SD NEGERI 14 MENSASAK	SD	73.700.000,00	22.500.000,00	96.200.000,00
166	SD NEGERI 15 GURUNG ULAK	SD	52.800.000,00	-	52.800.000,00
167	SD NEGERI 16 MENTAWIT	SD	53.900.000,00	-	53.900.000,00
168	SD NEGERI 17 SENAI	SD	72.600.000,00	-	72.600.000,00
169	SD NEGERI 18 SUNGAI MEDANG	SD	38.500.000,00	-	38.500.000,00
170	SMP NEGERI 1 HULU GURUNG	SMP	176.730.000,00	-	176.730.000,00
171	SMP NEGERI 2 HULU GURUNG	SMP	110.970.000,00	-	110.970.000,00
172	SMP NEGERI 3 HULU GURUNG	SMP	95.900.000,00	-	95.900.000,00
173	SMP NEGERI 4 SATAP HULU GURUNG	SMP	69.870.000,00	-	69.870.000,00
174	SMP NEGERI 5 SATAP HULU GURUNG	SMP	57.540.000,00	-	57.540.000,00
175	SMP NEGERI 6 SATAP HULU GURUNG	SMP	42.470.000,00	-	42.470.000,00
176	SD NEGERI 01 JONGKONG	SD	137.500.000,00	22.500.000,00	160.000.000,00
177	SD NEGERI 02 JONGKONG	SD	36.300.000,00	-	36.300.000,00
178	SD NEGERI 03 JONGKONG	SD	74.800.000,00	45.000.000,00	119.800.000,00

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOS REGULER	Alokasi Dana BOS KINERJA	
179	SD NEGERI 04 JONGKONG	SD	85.800.000,00	22.500.000,00	108.300.000,00
180	SD NEGERI 05 JONGKONG	SD	44.000.000,00	-	44.000.000,00
181	SD NEGERI 06 JONGKONG	SD	77.000.000,00	22.500.000,00	99.500.000,00
182	SD NEGERI 07 BONTAI	SD	91.300.000,00	-	91.300.000,00
183	SD NEGERI 08 NANGA SERIAN	SD	51.700.000,00	-	51.700.000,00
184	SD NEGERI 09 KELAMPAI	SD	41.800.000,00	-	41.800.000,00
185	SD NEGERI 10 NANGA TEMENANG	SD	102.300.000,00	-	102.300.000,00
186	SD NEGERI 11 DANAU KANDUNG SULI	SD	45.100.000,00	-	45.100.000,00
187	SD NEGERI 12 KEPIAT	SD	9.900.000,00	-	9.900.000,00
188	SD NEGERI 13 PENELAT	SD	23.100.000,00	-	23.100.000,00
189	SD NEGERI 14 SAKA	SD	60.500.000,00	-	60.500.000,00
190	SD NEGERI 15 UJUNG JAMBU	SD	89.100.000,00	-	89.100.000,00
191	SD NEGERI 16 UJUNG SAID	SD	144.100.000,00	-	144.100.000,00
192	SD NEGERI 17 MENSIPANG	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
193	SMP NEGERI 1 JONGKONG	SMP	158.920.000,00	-	158.920.000,00
194	SMP NEGERI 2 JONGKONG	SMP	183.580.000,00	-	183.580.000,00
195	SMP NEGERI 3 SATAP JONGKONG	SMP	82.200.000,00	-	82.200.000,00
196	SMP NEGERI 4 JONGKONG	SMP	130.150.000,00	-	130.150.000,00
197	SMP NEGERI 5 SATAP JONGKONG	SMP	39.730.000,00	-	39.730.000,00
198	SD NEGERI 01 NANGA KALIS	SD	224.400.000,00	-	224.400.000,00
199	SD NEGERI 02 NANGA RAUN	SD	86.900.000,00	-	86.900.000,00
200	SD NEGERI 03 NANGA SEBINTANG	SD	68.200.000,00	-	68.200.000,00
201	SD NEGERI 04 NANGA SARAY	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
202	SD NEGERI 05 TANAH PUTIH	SD	88.000.000,00	-	88.000.000,00
203	SD NEGERI 06 SEMERANTAU	SD	73.700.000,00	-	73.700.000,00
204	SD NEGERI 07 NANGA LEBANGAN	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
205	SD NEGERI 08 RIBANG KADENG	SD	66.000.000,00	45.000.000,00	111.000.000,00
206	SD NEGERI 09 SEGIAM	SD	66.000.000,00	45.000.000,00	111.000.000,00
207	SD NEGERI 10 NANGA KALIS	SD	135.300.000,00	-	135.300.000,00
208	SD NEGERI 11 SEPAN PADANG	SD	82.500.000,00	-	82.500.000,00
209	SD NEGERI 12 NANGA ARONG	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOS REGULER	Alokasi Dana BOS KINERJA	
210	SD NEGERI 13 RANTAU BUMBUN	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
211	SD NEGERI 14 BEBERUK	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
212	SD NEGERI 15 LEBANGAN DALAM	SD	66.000.000,00	22.500.000,00	88.500.000,00
213	SD NEGERI 16 NANGA PENIUNG	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
214	SD NEGERI 17 KENSURAI	SD	83.600.000,00	-	83.600.000,00
215	SD NEGERI 18 NANGA TUBUK	SD	53.900.000,00	-	53.900.000,00
216	SD NEGERI 19 RANTAU KALIS	SD	69.300.000,00	-	69.300.000,00
217	SD NEGERI 20 TEKUDAK	SD	79.200.000,00	-	79.200.000,00
218	SD NEGERI 21 LUBUK MANTUK	SD	35.200.000,00	-	35.200.000,00
219	SD NEGERI 22 HULU TUBUK	SD	72.600.000,00	-	72.600.000,00
220	SD NEGERI 23 TRANS NANGA DANAU	SD	5.500.000,00	-	5.500.000,00
221	SD NEGERI 24 TRANS BUNUT TUBUY	SD	44.000.000,00	-	44.000.000,00
222	SD NEGERI 25 NANGA DANAU	SD	77.000.000,00	-	77.000.000,00
223	SMP NEGERI 1 KALIS	SMP	426.070.000,00	-	426.070.000,00
224	SMP NEGERI 2 KALIS	SMP	90.420.000,00	-	90.420.000,00
225	SMP NEGERI 3 SATAP KALIS	SMP	89.050.000,00	-	89.050.000,00
226	SMP NEGERI 4 KALIS	SMP	100.010.000,00	35.000.000,00	135.010.000,00
227	SMP NEGERI 5 KALIS	SMP	119.190.000,00	70.000.000,00	189.190.000,00
228	SD NEGERI 01 NANGA MENTEBAH	SD	309.100.000,00	-	309.100.000,00
229	SD NEGERI 02 SUKA MAJU	SD	124.300.000,00	-	124.300.000,00
230	SD NEGERI 03 MENARIN	SD	192.500.000,00	-	192.500.000,00
231	SD NEGERI 04 KEPALA GURUNG	SD	79.200.000,00	-	79.200.000,00
232	SD NEGERI 05 BIANG II	SD	112.200.000,00	-	112.200.000,00
233	SD NEGERI 06 TEKALONG III	SD	152.900.000,00	-	152.900.000,00
234	SD NEGERI 07 MENTEBAH	SD	57.200.000,00	-	57.200.000,00
235	SD NEGERI 08 SEI TEKUYUNG	SD	55.000.000,00	-	55.000.000,00
236	SD NEGERI 09 SUMEDANG	SD	40.700.000,00	-	40.700.000,00
237	SD NEGERI 10 PADANG JAYA	SD	44.000.000,00	-	44.000.000,00
238	SD NEGERI 11 UPT XVI TRANS SUKA MAJU	SD	51.700.000,00	-	51.700.000,00
239	SD NEGERI 12 UPT XVII KEPALA GURUNG	SD	66.000.000,00	22.500.000,00	88.500.000,00
240	SD NEGERI 13 LUBUK TAPANG	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOS REGULER	Alokasi Dana BOS KINERJA	
241	SD NEGERI 14 BANGAN PERMAI	SD	102.300.000,00	-	102.300.000,00
242	SMP NEGERI 1 MENTEBAH	SMP	497.310.000,00	35.000.000,00	532.310.000,00
243	SMP NEGERI 2 MENTEBAH	SMP	223.310.000,00	70.000.000,00	293.310.000,00
244	SD NEGERI 01 MENENDANG	SD	198.000.000,00	-	198.000.000,00
245	SD NEGERI 02 RIAM PANJANG	SD	108.900.000,00	-	108.900.000,00
246	SD NEGERI 03 BUAH LIMBANG	SD	91.300.000,00	-	91.300.000,00
247	SD NEGERI 04 BUAH MAU	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
248	SD NEGERI 05 TINTIN KEMANTAN	SD	38.500.000,00	-	38.500.000,00
249	SD NEGERI 06 SUKARAMAI	SD	79.200.000,00	-	79.200.000,00
250	SD NEGERI 07 NANGA SEMELANGIT	SD	40.700.000,00	-	40.700.000,00
251	SD NEGERI 08 MAWAN	SD	81.400.000,00	-	81.400.000,00
252	SD NEGERI 09 NANGA SENGKALU	SD	44.000.000,00	-	44.000.000,00
253	SD NEGERI 10 REPUN	SD	67.100.000,00	-	67.100.000,00
254	SD NEGERI 11 NANGA PEDIAN	SD	57.200.000,00	-	57.200.000,00
255	SD NEGERI 12 KERANGAN PANJANG	SD	106.700.000,00	-	106.700.000,00
256	SD NEGERI 13 SASAN	SD	52.800.000,00	-	52.800.000,00
257	SD NEGERI 14 NANGA LIDAU	SD	30.800.000,00	-	30.800.000,00
258	SD NEGERI 15 SULANG	SD	29.700.000,00	-	29.700.000,00
259	SD NEGERI 16 BUAH LIMBANG UPT XI	SD	34.100.000,00	-	34.100.000,00
260	SMP NEGERI 1 PENGKADAN	SMP	221.940.000,00	-	221.940.000,00
261	SMP NEGERI 2 PENGKADAN	SMP	87.680.000,00	-	87.680.000,00
262	SMP NEGERI 3 SATAP PENGKADAN	SMP	39.730.000,00	-	39.730.000,00
263	SD NEGERI 01 SUNGAI ANTU	SD	78.100.000,00	-	78.100.000,00
264	SD NEGERI 02 LANGAU	SD	46.200.000,00	-	46.200.000,00
265	SD NEGERI 03 SUNGAI MAWANG	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
266	SD NEGERI 04 MERAKAI PANJANG	SD	66.000.000,00	22.500.000,00	88.500.000,00
267	SD NEGERI 05 KEDANG	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
268	SD NEGERI 06 KANTUK BUNUT	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
269	SD NEGERI 07 KANTUK BALAU	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
270	SD NEGERI 08 KANTUK ASAM	SD	42.900.000,00	-	42.900.000,00
271	SD NEGERI 09 MELANCAU	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOS REGULER	Alokasi Dana BOS KINERJA	
272	SMP NEGERI 1 PURING KENCANA	SMP	82.200.000,00	35.000.000,00	117.200.000,00
273	SD NEGERI 01 KEDAMIN HILIR	SD	242.000.000,00	-	242.000.000,00
274	SD NEGERI 02 KEDAMIN HULU	SD	282.700.000,00	-	282.700.000,00
275	SD NEGERI 03 KEDAMIN	SD	57.200.000,00	-	57.200.000,00
276	SD NEGERI 04 KEDAMIN DARAT	SD	104.500.000,00	-	104.500.000,00
277	SD NEGERI 05 EKOK TAMBAI	SD	105.600.000,00	-	105.600.000,00
278	SD NEGERI 06 LUNSARA	SD	141.900.000,00	-	141.900.000,00
279	SD NEGERI 07 SIUT	SD	114.400.000,00	-	114.400.000,00
280	SD NEGERI 08 NANGA ERAK	SD	48.400.000,00	-	48.400.000,00
281	SD NEGERI 09 LUNSA	SD	47.300.000,00	-	47.300.000,00
282	SD NEGERI 10 MATA LUNAI	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
283	SD NEGERI 11 TANJUNG LOKANG	SD	75.900.000,00	-	75.900.000,00
284	SD NEGERI 12 MELAPI	SD	45.100.000,00	-	45.100.000,00
285	SD NEGERI 13 JARAS	SD	61.600.000,00	-	61.600.000,00
286	SD NEGERI 14 SUAI	SD	34.100.000,00	-	34.100.000,00
287	SD NEGERI 15 PULAU SAYAT	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
288	SD NEGERI 16 SEPAN	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
289	SD NEGERI 17 NANGA BUNGAN	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
290	SD NEGERI 18 NANGA ENAP	SD	55.000.000,00	-	55.000.000,00
291	SD NEGERI 19 NANGA BALANG	SD	66.000.000,00	22.500.000,00	88.500.000,00
292	SD NEGERI 20 NANGA SALIN	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
293	SD NEGERI 21 NANGA LAPUNG	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
294	SD NEGERI 22 KEDAMIN HULU	SD	162.800.000,00	-	162.800.000,00
295	SD NEGERI 23 KEDAMIN	SD	57.200.000,00	-	57.200.000,00
296	SD NEGERI 24 SUNGAI ULUK	SD	184.800.000,00	-	184.800.000,00
297	SD NEGERI 26 TRANS NANGA SAHUI	SD	16.500.000,00	-	16.500.000,00
298	SD NEGERI 27 MELAPI	SD	15.400.000,00	-	15.400.000,00
299	SD NEGERI 28 KEDAMIN DARAT	SD	39.600.000,00	-	39.600.000,00
300	SD NEGERI 29 TANJUNG JATI	SD	42.900.000,00	-	42.900.000,00
301	SMP NEGERI 2 PUTUSSIBAU	SMP	498.680.000,00	-	498.680.000,00
302	SMP NEGERI 3 PUTUSSIBAU	SMP	69.870.000,00	-	69.870.000,00

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOS REGULER	Alokasi Dana BOS KINERJA	
303	SMP NEGERI 6 PUTUSSIBAU	SMP	130.150.000,00	35.000.000,00	165.150.000,00
304	SMP NEGERI 7 PUTUSSIBAU	SMP	567.180.000,00	-	567.180.000,00
305	SMP NEGERI 9 PUTUSSIBAU	SMP	135.630.000,00	70.000.000,00	205.630.000,00
306	SMP NEGERI 11 SATAP PUTUSSIBAU	SMP	82.200.000,00	-	82.200.000,00
307	SMP NEGERI 12 PUTUSSIBAU	SMP	56.170.000,00	-	56.170.000,00
308	SMP NEGERI 13 PUTUSSIBAU	SMP	57.540.000,00	70.000.000,00	127.540.000,00
309	SD NEGERI 01 PUTUSSIBAU	SD	403.700.000,00	-	403.700.000,00
310	SD NEGERI 02 PUTUSSIBAU	SD	137.500.000,00	-	137.500.000,00
311	SD NEGERI 03 PALA PULAU	SD	71.500.000,00	-	71.500.000,00
312	SD NEGERI 04 PUTUSSIBAU	SD	530.200.000,00	-	530.200.000,00
313	SD NEGERI 05 PUTUSSIBAU	SD	124.300.000,00	-	124.300.000,00
314	SD NEGERI 06 PUTUSSIBAU	SD	90.200.000,00	-	90.200.000,00
315	SD NEGERI 07 PUTUSSIBAU	SD	64.900.000,00	-	64.900.000,00
316	SD NEGERI 08 SIBAU HILIR	SD	39.600.000,00	-	39.600.000,00
317	SD NEGERI 09 SIBAU HULU	SD	141.900.000,00	-	141.900.000,00
318	SD NEGERI 10 NANGA SAMBUS	SD	116.600.000,00	-	116.600.000,00
319	SD NEGERI 11 TANJUNG KARANG	SD	77.000.000,00	-	77.000.000,00
320	SD NEGERI 12 TANJUNG DURIAN	SD	79.200.000,00	-	79.200.000,00
321	SD NEGERI 13 TANJUNG LASA	SD	75.900.000,00	-	75.900.000,00
322	SD NEGERI 14 SEMANGKOK	SD	46.200.000,00	-	46.200.000,00
323	SD NEGERI 15 MUPA	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
324	SD NEGERI 16 NANGA UBAT	SD	15.400.000,00	-	15.400.000,00
325	SD NEGERI 17 PALA PULAU	SD	69.300.000,00	-	69.300.000,00
326	SD NEGERI 18 SIBAU HILIR	SD	148.500.000,00	22.500.000,00	171.000.000,00
327	SD NEGERI 19 TANJUNG KUDA	SD	91.300.000,00	-	91.300.000,00
328	SD NEGERI 20 NANGA AWIN	SD	144.100.000,00	22.500.000,00	166.600.000,00
329	SD NEGERI 21 NANGA NYABAU	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
330	SD NEGERI 22 SUNGAI ULUK PALIN	SD	58.300.000,00	-	58.300.000,00
331	SD NEGERI 23 BANUA TENGAH	SD	60.500.000,00	-	60.500.000,00
332	SD NEGERI 24 SELUAN	SD	108.900.000,00	-	108.900.000,00
333	SD NEGERI 25 TANJUNG KERJA	SD	26.136.000,00	-	26.136.000,00

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOS REGULER	Alokasi Dana BOS KINERJA	
334	SD NEGERI 26 TANJUNG BERUANG	SD	42.900.000,00	-	42.900.000,00
335	SD NEGERI 27 GUDANG SUAI	SD	66.000.000,00	22.500.000,00	88.500.000,00
336	SD NEGERI 28 LANDAU IPUH	SD	6.600.000,00	-	6.600.000,00
337	SD NEGERI NO. 29 LAUK II	SD	31.900.000,00	22.500.000,00	54.400.000,00
338	SD NEGERI 30 LAUK SATU	SD	12.100.000,00	-	12.100.000,00
339	SMP NEGERI 1 PUTUSSIBAU	SMP	754.870.000,00	-	754.870.000,00
340	SMP NEGERI 4 PUTUSSIBAU	SMP	183.580.000,00	-	183.580.000,00
341	SMP NEGERI 5 PUTUSSIBAU	SMP	406.890.000,00	-	406.890.000,00
342	SMP NEGERI 8 PUTUSSIBAU	SMP	180.840.000,00	-	180.840.000,00
343	SMP NEGERI 10 SATAP PUTUSSIBAU	SMP	58.910.000,00	-	58.910.000,00
344	SD NEGERI 01 SEJIRAM	SD	73.700.000,00	-	73.700.000,00
345	SD NEGERI 02 SEJIRAM	SD	121.000.000,00	22.500.000,00	143.500.000,00
346	SD NEGERI 03 RANYAI HILIR	SD	155.100.000,00	-	155.100.000,00
347	SD NEGERI 04 BATI	SD	78.100.000,00	-	78.100.000,00
348	SD NEGERI 05 GURUNG	SD	60.500.000,00	22.500.000,00	83.000.000,00
349	SD NEGERI 06 SENEKAN	SD	74.800.000,00	22.500.000,00	97.300.000,00
350	SD NEGERI 07 BELIKAI	SD	126.500.000,00	-	126.500.000,00
351	SD NEGERI 08 EMPIRIANG	SD	62.700.000,00	-	62.700.000,00
352	SD NEGERI 09 BELUIS LELAM	SD	68.200.000,00	22.500.000,00	90.700.000,00
353	SD NEGERI 10 TANJUNG KELILING	SD	66.000.000,00	22.500.000,00	88.500.000,00
354	SD NEGERI 11 JERENJANG	SD	53.900.000,00	-	53.900.000,00
355	SD NEGERI 12 NANGA LOT	SD	82.500.000,00	-	82.500.000,00
356	SD NEGERI 13 LAUNG	SD	28.600.000,00	-	28.600.000,00
357	SD NEGERI 14 PALA KOTA	SD	151.800.000,00	-	151.800.000,00
358	SD NEGERI 15 BEKUAN	SD	27.500.000,00	-	27.500.000,00
359	SD NEGERI 16 NANGA NYAWA	SD	69.300.000,00	-	69.300.000,00
360	SMP NEGERI 1 SEBERUANG	SMP	549.370.000,00	-	549.370.000,00
361	SMP NEGERI 2 SATAP SEBERUANG	SMP	161.660.000,00	-	161.660.000,00
362	SMP NEGERI 3 SATAP SEBERUANG	SMP	73.980.000,00	-	73.980.000,00
363	SD NEGERI 01 SELIMBAU	SD	77.000.000,00	-	77.000.000,00
364	SD NEGERI 02 SELIMBAU	SD	141.900.000,00	-	141.900.000,00

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOS REGULER	Alokasi Dana BOS KINERJA	
365	SD NEGERI 03 SELIMBAU	SD	122.100.000,00	-	122.100.000,00
366	SD NEGERI 04 SELIMBAU	SD	84.700.000,00	-	84.700.000,00
367	SD NEGERI 05 SELIMBAU	SD	145.200.000,00	45.000.000,00	190.200.000,00
368	SD NEGERI 06 SELIMBAU	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
369	SD NEGERI 07 NIBUNG	SD	104.500.000,00	-	104.500.000,00
370	SD NEGERI 08 PIASAK	SD	181.500.000,00	-	181.500.000,00
371	SD NEGERI 09 DANAU MAWAN	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
372	SD NEGERI 10 GERAYAU	SD	47.300.000,00	-	47.300.000,00
373	SD NEGERI 11 BENUIS	SD	33.000.000,00	-	33.000.000,00
374	SD NEGERI 12 SEMALAH	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
375	SD NEGERI 13 SEKULAT	SD	179.300.000,00	-	179.300.000,00
376	SD NEGERI 14 ENKKERENGAS	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
377	SD NEGERI 15 SEKUBAH	SD	29.700.000,00	-	29.700.000,00
378	SD NEGERI 16 KEJERING	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
379	SD NEGERI 17 NANGA LEBOYAN	SD	69.300.000,00	-	69.300.000,00
380	SD NEGERI 18 PEGA	SD	60.500.000,00	-	60.500.000,00
381	SD NEGERI 19 TEMPURAU	SD	46.200.000,00	-	46.200.000,00
382	SD NEGERI 20 SUKA MAJU	SD	38.500.000,00	-	38.500.000,00
383	SD NEGERI 21 PENGEMBUNG	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
384	SD NEGERI 22 NANGA SEMANGIT	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
385	SMP NEGERI 1 SELIMBAU	SMP	234.270.000,00	-	234.270.000,00
386	SMP NEGERI 2 SELIMBAU	SMP	120.560.000,00	-	120.560.000,00
387	SMP NEGERI 3 SELIMBAU	SMP	38.360.000,00	-	38.360.000,00
388	SMP NEGERI 4 SELIMBAU	SMP	110.970.000,00	-	110.970.000,00
389	SMP NEGERI 5 SELIMBAU	SMP	82.200.000,00	-	82.200.000,00
390	SMP NEGERI 6 SATAP SELIMBAU	SMP	95.900.000,00	35.000.000,00	130.900.000,00
391	SMP NEGERI 7 SATAP SELIMBAU	SMP	86.310.000,00	-	86.310.000,00
392	SMP NEGERI 8 SELIMBAU	SMP	39.730.000,00	35.000.000,00	74.730.000,00
393	SD NEGERI 01 SEMITAU	SD	201.300.000,00	45.000.000,00	246.300.000,00
394	SD NEGERI 02 SEMITAU	SD	166.100.000,00	-	166.100.000,00
395	SD NEGERI 03 SEMITAU	SD	60.500.000,00	-	60.500.000,00

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOS REGULER	Alokasi Dana BOS KINERJA	
396	SD NEGERI 04 NANGA KENEPAI	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
397	SD NEGERI 05 KENEPAI KOMPLEK	SD	158.400.000,00	-	158.400.000,00
398	SD NEGERI 06 NANGA SEBERUANG	SD	96.800.000,00	22.500.000,00	119.300.000,00
399	SD NEGERI 07 ENTIPAN HILIR	SD	67.100.000,00	-	67.100.000,00
400	SD NEGERI 08 ENTIPAN HULU	SD	89.100.000,00	-	89.100.000,00
401	SD NEGERI 09 NANGA BIAN	SD	66.000.000,00	22.500.000,00	88.500.000,00
402	SD NEGERI 10 KENERAK	SD	72.600.000,00	22.500.000,00	95.100.000,00
403	SD NEGERI 11 SEKEDAU 2	SD	102.300.000,00	-	102.300.000,00
404	SD NEGERI 12 NANGA LEMEDAK	SD	81.400.000,00	-	81.400.000,00
405	SMP NEGERI 1 SEMITAU	SMP	563.070.000,00	-	563.070.000,00
406	SMP NEGERI 2 SEMITAU	SMP	106.860.000,00	-	106.860.000,00
407	SMP NEGERI 3 SATAP SEMITAU	SMP	121.930.000,00	-	121.930.000,00
408	SD NEGERI 01 NANGA SILAT	SD	158.400.000,00	-	158.400.000,00
409	SD NEGERI 02 NANGA SILAT	SD	112.200.000,00	-	112.200.000,00
410	SD NEGERI 03 NANGA SILAT	SD	29.700.000,00	-	29.700.000,00
411	SD NEGERI 04 NANGA SENTABAI	SD	122.100.000,00	-	122.100.000,00
412	SD NEGERI 05 PB. PENAI	SD	246.400.000,00	-	246.400.000,00
413	SD NEGERI 06 NANGA NUAR	SD	126.500.000,00	-	126.500.000,00
414	SD NEGERI 07 BONGKONG	SD	174.900.000,00	22.500.000,00	197.400.000,00
415	SD NEGERI 08 NANGA SEMELUANG	SD	35.200.000,00	-	35.200.000,00
416	SD NEGERI 09 SUNGAI CANGGAI	SD	29.700.000,00	-	29.700.000,00
417	SD NEGERI 10 MIAU MERAH	SD	68.200.000,00	-	68.200.000,00
418	SD NEGERI 11 SETUNGGUL	SD	71.500.000,00	-	71.500.000,00
419	SD NEGERI 12 SUNGAI MALI	SD	79.200.000,00	-	79.200.000,00
420	SD NEGERI 13 UPT I NANGA SILAT	SD	308.000.000,00	-	308.000.000,00
421	SD NEGERI 14 UPT II SILAT	SD	85.800.000,00	-	85.800.000,00
422	SD NEGERI 15 UPT III SILAT	SD	157.300.000,00	22.500.000,00	179.800.000,00
423	SD NEGERI 16 SALAT	SD	23.100.000,00	-	23.100.000,00
424	SD NEGERI 17 ENKKARAS	SD	30.800.000,00	-	30.800.000,00
425	SD NEGERI 18 UPT IV SILAT	SD	344.300.000,00	45.000.000,00	389.300.000,00
426	SD NEGERI 19 UPT V NANGA SILAT	SD	89.100.000,00	-	89.100.000,00

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOS REGULER	Alokasi Dana BOS KINERJA	
427	SD NEGERI 20 SUNGAI PUTAT	SD	107.800.000,00	-	107.800.000,00
428	SD NEGERI 21 SEBERU	SD	56.100.000,00	-	56.100.000,00
429	SD NEGERI 22 BERAN III	SD	75.900.000,00	-	75.900.000,00
430	SD NEGERI 23 SUNGAI SENA	SD	46.200.000,00	-	46.200.000,00
431	SD NEGERI 24 RUMBIH	SD	55.000.000,00	22.500.000,00	77.500.000,00
432	SD NEGERI 25 SAUK ATAS	SD	40.700.000,00	-	40.700.000,00
433	SD NEGERI 26 TSM ENKKARAS	SD	-	-	0,00
434	SD NEGERI 27 KERANJI	SD	53.900.000,00	-	53.900.000,00
435	SD NEGERI 28 SUNGAI KUNCIT	SD	31.900.000,00	22.500.000,00	54.400.000,00
436	SD NEGERI 29 SUNGAI RINGIN	SD	39.600.000,00	22.500.000,00	62.100.000,00
437	SD NEGERI 30 TEKALONG JAYA	SD	69.300.000,00	-	69.300.000,00
438	SMP NEGERI 1 SILAT HILIR	SMP	380.860.000,00	35.000.000,00	415.860.000,00
439	SMP NEGERI 2 SILAT HILIR	SMP	313.730.000,00	35.000.000,00	348.730.000,00
440	SMP NEGERI 3 SILAT HILIR	SMP	243.860.000,00	-	243.860.000,00
441	SMP NEGERI 4 SATAP SILAT HILIR	SMP	82.200.000,00	-	82.200.000,00
442	SMP NEGERI 5 SILAT HILIR	SMP	173.990.000,00	-	173.990.000,00
443	SMP NEGERI 6 SILAT HILIR	SMP	143.850.000,00	-	143.850.000,00
444	SD NEGERI 01 NANGA DANGKAN	SD	97.900.000,00	-	97.900.000,00
445	SD NEGERI 02 NANGA DANGKAN	SD	210.100.000,00	-	210.100.000,00
446	SD NEGERI 03 NANGA NGERI	SD	133.100.000,00	-	133.100.000,00
447	SD NEGERI 04 RIAM TAPANG	SD	70.400.000,00	-	70.400.000,00
448	SD NEGERI 05 LANDAU BADA	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
449	SD NEGERI 06 BELIMBING	SD	124.300.000,00	-	124.300.000,00
450	SD NEGERI 07 NANGA LUAN	SD	66.000.000,00	22.500.000,00	88.500.000,00
451	SD NEGERI 08 LANDAU RANTAU	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
452	SD NEGERI 09 NANGA LUNGU	SD	66.000.000,00	22.500.000,00	88.500.000,00
453	SD NEGERI 10 LANDAU TEMIANG	SD	19.800.000,00	-	19.800.000,00
454	SD NEGERI 11 NANGA MENYABAI	SD	67.100.000,00	-	67.100.000,00
455	SD NEGERI 12 SELIMU	SD	66.000.000,00	22.500.000,00	88.500.000,00
456	SD NEGERI 13 PERJUK	SD	100.100.000,00	-	100.100.000,00
457	SD NEGERI 14 LEBAK NAJAH	SD	96.800.000,00	-	96.800.000,00

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOS REGULER	Alokasi Dana BOS KINERJA	
458	SD NEGERI 15 GEDABANG	SD	66.000.000,00	22.500.000,00	88.500.000,00
459	SD NEGERI 16 PELANJAU	SD	37.400.000,00	-	37.400.000,00
460	SD NEGERI 17 NANGA PENGGA	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
461	SD NEGERI 18 BANGAN BARU	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
462	SD NEGERI 19 SELANGKAI	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
463	SD NEGERI 20 NANGA SUANG	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
464	SD NEGERI 21 SUNGAI RAMAH	SD	52.800.000,00	-	52.800.000,00
465	SD NEGERI 22 LUBUK RUBIN	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
466	SMP NEGERI 1 SILAT HULU	SMP	437.030.000,00	-	437.030.000,00
467	SMP NEGERI 2 SILAT HULU	SMP	89.050.000,00	-	89.050.000,00
468	SMP NEGERI 3 SILAT HULU	SMP	87.680.000,00	-	87.680.000,00
469	SMP NEGERI 4 SATAP SILAT HULU	SMP	82.200.000,00	35.000.000,00	117.200.000,00
470	SMP NEGERI 5 SATAP SILAT HULU	SMP	82.200.000,00	35.000.000,00	117.200.000,00
471	SMP NEGERI 6 SILAT HULU	SMP	82.200.000,00	-	82.200.000,00
472	SD NEGERI 01 NANGA SUHAID	SD	188.100.000,00	-	188.100.000,00
473	SD NEGERI 02 NANGA SUHAID	SD	158.400.000,00	-	158.400.000,00
474	SD NEGERI 03 NANGA SUHAID	SD	203.500.000,00	-	203.500.000,00
475	SD NEGERI 04 SUHAID	SD	184.800.000,00	-	184.800.000,00
476	SD NEGERI 05 NANGA KENELANG	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
477	SD NEGERI 06 KERANGAS	SD	5.500.000,00	-	5.500.000,00
478	SD NEGERI 07 CARAM	SD	12.100.000,00	-	12.100.000,00
479	SD NEGERI 08 MANTAN	SD	31.900.000,00	-	31.900.000,00

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOS REGULER	Alokasi Dana BOS KINERJA	
480	SD NEGERI 09 MENSUSAI	SD	60.500.000,00	-	60.500.000,00
481	SD NEGERI 10 JONGKONG SARAI	SD	30.800.000,00	-	30.800.000,00
482	SD NEGERI 11 NANGA EMPANANG	SD	66.000.000,00	-	66.000.000,00
483	SD NEGERI 12 MENAPAR	SD	44.000.000,00	-	44.000.000,00
484	SD NEGERI 13 KENABAK	SD	23.100.000,00	-	23.100.000,00
485	SMP NEGERI 1 SUHAID	SMP	284.960.000,00	35.000.000,00	319.960.000,00
486	SMP NEGERI 2 SUHAID	SMP	105.490.000,00	-	105.490.000,00
487	SMP NEGERI 3 SATAP SUHAID	SMP	82.200.000,00	-	82.200.000,00
488	SMP NEGERI 4 SATU ATAP SUHAID	SMP	87.680.000,00	70.000.000,00	157.680.000,00
489	SD SWASTA TUNAS SEJAHTERA SERIANG	SD HIB	189.200.000,00	25.000.000,00	214.200.000,00
490	SMP TUNAS SEJAHTERA SERIANG	SMP HIB	227.420.000,00	70.000.000,00	297.420.000,00
491	SDS TUNAS SEJAHTERA SUNGAI TEMBAGA MARTANJUNG	SD HIB	216.700.000,00	-	216.700.000,00
492	SD TUNAS SEJAHTERA SUNGAI TAWANG	SD HIB	253.000.000,00	22.500.000,00	275.500.000,00
493	SD ISLAM TERPADU INSAN MULIA	SD HIB	236.500.000,00	25.000.000,00	261.500.000,00
494	SD ISLAMIC CENTER KAPUAS HULU	SD HIB	119.900.000,00	-	119.900.000,00
495	SD ISLAM TAHFIDZ	SD HIB	135.300.000,00	-	135.300.000,00
496	SD SUBSIDI KARYA BUDI	SD HIB	242.000.000,00	22.500.000,00	264.500.000,00
497	SMP KARYA BUDI	SMP HIB	304.140.000,00	-	304.140.000,00
498	SMPS PGRI 2 PUTUSSIBAU	SMP HIB	75.350.000,00	-	75.350.000,00
499	SMP KRISTEN SETIA PUTUSSIBAU	SMP HIB	83.570.000,00	-	83.570.000,00
500	SDS PELITA SEMITAU	SD HIB	88.000.000,00	-	88.000.000,00
501	SD EKA TJIPTA BELIAN	SD HIB	293.700.000,00	45.000.000,00	338.700.000,00
502	SD TUNAS PRIMA KHATULISTIWA	SD HIB	123.200.000,00	-	123.200.000,00
503	SMP EKA TJIPTA TENGGAWANG	SMP HIB	239.750.000,00	-	239.750.000,00
504	SD EKA TJIPTA SUNGAI BERAN	SD HIB	100.100.000,00	-	100.100.000,00
505	SD EKA TJIPTA KAPUAS HULU	SD HIB	140.800.000,00	45.000.000,00	185.800.000,00
506	SD TUNAS PRIMA SEJIRAM	SD HIB	123.200.000,00	22.500.000,00	145.700.000,00
507	SDS EKA TJIPTA MUARA TAWANG	SD HIB	125.400.000,00	45.000.000,00	170.400.000,00
508	SMPIT INSAN MANDIRI PUTUSSIBAU	SMP HIB	60.280.000,00	-	60.280.000,00
TOTAL			50.031.293.000	2.685.000.000	52.716.293.000,00

Rincian Pendapatan Hibah Dana BOS BOP PAUD TA 2023

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOP PAUD Reguler (Tahap I)	Alokasi Dana BOP PAUD Reguler (Tahap II)	
1	PAUD RADEN SURA	PAUD / TKN	Rp16.450.000	Rp16.450.000	32.900.000,00
2	PAUD TERPADU TUNAS SEJAHTERA SERIANG	PAUD / TKN	Rp25.200.000	Rp25.200.000	50.400.000,00
3	KB SEMPANDAI	PAUD / TKN	Rp3.850.000	Rp3.850.000	7.700.000,00
4	PAUD TARADANG	PAUD / TKN	Rp4.550.000	Rp4.550.000	9.100.000,00
5	BINA KASIH	PAUD / TKN	Rp5.950.000	Rp5.950.000	11.900.000,00
6	KB MANDAY PERMAI	PAUD / TKN	Rp11.550.000	Rp11.550.000	23.100.000,00
7	PAUD MANDIRI	PAUD / TKN	Rp7.350.000	Rp7.350.000	14.700.000,00
8	PAUD MAWAR	PAUD / TKN	Rp9.800.000	Rp9.800.000	19.600.000,00
9	PAUD NGIGAK PENEMU PENYELUANG	PAUD / TKN	Rp5.950.000	Rp5.950.000	11.900.000,00
10	PAUD RUAI PENEMU	PAUD / TKN	Rp8.750.000	Rp8.750.000	17.500.000,00
11	PAUD SINAR BIKI	PAUD / TKN	Rp7.000.000	Rp7.000.000	14.000.000,00
12	KB YONGKI	PAUD / TKN	Rp3.150.000	Rp3.150.000	6.300.000,00
13	KB LANDAU NIBUNG	PAUD / TKN	Rp7.350.000	Rp7.350.000	14.700.000,00
14	KB PELANGI INDAH	PAUD / TKN	Rp14.350.000	Rp14.350.000	28.700.000,00
15	PAUD BIAN PERMAI	PAUD / TKN	Rp10.850.000	Rp10.850.000	21.700.000,00
16	PAUD PERBU KENCANA	PAUD / TKN	Rp10.850.000	Rp10.850.000	21.700.000,00
17	PAUD PERMATA BUNDA	PAUD / TKN	Rp5.250.000	Rp5.250.000	10.500.000,00
18	PAUD SERAI BERTUAH	PAUD / TKN	Rp8.400.000	Rp8.232.000	16.632.000,00
19	PAUD TANJUNG RAYA	PAUD / TKN	Rp9.450.000	Rp9.450.000	18.900.000,00
20	PAUD TUNAS BANGSA	PAUD / TKN	Rp8.750.000	Rp8.750.000	17.500.000,00
21	PAUD TUNAS MENGELAI	PAUD / TKN	Rp20.300.000	Rp20.300.000	40.600.000,00
22	KB MAWAR	PAUD / TKN	Rp5.950.000	Rp5.950.000	11.900.000,00
23	PAUD ANAK BANGSA	PAUD / TKN	Rp8.050.000	Rp8.050.000	16.100.000,00
24	PAUD BUNGA BERINGIN	PAUD / TKN	Rp7.350.000	Rp7.350.000	14.700.000,00
25	PAUD CERIA	PAUD / TKN	Rp7.000.000	Rp7.000.000	14.000.000,00
26	PAUD DAHLIA	PAUD / TKN	Rp16.100.000	Rp16.100.000	32.200.000,00
27	PAUD KASIH BUNDA	PAUD / TKN	Rp12.250.000	Rp12.250.000	24.500.000,00
28	PAUD PERMATA BUNDA	PAUD / TKN	Rp10.500.000	Rp10.500.000	21.000.000,00

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOP PAUD Reguler (Tahap I)	Alokasi Dana BOP PAUD Reguler (Tahap II)	
29	PAUD SEJAHTERA	PAUD / TKN	Rp10.500.000	Rp10.500.000	21.000.000,00
30	KB PERMATA BUNDA	PAUD / TKN	Rp10.850.000	Rp10.850.000	21.700.000,00
31	PAUD BELIMBING	PAUD / TKN	Rp6.300.000	Rp6.300.000	12.600.000,00
32	PAUD KARMUI JAYA	PAUD / TKN	Rp5.950.000	Rp5.950.000	11.900.000,00
33	PAUD KETAM DELAPAN	PAUD / TKN	Rp9.800.000	Rp9.800.000	19.600.000,00
34	PAUD MEKAR JAYA	PAUD / TKN	Rp5.950.000	Rp5.950.000	11.900.000,00
35	PAUD SINGAJAGA	PAUD / TKN	Rp12.950.000	Rp12.950.000	25.900.000,00
36	KB TUNAS HARAPAN	PAUD / TKN	Rp6.650.000	Rp6.650.000	13.300.000,00
37	PAUD ALFA OMEGA	PAUD / TKN	Rp9.100.000	Rp9.100.000	18.200.000,00
38	KB WIDYA BAKTI	PAUD / TKN	Rp4.900.000	Rp4.900.000	9.800.000,00
39	PAUD ANAK DANGINAN	PAUD / TKN	Rp5.950.000	Rp5.950.000	11.900.000,00
40	PAUD INDU BANUA	PAUD / TKN	Rp8.750.000	Rp8.750.000	17.500.000,00
41	PAUD TUNAS HARAPAN	PAUD / TKN	Rp4.200.000	Rp4.200.000	8.400.000,00
42	PAUD KUMANG	PAUD / TKN	Rp6.300.000	Rp6.300.000	12.600.000,00
43	KB AGUNG PERMAI	PAUD / TKN	Rp4.200.000	Rp4.200.000	8.400.000,00
44	KB AZHAR	PAUD / TKN	Rp10.150.000	Rp10.150.000	20.300.000,00
45	KB AZZAHRA	PAUD / TKN	Rp2.800.000	Rp2.800.000	5.600.000,00
46	KB BERINGIN	PAUD / TKN	Rp9.100.000	Rp9.100.000	18.200.000,00
47	KB KASTURI	PAUD / TKN	Rp4.900.000	Rp4.900.000	9.800.000,00
48	KB KEMBANG MELATI	PAUD / TKN	Rp7.000.000	Rp7.000.000	14.000.000,00
49	KB MENTARI	PAUD / TKN	Rp5.250.000	Rp5.250.000	10.500.000,00
50	KB NURUL ISTIQOMAH	PAUD / TKN	Rp9.800.000	Rp9.800.000	19.600.000,00
51	PAUD ADU LESTARI	PAUD / TKN	Rp6.300.000	Rp6.300.000	12.600.000,00
52	PAUD AL-FALAH	PAUD / TKN	Rp8.750.000	Rp8.750.000	17.500.000,00
53	PAUD AT - TAQWA	PAUD / TKN	Rp3.850.000	Rp3.850.000	7.700.000,00
54	PAUD MANDIRI	PAUD / TKN	Rp7.350.000	Rp7.203.000	14.553.000,00
55	PAUD MELATI	PAUD / TKN	Rp11.550.000	Rp11.550.000	23.100.000,00
56	PAUD PELANGI	PAUD / TKN	Rp5.950.000	Rp5.950.000	11.900.000,00
57	PAUD PELITA HARAPAN	PAUD / TKN	Rp5.250.000	Rp5.250.000	10.500.000,00
58	PAUD PERMATA BUNDA	PAUD / TKN	Rp8.750.000	Rp8.750.000	17.500.000,00

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOP PAUD Reguler (Tahap I)	Alokasi Dana BOP PAUD Reguler (Tahap II)	
59	PAUD RABBANI	PAUD / TKN	Rp8.050.000	Rp8.050.000	16.100.000,00
60	TK PAUD AT-TAQWA	PAUD / TKN	Rp5.250.000	Rp5.250.000	10.500.000,00
61	KB HARAPAN BANGSA	PAUD / TKN	Rp4.550.000	Rp4.550.000	9.100.000,00
62	KB HARAPAN BUNDA	PAUD / TKN	Rp3.500.000	Rp3.500.000	7.000.000,00
63	KB KARYA BERSAMA	PAUD / TKN	Rp7.700.000	Rp7.700.000	15.400.000,00
64	KB MUTIARA BUNDA	PAUD / TKN	Rp9.450.000	Rp9.450.000	18.900.000,00
65	KB TUNAS MUDA	PAUD / TKN	Rp14.000.000	Rp14.000.000	28.000.000,00
66	PAUD KARYA JAYA	PAUD / TKN	Rp6.300.000	Rp6.300.000	12.600.000,00
67	PAUD KASIH IBU	PAUD / TKN	Rp3.850.000	Rp3.850.000	7.700.000,00
68	PAUD PERMATA HATI	PAUD / TKN	Rp10.500.000	Rp10.500.000	21.000.000,00
69	PAUD SENARA	PAUD / TKN	Rp21.000.000	Rp21.000.000	42.000.000,00
70	PAUD TUNAS MENTARI	PAUD / TKN	Rp11.550.000	Rp11.550.000	23.100.000,00
71	KB HARAPAN LANGAN	PAUD / TKN	Rp9.800.000	Rp9.800.000	19.600.000,00
72	KB MARUNG PELITA JAYA	PAUD / TKN	Rp9.450.000	Rp9.450.000	18.900.000,00
73	KB SUNAN INDAH	PAUD / TKN	Rp8.750.000	Rp8.750.000	17.500.000,00
74	KB SURUH BARA AN	PAUD / TKN	Rp10.150.000	Rp10.150.000	20.300.000,00
75	KB TUNAS BANGSA	PAUD / TKN	Rp8.750.000	Rp8.750.000	17.500.000,00
76	PAUD DAMAI SEJAHTERA SEGIAM	PAUD / TKN	Rp3.850.000	Rp3.850.000	7.700.000,00
77	PAUD HARAPAN PANDE	PAUD / TKN	Rp5.950.000	Rp5.950.000	11.900.000,00
78	PAUD KARTINI	PAUD / TKN	Rp5.950.000	Rp5.950.000	11.900.000,00
79	PAUD MEDANG	PAUD / TKN	Rp9.100.000	Rp9.100.000	18.200.000,00
80	PAUD NANDANG PASULANG	PAUD / TKN	Rp15.400.000	Rp15.400.000	30.800.000,00
81	PAUD SARAY PERMAI	PAUD / TKN	Rp14.350.000	Rp14.350.000	28.700.000,00
82	PAUD TILANTANG BAGURUAN	PAUD / TKN	Rp8.750.000	Rp8.750.000	17.500.000,00
83	PAUD TINAN MUNDI	PAUD / TKN	Rp12.250.000	Rp12.250.000	24.500.000,00
84	PAUD TUNGGAN CERIA	PAUD / TKN	Rp8.750.000	Rp8.750.000	17.500.000,00
85	KB ANAK BANGSA	PAUD / TKN	Rp8.050.000	Rp8.050.000	16.100.000,00
86	KB BUKIT BELANG	PAUD / TKN	Rp12.950.000	Rp12.950.000	25.900.000,00
87	KB KARYA BERSAMA	PAUD / TKN	Rp10.850.000	Rp10.633.000	21.483.000,00
88	PAUD HARAPAN MAJU	PAUD / TKN	Rp9.100.000	Rp9.100.000	18.200.000,00

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOP PAUD Reguler (Tahap I)	Alokasi Dana BOP PAUD Reguler (Tahap II)	
89	PAUD INTAN PERMAI	PAUD / TKN	Rp8.400.000	Rp8.400.000	16.800.000,00
90	PAUD KASIH IBU	PAUD / TKN	Rp7.350.000	Rp7.350.000	14.700.000,00
91	PAUD MENARIN JAYA	PAUD / TKN	Rp14.700.000	Rp14.700.000	29.400.000,00
92	PAUD TANGAI RAYA	PAUD / TKN	Rp12.600.000	Rp12.600.000	25.200.000,00
93	KB NUR HIDAYAH	PAUD / TKN	Rp3.150.000	Rp3.150.000	6.300.000,00
94	KB PELANGI	PAUD / TKN	Rp10.500.000	Rp10.500.000	21.000.000,00
95	PAUD AL - WALIY	PAUD / TKN	Rp8.750.000	Rp8.750.000	17.500.000,00
96	PAUD AL-AMIN	PAUD / TKN	Rp7.350.000	Rp7.350.000	14.700.000,00
97	PAUD CAHAYA BUNDA	PAUD / TKN	Rp9.450.000	Rp9.450.000	18.900.000,00
98	PAUD ISTIQOMAH	PAUD / TKN	Rp17.150.000	Rp17.150.000	34.300.000,00
99	PAUD KUMPULAN CERIA	PAUD / TKN	Rp7.000.000	Rp7.000.000	14.000.000,00
100	PAUD LESTARI ABADI	PAUD / TKN	Rp10.500.000	Rp10.500.000	21.000.000,00
101	PAUD NUSA INDAH	PAUD / TKN	Rp3.150.000	Rp3.150.000	6.300.000,00
102	PAUD SENGKALU JAYA	PAUD / TKN	Rp4.550.000	Rp4.550.000	9.100.000,00
103	PAUD TAMAN CERIA	PAUD / TKN	Rp5.600.000	Rp5.488.000	11.088.000,00
104	PAUD KEMANTAN PURING	PAUD / TKN	Rp6.650.000	Rp6.650.000	13.300.000,00
105	KB MUTIARA BANGSA	PAUD / TKN	Rp6.650.000	Rp6.650.000	13.300.000,00
106	KB PERMAI	PAUD / TKN	Rp10.150.000	Rp10.150.000	20.300.000,00
107	MANSANG PENEMU	PAUD / TKN	Rp10.500.000	Rp10.500.000	21.000.000,00
108	PAUD ANUGERAH	PAUD / TKN	Rp8.750.000	Rp8.750.000	17.500.000,00
109	PAUD ASOIMBER	PAUD / TKN	Rp10.150.000	Rp10.150.000	20.300.000,00
110	PAUD BUNGA LESTARI	PAUD / TKN	Rp14.000.000	Rp14.000.000	28.000.000,00
111	PAUD MELATI	PAUD / TKN	Rp9.100.000	Rp9.100.000	18.200.000,00
112	PAUD TIARA	PAUD / TKN	Rp5.250.000	Rp5.250.000	10.500.000,00
113	PAUD TONO KULAN	PAUD / TKN	Rp11.550.000	Rp11.550.000	23.100.000,00
114	PAUD URING TUKUNG	PAUD / TKN	Rp8.050.000	Rp8.050.000	16.100.000,00
115	KB PETINGGI SARI	PAUD / TKN	Rp14.000.000	Rp14.000.000	28.000.000,00
116	PAUD BINA LESTARI	PAUD / TKN	Rp10.500.000	Rp10.500.000	21.000.000,00
117	PAUD CERIA	PAUD / TKN	Rp4.900.000	Rp4.900.000	9.800.000,00
118	PAUD MUTIARA BUNDA	PAUD / TKN	Rp5.950.000	Rp5.950.000	11.900.000,00

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOP PAUD Reguler (Tahap I)	Alokasi Dana BOP PAUD Reguler (Tahap II)	
119	PAUD TERPADU KARYABUDI	PAUD / TKN	Rp36.050.000	Rp36.050.000	72.100.000,00
120	PAUD TUNAS KARTIKA	PAUD / TKN	Rp19.600.000	Rp19.600.000	39.200.000,00
121	PAUD TUNAS PERTIWI	PAUD / TKN	Rp11.200.000	Rp11.200.000	22.400.000,00
122	TK KARTIKA JAYA	PAUD / TKN	Rp9.450.000	Rp9.450.000	18.900.000,00
123	TK KEMALA BAYANGKARI	PAUD / TKN	Rp21.350.000	Rp21.350.000	42.700.000,00
124	TKIT AL HIDAYAH	PAUD / TKN	Rp11.550.000	Rp11.550.000	23.100.000,00
125	KB AGAVE	PAUD / TKN	Rp10.150.000	Rp10.150.000	20.300.000,00
126	KB DAYANG LINDUNG	PAUD / TKN	Rp3.500.000	Rp3.500.000	7.000.000,00
127	KB NEMBIK KITA	PAUD / TKN	Rp8.400.000	Rp8.400.000	16.800.000,00
128	KB PERMATA HATI	PAUD / TKN	Rp5.250.000	Rp5.040.000	10.290.000,00
129	KB R.A. KARTINI	PAUD / TKN	Rp7.700.000	Rp7.700.000	15.400.000,00
130	KB RUAI MANA	PAUD / TKN	Rp10.500.000	Rp10.500.000	21.000.000,00
131	KB ISLAM TERPADU DARUSSALAM	PAUD / TKN	Rp7.700.000	Rp7.700.000	15.400.000,00
132	KB KASIH IBU	PAUD / TKN	Rp9.100.000	Rp9.100.000	18.200.000,00
133	KB PERMATA BUNDA	PAUD / TKN	Rp6.300.000	Rp6.300.000	12.600.000,00
134	PAUD KASIH IBU	PAUD / TKN	Rp12.250.000	Rp12.250.000	24.500.000,00
135	PAUD LINTAS DANAU SENTARUM	PAUD / TKN	Rp18.900.000	Rp18.900.000	37.800.000,00
136	PAUD PERMATA HATI	PAUD / TKN	Rp8.750.000	Rp8.750.000	17.500.000,00
137	KB HARAPAN BUNDA	PAUD / TKN	Rp15.750.000	Rp15.750.000	31.500.000,00
138	KB LESTARI	PAUD / TKN	Rp17.150.000	Rp17.150.000	34.300.000,00
139	KB PELANGI	PAUD / TKN	Rp21.350.000	Rp21.350.000	42.700.000,00
140	KB PURNAMA BAKTI	PAUD / TKN	Rp10.850.000	Rp10.850.000	21.700.000,00
141	PAUD CAHAYA KASIH	PAUD / TKN	Rp9.100.000	Rp9.100.000	18.200.000,00
142	PAUD MERTIDANA	PAUD / TKN	Rp9.800.000	Rp9.800.000	19.600.000,00
143	PAUD TUNAS BANGSA	PAUD / TKN	Rp14.350.000	Rp14.350.000	28.700.000,00
144	KB SERABUN PERMAI	PAUD / TKN	Rp16.100.000	Rp16.100.000	32.200.000,00
145	KB KASIH BUNDA	PAUD / TKN	Rp7.700.000	Rp7.700.000	15.400.000,00
146	KB TUNAS BANGSA	PAUD / TKN	Rp9.450.000	Rp9.450.000	18.900.000,00
147	PAUD ANGGREK PERMAI INDAH	PAUD / TKN	Rp10.500.000	Rp10.500.000	21.000.000,00
148	PAUD PERMATA HATI	PAUD / TKN	Rp5.950.000	Rp5.950.000	11.900.000,00

No.	Nama Satuan Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Pendapatan		Jumlah Pendapatan
			Alokasi Dana BOP PAUD Reguler (Tahap I)	Alokasi Dana BOP PAUD Reguler (Tahap II)	
149	TKN PEMBINA BADAU	PAUD / TKN	Rp18.900.000	Rp18.900.000	37.800.000,00
150	TKN PEMBINA BATANG LUPAR	PAUD / TKN	Rp14.700.000	Rp14.700.000	29.400.000,00
151	TKN PEMBINA BIKI	PAUD / TKN	Rp9.800.000	Rp9.800.000	19.600.000,00
152	TKN PEMBINA BOYAN TANJUNG	PAUD / TKN	Rp23.100.000	Rp23.100.000	46.200.000,00
153	TKN PEMBINA BUNUT HILIR	PAUD / TKN	Rp11.550.000	Rp11.550.000	23.100.000,00
154	TKN PEMBINA BUNUT HULU	PAUD / TKN	Rp13.650.000	Rp13.650.000	27.300.000,00
155	TKN PEMBINA EMBALOH HILIR	PAUD / TKN	Rp18.900.000	Rp18.900.000	37.800.000,00
156	TKN PEMBINA EMBALOH HULU	PAUD / TKN	Rp5.950.000	Rp5.950.000	11.900.000,00
157	TKN PEMBINA EMPANANG	PAUD / TKN	Rp6.650.000	Rp6.650.000	13.300.000,00
158	TKN PEMBINA HULU GURUNG	PAUD / TKN	Rp17.500.000	Rp17.500.000	35.000.000,00
159	TKN PEMBINA JONGKONG	PAUD / TKN	Rp9.800.000	Rp9.800.000	19.600.000,00
160	TKN PEMBINA KALIS	PAUD / TKN	Rp9.800.000	Rp9.800.000	19.600.000,00
161	TKN PEMBINA MENTEBAH	PAUD / TKN	Rp12.250.000	Rp12.250.000	24.500.000,00
162	TKN PEMBINA PENGKADAN	PAUD / TKN	Rp5.600.000	Rp5.600.000	11.200.000,00
163	TKN PEMBINA KAB. KAPUAS HULU	PAUD / TKN	Rp39.900.000	Rp39.900.000	79.800.000,00
164	TKN PERTIWI PUTUSSIBAU UTARA	PAUD / TKN	Rp23.450.000	Rp23.450.000	46.900.000,00
165	TKN PEMBINA SEBERUANG	PAUD / TKN	Rp5.950.000	Rp5.950.000	11.900.000,00
166	TKN PEMBINA SELIMBAU	PAUD / TKN	Rp17.500.000	Rp17.500.000	35.000.000,00
167	TKN PEMBINA SEMITAU	PAUD / TKN	Rp16.450.000	Rp16.450.000	32.900.000,00
168	TKN PEMBINA SILAT HILIR	PAUD / TKN	Rp16.800.000	Rp16.800.000	33.600.000,00
169	TKN PEMBINA SILAT HULU	PAUD / TKN	Rp15.400.000	Rp15.400.000	30.800.000,00
170	TKN PEMBINA SUHAID	PAUD / TKN	Rp14.700.000	Rp14.805.000	29.505.000,00
JUMLAH			1.729.700.000,00	1.728.951.000,00	3.458.651.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
05.02	BELANJA MODAL	290.716.596.027,00	286.543.813.186,86	98,56	236.955.283.717,54
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.149.127.380,00	25.419.577.448,00	97,21	31.320.262.383,01
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	39.000.000,00	37.999.053,00	97,43	432.217.480,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	39.000.000,00	37.999.053,00	97,43	432.217.480,00
5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	39.000.000,00	37.999.053,00	97,43	432.217.480,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	3.134.265.500,00	3.104.691.500,00	99,06	5.520.297.100,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.254.465.000,00	1.224.891.000,00	97,64	5.069.047.100,00
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	-	-	0,00	2.153.000.000,00
5.2.02.02.01.0002.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	597.400.000,00
5.2.02.02.01.0003.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-	0,00	1.051.257.100,00
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	504.465.000,00	474.891.000,00	94,14	1.149.940.000,00
5.2.02.02.01.0005.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	-	-	0,00	117.450.000,00
5.2.02.02.03.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.865.288.000,00	1.865.288.000,00	100,00	451.250.000,00
5.2.02.02.03.0003.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	1.865.288.000,00	1.865.288.000,00	100,00	35.000.000,00
5.2.02.02.03.0005.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	-	-	0,00	416.250.000,00
5.2.02.02.04.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	14.512.500,00	14.512.500,00	100,00	-
5.2.02.02.04.0004.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	14.512.500,00	14.512.500,00	100,00	-
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.253.961,00	6.680.900,00	92,10	285.775.000,00
5.2.02.03.01.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	-	-	0,00	22.880.000,00
5.2.02.03.01.0003.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	-	-	0,00	22.880.000,00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	7.253.961,00	6.680.900,00	92,10	262.895.000,00
5.2.02.03.03.0009.	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	-	-	0,00	7.425.000,00
5.2.02.03.03.0010.	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	-	-	0,00	64.650.000,00
5.2.02.03.03.0011.	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	-	-	0,00	190.820.000,00
5.2.02.03.03.0021.	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	7.253.961,00	6.680.900,00	92,10	-
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	0,00	99.888.000,00
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	-	-	0,00	99.888.000,00
5.2.02.04.01.0008.	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	-	-	0,00	99.888.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.201.660.730,00	3.158.998.287,00	98,67	3.315.095.177,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	410.014.230,00	403.013.655,00	98,29	546.387.767,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	29.800.000,00	99,33	48.350.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	380.014.230,00	373.213.655,00	98,21	498.037.767,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.327.198.500,00	2.296.134.150,00	98,67	2.294.491.790,00
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	1.282.030.000,00	1.277.914.500,00	99,68	381.659.161,00
5.2.02.05.02.0002.	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	-	-	0,00	400.000,00
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	5.240.000,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	295.352.800,00	278.149.000,00	94,18	501.428.699,00
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	23.880.000,00	23.130.000,00	96,86	126.375.000,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	715.600.900,00	706.610.650,00	98,74	1.278.638.930,00
5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.834.800,00	1.830.000,00	99,74	750.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	464.448.000,00	459.850.482,00	99,01	474.215.620,00
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	84.000.000,00	83.695.000,00	99,64	62.428.620,00
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	118.600.000,00	117.890.000,00	99,40	124.331.000,00
5.2.02.05.03.0004.	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	53.994.000,00	53.750.000,00	99,55	104.700.000,00
5.2.02.05.03.0005.	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	-	-	0,00	16.200.000,00
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	102.400.000,00	101.126.482,00	98,76	128.960.000,00
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	105.454.000,00	103.389.000,00	98,04	37.596.000,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	262.206.700,00	215.702.000,00	82,26	878.466.470,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	228.858.700,00	182.384.000,00	79,69	763.319.570,00
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.379.840,00	2.350.000,00	98,75	103.740.000,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	78.919.510,00	78.805.000,00	99,85	490.132.500,00
5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	43.250.000,00	43.040.000,00	99,51	41.000.000,00
5.2.02.06.01.0004.	Belanja Modal Peralatan Cetak	-	-	0,00	29.893.410,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	104.309.350,00	58.189.000,00	55,79	98.553.660,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	14.358.000,00	14.338.000,00	99,86	115.146.900,00
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	-	-	0,00	10.000.000,00
5.2.02.06.02.0004.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	8.450.000,00	8.450.000,00	100,00	-
5.2.02.06.02.0005.	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	5.908.000,00	5.888.000,00	99,66	77.220.000,00
5.2.02.06.02.0010.	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	-	-	0,00	15.950.000,00
5.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	-	-	0,00	11.976.900,00
5.2.02.06.04.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	18.990.000,00	18.980.000,00	99,95	-
5.2.02.06.04.0006.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	18.990.000,00	18.980.000,00	99,95	-
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.737.066.489,00	5.295.242.255,00	92,30	5.506.884.487,00
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.803.927.738,00	2.680.235.967,00	95,59	5.321.179.987,00
5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.765.107.738,00	2.642.068.967,00	95,55	3.319.415.487,00
5.2.02.07.01.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	-	-	0,00	1.821.001.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.2.02.07.01.0009.	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	-
5.2.02.07.01.0015.	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	-	-	0,00	180.763.500,00
5.2.02.07.01.0021.	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	28.000.000,00	27.500.000,00	98,21	-
5.2.02.07.01.0029.	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.120.000,00	2.967.000,00	95,10	-
5.2.02.07.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.933.138.751,00	2.615.006.288,00	89,15	185.704.500,00
5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.933.138.751,00	2.615.006.288,00	89,15	185.704.500,00
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.452.387.000,00	3.380.478.953,00	97,92	1.606.000.000,00
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.407.387.000,00	3.335.478.953,00	97,89	-
5.2.02.08.01.0006.	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	57.890.000,00	57.810.000,00	99,86	-
5.2.02.08.01.0011.	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.959.507.000,00	1.888.183.953,00	96,36	-
5.2.02.08.01.0016.	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	1.389.990.000,00	1.389.485.000,00	99,96	-
5.2.02.08.07.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	1.606.000.000,00
5.2.02.08.07.0001.	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	-	-	0,00	1.606.000.000,00
5.2.02.08.07.0006.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	5.322.729.049,00	5.149.224.632,00	96,74	5.732.440.179,01
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	4.093.518.700,00	3.998.190.800,00	97,67	4.368.772.340,01
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	1.426.767.700,00	1.423.316.700,00	99,76	2.703.188.280,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.666.751.000,00	2.574.874.100,00	96,55	1.665.584.060,01
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.229.210.349,00	1.151.033.832,00	93,64	1.363.667.839,00
5.2.02.10.02.0001.	Belanja Modal Peralatan Mainframe	-	-	0,00	18.000.000,00
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	-	-	0,00	10.000.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.229.210.349,00	1.151.033.832,00	93,64	1.335.667.839,00
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	19.048.000,00	19.018.000,00	99,84	-
5.2.02.11.02.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	19.048.000,00	19.018.000,00	99,84	-
5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	19.048.000,00	19.018.000,00	99,84	-
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	0,00	94.445.500,00
5.2.02.15.02.	Belanja Modal Alat Pelindung	-	-	0,00	94.445.500,00
5.2.02.15.02.0001.	Belanja Modal Baju Pengaman	-	-	0,00	4.495.500,00
5.2.02.15.02.0006.	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	-	-	0,00	89.950.000,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	-	-	0,00	1.743.022.000,00
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	-	-	0,00	1.743.022.000,00
5.2.02.18.01.0002.	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	-	-	0,00	329.277.500,00
5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	-	-	0,00	1.413.744.500,00
5.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.873.509.951,00	4.952.302.998,00	101,62	6.078.159.990,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.2.02.88.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.873.509.951,00	4.952.302.998,00	101,62	6.078.159.990,00
5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.873.509.951,00	4.952.302.998,00	101,62	6.078.159.990,00
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	100.000.000,00	99.238.870,00	99,24	27.571.000,00
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	100.000.000,00	99.238.870,00	99,24	27.571.000,00
5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	100.000.000,00	99.238.870,00	99,24	27.571.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
05.02	BELANJA MODAL	290.716.596.027,00	286.543.813.186,86	98,56	236.955.283.717,54
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.663.968.459,00	132.663.818.494,86	97,79	86.778.054.668,79
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	131.302.594.212,00	128.322.780.484,86	97,73	85.136.054.125,79
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	124.630.768.662,00	122.001.980.734,86	97,89	80.902.652.847,79
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	53.132.501.480,00	52.980.858.250,08	99,71	50.788.967.211,00
5.2.03.01.01.0002.	Belanja Modal Bangunan Gudang	261.841.821,00	261.125.509,00	99,73	189.400.000,00
5.2.03.01.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	1.767.663.100,00	1.755.781.990,00	99,33	1.284.635.000,00
5.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	10.793.100.000,00	10.779.136.632,00	99,87	6.625.986.500,00
5.2.03.01.01.0009.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	0,00	340.760.000,00
5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	53.498.754.700,00	51.095.715.526,00	95,51	4.939.444.034,00
5.2.03.01.01.0011.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.898.900.000,00	1.892.495.867,00	99,66	1.042.948.360,00
5.2.03.01.01.0012.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	-	-	0,00	18.571.988,00
5.2.03.01.01.0013.	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	-	-	0,00	353.371.000,00
5.2.03.01.01.0014.	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	220.000.000,00	219.980.000,00	99,99	100.000.000,00
5.2.03.01.01.0016.	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	681.709.550,00	678.599.932,00	99,54	12.765.002.656,00
5.2.03.01.01.0025.	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.021.089.338,00	1.019.661.500,00	99,86	332.551.599,00
5.2.03.01.01.0030.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	0,00	319.421.026,00
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	743.714.450,00	708.343.447,78	95,24	1.208.026.473,79
5.2.03.01.01.0033.	Belanja Modal Bangunan Parkir	611.494.223,00	610.282.081,00	99,80	198.900.000,00
5.2.03.01.01.0036.	Belanja Modal Taman	-	-	0,00	338.083.400,00
5.2.03.01.01.0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	-	0,00	56.583.600,00
5.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	6.671.825.550,00	6.320.799.750,00	94,74	4.233.401.278,00
5.2.03.01.02.0001.	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	550.000.000,00	549.550.000,00	99,92	243.950.000,00
5.2.03.01.02.0002.	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	5.722.825.550,00	5.374.355.150,00	93,91	3.989.451.278,00
5.2.03.01.02.0005.	Belanja Modal Asrama	399.000.000,00	396.894.600,00	99,47	-
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.361.374.247,00	4.341.038.010,00	99,53	1.642.000.543,00
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	4.361.374.247,00	4.341.038.010,00	99,53	1.642.000.543,00
5.2.03.04.01.0001.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	180.000.000,00	179.850.000,00	99,92	-
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	4.181.374.247,00	4.161.188.010,00	99,52	1.642.000.543,00

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
05.02	BELANJA MODAL	290.716.596.027,00	286.543.813.186,86	98,56	236.955.283.717,54
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.429.237.748,00	121.086.925.212,00	99,72	114.323.298.911,74
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	119.172.115.302,00	118.830.683.474,00	99,71	109.155.601.208,00
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	116.496.324.316,00	116.158.582.488,00	99,71	98.404.587.294,00
5.2.04.01.01.0003.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	112.003.263.216,00	111.665.615.390,00	99,70	95.316.003.594,00
5.2.04.01.01.0005.	Belanja Modal Jalan Desa	4.318.061.100,00	4.318.033.873,00	100,00	2.000.000.000,00
5.2.04.01.01.0010.	Belanja Modal Jalan Lainnya	175.000.000,00	174.933.225,00	99,96	1.088.583.700,00
5.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	2.675.790.986,00	2.672.100.986,00	99,86	10.751.013.914,00
5.2.04.01.02.0003.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	975.085.304,00	975.085.304,00	100,00	8.155.742.682,00
5.2.04.01.02.0013.	Belanja Modal Jembatan Lainnya	1.700.705.682,00	1.697.015.682,00	99,78	2.595.271.232,00
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	1.003.722.600,00	1.002.983.810,00	99,93	2.819.690.336,74
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	262.252.360,00	262.118.210,00	99,95	2.684.737.336,74
5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	262.252.360,00	262.118.210,00	99,95	2.684.737.336,74
5.2.04.02.02.	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	220.000.000,00	219.856.200,00	99,93	-
5.2.04.02.02.0004.	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	220.000.000,00	219.856.200,00	99,93	-
5.2.04.02.04.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	521.470.240,00	521.009.400,00	99,91	134.953.000,00
5.2.04.02.04.0001.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	521.470.240,00	521.009.400,00	99,91	134.953.000,00
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	1.187.936.000,00	1.187.818.100,00	99,99	1.046.508.627,00
5.2.04.03.02.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.019.936.000,00	1.019.936.000,00	100,00	729.575.390,00
5.2.04.03.02.0004.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.019.936.000,00	1.019.936.000,00	100,00	729.575.390,00
5.2.04.03.03.	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	168.000.000,00	167.882.100,00	99,93	-
5.2.04.03.03.0003.	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	168.000.000,00	167.882.100,00	99,93	-
5.2.04.03.05.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	-	-	0,00	117.613.060,00
5.2.04.03.05.0002.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	-	-	0,00	16.000.000,00
5.2.04.03.05.0012.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	-	-	0,00	101.613.060,00
5.2.04.03.10.	Belanja Modal Instalasi Lain	-	-	0,00	199.320.177,00
5.2.04.03.10.0001.	Belanja Modal Instalasi Lain	-	-	0,00	199.320.177,00
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	65.463.846,00	65.439.828,00	99,96	1.301.498.740,00
5.2.04.04.01.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	-	-	0,00	953.708.800,00
5.2.04.04.01.0005.	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	-	-	0,00	953.708.800,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
5.2.04.04.02.	Belanja Modal Jaringan Listrik	65.463.846,00	65.439.828,00	99,96	347.789.940,00
5.2.04.04.02.0002.	Belanja Modal Jaringan Distribusi	65.463.846,00	65.439.828,00	99,96	-
5.2.04.04.02.0003.	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	-	-	0,00	347.789.940,00

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
05.02	BELANJA MODAL	290.716.596.027,00	286.543.813.186,86	98,56	236.955.283.717,54
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.028.832.440,00	6.928.459.040,00	98,57	4.524.735.479,00
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	3.736.810.000,00	3.734.198.550,00	99,93	893.570.000,00
5.2.05.01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	3.716.810.000,00	3.714.198.550,00	99,93	893.570.000,00
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	3.716.810.000,00	3.714.198.550,00	99,93	893.570.000,00
5.2.05.01.02.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.2.05.01.02.0001.	Belanja Modal Audio Visual	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.2.05.04.	Belanja Modal Biota Perairan	-	-	0,00	24.136.000,00
5.2.05.04.01.	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	-	-	0,00	24.136.000,00
5.2.05.04.01.0001.	Belanja Modal Ikan Budidaya	-	-	0,00	24.136.000,00
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	28.305.000,00	27.933.150,00	98,69	83.268.000,00
5.2.05.08.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	28.305.000,00	27.933.150,00	98,69	83.268.000,00
5.2.05.08.01.0001.	Belanja Modal Goodwill	-	-	0,00	83.268.000,00
5.2.05.08.01.0009.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	28.305.000,00	27.933.150,00	98,69	-
5.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.263.717.440,00	3.166.327.340,00	97,02	3.523.761.479,00
5.2.05.88.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.263.717.440,00	3.166.327.340,00	97,02	3.523.761.479,00
5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.263.717.440,00	3.166.327.340,00	97,02	3.523.761.479,00

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
05.02	BELANJA MODAL	290.716.596.027,00	286.543.813.186,86	98,56	236.955.283.717,54
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	445.430.000,00	445.032.992,00	99,91	-
5.2.06.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	445.430.000,00	445.032.992,00	99,91	-
5.2.06.01.01.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	445.430.000,00	445.032.992,00	99,91	-
5.2.06.01.01.0009.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	445.430.000,00	445.032.992,00	99,91	-

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP - TANAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Mutasi		Penghapusan	Koreksi	Hibah	Saldo Akhir 2023
			Tambah	Kurang				
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	23.808.948.023,75	40.000,00					23.808.988.023,75
2	DINAS KESEHATAN	5.940.508.243,25						5.940.508.243,25
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	75.510.986.143,00					51.067.421,00	75.562.053.564,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	125.556.990,64						125.556.990,64
5	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	561.448.000,00						561.448.000,00
6	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	89.255.500,00						89.255.500,00
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	5.462.362.621,90						5.462.362.621,90
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	258.332.000,00						258.332.000,00
9	DINAS PERHUBUNGAN	18.520.000,00						18.520.000,00
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK	375.910.000,00					55.964.000,00	431.874.000,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1.417.081.226,45						1.417.081.226,45
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	20.320.000,00						20.320.000,00
13	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	4.659.366.000,00				(60.000.000,00)		4.599.366.000,00
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.949.709.000,00						2.949.709.000,00
15	DINAS PERIKANAN	948.098.865,44						948.098.865,44
16	INSPEKTORAT	79.040.000,00						79.040.000,00
17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.953.302.000,00						3.953.302.000,00
18	BADAN KEUANGAN DAERAH	14.106.427.222,00						14.106.427.222,00
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	85.200.000,00						85.200.000,00
20	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	7.200.000,00						7.200.000,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	84.824.417.116,87			(188.300.000,00)	(7.526.000,00)		84.628.591.116,87
22	SEKRETARIAT DPRD	12.800.000,00						12.800.000,00
23	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	6.868.529.000,00						6.868.529.000,00
24	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	2.093.408.500,00						2.093.408.500,00
25	KECAMATAN BIKA	307.115.000,00						307.115.000,00

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Mutasi		Penghapusan	Koreksi	Hibah	Saldo Akhir 2023
			Tambah	Kurang				
26	KECAMATAN KALIS	335.925.000,00						335.925.000,00
27	KECAMATAN EMBALOH HILIR	14.039.000,00						14.039.000,00
28	KECAMATAN EMBALOH HULU	236.123.500,00						236.123.500,00
29	KECAMATAN BUNUT HILIR	1.084.536.400,00						1.084.536.400,00
30	KECAMATAN BOYAN TANJUNG	1.697.850.000,00						1.697.850.000,00
31	KECAMATAN BUNUT HULU	113.025.000,00						113.025.000,00
32	KECAMATAN MENTEBAH	436.867.000,00						436.867.000,00
33	KECAMATAN JONGKONG	176.220.000,00						176.220.000,00
34	KECAMATAN PENGKADAN	98.150.000,00						98.150.000,00
35	KECAMATAN HULU GURUNG	165.875.200,00						165.875.200,00
36	KECAMATAN SELIMBAU	1.350.179.500,00						1.350.179.500,00
37	KECAMATAN BADAU	1.229.937.500,00						1.229.937.500,00
38	KECAMATAN BATANG LUPAR	465.510.000,00						465.510.000,00
39	KECAMATAN EMPANANG	857.410.000,00						857.410.000,00
40	KECAMATAN PURING KENCANA	525.198.000,00						525.198.000,00
41	KECAMATAN SEMITAU	495.768.500,00						495.768.500,00
42	KECAMATAN SUHAID	188.342.000,00						188.342.000,00
43	KECAMATAN SEBERUANG	1.007.485.000,00						1.007.485.000,00
44	KECAMATAN SILAT HILIR	256.852.000,00		(40.000,00)				256.812.000,00
45	KECAMATAN SILAT HULU	153.625.000,00						153.625.000,00
JUMLAH		245.372.760.053,30	40.000,00	(40.000,00)	(188.300.000,00)	(67.526.000,00)	107.031.421,00	245.223.965.474,30

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP - TANAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Mutasi		Penghapusan	Koreksi	Hibah	Saldo Akhir 2023
			Tambah	Kurang				
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	23.808.948.023,75	40.000,00					23.808.988.023,75
2	DINAS KESEHATAN	5.940.508.243,25						5.940.508.243,25
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	75.510.986.143,00					51.067.421,00	75.562.053.564,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	125.556.990,64						125.556.990,64
5	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	561.448.000,00						561.448.000,00
6	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	89.255.500,00						89.255.500,00
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	5.462.362.621,90						5.462.362.621,90
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	258.332.000,00						258.332.000,00
9	DINAS PERHUBUNGAN	18.520.000,00						18.520.000,00
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK	375.910.000,00					55.964.000,00	431.874.000,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1.417.081.226,45						1.417.081.226,45
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	20.320.000,00						20.320.000,00
13	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	4.659.366.000,00				(60.000.000,00)		4.599.366.000,00
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.949.709.000,00						2.949.709.000,00
15	DINAS PERIKANAN	948.098.865,44						948.098.865,44
16	INSPEKTORAT	79.040.000,00						79.040.000,00
17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.953.302.000,00						3.953.302.000,00
18	BADAN KEUANGAN DAERAH	14.106.427.222,00						14.106.427.222,00
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	85.200.000,00						85.200.000,00
20	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	7.200.000,00						7.200.000,00
21	SEKRETARIAT DAERAH	84.824.417.116,87			(188.300.000,00)	(7.526.000,00)		84.628.591.116,87
22	SEKRETARIAT DPRD	12.800.000,00						12.800.000,00
23	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	6.868.529.000,00						6.868.529.000,00
24	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	2.093.408.500,00						2.093.408.500,00
25	KECAMATAN BIKA	307.115.000,00						307.115.000,00

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Mutasi		Penghapusan	Koreksi	Hibah	Saldo Akhir 2023
			Tambah	Kurang				
26	KECAMATAN KALIS	335.925.000,00						335.925.000,00
27	KECAMATAN EMBALOH HILIR	14.039.000,00						14.039.000,00
28	KECAMATAN EMBALOH HULU	236.123.500,00						236.123.500,00
29	KECAMATAN BUNUT HILIR	1.084.536.400,00						1.084.536.400,00
30	KECAMATAN BOYAN TANJUNG	1.697.850.000,00						1.697.850.000,00
31	KECAMATAN BUNUT HULU	113.025.000,00						113.025.000,00
32	KECAMATAN MENTEBAH	436.867.000,00						436.867.000,00
33	KECAMATAN JONGKONG	176.220.000,00						176.220.000,00
34	KECAMATAN PENGKADAN	98.150.000,00						98.150.000,00
35	KECAMATAN HULU GURUNG	165.875.200,00						165.875.200,00
36	KECAMATAN SELIMBAU	1.350.179.500,00						1.350.179.500,00
37	KECAMATAN BADAU	1.229.937.500,00						1.229.937.500,00
38	KECAMATAN BATANG LUPAR	465.510.000,00						465.510.000,00
39	KECAMATAN EMPANANG	857.410.000,00						857.410.000,00
40	KECAMATAN PURING KENCANA	525.198.000,00						525.198.000,00
41	KECAMATAN SEMITAU	495.768.500,00						495.768.500,00
42	KECAMATAN SUHAID	188.342.000,00						188.342.000,00
43	KECAMATAN SEBERUANG	1.007.485.000,00						1.007.485.000,00
44	KECAMATAN SILAT HILIR	256.852.000,00		(40.000,00)				256.812.000,00
45	KECAMATAN SILAT HULU	153.625.000,00						153.625.000,00
JUMLAH		245.372.760.053,30	40.000,00	(40.000,00)	(188.300.000,00)	(67.526.000,00)	107.031.421,00	245.223.965.474,30

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP -PERALATAN DAN MESIN ALAT BERAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Reklas		Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00					0,00
2	DINAS KESEHATAN	17.074.048.244,15	17.000.053,00	4.161,83		(17.004.214,83)	17.074.048.244,15
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.201.233.297,26					2.201.233.297,26
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	3.038.790.192,10					3.038.790.192,10
5	BADAN PENANGGULANGAN BANCANA DAERAH	204.600.000,00					204.600.000,00
6	BADAN KEUANGAN DAERAH	116.610.154,00					116.610.154,00
7	SEKRETARIAT DAERAH	499.950.000,00					499.950.000,00
8	SEKRETARIAT DPRD	252.587.254,86					252.587.254,86
9	KECAMATAN EMBALOH HULU	0,00	10.500.000,00			(10.500.000,00)	0,00
10	KECAMATAN SILAT HULU	0,00	10.499.000,00			(10.499.000,00)	0,00
JUMLAH		23.387.819.142,37	37.999.053,00	4.161,83	0,00	(38.003.214,83)	23.387.819.142,37

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP -PERALATAN DAN MESIN ALAT ANGKUTAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Mutasi		Reklas		Reklas		Penghapusan	Koreksi	Hibah	Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	ke Aset Lain-lain	dari Aset Lain-lain				
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.221.742.163,54	140.400.000,00			(44.891.908,59)								3.317.250.254,95
2	DINAS KESEHATAN	29.865.684.130,52	2.629.800.500,00	643.809,22	46.908.780,25				(26.000.000,00)					32.517.037.219,99
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7.046.240.369,09				(28.483.333,33)					(8.235.000,00)			7.009.522.035,76
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	4.525.006.921,70	39.920.000,00	1.737.596,41	18.140.721,09	(71.057.009,39)		(0,05)	(124.730.000,00)					4.389.018.229,76
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.703.118.415,21												1.703.118.415,21
6	BADAN PENANGGULANGAN BANCANA DAERAH	5.460.798.131,98			33.795.000,00									5.494.593.131,98
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	585.663.270,73			27.873.532,33	(39.610.000,00)			(17.275.500,00)					556.651.303,06
8	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	1.764.342.413,84												1.764.342.413,84
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	3.143.630.412,90				(17.000.000,00)			(25.300.000,00)					3.101.330.412,90
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.628.291.843,59			26.240.318,01	(19.274.817,71)								2.635.257.343,89
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.845.793.871,89			38.254.090,71				(184.000.000,00)					1.700.047.962,60
12	DINAS PERHUBUNGAN	5.541.058.501,38			26.150.000,00	(81.082.884,36)								5.486.125.617,02
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK	970.227.227,99			25.564.074,75	(30.808.870,82)								964.982.431,92
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	1.701.406.078,93			14.300.000,00	(45.160.038,00)								1.670.546.040,93
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	518.296.386,93				(32.487.928,12)								485.808.458,81
16	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1.440.744.105,31			51.831.743,76	(36.743.158,00)								1.455.832.691,07
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	877.891.295,00			27.813.428,66	(16.620.000,00)								889.084.723,66
18	DINAS PERIKANAN	2.418.801.295,68			101.763.781,84	(132.337.908,92)			(16.996.250,00)					2.371.230.918,60
19	INSPEKTORAT	1.491.836.552,18			16.620.000,00	(48.555.000,00)								1.459.901.552,18
20	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.107.570.942,82			25.055.000,00	(64.034.795,85)					(91.392.785,31)			1.977.198.361,66
21	BADAN KEUANGAN DAERAH	2.882.705.572,41			20.100.000,00	(19.706.627,25)						433.800.000,00		3.316.898.945,16
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	765.237.348,83			16.990.000,00									782.227.348,83
23	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	1.175.580.420,37			41.735.800,00	(101.957.376,95)								1.115.358.843,42
24	SEKRETARIAT DAERAH	13.396.397.321,72	93.649.000,00		149.364.204,15	(138.027.465,97)			(278.585.234,00)	22.411.250,00				13.245.209.075,90
25	SEKRETARIAT DPRD	5.377.136.145,33	34.700.000,00	1.492.107,41	27.951.317,73	(62.847.782,07)								5.378.431.788,40
26	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	513.067.551,36			111.223.127,38									624.290.678,74
27	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	405.438.922,94			102.961.796,23									508.400.719,17
28	KECAMATAN BIKI	267.235.187,18			46.507.358,00	(17.310.434,00)								296.432.111,18
29	KECAMATAN KALIS	250.151.666,25				(36.508.737,00)								213.642.929,25
30	KECAMATAN EMBALOH HILIR	315.433.650,00												315.433.650,00
31	KECAMATAN EMBALOH HULU	227.498.887,61												227.498.887,61
32	KECAMATAN BUNUT HILIR	403.634.376,29			36.508.737,00									440.143.113,29
33	KECAMATAN BOYAN TANJUNG	256.175.390,63	39.920.000,00											296.095.390,63
34	KECAMATAN BUNUT HULU	323.308.034,00	51.781.000,00		17.310.434,00				(35.185.800,00)					357.213.668,00
35	KECAMATAN MENTEBAH	350.511.980,62			22.652.000,00									373.163.980,62
36	KECAMATAN JONGKONG	341.816.583,96												341.816.583,96
37	KECAMATAN PENGKADAN	193.785.150,00	27.889.000,00	645.172,40	29.718.021,28	(20.100.000,00)								231.937.343,68
38	KECAMATAN HULU GURUNG	296.779.270,00	23.232.000,00	628.960,42										320.640.230,42
39	KECAMATAN SELIMBAU	504.862.549,16			19.772.000,00	(22.652.000,00)								501.982.549,16
40	KECAMATAN BADAU	231.152.850,00												231.152.850,00
41	KECAMATAN BATANG LUPAR	280.169.534,37			71.003.440,60	(16.996.250,00)								334.176.724,97
42	KECAMATAN EMPANANG	161.108.242,82												161.108.242,82
43	KECAMATAN PURING KENCANA	241.078.324,00				(58.191.262,00)								182.887.062,00

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Mutasi		Reklas		Reklas		Penghapusan	Koreksi	Hibah	Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	ke Aset Lain-lain	dari Aset Lain-lain				
44	KECAMATAN SEMITAU	269.243.136,00												269.243.136,00
45	KECAMATAN SUHAID	292.807.932,00												292.807.932,00
46	KECAMATAN SEBERUANG	179.525.500,00	23.400.000,00	452.688,48										203.378.188,48
47	KECAMATAN SILAT HILIR	392.216.518,56			32.487.928,12				(76.669.718,56)					348.034.728,12
48	KECAMATAN SILAT HULU	306.266.243,00			26.000.000,00									332.266.243,00
49	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	481.454.545,69			44.429.776,61									525.884.322,30
50	BADAN PENDAPATAN DAERAH	715.030.967,00			22.411.250,00	(66.002.074,18)								671.440.142,82
JUMLAH		110.654.954.133,31	3.104.691.500,00	5.600.334,34	1.319.437.662,50	(1.268.447.662,51)	0,00	(0,05)	(784.742.502,56)	22.411.250,00	(8.235.000,00)	(91.392.785,31)	433.800.000,00	113.388.076.929,72

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP -PERALATAN DAN MESIN ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Mutasi		Reklas		Reklas ke Aset Lain-lain	Ekstrakomtab el	Hibah	Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang				
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14.926.000,00					920.500,00			(920.500,00)		14.926.000,00
2	DINAS KESEHATAN	11.805.549,25	6.680.900,00	1.635,57								18.488.084,82
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.463.044.287,03										1.463.044.287,03
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	20.800.000,00										20.800.000,00
5	BADAN PENANGGULANGAN BANCANA DAERAH	83.079.400,42			4.000.000,00							87.079.400,42
6	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	91.047.284,76										91.047.284,76
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	291.938.713,99										291.938.713,99
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.673.846,42										11.673.846,42
9	DINAS PERHUBUNGAN	32.668.572,71				(4.000.000,00)						28.668.572,71
10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	748.820.154,88										748.820.154,88
11	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	16.671.342,70										16.671.342,70
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.300.000,00					2.306.076,43					11.606.076,43
13	DINAS PERIKANAN	353.419.498,28							(42.960.000,00)			310.459.498,28
14	INSPEKTORAT	3.850.000,00										3.850.000,00
15	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.500.000,00										1.500.000,00
16	BADAN KEUANGAN DAERAH	64.043.362,91									89.625.250,00	153.668.612,91
17	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	4.399.500,00										4.399.500,00
18	SEKRETARIAT DAERAH	7.150.000,00										7.150.000,00
19	KECAMATAN BUNUT HULU	5.000.000,00										5.000.000,00
20	KECAMATAN MENTEBAH	3.500.000,00										3.500.000,00
21	KECAMATAN HULU GURUNG	6.500.000,00										6.500.000,00
22	KECAMATAN SEMITAU	5.750.000,00										5.750.000,00
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	58.621.689,28										58.621.689,28
JUMLAH		3.309.509.202,63	6.680.900,00	1.635,57	4.000.000,00	(4.000.000,00)	3.226.576,43	0,00	(42.960.000,00)	(920.500,00)	89.625.250,00	3.365.163.064,63

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP -PERALATAN DAN MESIN ALAT PERTANIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Reklas ke Aset Lain-lain	Ekstrakomtabel	Penghapusan	Koreksi	Saldo Akhir 2023
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	51.561.362,00					51.561.362,00
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	22.654.000,00					22.654.000,00
3	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	974.425.863,99					974.425.863,99
4	DINAS PERIKANAN	646.790.000,33	(67.614.500,00)				579.175.500,33
5	BADAN KEUANGAN DAERAH	114.180.000,00					114.180.000,00
6	KECAMATAN HULU GURUNG	3.500.000,00					3.500.000,00
JUMLAH		1.813.111.226,32	(67.614.500,00)	0,00	0,00	0,00	1.745.496.726,32

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP -PERALATAN DAN MESIN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Reklas		Reklas ke Aset Lain-lain	Ekstrakomtabel	Penghapusan	Koreksi	Hibah	Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang						
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	13.506.249.009,70	1.291.485.500,00		2.728.371.989,60	(37.232.000,00)		(2.145.428.693,60)				15.343.445.805,70
2	DINAS KESEHATAN	16.808.418.700,74	257.821.000,00	63.117,93	72.486.714,38		(610.252.882,40)	(36.947.443,04)				16.491.589.207,61
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.239.213.179,67							(64.832.261,35)			2.174.380.918,32
4	RUANG DAN CIPTA KARYA											0,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	1.903.012.829,37	26.000.000,00	1.131.701,08			(11.746.966,16)				33.300.000,00	1.951.697.564,29
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	326.872.226,76	8.091.900,00									334.964.126,76
7	BADAN PENANGGULANGAN BANCANA DAERAH	1.261.530.556,45										1.261.530.556,45
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	254.207.632,22	8.545.000,00				(58.265.768,34)					204.486.863,88
9	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	515.828.069,27										515.828.069,27
10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1.610.983.036,96	100.335.000,00	3.340.924,99			(15.272.700,00)					1.699.386.261,95
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.156.769.463,90	35.292.000,00	915.654,04								1.192.977.117,94
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	591.760.785,09	4.570.000,00	17.238,35			(15.022.652,11)					581.325.371,33
13	DINAS PERHUBUNGAN	566.677.813,27	11.932.500,00	369.314,50								578.979.627,77
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK	632.018.936,43	19.565.000,00	220.384,79			(22.024.044,50)					629.384.276,72
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	467.197.648,31	9.950.000,00					(8.350.000,00)				468.797.648,31
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	362.508.646,69	13.740.000,00	2.720.000,00								378.968.646,69
17	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	911.584.113,72										911.584.113,72
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	373.777.754,19	16.574.000,00	58.250,12	49.813.659,35	(5.906.686,63)		(692.425,04)				433.624.551,99
19	DINAS PERIKANAN	1.111.749.889,32	22.240.000,00	5.332.894,50			(109.871.283,40)					1.029.451.496,42
20	INSPEKTORAT	276.369.619,77	43.300.000,00	1.415.225,39			(41.500.000,00)					279.584.845,16
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	964.530.071,64										964.530.071,64
22	BADAN KEUANGAN DAERAH	1.572.384.750,14	195.500.000,00	4.776.742,22			(237.190.816,17)				92.926.000,00	1.628.396.676,19
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	869.223.790,10	30.570.000,00						(771.534.628,19)			128.259.161,91
24	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	129.313.274,73	24.114.375,00	3.226.611,68				(13.106.071,29)				143.548.190,12
25	SEKRETARIAT DAERAH	6.165.219.495,36	809.824.250,00		60.000.000,00		(395.658.375,41)	(151.848.000,00)				6.487.537.369,95
26	SEKRETARIAT DPRD	3.319.672.064,28	52.657.500,00	2.264.283,73				(633.622,63)				3.373.960.225,38
27	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	206.118.000,00	13.348.000,00	1.177.968,51	10.630.031,49			(565.890,29)				230.708.109,71
28	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	113.005.303,00										113.005.303,00
29	KECAMATAN BIKI	146.011.122,73										146.011.122,73
30	KECAMATAN KALIS	77.000.000,00	27.987.000,00	2.040.000,00				(7.268.836,42)		(1.750.958,09)		98.007.205,49
31	KECAMATAN EMBALOH HILIR	150.027.000,00					(12.184.500,00)					137.842.500,00
32	KECAMATAN EMBALOH HULU	161.578.740,00	12.600.000,00	896.957,90	14.500.000,00			(13.017.035,78)				176.558.662,12
33	KECAMATAN BUNUT HILIR	273.980.750,00										273.980.750,00
34	KECAMATAN BOYAN TANJUNG	119.687.630,32					(7.049.916,81)					112.637.713,51
35	KECAMATAN BUNUT HULU	264.584.237,15					(1.000.000,00)					263.584.237,15
36	KECAMATAN MENTEBAH	118.487.798,54	13.796.482,00									130.284.280,54
37	KECAMATAN JONGKONG	248.452.284,88										248.452.284,88
38	KECAMATAN PENGKADAN	140.159.300,00	30.900.000,00	714.827,60				(9.105.888,87)				162.668.238,73
39	KECAMATAN HULU GURUNG	206.381.839,73	67.609.780,00	1.830.401,00				(21.568.533,45)				254.253.487,28
40	KECAMATAN SELIMBAU	173.724.604,54										173.724.604,54
41	KECAMATAN BADAU	834.690.676,56										834.690.676,56
42	KECAMATAN BATANG LUPAR	323.768.739,40										323.768.739,40
43	KECAMATAN EMPANANG	166.727.486,51					(42.845.291,48)					123.882.195,03
44	KECAMATAN PURING KENCANA	332.088.700,00					(50.480.000,00)					281.608.700,00
45	KECAMATAN SEMITAU	148.064.000,00										148.064.000,00
46	KECAMATAN SUHAID	296.211.737,93	4.549.000,00	98.116,54								300.858.854,47
47	KECAMATAN SEBERUANG	166.072.791,02					(35.700.000,00)					130.372.791,02
48	KECAMATAN SILAT HILIR	249.676.000,00					(20.750.000,00)					228.926.000,00
49	KECAMATAN SILAT HULU	215.276.902,29	300.000,00	589.420,66	15.749.000,00	(5.753.831,06)						226.161.491,89
50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	70.893.838,77	5.800.000,00									76.693.838,77
51	BADAN PENDAPATAN DAERAH	330.407.701,70					(124.754.596,42)					205.653.105,28
JUMLAH		63.428.150.542,15	3.158.998.287,00	33.200.035,53	2.951.551.394,82	(48.892.517,69)	(1.811.965.793,20)	(2.408.532.440,41)	(836.366.889,54)	(1.750.958,09)	126.226.000,00	64.590.617.660,57

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP -PERALATAN DAN MESIN ALAT KOMPUTER
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Hibah Masuk	Mutasi		Reklas		Reklas ke Aset Lain-lain	Ekstrakomtabel	Penghapusan	Koreksi	Saldo Akhir 2023
						Tambah	Kurang	Tambah	Kurang					
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	48.245.603.663,35	2.071.628.000,00					2.181.352.074,00			(11.096.417,00)			52.487.487.320,35
2	DINAS KESEHATAN	11.206.748.835,89	1.277.162.427,00	312.665,95	46.770.000,00	8.861.743,20			(79.292.277,06)	(282.183.058,05)			(0,51)	12.178.380.336,42
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.564.349.749,00	165.045.000,00	47.219,41		44.953.972,61	(37.167.136,36)							4.737.228.904,66
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN CIPTA KARYA													0,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	780.954.053,77	56.800.000,00	2.472.331,58		7.065.329,93	(39.779.511,29)	0,03		(51.734.230,18)				755.777.973,84
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	392.333.635,19	67.285.000,00			12.087.943,44								471.706.578,63
7	BADAN PENANGGULANGAN BANCANA DAERAH	310.962.720,58				25.100.538,66								336.063.259,24
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	441.178.088,01	21.145.000,00				(6.720.616,51)		(6.000.000,00)	(121.939.813,79)				327.662.657,71
9	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	613.502.433,37												613.502.433,37
10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1.585.542.419,03	34.960.000,00	1.164.087,68		11.388.639,16	(36.053.310,45)			(256.462.954,00)			(0,01)	1.340.538.881,41
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	2.738.927.510,27	45.200.000,00	1.172.717,98		18.414.111,97	(16.593.241,03)							2.787.121.099,19
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.048.993.554,26	58.700.000,00	221.420,35		10.184.303,49				(45.191.829,50)				1.072.907.448,60
13	DINAS PERHUBUNGAN	969.634.305,19	26.728.000,00	827.239,76		42.295.651,22	(51.089.253,49)							988.395.942,68
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK	884.913.094,55	61.681.000,00	694.789,38		27.903.732,45	(41.608.984,26)	20.023.031,89		(52.513.461,44)				901.093.202,57
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	417.988.687,38	19.490.900,00			24.339.330,37	(39.651.638,10)							422.167.279,65
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	261.129.721,09					(18.414.111,97)							242.715.609,12
17	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	369.497.303,29	3.999.375,00	17.162,76		6.947.514,01								380.461.355,06
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	683.575.564,30	84.591.000,00	297.299,12										768.463.863,42
19	DINAS PERIKANAN	924.563.096,09	11.790.000,00	2.827.105,50		38.602.629,64	(34.623.715,42)			(188.389.357,16)				754.769.758,65
20	INSPEKTORAT	623.468.686,58	156.303.000,00	5.108.636,79			(26.299.910,00)			(69.392.500,00)				689.187.913,37
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.149.042.214,74	75.525.000,00	10.316.730,02		36.440.448,66	(28.771.055,46)							1.242.553.337,96
22	BADAN KEUANGAN DAERAH	2.837.699.327,69	138.468.200,00	3.383.257,78	89.084.000,00		(20.188.517,67)			(363.275.007,52)				2.685.171.260,28
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.329.454.605,85	97.895.000,00				(40.455.405,53)					(441.397.721,69)		945.496.478,63
24	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	161.176.329,14	21.624.000,00	2.893.388,32			(18.414.111,97)							167.279.605,49
25	SEKRETARIAT DAERAH	2.798.454.050,70	317.585.500,00			62.729.824,54	(41.208.556,29)			(159.725.618,87)				2.977.835.200,08
26	SEKRETARIAT DPRD	1.038.187.630,79	59.369.000,00	2.552.879,67			(29.824.965,92)							1.070.284.544,54
27	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	451.080.323,80				52.285.421,50								503.365.745,30
28	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	489.637.753,68				10.453.840,00								500.091.593,68
29	KECAMATAN BIKI	64.981.435,74				20.425.330,32								85.406.766,06
30	KECAMATAN KALIS	133.115.090,00												133.115.090,00
31	KECAMATAN EMBALOH HILIR	138.211.800,00	27.470.000,00	2.040.000,00			(10.811.800,00)			(24.000.000,00)				132.910.000,00
32	KECAMATAN EMBALOH HULU	167.398.310,00	13.990.000,00	463.042,10										181.851.352,10
33	KECAMATAN BUNUT HILIR	269.363.000,00												269.363.000,00
34	KECAMATAN BOYAN TANJUNG	261.906.555,17	32.850.900,00							(15.294.619,39)				279.462.835,78
35	KECAMATAN BUNUT HULU	322.583.069,42	21.990.000,00							(14.298.000,00)				330.275.069,42
36	KECAMATAN MENTEBEH	223.384.848,14	25.999.700,00			26.229.628,53								275.614.176,67
37	KECAMATAN JONGKONG	408.369.440,00	14.000.000,00											422.369.440,00
38	KECAMATAN PENGKADAN	198.760.000,00				10.250.000,00				(53.000.000,00)				156.010.000,00
39	KECAMATAN HULU GURUNG	390.029.330,65	34.744.500,00	940.638,58										425.714.469,23
40	KECAMATAN SELIMBAU	283.269.093,91				11.534.285,72								294.803.379,63
41	KECAMATAN BADAU	194.006.378,02	19.900.000,00											213.906.378,02
42	KECAMATAN BATANG LUPAR	179.240.521,14	27.570.000,00			18.414.111,97								225.224.633,11
43	KECAMATAN EMPANANG	161.254.147,46												161.254.147,46
44	KECAMATAN PURING KENCANA	147.710.000,00	39.568.000,00							(14.000.000,00)				173.278.000,00
45	KECAMATAN SEMITAU	238.699.000,00												238.699.000,00

46	KECAMATAN SUHAID	178.969.448,45	26.978.000,00	581.883,46		10.811.800,00							217.341.131,91
47	KECAMATAN SEBERUANG	200.737.763,98	11.750.000,00	227.311,52						(18.100.000,00)			194.615.075,50
48	KECAMATAN SILAT HILIR	137.420.175,76				18.414.111,97				(64.700.000,00)			91.134.287,73
49	KECAMATAN SILAT HULU	296.743.660,77	32.498.000,00	1.193.531,85									330.435.192,62
50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	205.126.749,59	27.099.000,00							(37.153.992,40)			195.071.757,19
51	BADAN PENDAPATAN DAERAH	342.246.960,07	19.080.000,00	8.160.000,00		10.140.013,43	(28.598.415,46)			(141.346.450,66)		3.631.250,00	213.313.357,38
JUMLAH		92.462.126.135,85	5.248.463.502,00	47.915.339,56	135.854.000,00	566.274.256,79	(566.274.257,18)	2.201.375.105,92	(85.292.277,06)	(1.972.700.892,96)	(11.096.417,00)	(441.397.721,69)	97.588.878.023,71

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP -PERALATAN DAN MESIN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Mutasi		Reklas		Reklas ke Aset Lain-lain	Ekstrakomtabel	Penghapusan	Koreksi	Hibah	Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang						
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.821.325.387,86	9.000.000,00				10.652.000,00			(860.000,00)				2.840.117.387,86
2	DINAS KESEHATAN	1.651.224.215,08	35.450.000,00	8.678,62			20.004.896,26							1.706.687.789,96
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.117.409.926,14									(15.628.000,00)			1.101.781.926,14
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN CIPTA KARYA													0,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	229.834.266,72	19.750.000,00	859.657,54										250.443.924,26
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.862.428,15	3.108.000,00											13.970.428,15
7	BADAN PENANGGULANGAN BANCANA DAERAH	76.731.940,31												76.731.940,31
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	12.118.788,98					6.000.000,00							18.118.788,98
9	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	86.800.864,00												86.800.864,00
10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	558.879.500,81							(29.645.180,80)					529.234.320,01
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	388.842.443,14												388.842.443,14
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	118.899.510,10												118.899.510,10
13	DINAS PERHUBUNGAN	31.796.221,93			5.540.307,41									37.336.529,34
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK	1.177.919.721,10	71.925.000,00	810.180,22				(20.023.031,89)	(124.017.000,00)	(2.791.089,29)				1.103.823.780,14
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	63.781.651,04				(5.540.307,41)								58.241.343,63
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.871.153,03												12.871.153,03
17	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARWISATA	115.819.542,70	5.000.000,00	21.456,80										120.840.999,50
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	50.908.036,00					3.600.610,20							54.508.646,20
19	DINAS PERIKANAN	727.107.650,39							(95.900.000,00)					631.207.650,39
20	DINAS INSPEKTORAT	12.000.000,00												12.000.000,00
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	264.053.921,57	9.980.000,00	1.363.269,98										275.397.191,55
22	BADAN KEUANGAN DAERAH	251.356.225,34											2.277.000,00	253.633.225,34
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	204.095.815,74	9.500.000,00							(9.500.000,00)	(200.171.383,07)			3.924.432,67
24	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	46.849.250,00												46.849.250,00
25	SEKRETARIAT DAERAH	1.620.178.437,61							(130.466.131,47)					1.489.712.306,14
26	SEKRETARIAT DPRD	454.451.777,61	43.040.000,00	1.850.729,19										499.342.506,80
27	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	38.000.000,00												38.000.000,00
28	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	39.890.000,00												39.890.000,00
29	KECAMATAN BIKI	56.672.673,27												56.672.673,27
30	KECAMATAN KALIS	16.000.000,00							(1.750.958,09)			1.750.958,09		16.000.000,00
31	KECAMATAN EMBALOH HILIR	36.722.000,00							(15.722.000,00)					21.000.000,00
32	KECAMATAN EMBALOH HULU	26.999.660,00												26.999.660,00
33	KECAMATAN BUNUT HILIR	67.830.000,00												67.830.000,00
34	KECAMATAN BOYAN TANJUNG	35.395.653,00							(12.000.000,00)					23.395.653,00
35	KECAMATAN BUNUT HULU	44.374.672,00	1.950.000,00											46.324.672,00
36	KECAMATAN MENTESAH	57.724.951,46												57.724.951,46
37	KECAMATAN JONGKONG	63.300.000,00												63.300.000,00
38	KECAMATAN PENGKADAN	42.500.000,00												42.500.000,00
39	KECAMATAN HULU GURUNG	98.012.000,00												98.012.000,00
40	KECAMATAN SELIMBAU	50.181.427,70												50.181.427,70
41	KECAMATAN BADAU	1.000.000,00												1.000.000,00
42	KECAMATAN BATANG LUPAR	60.342.459,46												60.342.459,46
43	KECAMATAN EMPANANG	24.526.036,87												24.526.036,87
44	KECAMATAN PURING KENCANA	43.865.000,00												43.865.000,00
45	KECAMATAN SEMITAU	26.100.000,00												26.100.000,00
46	KECAMATAN SUHAID	31.022.585,37												31.022.585,37
47	KECAMATAN SEBERUANG	50.600.000,00							(5.500.000,00)					45.100.000,00
48	KECAMATAN SILAT HILIR	25.700.000,00							(18.000.000,00)					7.700.000,00
49	KECAMATAN SILAT HULU	20.241.901,10	6.999.000,00	257.047,49			5.753.831,06			(311.017,89)				32.940.761,76
50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	20.150.000,00												20.150.000,00
51	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9.900.000,00												9.900.000,00
JUMLAH		13.093.169.695,58	215.702.000,00	5.171.019,84	5.540.307,41	(5.540.307,41)	46.011.337,52	(20.023.031,89)	(431.250.312,27)	(15.213.065,27)	(215.799.383,07)	1.750.958,09	2.277.000,00	12.681.796.218,53

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP -PERALATAN DAN MESIN ALAT KEDOKTERAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Hibah	Mutasi		Reklas		Reklas ke Aset Lain-lain	Ekstrakomtabel	Koreksi	Saldo Akhir 2023
						Tambah	Kurang	Tambah	Kurang				
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.709.500,00											4.709.500,00
2	DINAS KESEHATAN	109.646.168.481,52	5.289.436.255,00	1.294.922,51	824.202.610,00			23.809.777,52		(700.370.136,04)	(11.494.163,30)	0,20	115.073.047.747,41
3	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	452.783.800,00	5.806.000,00	193.326,46								(5.999.326,46)	452.783.800,00
4	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	227.655.000,00											227.655.000,00
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.422.990,17											2.422.990,17
JUMLAH		110.333.739.771,69	5.295.242.255,00	1.488.248,97	824.202.610,00	0,00	0,00	23.809.777,52	0,00	(700.370.136,04)	(11.494.163,30)	(5.999.326,26)	115.760.619.037,58

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP -PERALATAN DAN MESIN ALAT LABORATORIUM
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Mutasi		Reklas		Ekstrakomtabel	Penghapusan	Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang			
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.803.487.772,39					77.452.880,00		(53.860.180,00)		4.827.080.472,39
2	DINAS KESEHATAN	5.959.685.796,46	3.277.668.953,00	802.415,76							9.238.157.165,22
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.348.752.605,01	57.810.000,00	16.539,45						(45.553.925,37)	1.361.025.219,09
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	7.524.774.221,85	45.000.000,00	1.958.713,39			0,02				7.571.732.935,26
5	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	704.474.103,00									704.474.103,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	703.878.700,00									703.878.700,00
7	DINAS PERIKANAN	84.779.636,29									84.779.636,29
8	BADAN KEUANGAN DAERAH	48.730.000,00									48.730.000,00
9	KECAMATAN BIKI	1.500.000,00									1.500.000,00
10	KECAMATAN BUNUT HILIR	92.040.000,00									92.040.000,00
11	KECAMATAN BOYAN TANJUNG	10.000.000,00									10.000.000,00
12	KECAMATAN JONGKONG	4.000.000,00									4.000.000,00
13	KECAMATAN PENGKADAN	3.000.000,00									3.000.000,00
14	KECAMATAN PURING KENCANA	69.650.000,00									69.650.000,00
15	KECAMATAN SILAT HILIR	3.000.000,00									3.000.000,00
JUMLAH		21.361.752.835,00	3.380.478.953,00	2.777.668,60	0,00	0,00	77.452.880,02	0,00	(53.860.180,00)	(45.553.925,37)	24.723.048.231,25

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP -PERALATAN DAN MESIN ALAT PRAKTEK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Mutasi		Reklas		Reklas ke Aset Lain-lain	Ekstrakomtabel	Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang			
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	6.830.454.623,09					166.460.000,00			(20.775.000,00)	6.976.139.623,09
2	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA						199.853.980,57				199.853.980,57
3	DINAS PERIKANAN	300.504.507,12							(2.808.846,00)		297.695.661,12
JUMLAH		7.130.959.130,21	0,00	0,00	0,00	0,00	366.313.980,57	0,00	(2.808.846,00)	(20.775.000,00)	7.473.689.264,78

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP -PERALATAN DAN MESIN ALAT KEAMANAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Mutasi		Reklas		Ekstrakomtabel	Penghapusan	Koreksi	Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang				
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	33.339.900,00										33.339.900,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BANCANA DAERAH	33.466.539,69										33.466.539,69
JUMLAH		66.806.439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.806.439,69

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP -PERALATAN DAN MESIN ALAT RAMBU-RAMBU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Mutasi		Reklas		Reklas ke Aset Lain-lain	Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang		
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	98.796.462,91								98.796.462,91
2	DINAS PERHUBUNGAN	6.618.303.680,82								6.618.303.680,82
3	DINAS PERIKANAN	17.354.017,98								17.354.017,98
JUMLAH		6.734.454.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.734.454.161,71

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP -PERALATAN DAN MESIN ALAT OLAHRAHA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Mutasi		Reklas		Reklas ke Aset Lain-lain	Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	459.347.543,36								459.347.543,36
2	SEKRETARIAT DAERAH	173.880.000,00								173.880.000,00
JUMLAH		633.227.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.227.543,36

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP -PERALATAN DAN MESIN ALAT PENGOLAHAN PEMURNIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Mutasi		Reklas		Reklas ke Aset Lain-lain	Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang		
1	DINAS KESEHATAN	296.902.382,91								296.902.382,91
JUMLAH		296.902.382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.902.382,91

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP -PERALATAN DAN MESIN ALAT EKSPLORASI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Mutasi		Reklas		Reklas ke Aset Lain-lain	Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang		
1	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	0,00	9.768.000,00	862.031,49				(10.630.031,49)		0,00
2	KECAMATAN EMBALOH HULU	0,00	4.000.000,00					(4.000.000,00)		0,00
3	KECAMATAN SILAT HULU	0,00	5.250.000,00					(5.250.000,00)		0,00
JUMLAH		0,00	19.018.000,00	862.031,49	0,00	0,00	0,00	(19.880.031,49)	0,00	0,00

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA PERALATAN DAN MESIN-BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BOS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Mutasi		Reklas		Reklas ke Aset Lain-lain	Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	4.952.302.998,00					(4.952.302.998,00)		0,00
	JUMLAH	0,00	4.952.302.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.952.302.998,00)	0,00	0,00

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA PERALATAN DAN MESIN-BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BLUD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Mutasi		Reklas		Reklas ke Aset Lain-lain	Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang		
1	DINAS KESEHATAN	0,00	99.238.870,00					(99.238.870,00)		0,00
JUMLAH		0,00	99.238.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(99.238.870,00)	0,00	0,00

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN - BANGUNAN GEDUNG
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Mutasi		Reklas		Utang Belanja	Reklas ke Aset Lain-lain	Ekstrakomtabel	Penghapusan	Kapitalisasi Pencatatan	Hibah	Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang							
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	661.944.660.586,38	60.440.945.028,00					(289.252.768,35)	677.774.800,00	(98.521.179,32)	(2.116.112.400,00)			27.449.788.854,00	748.009.282.920,71
2	DINAS KESEHATAN	404.217.731.083,17	11.475.055.217,00	2.809.242,14			37.472.611,34	(8.170.933.435,75)							407.562.134.717,90
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	76.119.213.262,52	52.367.328.100,08	14.982.303,88		(7.726.193.938,62)		(52.362.310.403,94)							68.393.019.323,90
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, TATA RUANG DAN CIPTA KARYA	0,00													0,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	3.054.519.037,55													3.054.519.037,55
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	350.000.000,00													350.000.000,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BANCANA DAERAH														0,00
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.783.484.465,88													1.783.484.465,88
9	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	4.613.472.669,64													4.613.472.669,64
10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	14.592.539.406,28	328.601.075,00	10.941.660,87							(93.824.893,00)		(4.546.426,92)		14.833.710.822,21
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.757.382.506,06	181.600.000,00	4.711.627,98											8.943.694.134,04
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.346.322.940,67													1.346.322.940,67
13	DINAS PERHUBUNGAN	10.895.134.069,59						(302.449.890,97)							11.122.951.071,14
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK	1.485.096.170,04													1.485.096.170,04
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	31.149.243.234,81	154.332.550,00												31.303.575.784,81
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.150.881.481,28													8.150.881.481,28
17	DINAS KEPENYUDAHAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	29.381.909.135,48	1.892.495.867,00	224.751.314,45				(249.817.676,57)					(792.126.514,42)		30.457.212.125,94
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11.480.077.335,76	49.639.200,00	174.459,35	772.044.000,00			(49.813.659,35)							12.252.121.335,76
19	DINAS PERIKANAN	15.848.913.052,39				(772.044.000,00)									15.076.869.052,39
20	INSPEKTORAT	1.457.206.042,89													1.457.206.042,89
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.960.352.640,80	174.890.000,00	5.716.137,82											2.960.352.640,80
22	BADAN KEUANGAN DAERAH	29.564.599.145,21													29.564.599.145,21
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.977.797.000,00									(755.076.000,00)				1.222.721.000,00
24	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH														0,00
25	SEKRETARIAT DAERAH	35.109.716.207,39	549.550.000,00		7.453.837.376,41								(829.464.842,79)		42.283.638.741,01
26	SEKRETARIAT DPRD	27.247.426.912,34													27.247.426.912,34
27	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	1.382.086.009,80				99.516.007,16									1.481.602.016,96
28	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	2.134.585.373,50													2.134.585.373,50
29	KECAMATAN BIKA	2.539.307.431,88				172.840.555,05									2.712.147.986,91
30	KECAMATAN KALIS	1.901.264.521,59													1.901.264.521,59
31	KECAMATAN EMBALOH HILIR	1.845.645.102,02													1.845.645.102,02
32	KECAMATAN EMBALOH HULU	1.045.545.955,40										(156.278.006,97)			889.267.948,43
33	KECAMATAN BUNUT HILIR	5.891.930.423,01													5.891.930.423,01
34	KECAMATAN BOYAN TANJUNG	888.748.858,45													888.748.858,45
35	KECAMATAN BUNUT HULU	5.020.760.649,52													5.020.760.649,52
36	KECAMATAN MENTERAH	2.983.656.824,68													2.983.656.824,68
37	KECAMATAN JONGKONG	3.293.389.227,50													3.293.389.227,50
38	KECAMATAN PENGKADAN	1.943.943.804,73													1.943.943.804,73
39	KECAMATAN HULU GURUNG	3.862.060.813,30													3.862.060.813,30
40	KECAMATAN SELIMBAU	1.923.852.639,66													1.923.852.639,66
41	KECAMATAN RADAU	3.792.336.165,70													3.792.336.165,70
42	KECAMATAN BATANG LUPAR	3.722.914.037,48													3.722.914.037,48
43	KECAMATAN EMPANANG	900.188.543,64													900.188.543,64
44	KECAMATAN PURING KENCANA	1.193.094.419,16													1.193.094.419,16
45	KECAMATAN SEMITAU	3.668.462.791,81													3.668.462.791,81
46	KECAMATAN SUHAID	1.053.114.862,56										154.936.000,00			1.208.050.862,56
47	KECAMATAN SEBERUANG	2.327.446.462,17													2.327.446.462,17
48	KECAMATAN SILAT HILIR	3.864.828.595,21													3.864.828.595,21
49	KECAMATAN SILAT HULU	2.556.879.206,80													2.556.879.206,80
50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00													0,00
Jumlah		1.443.013.721.104,66	128.322.780.484,86	286.010.192,21	8.498.237.938,62	(8.498.237.938,62)	37.472.611,34	(61.444.577.834,93)	677.774.800,00	(98.521.179,32)	(2.965.013.293,00)	(1.342.006,97)	(1.626.137.784,13)	27.449.788.854,00	1.533.651.955.948,72

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN - MONUMEN DAN TUGU
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Mutasi		Reklas		Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	11.094.658.340,94	3.713.793.130,00				113.578.322,75		14.922.029.793,69
2	DINAS KESEHATAN	1.832.925.318,51	149.930.500,00	36.704,93					1.982.892.523,44
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.512.282.346,24	179.850.000,00	51.455,12					6.692.183.801,36
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	553.569.638,60							553.569.638,60
5	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	211.600.000,00							211.600.000,00
6	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	776.420.991,61	195.557.480,00	9.520.000,00					981.498.471,61
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1.947.901.280,62							1.947.901.280,62
8	DINAS PERHUBUNGAN	434.821.206,61							434.821.206,61
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK	250.231.788,03							250.231.788,03
10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	119.826.000,00	101.906.900,00						221.732.900,00
11	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	1.038.629.174,58							1.038.629.174,58
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	102.408.581,82							102.408.581,82
13	INSPEKTORAT	25.000.000,00							25.000.000,00
14	BADAN KEUANGAN DAERAH	109.775.000,00							109.775.000,00
15	SEKRETARIAT DAERAH	908.633.376,83							908.633.376,83
16	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	125.000.000,00							125.000.000,00
17	KECAMATAN BUNUT HILIR	164.870.000,00							164.870.000,00
18	KECAMATAN BUNUT HULU	76.565.705,99							76.565.705,99
19	KECAMATAN MENTEBAH	136.633.282,98							136.633.282,98
20	KECAMATAN SEMITAU	102.447.500,00							102.447.500,00
21	KECAMATAN SILAT HILIR	201.711.104,96							201.711.104,96
22	KECAMATAN SILAT HULU	324.602.000,00							324.602.000,00
JUMLAH		27.050.512.638,32	4.341.038.010,00	9.608.160,05	0,00	0,00	113.578.322,75	0,00	31.514.737.131,12

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP - JALAN DAN JEMBATAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Mutasi		Reklas		Penghapusan	Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	139.024.605,93								139.024.605,93
2	DINAS KESEHATAN	10.805.110.880,10	174.933.225,00	42.825,92						10.980.086.931,02
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.822.404.721.905,69	116.555.750.249,00	33.346.625,27	1.170.352.255,90		43.010.497.145,92	(1.237.879.933,31)		2.981.936.788.248,47
4	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	59.897.000,00								59.897.000,00
5	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	9.198.826.009,68								9.198.826.009,68
6	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1.102.097.026,82								1.102.097.026,82
7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.188.555.489,14	2.100.000.000,00	7.921.341,30						11.296.476.830,44
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	6.542.793.004,15								6.542.793.004,15
9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	86.631.043,51								86.631.043,51
10	DINAS PERIKANAN	1.474.687.886,99							(99.900.000,00)	1.374.787.886,99
11	BADAN KEUANGAN DAERAH	13.055.319.503,00								13.055.319.503,00
12	SEKRETARIAT DAERAH	413.276.382,44								413.276.382,44
13	KECAMATAN BIKI	1.523.560.394,93				(1.170.352.255,90)				353.208.139,03
14	KECAMATAN EMBALOH HILIR	9.042.052.993,86								9.042.052.993,86
15	KECAMATAN EMBALOH HULU	1.330.649.115,76								1.330.649.115,76
16	KECAMATAN BUNUT HILIR	4.228.677.619,31								4.228.677.619,31
17	KECAMATAN BOYAN TANJUNG	5.660.330.241,41								5.660.330.241,41
18	KECAMATAN BUNUT HULU	11.781.053.551,85								11.781.053.551,85
19	KECAMATAN MENTEBAH	1.357.680.728,35								1.357.680.728,35
20	KECAMATAN JONGKONG	331.742.545,71								331.742.545,71
21	KECAMATAN HULU GURUNG	4.703.942.176,85								4.703.942.176,85
22	KECAMATAN EMPANANG	1.214.826.922,21								1.214.826.922,21
23	KECAMATAN PURING KENCANA	14.329.821.749,38								14.329.821.749,38
24	KECAMATAN SEMITAU	357.355.174,15								357.355.174,15
25	KECAMATAN SUHAID	2.665.961.838,19								2.665.961.838,19
26	KECAMATAN SILAT HILIR	1.959.652.914,33								1.959.652.914,33
27	KECAMATAN SILAT HULU	3.586.120.147,69								3.586.120.147,69
JUMLAH		2.938.544.368.851,43	118.830.683.474,00	41.310.792,49	1.170.352.255,90	(1.170.352.255,90)	43.010.497.145,92	(1.237.879.933,31)	(99.900.000,00)	3.099.089.080.330,53

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP - JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN - BANGUNAN AIR (IRIGASI)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Mutasi		Reklas		Hibah	Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang		
1	DINAS KESEHATAN	7.879.771.636,72					219.910.023,65			8.099.681.660,37
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	141.781.106.380,69	783.127.610,00				1.634.040.369,47	(882.856.134,19)	7.872.194.832,00	151.187.613.057,97
3	BADAN PENANGGULANGAN BANCANA DAERAH	424.609.249,92								424.609.249,92
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	179.556.299,24								179.556.299,24
5	DINAS PERHUBUNGAN	6.488.511.563,71					302.449.890,97			6.790.961.454,68
6	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	59.298.613,17								59.298.613,17
7	DINAS PERIKANAN	6.682.835.605,38								6.682.835.605,38
8	KECAMATAN BIKA	54.653.239,05								54.653.239,05
9	KECAMATAN BUNUT HILIR	1.308.531.032,30								1.308.531.032,30
10	KECAMATAN BOYAN TANJUNG	216.768.961,82								216.768.961,82
11	KECAMATAN BUNUT HULU	1.067.729.696,24								1.067.729.696,24
12	KECAMATAN MENTEBAH	856.369.884,91								856.369.884,91
13	KECAMATAN JONGKONG	292.826.152,22								292.826.152,22
14	KECAMATAN PURING KENCANA	331.342.020,18								331.342.020,18
15	KECAMATAN SUHAID	1.553.636.836,52								1.553.636.836,52
JUMLAH		169.177.547.172,07	783.127.610,00	0,00	0,00	0,00	2.156.400.284,09	(882.856.134,19)	7.872.194.832,00	179.106.413.763,97

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP - JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN - INSTALASI DAN JARINGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Mutasi		Reklas		Penghapusan	Koreksi	Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang			
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	159.771.920,00									159.771.920,00
2	DINAS KESEHATAN	19.190.027.441,60	387.738.300,00	94.923,35				(219.910.023,65)			19.357.950.641,30
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	131.774.562.278,58	1.019.936.000,00	515.856,89			783.127.610,00	(1.132.495.891,71)	(831.876.054,00)	(511.304.498,81)	131.102.465.300,95
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	75.882.000,00									75.882.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	114.961.000,00									114.961.000,00
6	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	83.519.832,39									83.519.832,39
7	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	194.392.841,42									194.392.841,42
8	DINAS PERHUBUNGAN	4.737.787.203,23									4.737.787.203,23
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK	195.684.060,00									195.684.060,00
10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	518.474.681,38									518.474.681,38
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	36.017.881,71									36.017.881,71
12	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	201.371.039,45									201.371.039,45
13	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	65.439.828,00	229.991,41							65.669.819,41
14	DINAS PERIKANAN	910.914.297,01									910.914.297,01
15	BADAN KEUANGAN DAERAH	8.484.180.008,00									8.484.180.008,00
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	129.429.000,00							(129.429.000,00)		0,00
17	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	14.700.000,00									14.700.000,00
18	SEKRETARIAT DAERAH	623.773.150,00									623.773.150,00
19	SEKRETARIAT DPRD	461.711.701,66									461.711.701,66
20	KECAMATAN EMBALOH HULU	632.504.326,46									632.504.326,46
21	KECAMATAN BOYAN TANJUNG	857.709.389,58									857.709.389,58
22	KECAMATAN HULU GURUNG	1.152.488.885,42									1.152.488.885,42
23	KECAMATAN EMPANANG	255.333.365,41									255.333.365,41
24	KECAMATAN SILAT HILIR	2.820.653.813,31									2.820.653.813,31
25	BADAN PENDPATAN DAERAH	79.400.680,00									79.400.680,00
JUMLAH		173.705.250.796,61	1.473.114.128,00	840.771,65	0,00	0,00	783.127.610,00	(1.352.405.915,36)	(961.305.054,00)	(511.304.498,81)	173.137.317.838,09

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP LAINNYA - BUKU DAN PERPUSTAKAAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Reklas		Ekstrakomtabel	Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	16.996.613.429,12	3.714.198.550,00		3.166.327.340,00		(3.530.299.940,00)	20.346.839.379,12
2	DINAS KESEHATAN	10.850.000,00	20.000.000,00	4.896,26		(20.004.896,26)		10.850.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.260.732.014,68						1.260.732.014,68
4	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.000.000,00						1.000.000,00
5	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	2.000.000,00						2.000.000,00
6	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	12.732.000,00						12.732.000,00
7	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	293.373.000,00						293.373.000,00
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	360.400.182,30						360.400.182,30
9	DINAS PERIKANAN	110.689.086,70						110.689.086,70
10	BADAN KEUANGAN DAERAH	32.795.500,00						32.795.500,00
11	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	850.000,00						850.000,00
12	SEKRETARIAT DPRD	431.105.086,01						431.105.086,01
13	KECAMATAN KALIS	100.000,00						100.000,00
JUMLAH		19.513.240.298,81	3.734.198.550,00	4.896,26	3.166.327.340,00	(20.004.896,26)	(3.530.299.940,00)	22.863.466.248,81

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP LAINNYA - BARANG BERCORAK KESENIAN DAN KEBUDAYAAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Reklas		Koreksi	Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.417.339.296,96						1.417.339.296,96
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	49.916.000,00						49.916.000,00
3	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	541.589.572,77						541.589.572,77
4	SEKRETARIAT DPRD	3.740.000,00						3.740.000,00
5	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	950.000,00						950.000,00
6	KECAMATAN BUNUT HILIR	168.500.000,00						168.500.000,00
7	KECAMATAN JONGKONG	300.000,00						300.000,00
8	KECAMATAN SEBERUANG	4.000.000,00						4.000.000,00
JUMLAH		2.186.334.869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.334.869,73

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP LAINNYA - BARANG BERCORAK KESENIAN DAN KEBUDAYAAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi Belanja Modal	Mutasi		Reklas		Saldo Akhir 2023
					Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	65.047.500,00							65.047.500,00
2	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	171.049.865,61							171.049.865,61
3	DINAS PERIKANAN	1.795.193.664,04							1.795.193.664,04
4	SEKRETARIAT DAERAH	144.965.886,40							144.965.886,40
JUMLAH		2.176.256.916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.256.916,05

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP LAINNYA - BARANG BERCORAK KESENIAN DAN KEBUDAYAAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Reklas		Koreksi	Saldo Akhir 2023
				Tambah	Kurang		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	99.894.450,00					99.894.450,00
2	DINAS KESEHATAN	71.143.881.312,11		8.170.933.435,75	(37.472.611,35)		79.277.342.136,51
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	122.305.731.456,02		53.719.918.861,44	(43.512.041.623,68)	149.895.009,92	132.663.503.703,70
4	BADAN PENANGGULANGAN BANCANA DAERAH	47.088.000,00					47.088.000,00
5	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	353.010.262,38					353.010.262,38
6	DINAS PERHUBUNGAN	1.150.191.100,00					1.150.191.100,00
7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK	44.880.000,00					44.880.000,00
8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	24.684.125,27		49.963.696,00			74.647.821,27
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.658.158,41					12.658.158,41
JUMLAH		195.182.018.864,19	0,00	61.940.815.993,19	(43.549.514.235,03)	149.895.009,92	213.723.215.632,27

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KERTAS KERJA ASET TETAP LAINNYA - ASET TIDAK BERWUJUD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2022	Belanja Modal	Atribusi	Belanja Jasa	Mutasi		Akumulasi Penyusutan s/d TA. 2023
						Tambah	Kurang	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		125.208.000,00					125.208.000,00
2	DINAS KESEHATAN	397.855.000,00						397.855.000,00
3	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	49.907.000,00						49.907.000,00
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK	25.000.000,00	27.933.150,00	314.645,61				53.247.795,61
5	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	50.923.000,00						50.923.000,00
6	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	227.790.000,00						227.790.000,00
7	SEKRETARIAT DAERAH	51.500.000,00	319.824.992,00					371.324.992,00
8	BADAN PENDAPATAN DAERAH	208.440.000,00						208.440.000,00
9	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00			98.800.000,00			98.800.000,00
JUMLAH		1.011.415.000,00	472.966.142,00	314.645,61	98.800.000,00	0,00	0,00	1.583.495.787,61